LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

AUDITED

PADANG PARIAMAN

SAIYO SAKATO



"PARIK MALINTANG"

MEI 2026

padangpariamankab.go.id

padang pariaman

padang pariaman

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (f) Laporan Arus Kas (LAK); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Aset berupa Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Parik Malintang, 22 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 salah satu bentuk transparansi pengelolaan keuangan, disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan pendekatan kinerja, artinya setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 merupakan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaan terkait dengan pengelolaan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyadari bahwa pengelolaan keuangan daerah selalu dihadapkan pada perubahan peraturan perundang-undangan yang dilandasi keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan membawa konsekuensi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk selalu berpacu mengimplementasikan tuntutan perubahan tersebut.

Hal ini disebabkan bahwa pengelolaan keuangan daerah menjadi subsistem dari pengelolaan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), meliputi: hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan negara; pengeluaran negara; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perubahan mendasar yang dirasakan daerah akibat dari peraturan perundang-undangan di bidang keuangan adalah perubahan format Laporan Keuangan dan keharusan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyajian Laporan Keuangan, sebagaimana terlihat pada Pasal 320 yaitu:

Ayat 1 : Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

Ayat 2 : Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan *catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan* keuangan BUMD; dan

Ayat 3 : Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Oleh karena itu, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025.

Parik Malintang, 22 Mei 2026.

BUPATI PADANG PARIAMAN



JOHN KENEDY AZIS

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LAPORAN KEUANGAN
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
C. NERACA
D. LAPORAN OPERASIONAL
E. LAPORAN ARUS KAS
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 4
1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 10
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 12
2.1. Ekonomi Makro 12
A. Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto 12
B. Pertumbuhan Ekonomi 14
2.2. Kebijakan Keuangan 17
A. Kebijakan Peningkatan Pendapatan 17
B. Kebijakan Belanja Daerah 19
C. Kebijakan Pembiayaan Daerah 22
2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD 24
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 30
3.1. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan Entitas 30
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 37
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 37

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan38
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 39
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 39
C. Neraca 39
D. Laporan Operasional (LO) 39
E. Laporan Arus Kas (LAK) 39
F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 40
G. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 40
4.3. Dasar Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 40
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 40
A. Pendapatan-LRA 40
B. Belanja 42
C. Transfer 43
D. Pembiayaan 45
E. Pendapatan-LO 47
F. Beban 52
G. Kas dan Setara Kas 56
H. Piutang 57
I. Persediaan 67
J. Investasi 70
K. Aset Tetap dan Penyusutan 72
L. Dana Cadangan 82
M. Aset Lainnya 83
N. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan 88
O. Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi 89
P. Properti Investasi 95
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 98
5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 98
A. PENDAPATAN DAERAH 98
B. BELANJA DAERAH 114
C. SURPLUS / (DEFISIT) 128
D. PEMBIAYAAN 128
E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 129
5.2. LAPORAN PERUBAHAN SISA ANGGARAN LEBIH 130

5.3. NERACA....132
A. ASET LANCAR.... 132
B. INVESTASI JANGKA PANJANG.... 140
C. ASET TETAP.... 144
D. ASET LAINNYA.... 163
E. KEWAJIBAN.... 167
F. EKUITAS.... 172
5.4. LAPORAN OPERASIONAL....173
A. PENDAPATAN.... 173
B. BEBAN.... 185
C. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL... 193
D. POS LUAR BIASA.... 194
E. SURPLUS/DEFISIT-LO.... 195
5.5. LAPORAN ARUS KAS....196
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI.... 196
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI.... 197
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN.... 198
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS.... 198
5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS....201
A. EKUITAS AWAL.... 201
B. SURPLUS/DEFISIT-LO.... 201
C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN..... 201
D. EKUITAS AKHIR.... 202
BAB VI PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA.... 203
6.1. MANDATORY *SPENDING*....203
A. Bidang Pendidikan.... 203
B. Bidang Kesehatan.... 204
C. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.... 204
6.2. PERGANTIAN MANAJEMEN....206
6.3. KOMITMEN DAN KONTINGENSI....206
6.4. STRUKTUR ORGANISASI....208
6.5. KEPEMIMPINAN DAERAH....210
6.6. PENGUNGKAPAN LAINNYA....211
BAB VII PENUTUP.... 213

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas Dasar Harga Berlaku 14
Tabel 2. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto 14
Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 16
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja 25
Tabel 2. 5 Ringkasan Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan TA 2025 26
Tabel 2. 6 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan.....26
Tabel 2. 7 Anggaran Belanja Per SKPD Sebelum dan Sesudah Perubahan.....26
Tabel 3. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025 30
Tabel 3. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025.....30
Tabel 3. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025.....32
Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025.....33
Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025.....35
Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025.....36
Tabel 3. 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025.....36
Tabel 4. 1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak.....65
Tabel 4. 2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi.....65
Tabel 4. 3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak.....66
Tabel 4. 4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi 66
Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah.....99
Tabel 5. 2 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah.....99
Tabel 5. 3 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah 101
Tabel 5. 4 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 102
Tabel 5. 5 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.....102
Tabel 5. 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer.....105
Tabel 5. 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 106
Tabel 5. 8 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan.....107
Tabel 5. 9 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) 107
Tabel 5. 10 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) 108
Tabel 5. 11 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK).....109
Tabel 5. 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah 110
Tabel 5. 13 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.....110
Tabel 5. 14 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 111

Tabel 5. 15 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah 113
Tabel 5. 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah 114
Tabel 5. 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi 115
Tabel 5. 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 115
Tabel 5. 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa 116
Tabel 5. 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah 117
Tabel 5. 21 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 117
Tabel 5. 22 Belanja Hibah Dana BOSP 119
Tabel 5. 23 Anggaran dan Realisasi Hibah kepada Partai Politik 119
Tabel 5. 24 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 120
Tabel 5. 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 121
Tabel 5. 26 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 122
Tabel 5. 27 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi 123
Tabel 5. 28 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 123
Tabel 5. 29 Rincian Belanja Tidak Terduga 124
Tabel 5. 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer 125
Tabel 5. 31 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 126
Tabel 5. 32 Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah 127
Tabel 5. 33 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan 129
Tabel 5. 34 Rincian SILPA 130
Tabel 5. 35 Rincian Kas BLUD 133
Tabel 5. 36 Piutang Pajak Daerah 134
Tabel 5. 37 Piutang Pajak Air Tanah 135
Tabel 5. 38 Piutang PBB-P2 136
Tabel 5. 39 Piutang Retribusi 137
Tabel 5. 40 Tagihan Ganti Rugi 139
Tabel 5. 41 Penyisihan Piutang 139
Tabel 5. 42 Rincian Persediaan per jenis 140
Tabel 5. 43 Investasi Jangka Panjang 141
Tabel 5. 44 Penyertaan Modal Daerah 142
Tabel 5. 45 Aset Tetap 144
Tabel 5. 46 Tanah per SKPD 145
Tabel 5. 47 Nilai Peralatan dan Mesin per SKPD 150
Tabel 5. 48 Nilai Gedung dan Bangunan per SKPD 153

Tabel 5. 49 Rincian Unit Gedung dan Bangunan DHS2 yang Telah Diserahterimakan .155
Tabel 5. 50 Rincian Unit Gedung dan Bangunan DHS2 yang Belum Diserahterimakan155
Tabel 5. 51 Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD 157
Tabel 5. 52 Nilai Aset Tetap Lainnya per SKPD 159
Tabel 5. 53 Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD 161
Tabel 5. 54 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....162
Tabel 5. 55 Aset Lainnya 163
Tabel 5. 56 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 164
Tabel 5. 57 Kewajiban 167
Tabel 5. 58 Utang Belanja.....169
Tabel 5. 59 Utang Belanja Pegawai 169
Tabel 5. 60 Utang Belanja Barang dan Jasa 170
Tabel 5. 61 Utang Belanja Transfer Pajak dan Retribusi.....171
Tabel 5. 62 Realisasi Pendapatan-LO 173
Tabel 5. 63 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO 173
Tabel 5. 64 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO 174
Tabel 5. 65 Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah.....175
Tabel 5. 66 Penerimaan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO 176
Tabel 5. 67 Rincian Pendapatan Transfer–LO 177
Tabel 5. 68 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO 178
Tabel 5. 69 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO.....179
Tabel 5. 70 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO 180
Tabel 5. 71 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO 181
Tabel 5. 72 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah 182
Tabel 5. 73 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....183
Tabel 5. 74 Rincian Beban 185
Tabel 5. 75 Rincian Beban Pegawai.....186
Tabel 5. 76 Rincian Beban Barang dan Jasa.....188
Tabel 5. 77 Rincian Beban Hibah 189
Tabel 5. 78 Rincian Beban Penyisihan Piutang.....190
Tabel 5. 79 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.....191
Tabel 5. 80 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 191
Tabel 5. 81 Rincian Beban Bagi Hasil 192
Tabel 5. 82 Rincian Beban Bantuan Keuangan.....192
Tabel 5. 83 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....193

Tabel 5. 84 Surplus dari Kegiatan Non Operasional 193
Tabel 5. 85 Defisit Kegiatan Non Operasional-LO 194
Tabel 5. 86 Rincian Pos Luar Biasa 194
Tabel 5. 87 Koreksi Tambah Ekuitas 201
Tabel 5. 88 Koreksi Kurang Ekuitas 202
Tabel 6. 1 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* 203
Tabel 6. 2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* 204
Tabel 6. 3 Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2025 205
Tabel 6. 4 Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah TA 2025 205
Tabel 6. 5 Susunan Pimpinan DPRD/Pejabat Legislatif Kabupaten Padang Pariaman ..211
Tabel 6. 6 Susunan Pejabat Eksekutif Kabupaten Padang Pariaman 211

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Padang Pariaman Tahun 2021-2025.....15
Gambar 2. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto.....16
Gambar 2. 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.....17
Gambar 5. 1 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah.....100
Gambar 5. 2 Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah 101
Gambar 5. 3 Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 104
Gambar 5. 4 Pendapatan Asli Daerah.....104
Gambar 5. 5 Perbandingan Realisasi Dana Transfer Tahun 2025 - 2024 112
Gambar 5. 6 Porsi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024 113

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pemutakhiran Rekening
2. Rincian Belanja Hibah Dana BOSP, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan
3. Daftar Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
4. Daftar Rincian Kas di Bendahara BOSP
5. Rincian Kas Dana BOK Puskesmas
6. a. Daftar Rincian Piutang Pajak Reklame per Wajib Pajak
   b. Daftar Rincian Piutang Pajak PBB-P2
7. a. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Pajak Reklame
   b. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Air Tanah
   c. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
   d. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Pelayanan Kesehatan
   e. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Sampah
   f. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Menara Telekomunikasi
   g. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD
   h. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
   i. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Lainya
8. Daftar Rincian Persediaan per SKPD
9. Rincian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
10. Investasi Permanen
11. Daftar Aset Tetap-Tanah
12. Daftar Aset Tetap-Peralatan dan Mesin
13. Daftar Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
14. Daftar Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi
15. Daftar Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya
16. Daftar Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan
17. Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
18. Daftar Aset Tak Berwujud
19. Daftar Aset Lain-lain – Rusak Berat
20. Daftar Aset Lain-lain – Dalam Penelusuran
21. Daftar Amortisasi Aset Tak Berwujud
22. Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
23. Daftar Perbandingan Pendapatan LRA dengan Pendapatan-LO

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF.	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
1	**PENDAPATAN DAERAH**	5.1.A				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	5.1.A.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.A.1.a	85.859.270.526,00	84.061.584.978,00	97,91	61.253.259.287,50
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.A.1.b	74.094.672.200,00	75.436.647.214,00	101,81	66.154.972.984,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.A.1.c	8.728.317.039,00	8.931.467.131,00	102,33	8.728.317.039,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.A.1.d	8.059.670.813,00	5.531.454.989,42	68,63	8.602.636.435,93
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)**		**176.741.930.578,00**	**173.961.154.312,42**	**98,43**	**144.739.185.746,43**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	5.1.A.2				
9	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	5.1.A.2.a				
10	Dana Perimbangan	5.1.A.2.a.1)	0,00	0,00	-	1.074.305.369.388,00
11	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.A.2.a.2)	12.533.080.000,00	13.124.962.202,00	104,72	0,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.A.2.a.3)	738.825.125.000,00	761.270.062.956,00	103,04	0,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.A.2.a.4)	277.573.554.000,00	271.343.063.892,00	97,76	0,00
14	Insentif Fiskal	5.1.A.2.a.5)	7.113.627.000,00	7.113.627.000,00	100,00	27.827.229.000,00
15	Dana Desa	5.1.A.2.a.6)	102.989.508.000,00	97.921.018.878,00	95,08	103.458.459.000,00
16	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s.d. 15)**		**1.139.034.894.000,00**	**1.150.772.734.928,00**	**101,03**	**1.205.591.057.388,00**
17	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	5.1.A.2.b				
18	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.A.2.b.1)	62.011.663.131,06	61.787.480.802,00	99,64	75.925.794.151,00
19	Bantuan Keuangan	5.1.A.2.b.2)	600.000.000,00	3.340.000.000,00	556,67	1.200.000.000,00
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (18 + 19)**		**62.611.663.131,06**	**65.127.480.802,00**	**104,02**	**77.125.794.151,00**
21	**Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 20)**		**1.201.646.557.131,06**	**1.215.900.215.730,00**	**101,19**	**1.282.716.851.539,00**
22	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	5.1.A.3				
23	Dana Darurat	5.1.A.3.a	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
24	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (23)**		**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
25	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 24)**		**1.382.388.487.709,06**	**1.393.861.370.042,42**	**100,83**	**1.427.456.037.285,43**
26	***BELANJA DAERAH***	*5.1.B.2*				
27	**BELANJA OPERASI**	5.1.B.1				
28	Belanja Pegawai	5.1.B.1.a	825.676.004.549,41	782.931.035.497,00	94,82	742.722.747.909,00
29	Belanja Barang dan Jasa	5.1.B.1.b	316.747.067.393,89	288.545.474.681,00	91,10	312.307.080.893,00
30	Belanja Hibah	5.1.B.1.c	13.475.860.000,00	13.440.512.178,00	99,74	44.812.366.236,68
31	**Jumlah Belanja Operasi (28 s.d. 30)**		**1.155.898.931.943,30**	**1.084.917.022.356,00**	**93,86**	**1.099.842.195.038,68**
32	**BELANJA MODAL**	5.1.B.2				
33	Belanja Tanah	5.1.B.2.a	0,00	0,00		1.087.632.000,00
34	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.B.2.b	21.126.541.592,30	18.893.691.839,00	89,43	23.888.796.704,00
35	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.B.2.c	25.706.349.333,00	24.535.317.201,00	95,44	20.826.064.638,00
36	Belanja Jalan Jaringan dan Irigasi	5.1.B.2.d	15.515.265.396,00	13.896.607.658,00	89,57	103.545.442.710,00
37	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.B.2.e	110.000.000,00	84.206.800,00	76,55	5.705.321.800,00
38	Belanja Aset Lainnya	5.1.B.2.f	100.000.000,00	53.113.500,00	53,11	0,00
39	**Jumlah Belanja Modal (33 s.d. 38)**		**62.558.156.321,30**	**57.462.936.998,00**	**91,86**	**155.053.257.852,00**
40	**BELANJA TAK TERDUGA**	5.1.B.3				
41	Belanja Tak Terduga	5.1.B.3a	14.000.000.000,00	7.200.264.113,00	51,43	7.691.341.000,00
42	**Jumlah Belanja Tak Terduga (42)**		**14.000.000.000,00**	**7.200.264.113,00**	51,43	**7.691.341.000,00**
43	**Jumlah Belanja (31 + 39 + 42)**		**1.232.457.088.264,60**	**1.149.580.223.467,00**	93,28	**1.262.586.793.890,68**
44	**BELANJA TRANSFER**	5.1.B.4				
45	Belanja Bagi Hasil	5.1.B.4.a	10.009.191.049,00	7.438.526.114,00	74,32	7.020.835.480,00
46	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.B.4.b	177.921.751.100,00	172.853.261.698,00	97,15	181.049.406.500,00
47	***Jumlah Belanja Transfer (45 + 46)***		***187.930.942.149,00***	***180.291.787.812,00***	***95,94***	***188.070.241.980,00***
48	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 47)**		**1.420.388.030.413,60**	**1.329.872.011.279,00**	**93,63**	**1.450.657.035.870,68**
49	**SURPLUS/DEFISIT (25 - 48)**	5.1.C	**(37.999.542.704,54)**	**63.989.358.763,42**	**(168,40)**	**(23.200.998.585,25)**
50	**PEMBIAYAAN**	5.1.D				
51	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	5.1.D.1				
52	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya	5.1.D.1a	40.499.542.704,54	40.499.542.704,54	100,00	65.906.541.289,79
53	**Jumlah Penerimaan (52)**		**40.499.542.704,54**	**40.499.542.704,54**	**100,00**	**65.906.541.289,79**
54	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.1.D.2				
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.D.2a	2.500.000.000,00	2.362.000.000,00	94,48	2.206.000.000,00
56	**Jumlah Pengeluaran (55)**		**2.500.000.000,00**	**2.362.000.000,00**	**94,48**	**2.206.000.000,00**
57	**PEMBIAYAAN NETTO (53 - 56)**		**37.999.542.704,54**	**38.137.542.704,54**	**100,36**	**63.700.541.289,79**
58	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (49 + 57)**	5.1.E	**0,00**	**102.126.901.467,96**	**0,00**	**40.499.542.704,54**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF.	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.a	40.499.542.704,54	65.903.111.369,79
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.b	40.499.542.704,54	65.906.541.289,79
3	**Subtotal (1 - 2)**		0,00	(3.429.920,00)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.c	102.126.901.467,96	40.499.542.704,54
5	**Subtotal (4 + 3)**		102.126.901.467,96	40.496.112.784,54
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.d	0,00	3.429.920,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	**5.2.e**	**102.126.901.467,96**	**40.499.542.704,54**

BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENEDY AZIS

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025	2024
1	**ASET**			
2	ASET LANCAR	5.3.A		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.A.1	93.111.613.560,46	28.984.627.889,04
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.A.2	4.029,00	35.236.512,00
5	Kas BLUD	5.3.A.3	5.936.475.188,50	7.304.357.109,50
6	Kas Dana BOSP	5.3.A.4	28.283.554,00	119.606.781,0000
7	Kas BOK	5.3.A.5	3.050.545.136,00	4.055.734.413,00
8	Setara Kas	5.3.A.6	-	-
9	Piutang Pajak Daerah	5.3.A.5	72.646.138.557,00	66.577.672.791,00
10	Piutang Retribusi Daerah	5.3.A.7	1.254.016.315,00	576.240.650,00
11	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	5.3.A.8	150.637,00	208.499.763,00
12	Piutang Antar Daerah	5.3.A.8	18.297.317.867,00	29.919.993.627,00
13	Piutang Lainnya	5.3.A.10	11.140.305,00	11.140.305,00
14	Penyisihan Piutang	5.3.A.11	(47.950.148.149,25)	(42.604.370.681,66)
15	Beban Dibayar Dimuka	5.3.A.12	186.927.468,75	197.458.593,75
16	Persediaan	5.3.A.13	21.123.260.904,02	15.986.315.979,67
17	**Jumlah Aset Lancar (3 s/d 16)**		**167.695.725.372,48**	**111.372.513.732,30**
18	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	5.3.B		
19	Investasi Non permanen	5.3.B.1		
20	Investasi Non permanen Lainnya	5.3.B.1a	4.224.465.232,00	4.232.465.232,00
21	Penyisihan Piutang Inv.Non permanen	5.3.B.2b	(4.224.465.232,00)	(4.232.465.232,00)
22	**Jumlah Investasi Non permanen (20 s/d 21)**		**0,00**	**0,00**
23	Investasi Permanen	5.3.B.2		
24	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.B.2a	96.244.617.419,41	92.435.723.017,54
25	**Jumlah Investasi Permanen (24)**		**96.244.617.419,41**	**92.435.723.017,54**
26	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (22 + 25)**		**96.244.617.419,41**	**92.435.723.017,54**
27	ASET TETAP	5.3.C		
28	Tanah	5.3.C.1	220.438.368.749,00	216.439.328.749,00
29	Peralatan dan Mesin	5.3.C.2	521.205.508.982,43	497.426.717.246,58
30	Gedung dan Bangunan	5.3.C.3	1.162.192.580.939,86	1.111.965.690.027,81
31	Jalan Jaringan dan Irigasi	5.3.C.4	2.695.525.875.363,05	2.681.736.052.936,05
32	Aset Tetap Lainnya	5.3.C.5	103.030.887.524,35	96.245.793.604,35
33	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.C.6	65.765.454.119,00	65.379.807.868,00
34	Akumulasi Penyusutan	5.3.C.7	(3.683.587.551.820,55)	(3.526.163.650.186,10)
35	**Jumlah Aset Tetap (28 s/d 34)**		**1.084.571.123.857,14**	**1.143.029.740.245,69**
36	ASET LAINNYA	5.3.D		
37	Tagihan Jangka Panjang	5.3.D.1	141.596.387,00	141.596.387,00
38	Aset Tidak Berwujud	5.3.D.2	6.755.796.464,00	
39	Aset Lain-Lain	5.3.D.3	14.670.847.808,44	6.702.682.964,00
40	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.D.4	(6.088.832.761,20)	18.565.560.298,29
41	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	5.3.D.5	(14.173.182.401,44)	(5.594.737.213,80)
42	Dana Transfer Treasury Deposit Fasility	5.3.D.6		(18.067.894.891,29)
43	**Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 42)**		**1.306.225.496,80**	**1.747.207.544,20**
44	**TOTAL ASET (17+26+35+43)**		**1.349.817.692.145,83**	**1.348.585.184.539,73**

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF.	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	**PENDAPATAN - LO**	**5.4.A**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO**	**5.4.A.1**				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.A.1.a	90.130.890.160,00	70.480.232.490,50	19.650.657.669,50	27,88
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.A.1.b	75.917.403.383,00	66.206.500.456,00	9.710.902.927,00	14,67
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	*5.4.A.1.c*	*8.931.467.131,00*	*8.728.317.039,00*	*203.150.092,00*	*2,33*
6	Lain-Lain PAD yang Sah - LO	5.4.A.1.d	5.616.454.989,42	8.620.336.435,93	(3.003.881.446,51)	(34,85)
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)**		**180.596.215.663,42**	**154.035.386.421,43**	**26.560.829.241,99**	17,24
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.A.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.A.2.a	900.686.552.950,00	1.102.132.598.388,00	(201.446.045.438,00)	(18,28)
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.A.2.b	53.505.721.094,00	80.708.188.335,00	(27.202.467.241,00)	(33,70)
11	**Jumlah Pendapatan Transfer (9 + 10)**		**954.192.274.044,00**	**1.182.840.786.723,00**	**(228.648.512.679,00)**	(19,33)
12	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO**	**5.4.A.2**				
13	Pendapatan Hibah - LO	5.4.A.2.a	28.926.749.328,10	551.596.917,00	28.375.152.411,10	5.144,18
14	Dana Darurat	5.4.A.2.b	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
15	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (13 + 14)**		**32.926.749.328,10**	**551.596.917,00**	**32.375.152.411,10**	5.869,35
16	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 11 + 15)**		**1.167.715.239.035,52**	**1.337.427.770.061,43**	**(169.712.531.025,91)**	(12,69)
17	**BEBAN - LO**	**5.4.B**				
18	Beban Pegawai	5.4.B.1	630.723.325.131,00	742.758.910.169,00	(112.035.585.038,00)	(15,08)
19	Beban Barang dan Jasa	5.4.B.2	275.356.549.522,70	314.318.864.631,23	(38.962.315.108,53)	(12,40)
20	Beban Hibah	5.4.B.3	13.440.512.178,00	44.801.118.235,68	(31.360.606.057,68)	(70,00)
21	Beban Penyisihan Piutang	5.4.B.4	47.426.572.079,85	42.604.370.681,66	4.822.201.398,19	11,32
22	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.B.5	33.204.310.325,08	38.272.019.860,00	(5.067.709.534,92)	(13,24)
23	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.B.6	60.423.986.039,52	52.245.308.098,99	8.178.677.940,53	15,65
24	Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasisi	5.4.B.7	60.010.863.719,00	26.092.890.591,00	33.917.973.128,00	129,99
25	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.B.8	494.095.547,40	641.847.047,40	(147.751.500,00)	(23,02)
26	Beban Bagi Hasil	5.4.B.9	8.566.031.382,70	6.319.342.279,60	2.246.689.103,10	35,55
27	Beban Bantuan Keuangan	5.4.B.10	74.932.242.820,00	77.590.947.500,00	(2.658.704.680,00)	(3,43)
28	**JUMLAH BEBAN (18 s.d. 27)**		**1.204.578.488.745,25**	**1.345.645.619.094,56**	**(141.067.130.349,31)**	(10,48)
29	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (16 - 28)**		**(36.863.249.709,73)**	**(8.217.849.033,13)**	**(28.645.400.676,60)**	348,58
30	**OPERASIONAL- LO**	**5.4.C**				
31	Surplus Kegiatan Non Operasional - LO	5.4.C.1	17.532.251.341,00	16.486.299.583,00	1.045.951.758,00	6,34
32	Defisit Non Lancar - LO	5.4.C.2	19.154.291.720,00	11.677.939.154,00	7.476.352.566,00	64,02
33	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (31 - 32)**		**(1.622.040.379,00)**	**4.808.360.429,00**	**(6.430.400.808,00)**	(133,73)
34	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (29 + 33)**		**(38.485.290.088,73)**	**(3.409.488.604,13)**	**(35.075.801.484,60)**	1.028,77
35	**POS LUAR BIASA - LO**	**5.4.D**				
36	Beban Luar Biasa	5.4.D	7.200.264.113,00	7.691.341.000,00	(491.076.887,00)	(6,38)
37	**POS LUAR BIASA (36)**		7.200.264.113,00	7.691.341.000,00	(491.076.887,00)	(6,38)
38	**SURPLUS/DEFISIT-LO (34 + 37)**	**5.4.E**	**(45.685.554.201,73)**	**(11.100.829.604,13)**	**(34.584.724.597,60)**	311,55

BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENEDY AZIS

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF.	2025	2024
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	5.5.A		
2	**Arus Masuk Kas**	5.5.A.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.5.A.1.a	84.061.584.978,00	61.253.259.287,50
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.A.1.b	75.436.647.214,00	66.154.972.984,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.A.1.c	8.931.467.131,00	8.728.317.039,00
6	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.A.1.d	5.531.454.989,42	8.251.739.335,93
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.A.1.e	1.150.772.734.928,00	1.205.591.057.388,00
8	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.A.1.f	65.127.480.802,00	77.125.794.151,00
9	Pendapatan Hibah	5.5.A.1.g	4.000.000.000,00	0,00
10	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 9)**		**1.393.861.370.042,42**	**1.427.105.140.185,43**
11	**Arus Keluar Kas**	5.5.A.2		
12	Belanja Pegawai	5.5.A.2.a	782.931.035.497,00	742.722.747.909,00
13	Belanja Barang dan Jasa	5.5.A.2.b	288.545.474.681,00	312.307.080.893,00
14	Belanja Hibah	5.5.A.2.c	13.440.512.178,00	44.812.366.236,68
15	Belanja Bantuan Sosial	5.5.A.2.d	0,00	0,00
16	Belanja Bantuan Keuangan	5.5.A.2.e	172.853.261.698,00	181.049.406.500,00
17	Belanja Bagi Hasil Pajak	5.5.A.2.f	7.438.526.114,00	7.020.835.480,00
18	Belanja Kejadian Luar Biasa	5.5.A.2.g	7.200.264.113,00	7.691.341.000,00
19	**Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d. 18)**		**1.272.409.074.281,00**	**1.295.603.778.018,68**
20	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (10 - 19)**		**121.452.295.761,42**	**131.501.362.166,75**
21	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	5.5.B		
22	**Arus Masuk Kas**	5.5.B.1		
23	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.B.1a	0,00	350.897.100,00
24	**Jumlah Arus Masuk Kas (23)**		**0,00**	**350.897.100,00**
25	**Arus Keluar Kas**	5.5.B.2		
26	Perolehan Tanah	5.5.B.2.a	0,00	1.087.632.000,00
27	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.B.2.b	18.893.691.839,00	23.888.796.704,00
28	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.B.2.c	24.535.317.201,00	20.826.064.638,00
29	Perolehan Jalan Jaringan dan Irigasi	5.5.B.2.d	13.896.607.658,00	103.545.442.710,00
30	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.B.2.e	84.206.800,00	5.705.321.800,00
31	Perolehan Aset Lainnya	5.5.B.2.f	53.113.500,00	0,00
32	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.B.2.g	2.362.000.000,00	2.206.000.000,00
33	**Jumlah Arus Keluar Kas (26 s.d. 32)**		**59.824.936.998,00**	**157.259.257.852,00**
34	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (24 - 33)**		**(59.824.936.998,00)**	**(156.908.360.752,00)**
35	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	5.5.D		
36	**Arus Masuk Kas**			
37	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.D.1	71.421.821.530,00	85.530.125.449,58
38	**Jumlah Arus Masuk Kas (37)**		**71.421.821.530,00**	**85.530.125.449,58**
39	**Arus Keluar Kas**			
40	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.D.2	71.421.801.530,00	85.530.105.449,58
41	**Jumlah Arus Keluar Kas (40)**		**71.421.801.530,00**	**85.530.105.449,58**
42	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (38 - 41)**		**20.000,00**	**20.000,00**
43	**Kenaikan/Penurunan Kas**		**61.627.378.763,42**	**(25.406.978.585,25)**
44	Saldo Awal Kas di BUD		40.499.542.704,54	65.903.111.369,79
45	Saldo Akhir Kas di BUD + BLUD		99.048.068.748,96	36.288.964.998,54
46	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		4.029,00	35.236.512,00
47	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
48	Saldo Akhir Kas BOSP		28.283.554,00	109.706.781,00
49	Saldo Akhir Kas BOK		3.050.545.136,00	4.065.634.413,00
50	**Saldo Akhir Kas (45 s.d. 49)**		**102.126.901.467,96**	**40.499.542.704,54**

BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENEDY AZIS

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2025	2024
1	**EKUITAS AWAL**	**5.6.A**	**1.342.128.864.497,33**	**1.317.852.308.140,98**
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**5.6.B**	**(45.685.554.201,73)**	**(11.100.829.604,13)**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:**	5.6.C	-	
4	**KOREKSI EKUITAS**			
5	Koreksi Tambah Ekuitas	5.6.D	44.349.616.242,51	39.578.515.457,63
6	Koreksi Kurang Ekuitas	5.6.E	(346.122.825,98)	(4.201.129.497,15)
7	**Total Koreksi Ekuitas (5+6)**		**44.003.493.416,53**	**35.377.385.960,48**
8	**EKUITAS AKHIR (1+2+7)**	5.6.F	**1.340.446.803.712,13**	**1.342.128.864.497,33**

BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENEDY AZIS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak hanya sekadar pelimpahan kewenangan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, serta proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya akan memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas, yang berarti bahwa pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD disusun dalam bentuk laporan keuangan daerah. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan/menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

   Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, dan pembiayaan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas, kenaikan/penurunan ekuitas, dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serta hasil-hasil yang telah dicapai;

4. Upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Nama Kecamatan, Nagari dan Korong di Kabupaten Padang Pariaman;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025;
37. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
38. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
39. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
40. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
41. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
42. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang

Pariaman Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

43. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
44. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
45. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
46. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
47. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
48. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
49. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
50. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
51. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

52. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
53. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
54. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
55. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
56. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
57. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
58. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
59. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

60. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
61. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
62. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
63. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 48 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
64. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
65. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
66. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
67. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam tujuh bab, yaitu:

BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, serta sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD.

BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan

penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen laporan realisasi anggaran, komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen neraca, komponen laporan operasional, komponen laporan arus kas, dan komponen laporan perubahan ekuitas.

BAB VI : Berisi pengungkapan penting lainnya berkaitan dengan pergantian manajemen, komitmen dan kontingensi, struktur organisasi, dan pengungkapan lainnya.

BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan menganalisis pencapaian kinerja tahun sebelumnya, permasalahan yang sedang dan akan terjadi, proyeksi ketersediaan dana pembangunan serta kondisi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kinerja APBD. Kondisi makro ekonomi tersebut antara lain dapat digambarkan sebagai berikut.

A. Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran, keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha diklasifikasikan menjadi 17 lapangan usaha yang dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estate*; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga *Non Profit* yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah, sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi tujuh komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga disini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif, Barang dan Jasa Individu merupakan Barang dan Jasa *Privat*, dimana ciri-ciri barang *privat* adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk pula disini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi enam sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual.

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk *(residen)* ke bukan penduduk *(non residen)*. Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga Tahun 2010.

Tabel 2. 1 PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Padang Pariaman (juta rupiah), 2021-2025

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Laju Indeks Implisit (%)
2021	18.455	12.195,75	2,15
2022	22.193	13.029,17	6,83
2023	25.149	13.740,82	5,46
2024*	26.947	14.369,24	4,57
2025**	27.784	14.619,50	1,74

Catatan/Note:
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS, Padang Pariaman Dalam Angka 2026

PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan dari nilai sebesar Rp26.947 juta menjadi sebesar Rp27.784 juta.

Produktivitas ekonomi secara riil yang mencerminkan kenaikan produktivitas dapat dilihat dari perkembangan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. Dari data di atas, kenaikan produktivitas ditunjukan dengan adanya kenaikan nilai PDRB dari sebesar Rp14.369,24 juta pada Tahun 2024 menjadi sebesar Rp14.619,50 juta pada Tahun 2025.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh berbagai sektor dalam perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, namun sektor yang dominan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor Pertanian dan sektor Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Padang Pariaman, 2021 - 2025

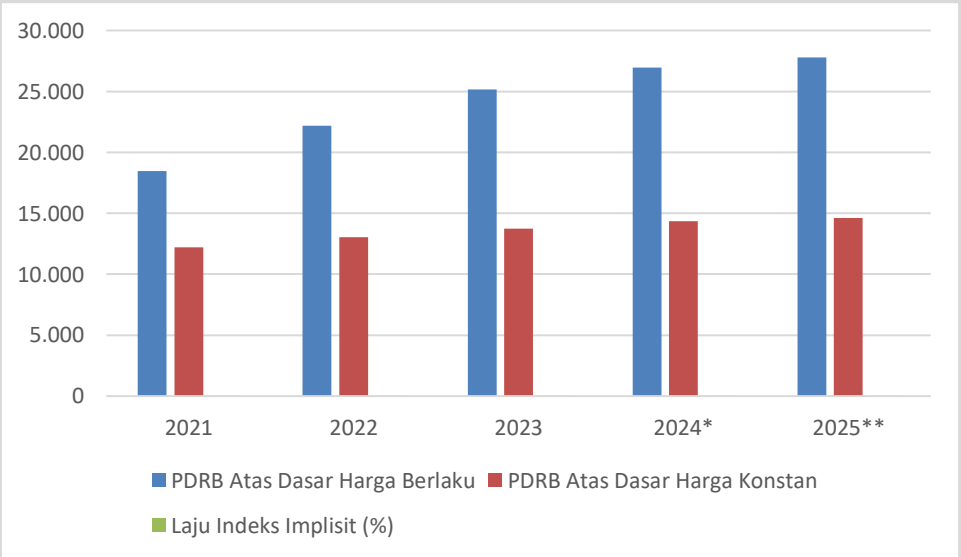
Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,65	21,37	20,49	20,17	20,70
B	Pertambangan dan Penggalian	7,54	6,71	6,46	6,28	5,94
C	Industri Pengolahan	11,95	10,92	10,50	10,25	10,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	10,66	9,82	9,80	10,10	9,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,65	10,44	10,16	10,14	10,38
H	Transportasi dan Pergudangan	13,57	19,34	21,10	22,53	21,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,13	1,27	1,26	1,24	1,26

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024*	2025**
J	Informasi dan Komunikasi	3,96	3,75	3,62	3,59	3,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,77	1,63	1,54	1,56	1,66
L	Real Estate	1,12	1,03	1,02	1,03	1,08
M,N	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,10	5,36	5,07	5,25	5,34
P	Jasa Pendidikan	6,40	5,97	5,58	5,43	5,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,70	0,70	0,71	0,77
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,56	1,53	1,54	1,57	1,66
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

** Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS, Padang Pariaman Dalam Angka 2026

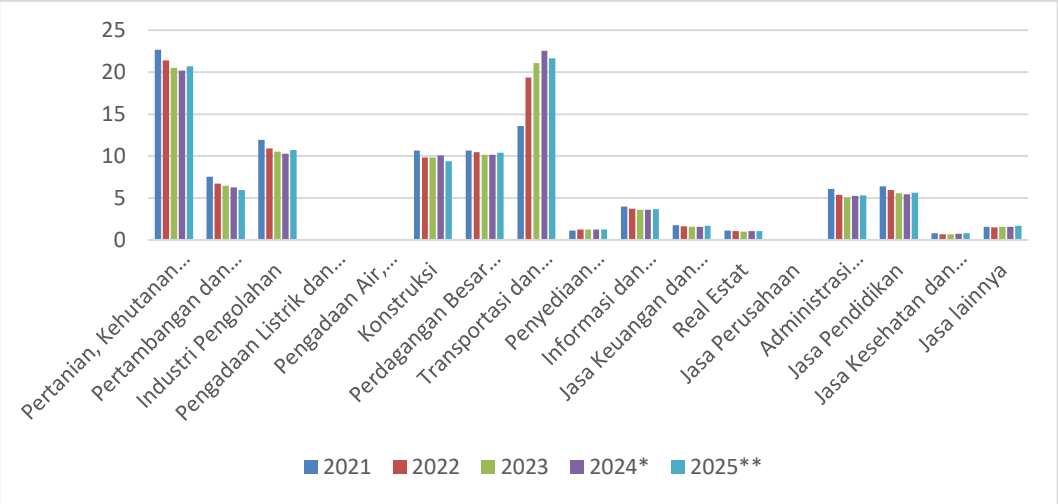
Berdasarkan jenis lapangan usaha, nilai PDRB per kapita menurut harga berlaku yang paling tinggi adalah PDRB per kapita dari lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan nilai sebesar 21,62% per tahun, disusul dengan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mempunyai PDRB per kapita sebesar 21,62% per tahun, selanjutnya disusul dengan Industri Pengolahan yang mempunyai PDRB sebesar 10,71% per tahun dan industri Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mempunyai PDRB sebesar 10,38%. Sementara itu, lapangan usaha lainnya memiliki PDRB per kapita di bawah 10% pada Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, sebagian besar lapangan usaha mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari lapangan usaha Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, dan Jasa lainnya.



Sumber: BPS, Padang Pariaman Dalam Angka 2026

Gambar 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Padang Pariaman Tahun 2021-2025



Sumber: BPS, Padang Pariaman Dalam Angka 2026

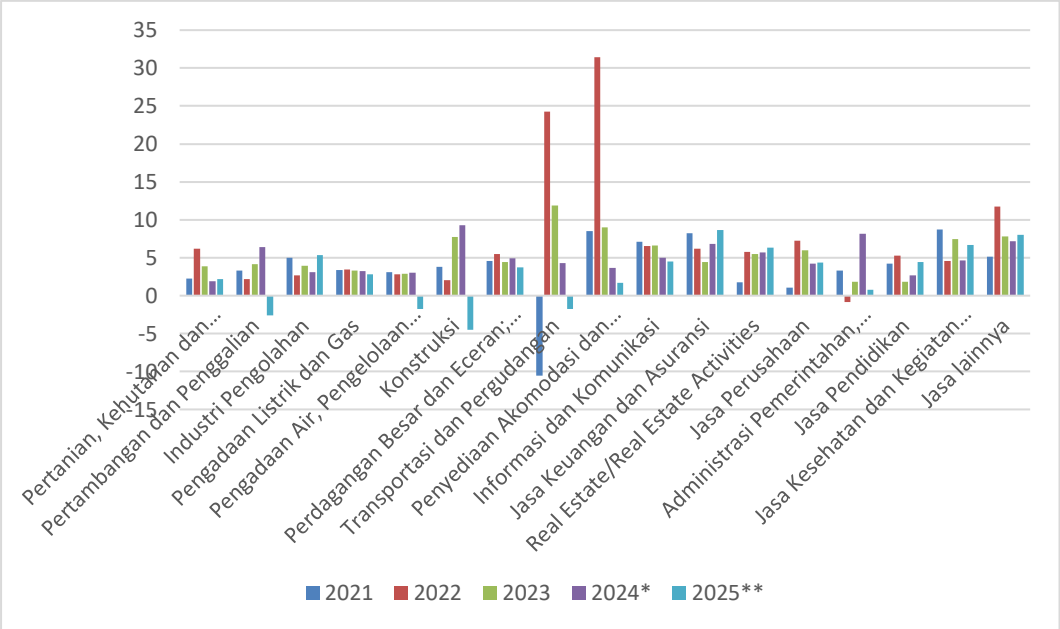
Gambar 2. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2025

Sedangkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (dalam persen) 2021–2025

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,28	6,19	3,87	1,91	2,20
B	Pertambangan dan Penggalian	3,28	2,19	4,16	6,40	-2,58
C	Industri Pengolahan	4,97	2,68	3,93	3,09	5,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,38	3,47	3,32	3,25	2,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,12	2,80	2,89	3,04	-1,75
F	Konstruksi	3,78	2,02	7,77	9,29	-4,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,58	5,50	4,42	4,95	3,73
H	Transportasi dan Pergudangan	-10,54	24,26	11,92	4,27	-1,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,52	31,41	9,00	3,65	1,72
J	Informasi dan Komunikasi	7,11	6,57	6,63	5,00	4,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,20	6,16	4,40	6,85	8,63
L	Real Estate/Real Estate Activities	1,75	5,75	5,51	5,72	6,30
M,N	Jasa Perusahaan	1,03	7,24	5,98	4,20	4,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,30	-0,81	1,82	8,18	0,79
P	Jasa Pendidikan	4,20	5,27	1,81	2,67	4,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,72	4,54	7,45	4,62	6,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,16	11,72	7,80	7,15	8,05
Produk Domestik Regional Bruto		**2,15**	**6,83**	**5,46**	**4,57**	**1,74**

** Angka Sementara **Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS, Padang Pariaman Dalam Angka 2026



Sumber: BPS, Padang Pariaman Dalam Angka 2026

Gambar 2. 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (dalam persen)

2.2. Kebijakan Keuangan

A. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Musrenbang Tahun 2024, maka pada Tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2024-2029 untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman Maju, Berkelanjutan, Sejahtera dan Merata. Kebijakan pendapatan daerah relatif sama dengan APBD awal Tahun 2025 yaitu melalui pengembangan sumber pendapatan daerah yang potensial maka peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat, disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut.

1. Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi Daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan asas keadilan (*equity*), memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya Pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (*efficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak;
2. Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Dalam usaha

mencapai efisiensi ini, tiga faktor yang mengancam yang patut diperhatikan adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan;

3. Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang-undangan; dan
4. Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah (*Local Government Revenue Improvement Action Plan*) adalah program terencana dan terpadu untuk: a). mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada; dan b). mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber-sumber penerimaan daerah.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa rencana peningkatan penerimaan daerah ini merupakan program yang bersifat *self corrected*. Hal ini berarti bahwa selain untuk mencapai sasaran penerimaan daerah sesuai potensi yang ada (realistis), program terpadu ini juga ditujukan untuk mengantisipasi berbagai perubahan. Hal tersebut terutama berkaitan langsung dengan penerimaan yang rencana pembelanjaannya telah ditetapkan secara baku dalam cakupan anggaran satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dituntut untuk dapat membiayai kebutuhan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat Padang Pariaman dengan menggali potensi pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp176.741.930.578,00 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.201.646.557.131,06 merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2025 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang dianggarkan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pendekatan ini guna menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Belanja daerah diprioritaskan bagi program/kegiatan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya menyatakan bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Kebijakan untuk belanja daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

   Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek dengan total anggaran sebesar Rp1.155.898.931.943,30 meliputi:

   a. Belanja Pegawai sebesar Rp825.676.004.549,41 digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN;

   b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp316.747.067.393,89 digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;

   c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan;

   d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;

e. Belanja Hibah digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp13.475.860.000,00; dan

f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dengan total anggaran sebesar Rp62.558.156.321,30 meliputi :

a. Belanja Modal Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai dengan anggaran sebesar Rp0,00;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin, mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai yang dianggarkan sebesar Rp21.126.541.592,30;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai yang dianggarkan sebesar Rp25.706.349.333,00;

d. Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi, digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi yang mencakup jalan, jaringan dan irigasi, yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai yang dianggarkan sebesar Rp15.515.265.396,00;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai yang dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00;

f. Belanja Modal Aset Lainnya, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi dan tidak termasuk kategori belanja

modal utama seperti tanah, mesin, atau bangunan, contohnya bisa berupa aset tidak berwujud, kemitraan, atau aset fisik lainnya yang memenuhi syarat kapitalisasi aset pemerintah yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.

3. Belanja Tidak Terduga

   Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp14.000.000.000,00.

4. Belanja Transfer

   Belanja Transfer digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa/nagari yang dianggarkan sebesar Rp187.930.942.149,00 yang terdiri dari:

   a. Belanja Bagi Hasil

      Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa/nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp10.009.191.049,00.

   b. Belanja Bantuan Keuangan

      Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yang dianggarkan sebesar Rp177.921.751.100,00.

   Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut, antara lain adalah:

   a. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah setiap tahun, tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya, dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS), sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

   b. Mengalokasikan anggaran kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah yang mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

   c. Mengalokasikan anggaran untuk pemerintahan desa/nagari sekurang-kurangnya sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah khususnya di daerah tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan;

e. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa/nagari yang bersumber dari pendapatan pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

f. Meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan prioritas menekan angka kemiskinan;

g. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

h. Mengoptimalkan tata guna, tata kelola, dan tata produksi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

i. Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana dasar, khususnya di daerah pedesaan dan perbatasan;

j. Memantapkan diversifikasi energi melalui peningkatan konservasi energi sebagai pilar manajemen energi regional dan pemanfaatan energi;

k. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodasi konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi;

l. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost* dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:

   1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan *service* kendaraan dinas);

   2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, serta pengendalian evaluasi dan perencanaan; dan

   3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen pemerintah.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah digunakan untuk mencatat SiLPA tahun sebelumnya pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penerimaan pembiayaan dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing*

pendapatan daerah dan belanja daerah. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp40.499.542.704,54 yang terdiri dari:

a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp40.499.542.704,54;

b. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan sebesar Rp0,00;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebesar Rp0,00;

d. Penerimaan Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan sebesar Rp0,00;

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00; dan

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 yang ditempatkan pada Bank Nagari.

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut.

a. Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan Dana Cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebesar Rp0,00;

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, sebesar Rp2.500.000.000,00;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00; dan

d. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, BUMN, Koperasi, dan/atau Masyarakat sebesar Rp0,00.

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Nagari, Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, dan perusahaan daerah lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan. Dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	% Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	176.741.930.578,00	173.961.154.312,42	98,43
Pendapatan Transfer	1.201.646.557.131,06	1.215.900.215.730,00	101,19
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan	**1.382.388.487.709,06**	**1.393.861.370.042,42**	**100,83**
Belanja Operasi	1.155.898.931.943,30	1.084.917.022.356,00	93,86
Belanja Modal	62.558.156.321,30	57.462.936.998,00	91,86
Belanja Tak Terduga	14.000.000.000,00	7.200.264.113,00	51,43
Belanja Transfer	187.930.942.149,00	180.291.787.812,00	95,94
Jumlah Belanja	**1.420.388.030.413,60**	**1.329.872.011.279,00**	**93,63**
Surplus/(Defisit)	**(37.999.542.704,54)**	**63.989.358.763,42**	**(168,40)**
Penerimaan Pembiayaan	40.499.542.704,54	40.499.542.704,54	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.362.000.000,00	94,48
Pembiayaan Neto	**37.999.542.704,54**	**38.137.542.704,54**	**100,36**
SiLPA	**0,00**	**102.126.901.467,96**	**0,00**

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah berjalan memasuki paruh tahun dengan berbagai dinamika yang menyertainya diperlukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi pendapatan, belanja maupun pada sisi pembiayaan daerah. Dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator *influen*–nya. Sejalan dengan rencana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, dimana telah memberikan gambaran arah kebijakan umum terkait kondisi dan kebijakan anggaran.

Penyesuaian dimaksud dikarenakan beberapa hal antara lain: Pertama, penyesuaian target pendapatan, baik peningkatan maupun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2025 pengurangan target pendapatan pada pos-pos tertentu sebagai penyesuaian *riil* dari peningkatan kinerja ataupun penyesuaian dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta hambatan dan kendala yang terjadi, berdasarkan evaluasi hasil pencapaian target pada triwulan pertama dan kedua. Kedua, perkembangan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama semester pertama yang dalam implementasinya ternyata perlu untuk dilakukan peninjauan ulang program. Ketiga, adanya berbagai kebutuhan yang bersifat cukup mendesak dan penting untuk dilakukan pengalokasiannya dalam perubahan anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dinyatakan bahwa dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan setelah

penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2025, namun Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan setelah Persetujuan Bersama atas rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2025.

Tabel 2. 5 Ringkasan Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan TA 2025

Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Tambah/ (Kurang)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
Pendapatan	1.454.686.855.839,00	(72.298.368.129,94)	1.382.388.487.709,06
Belanja	1.552.919.707.637,14	(132.531.677.223,54)	1.420.388.030.413,60
Surplus/(Defisit)	**(98.232.851.798,14)**	**60.233.309.093,60**	**(37.999.542.704,54)**
Pembiayaan			
Penerimaan	100.732.851.798,14	(60.233.309.093,60)	40.499.542.704,54
Pengeluaran	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
Pembiayaan Neto	**98.232.851.798,14**	**(60.233.309.093,60)**	**37.999.542.704,54**

Pendapatan sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp1.454.686.855.839,00 dan setelah anggaran perubahan sebesar Rp1.382.388.487.709,06 dengan demikian terjadi penurunan sebesar Rp72.298.368.129,94 atau 4,97% sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan

Pendapatan	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Naik/Turun (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	180.895.259.765,00	176.741.930.578,00	(2,30)
Pendapatan Transfer	1.273.791.596.074,00	1.201.646.557.131,06	(5,66)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	4.000.000.000,00	0,00
Total Pendapatan	**1.454.686.855.839,00**	**1.382.388.487.709,06**	**(4,97)**

Pada pos belanja terjadi penurunan, dari anggaran semula sebesar Rp1.552.919.707.637,14 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.420.388.030.413,60 terjadi penurunan sebesar Rp132.531.677.223,54 atau 8,53%.

Rincian penambahan dan pengurangan belanja masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Anggaran Belanja per SKPD Sebelum dan Sesudah Perubahan

No.	SKPD	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	615.415.370.813,25	603.845.730.344,41	(11.569.640.468,84)	(1,88)
2.	Dinas Kesehatan	196.582.504.029,00	196.375.121.576,99	(207.382.452,01)	(0,11)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	84.395.424.542,00	90.949.717.799,50	6.554.293.257,50	7,77

No.	SKPD	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	116.319.611.092,00	38.675.565.142,36	(77.644.045.949,64)	(66,75)
5.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	7.454.341.023,00	6.610.165.935,00	(844.175.088,00)	(11,32)
6.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.546.521.961,00	11.350.970.153,44	(195.551.807,56)	(1,69)
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.468.976.705,00	6.236.143.087,00	(232.833.618,00)	(3,60)
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.106.805.847,00	5.379.565.779,00	(727.240.068,00)	(11,91)
9.	Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan	13.677.292.116,00	12.773.478.937,00	(903.813.179,00)	(6,61)
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.644.289.276,00	5.042.117.050,00	(602.172.226,00)	(10,67)
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.855.796.049,00	4.099.996.959,00	(755.799.090,00)	(15,56)
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.216.904.081,00	13.554.299.016,50	(662.605.064,50)	(4,66)
13.	Dinas Perhubungan	24.404.517.203,00	24.056.885.244,60	(347.631.958,40)	(1,42)
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.302.083.362,00	7.158.667.149,00	(143.416.213,00)	(1,96)
15.	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.071.529.984,00	6.870.407.532,00	(201.122.452,00)	(2,84)
16.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	4.976.430.711,00	4.225.165.293,00	(751.265.418,00)	(15,10)

No.	SKPD	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
17.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	8.647.795.808,00	7.970.590.642,00	(677.205.166,00)	(7,83)
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.023.020.907,69	3.469.921.403,00	(553.099.504,69)	(13,75)
19.	Dinas Perikanan	14.478.557.285,00	4.702.015.902,00	(9.776.541.383,00)	(67,52)
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.777.610.828,00	4.638.838.229,00	(1.138.772.599,00)	(19,71)
21.	Sekretariat Daerah	42.501.223.117,00	44.355.294.039,00	1.854.070.922,00	4,36
22.	Sekretariat DPRD	47.955.086.171,00	41.477.097.375,50	(6.477.988.795,50)	(13,51)
23.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	7.815.806.622,00	5.240.492.751,00	(2.575.313.871,00)	(32,95)
24.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	231.408.896.799,20	220.143.049.131,00	(11.265.847.668,20)	(4,87)
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.810.630.845,00	27.867.299.604,00	(7.943.331.241,00)	(22,18)
26.	Inspektorat Daerah	9.360.526.124,00	7.837.200.101,00	(1.523.326.023,00)	(16,27)
27.	Pemerintah Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang	862.813.169,00	728.431.726,00	(134.381.443,00)	(15,57)
28.	Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam	888.013.552,00	700.835.612,00	(187.177.940,00)	(21,08)
29.	Pemerintah Kecamatan Batang Gasan	832.961.852,00	680.027.399,00	(152.934.453,00)	(18,36)
30.	Pemerintah Kecamatan Batang Anai	1.001.300.208,00	776.111.766,20	(225.188.441,80)	(22,49)
31.	Pemerintah Kecamatan Anam Lingkuang	862.569.858,00	693.748.724,00	(168.821.134,00)	(19,57)
32.	Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang	768.464.885,00	650.614.331,00	(117.850.554,00)	(15,34)
33.	Pemerintah Kecamatan Lubuak Aluang	1.024.385.021,00	783.640.450,00	(240.744.571,00)	(23,50)
34.	Pemerintah Kecamatan Nan Sabaris	854.477.933,00	678.539.268,00	(175.938.665,00)	(20,59)

No.	SKPD	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
35.	Pemerintah Kecamatan VII Koto Padang Sago	770.853.357,00	621.194.595,00	(149.658.762,00)	(19,41)
36.	Pemerintah Kecamatan VII Koto Patamuan	883.917.664,00	673.571.935,00	(210.345.729,00)	(23,80)
37.	Pemerintah Kecamatan Sungai Garinggiang	924.615.804,00	765.995.704,00	(158.620.100,00)	(17,16)
38.	Pemerintah Kecamatan Sungai Limau	878.802.455,00	759.829.049,60	(118.973.405,40)	(13,54)
39.	Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	851.042.947,00	684.204.632,00	(166.838.315,00)	(19,60)
40.	Pemerintah Kecamatan Ulakan Tapakih	839.255.025,00	724.719.084,00	(114.535.941,00)	(13,65)
41.	Pemerintah Kecamatan V Koto Timur	770.854.311,00	660.237.441,00	(110.616.870,00)	(14,35)
42.	Pemerintah Kecamatan V Koto	881.389.779,00	748.782.378,00	(132.607.401,00)	(15,05)
43.	Pemerintah Kecamatan VII Koto	926.729.542,00	784.494.200,50	(142.235.341,50)	(15,35)
44.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.879.706.974,00	3.367.255.942,00	(512.451.032,00)	(13,21)
Jumlah		**1.552.919.707.637,14**	**1.420.388.030.413,60**	**(132.531.677.223,54)**	**(8,53)**

Dari tabel di atas diketahui bahwa secara keseluruhan terjadi penurunan belanja pada perubahan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp132.531.677.223,54 atau 8,53%.

Persentase penurunan belanja pada perubahan anggaran terbesar terjadi pada Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal tersebut dikarenakan adanya pemotongan pemotongan DAK Fisik pada Dinas Perikanan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sedangkan penurunan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dikarenakan ASN PPPK yang diterima lebih sedikit dari perencanaan awal.

Sementara itu, persentase kenaikan terbesar terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Pariaman dan Sekretariat Daerah.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan Entitas

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara luas sejak Tahun 2018.

Tabel 3. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.382.388.487.709,06	1.393.861.370.042,42	100,83	1.427.456.037.285,43
2.	Belanja Daerah	1.420.388.030.413,60	1.329.872.011.279,00	93,63	1.450.657.035.870,68
3.	Belanja Operasi	1.155.898.931.943,30	1.084.917.022.356,00	93,86	1.099.842.195.038,68
4.	Belanja Modal	62.558.156.321,30	57.462.936.998,00	91,86	155.053.257.852,00
5.	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000,00	7.200.264.113,00	51,43	7.691.341.000,00
6.	Belanja Transfer	187.930.942.149,00	180.291.787.812,00	95,94	188.070.241.980,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.382.388.487.709,06 dan terealisasi sebesar Rp1.393.861.370.042,42 atau sebesar 100,83%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.427.456.037.285,43 realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.594.667.243,01 atau sebesar 2,35%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan per SKPD diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1.	Dinas Kesehatan	22.939.870.000,00	20.253.670.670,00	88,29
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	49.352.802.200,00	53.584.246.771,00	108,57
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.135.000.000,00	869.880.981,00	76,64
4.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	515.000.000,00	594.783.792,00	115,49
5.	Dinas Perhubungan	42.000.000,00	26.280.000,00	62,57

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
6.	Dinas Perikanan	60.000.000,00	26.485.000,00	44,14
7.	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	81.300.000,00	162,60
8.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1.308.293.815.509,06	1.318.424.722.828,42	100,77
Jumlah		**1.382.388.487.709,06**	**1.393.861.370.042,42**	**100,83**

Penerimaan Pendapatan Daerah terutama Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Padang Pariaman belum optimal disebabkan oleh:

1. Penetapan target yang belum berdasarkan data riil di lapangan karena survei potensi belum dilakukan;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya;
3. Perangkat hukum dan *law enforcement* yang mendukung pelaksanaan pemungutan pendapatan belum sesuai dengan kondisi lapangan;
4. Belum lengkapnya data pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Total penerimaan daerah masih relatif kecil dan sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari pemerintah pusat;
6. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar;
7. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
8. Perencanaan dan pengawasan keuangan yang belum memadai mengakibatkan kebocoran penerimaan yang sangat berarti bagi daerah.

Optimalisasi sumber pendapatan perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses, dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu berguna untuk mengintensifkan pajak, mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal.

Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial atau belum terintegrasi dan kurangnya koordinasi, sehingga informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda, dan data tidak *update*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak diantaranya adalah data wajib pajak/retribusi yang belum dilakukan pemutakhiran, penetapan jumlah pajak, serta jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Selanjutnya, Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menganggarkan belanja sebesar Rp1.420.388.030.413,60 dan terealisasi sebesar Rp1.329.872.011.279,00 atau sebesar 93,63%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.450.657.035.870,68, realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp120.785.024.591,68 atau 8,33%. Rincian anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk Tahun Anggaran 2025 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Kode	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	603.845.730.344,41	578.635.923.657,00	95,83
01.02.01	Dinas Kesehatan	196.375.121.576,99	180.426.818.644,00	91,88
01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	90.949.717.799,50	88.743.175.289,00	97,57
01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.675.565.142,36	35.424.376.665,00	91,59
01.04.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	6.610.165.935,00	6.207.239.400,00	93,90
01.05.01	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.350.970.153,44	10.585.592.877,00	93,26
01.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.236.143.087,00	6.150.425.539,00	98,63
01.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.379.565.779,00	4.598.572.093,00	85,48
02.09.01	Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan	12.773.478.937,00	12.448.727.588,00	97,46
02.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.042.117.050,00	4.645.809.306,00	92,14
02.13.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.099.996.959,00	3.492.538.417,00	85,18
02.14.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.554.299.016,50	13.036.095.048,00	96,18
02.15.01	Dinas Perhubungan	24.056.885.244,60	23.529.301.272,00	97,81
02.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.158.667.149,00	6.880.590.082,00	96,12
02.17.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.870.407.532,00	6.063.526.555,00	88,26
02.18.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	4.225.165.293,00	4.005.336.531,00	94,80
02.19.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	7.970.590.642,00	7.161.818.216,00	89,85
02.23.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.469.921.403,00	3.320.878.123,00	95,70
03.25.01	Dinas Perikanan	4.702.015.902,00	4.433.093.432,00	94,28
03.27.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.638.838.229,00	4.370.915.750,00	94,22
04.01.01	Sekretariat Daerah	44.355.294.039,00	40.830.566.701,00	92,05
04.02.01	Sekretariat DPRD	41.477.097.375,50	38.814.248.576,00	93,58
05.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	5.240.492.751,00	4.968.680.257,00	94,81
05.02.01	Badan Pengelola Keuangan Daerah	220.143.049.131,00	202.926.506.672,00	92,18

Kode	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
05.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.867.299.604,00	17.233.310.879,00	61,84
06.01.01	Inspektorat Daerah	7.837.200.101,00	7.462.527.816,00	95,22
07.01.01	Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung	728.431.726,00	624.144.833,00	85,68
07.01.02	Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam	700.835.612,00	632.872.757,00	90,30
07.01.03	Pemerintah Kecamatan Batang Gasan	680.027.399,00	512.561.943,00	75,37
07.01.04	Pemerintah Kecamatan Batang Anai	776.111.766,20	692.983.356,00	89,29
07.01.05	Pemerintah Kecamatan Enam Lingkung	693.748.724,00	650.001.500,00	93,69
07.01.06	Pemerintah Kecamatan IV Koto Aur Malintang	650.614.331,00	490.575.405,00	75,40
07.01.07	Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung	783.640.450,00	690.022.610,00	88,05
07.01.08	Pemerintah Kecamatan Nan Sabaris	678.539.268,00	557.058.343,00	82,10
07.01.09	Pemerintah Kecamatan Padang Sago	621.194.595,00	555.790.463,00	89,47
07.01.10	Pemerintah Kecamatan Patamuan	673.571.935,00	575.830.634,00	85,49
07.01.11	Pemerintah Kecamatan Sungai Geringging	765.995.704,00	662.129.661,00	86,44
07.01.12	Pemerintah Kecamatan Sungai Limau	759.829.049,60	681.558.465,00	89,70
07.01.13	Pemerintah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	684.204.632,00	641.640.902,00	93,78
07.01.14	Pemerintah Kecamatan Ulakan Tapakis	724.719.084,00	642.625.053,00	88,67
07.01.15	Pemerintah Kecamatan V Koto Timur	660.237.441,00	524.381.375,00	79,42
07.01.16	Pemerintah Kecamatan V Koto Kampung Dalam	748.782.378,00	653.612.853,00	87,29
07.01.17	Pemerintah Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	784.494.200,50	632.819.831,00	80,67
08.01.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.367.255.942,00	3.054.805.910,00	90,72
Jumlah		**1.420.388.030.413,60**	**1.329.872.011.279,00**	**93,63**

Terhadap besaran anggaran dan realisasi belanja per SKPD sesuai tabel di atas, rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja per SKPD untuk Tahun Anggaran 2025 yang dibagi dalam kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025

Kode	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	592.272.454.228,41	567.961.783.038,00	95,90
01.02.01	Dinas Kesehatan	181.068.010.254,99	166.417.688.473,00	91,91
01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	77.441.569.181,00	76.261.620.654,00	98,48
01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.533.585.228,36	23.254.406.520,00	91,07
01.04.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	6.508.606.435,00	6.112.179.900,00	93,91

Kode	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
01.05.01	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.348.570.153,44	10.583.772.877,00	93,26
01.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.083.243.087,00	5.997.526.539,00	98,59
01.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.379.565.779,00	4.598.572.093,00	85,48
02.09.01	Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan	12.773.478.937,00	12.448.727.588,00	97,46
02.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.943.255.050,00	4.550.640.854,00	92,06
02.13.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.072.996.959,00	3.465.595.217,00	85,09
02.14.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.647.202.965,50	10.279.597.747,00	96,55
02.15.01	Dinas Perhubungan	23.786.385.244,60	23.263.547.584,00	97,80
02.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.023.019.749,00	6.796.356.332,00	96,77
02.17.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.705.507.532,00	5.910.346.555,00	88,14
02.18.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	4.225.165.293,00	4.005.336.531,00	94,80
02.19.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	7.907.590.642,00	7.100.165.466,00	89,79
02.23.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.469.921.403,00	3.320.878.123,00	95,70
03.25.01	Dinas Perikanan	4.505.365.902,00	4.239.045.432,00	94,09
03.27.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.638.838.229,00	4.370.915.750,00	94,22
04.01.01	Sekretariat Daerah	42.030.834.039,00	38.903.224.736,00	92,56
04.02.01	Sekretariat DPRD	40.283.825.975,50	37.829.481.526,00	93,91
05.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	5.056.992.751,00	4.801.680.256,00	94,95
05.02.01	Badan Pengelola Keuangan Daerah	17.483.572.982,00	14.742.794.932,00	84,32
05.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.867.299.604,00	17.233.310.879,00	61,84
06.01.01	Inspektorat Daerah	7.508.170.101,20	7.139.432.011,00	95,09
07.01.01	Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung	722.931.726,00	618.644.833,00	85,57
07.01.02	Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam	675.305.612,00	608.460.956,00	90,10
07.01.03	Pemerintah Kecamatan Batang Gasan	649.527.399,00	482.061.943,00	74,22
07.01.04	Pemerintah Kecamatan Batang Anai	776.111.766,20	692.983.356,00	89,29
07.01.05	Pemerintah Kecamatan Enam Lingkung	693.748.724,00	650.001.500,00	93,69
07.01.06	Pemerintah Kecamatan IV Koto Aur Malintang	639.114.331,00	479.075.405,00	74,96
07.01.07	Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung	783.640.450,00	690.022.610,00	88,05
07.01.08	Pemerintah Kecamatan Nan Sabaris	678.539.268,00	557.058.343,00	82,10
07.01.09	Pemerintah Kecamatan Padang Sago	621.194.595,00	555.790.463,00	89,47
07.01.10	Pemerintah Kecamatan Patamuan	649.571.935,00	551.830.634,00	84,95

Kode	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
07.01.11	Pemerintah Kecamatan Sungai Geringging	765.995.704,00	662.129.661,00	86,44
07.01.12	Pemerintah Kecamatan Sungai Limau	735.029.049,60	656.920.965,00	89,37
07.01.13	Pemerintah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	672.704.632,00	630.169.052,00	93,68
07.01.14	Pemerintah Kecamatan Ulakan Tapakis	724.719.084,00	642.625.053,00	88,67
07.01.15	Pemerintah Kecamatan V Koto Timur	660.237.441,00	524.381.375,00	79,42
07.01.16	Pemerintah Kecamatan V Koto Kampung Dalam	733.782.378,00	638.612.853,00	87,03
07.01.17	Pemerintah Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	784.494.200,50	632.819.831,00	80,67
08.01.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.367.255.942,00	3.054.805.910,00	90,72
Jumlah		**1.155.898.931.943,30**	**1.084.917.022.356,00**	**93,86**

Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025

Kode	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.573.276.116,00	10.674.140.619,00	92,23
01.02.01	Dinas Kesehatan	15.307.111.322,00	14.009.130.171,00	91,52
01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	13.508.148.618,50	12.481.554.635,00	92,40
01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.141.979.914,00	12.169.970.145,00	92,60
01.04.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	101.559.500,00	95.059.500,00	93,60
01.05.01	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.400.000,00	1.820.000,00	75,83
01.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	152.900.000,00	152.899.000,00	100,00
02.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98.862.000,00	95.168.452,00	96,26
02.13.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.000.000,00	26.943.200,00	99,79
02.14.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.907.096.051,00	2.756.497.301,00	94,82
02.15.01	Dinas Perhubungan	270.500.000,00	265.753.688,00	98,25
02.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	135.647.400,00	84.233.750,00	62,10
02.17.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	164.900.000,00	153.180.000,00	92,89
02.19.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	63.000.000,00	61.652.750,00	97,86
03.25.01	Dinas Perikanan	196.650.000,00	194.048.000,00	98,68
04.01.01	Sekretariat Daerah	2.324.460.000,00	1.927.341.965,00	82,92
04.02.01	Sekretariat DPRD	1.193.271.400,00	984.767.050,00	82,53
05.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	183.500.000,00	167.000.001,00	91,01
05.02.01	Badan Pengelola Keuangan Daerah	728.534.000,00	691.659.815,00	94,94
06.01.01	Inspektorat Daerah	329.029.999,80	323.095.805,00	98,20

Kode	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
07.01.01	Pemerintah Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
07.01.02	Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam	25.530.000,00	24.411.801,00	95,62
07.01.03	Pemerintah Kecamatan Batang Gasan	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00
07.01.06	Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
07.01.10	Pemerintah Kecamatan VII Koto Patamuan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
07.01.12	Pemerintah Kecamatan Sungai Limau	24.800.000,00	24.637.500,00	99,34
07.01.13	Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	11.500.000,00	11.471.850,00	99,76
07.01.16	Pemerintah Kecamatan V Koto	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Jumlah		**62.558.156.321,30**	**57.462.936.998,00**	**91,86**

Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025

Kode	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
04.04.01	Badan Pengelola Keuangan Daerah	14.000.000.000,00	7.200.264.113,00	51,43
Jumlah		**14.000.000.000,00**	**7.200.264.113,00**	**51,43**

Tabel 3. 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025

Kode	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
04.04.01	Badan Pengelola Keuangan Daerah	187.930.942.149,00	180.291.787.812,00	95,94
Jumlah		**187.930.942.149,00**	**180.291.787.812,00**	**95,94**

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Selain kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 juga mengacu kepada kebijakan akuntansi secara umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pusat pertanggungjawaban atau entitas akuntansi adalah sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) dan Puskesmas (BLUD);
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
5. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Perhubungan;

13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
18. Dinas Perikanan;
19. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
23. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat Daerah;
26. Pemerintah Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang;
27. Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam;
28. Pemerintah Kecamatan Batang Gasan;
29. Pemerintah Kecamatan Batang Anai;
30. Pemerintah Kecamatan Anam Lingkuang;
31. Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang;
32. Pemerintah Kecamatan Lubuak Aluang;
33. Pemerintah Kecamatan Nan Sabaris;
34. Pemerintah Kecamatan VII Koto Padang Sago;
35. Pemerintah Kecamatan VII Koto Patamuan;
36. Pemerintah Kecamatan Sungai Garinggiang;
37. Pemerintah Kecamatan Sungai Limau;
38. Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang;
39. Pemerintah Kecamatan Ulakan Tapakih;
40. Pemerintah Kecamatan V Koto Timur;
41. Pemerintah Kecamatan V Koto;
42. Pemerintah Kecamatan VII Koto; dan
43. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang

dikelola oleh seluruh entitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang terdiri dari PPKD (BUD), SKPD, dan dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Snggaran 2025 terdiri dari:

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan penyajiannya disandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Laporan Realisasi Anggaran memuat informasi mengenai Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

C. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk pos-pos yang terdiri dari: Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak dan Bukan Pajak, Persediaan, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, dan Ekuitas.

D. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/defisit dari kegiatan operasional, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO, dan penyajiannya disandingkan dengan realisasi sebelumnya.

E. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2025.

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari: Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap, dan Ekuitas akhir.

G. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual digunakan baik dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, termasuk Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara basis kas, digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dikeluarkan dari RKUD.

4.3. Dasar Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis (*historical cost*), yaitu jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration)* untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

A. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Beberapa ketentuan terkait dengan pengakuan Pendapatan LRA adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan–LRA diakui pada saat kas Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
2. Pendapatan kas yang diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
3. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;
4. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
5. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
6. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
3. Pengembalian yang bersifat sistemik (normal) dan berulang *(recurring)* atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan- LRA;
4. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama;
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut; dan

6. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) pada saat terjadi Pendapatan-LRA;

Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian jenis pendapatan lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat SP2D GU/GU Nihil/TU-Nihil terbit; dan
3. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah dan diukur berdasarkan asas bruto penilaian.

Pengungkapan

1. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam CaLK;
2. Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CaLK dan diakui sebagai beban operasional tahun berjalan;

3. Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CaLK dan tidak diakui sebagai beban operasional;
4. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan beban adalah:
   a. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
   b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
   c. Penjelasan mengenai sebab dan kaitan belanja dengan akun laporan keuangan lainnya misalnya berkaitan dengan timbulnya hutang piutang, timbulnya aset dan informasi mengenai wanprestasi pekerjaan; dan
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

C. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan

1. Transfer masuk diakui pada saat terjadinya penerimaan kas ke RKUD;
2. Transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer;
3. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, diakui saat terjadinya transfer keluar dari RKUD;
4. Transfer keluar atau transfer pada LRA disajikan sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer;
5. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD;
6. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi;
7. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus kas keluar aktivitas operasi;
8. Pendapatan transfer pada Laporan Operasional dilakukan pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan *(earned);* atau
   b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi *(realized);*
9. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer;

10. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa;
11. Pada tahun berjalan dimungkinkan terjadinya kelebihan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas hal tersebut dilakukan koreksi atas Pendapatan Transfer-LO dan diakui sebagai Pendapatan Transfer Diterima Dimuka; dan
12. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengukuran

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah yang didukung dengan dokumen yang sah;
3. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
4. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.
    a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
    b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
    c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
    d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

   a. Penjelasan rincian anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional serta perbandingan dengan tahun anggaran sebelumnya;

   b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;

   c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan

   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun – tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuan

1. Penerimaan Pembiayaan

   a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;

   b. Akun Penerimaan Pembiayaan meliputi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

   c. Pencairan dana cadangan diakui ketika Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan dan mengurangi saldo dana cadangan yang tercatat tersebut dianggarkan dalam belanja SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;

   d. Penerimaan Pinjaman Daerah mencakup Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain, Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB), Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Pinjaman Daerah dari Masyarakat;

   e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah mencakup Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN, Penerimaan Kembali

Pinjaman kepada Koperasi, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat, Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD;

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD;

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;

b. Penggunaan SiLPA mencakup Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan nomor yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran; dan

d. Penyertaan Modal Daerah merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan;
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto;
3. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan; dan
4. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan

3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

E. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
   b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayarannya secara tunai *(realized)* maupun masih berupa piutang *(realizable);*
2. Pengakuan Pendapatan-LO tersebut dapat dikelompokkan ke dalam:
   a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
   b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
   c. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
3. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD dan PPKD adalah sebagai berikut.
   a. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD
      1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

         Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

         a) PAD Melalui Penetapan

            Merupakan kelompok pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (*official assessment*) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan ini diakui pada saat diterbitkannya penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).

            Contoh Pajak Daerah yang melalui penetapan yaitu Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Contoh Retribusi Daerah yang melalui penetapan yaitu Retribusi IMB, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,Retribusi Menara Telekomunikasi, Retribusi Kesehatan, Retribusi Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat

Pemadam Kebakaran, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah Dipotong, dan Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus.

Pendapatan ini diakui pada saat:

(1) Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah;

(2) Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD-KB) apabila berdasarkan hasil perhitungan dan pemeriksaan ditemukan kekurangan pembayaran oleh wajib pajak daerah;

(3) Diterbitkannya penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas pendapatan terkait apabila wajib pajak tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) dan tidak membayar kewajibannya sampai dengan akhir tahun pelaporan keuangan;

(4) Apabila wajib pajak melakukan kelebihan pembayaran pajak pada periode sebelumnya, maka atas kelebihan pembayaran tersebut bisa di kredit pajaknya. Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka, dan apabila kelebihan pembayaran pajak tersebut telah dikreditkan, maka diakui sebagai Pendapatan Pajak - LO pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);

(5) Apabila wajib pajak melakukan pembayaran di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan, Pendapatan Pajak-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah berlalu.

Selain pendapatan pajak tersebut, PAD yang masuk ke dalam kategori melalui penetapan adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

b) PAD Tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* Contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, BPHTB, Pajak Penerangan Jalan, Pajak sarang Burung Walet, dan Pengambilan Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan, Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, Retribusi Terminal, Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika diterima di Rekening Kas Umum Daerah baik secara langsung maupun melalui Bendahara Penerimaan.

c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui berdasarkan Hasil RUPS atau dokumen yang dipersamakan. Contoh: pendapatan bagian laba dari penyertaan modal pada BUMD.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLUD.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Contoh:

a) Untuk Pendapatan Transfer DAU diakui setiap awal bulan atau akhir bulan sebelumnya sebesar jumlah kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;

b) Untuk Pendapatan Transfer DAK diakui pada saat pengajuan pencairan dana disampaikan oleh PPKD ke Menteri Keuangan sesuai jumlah yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;

c) Untuk Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil diakui setiap akhir triwulan tahun yang berkenaan sebesar jumlah yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;

d) Untuk Pendapatan Transfer yang merupakan tunda salur atau kurang bayar diakui pada saat diterimanya peraturan perundang-undangan tentang Tunda Salur atau Kurang Bayar. Apabila Peraturan perundang-undangan tentang Tunda Salur atau Kurang Bayar diterima sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka pendapatan

tunda salur/kurang bayar tersebut dicatat pada laporan keuangan tahun berkenaan. Apabila peraturan perundang-undangan tentang Tunda Salur atau Kurang Bayar diterima setelah laporan keuangan diterbitkan, maka pendapatan tunda salur/kurang bayar tersebut dicatat pada laporan keuangan tahun berjalan;

e) Untuk Pendapatan Transfer dari Provinsi diakui setiap akhir triwulan tahun yang berkenaan sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat;

f) Untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan transfer tersebut sesuai Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang ada;

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan yang terdiri dari :

a) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Pendapatan hibah diakui pada saat dokumen pengajuan pencairan dana hibah diterbitkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga atau Sejenis, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non Lancar) telah diterima.

c) Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering/rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah dan atau diterima pada SKPD.

Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan nilai pendapatan brutonya (tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

2. Pengukuran Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment* dicatat sebesar nilai pajak/retribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak/retribusi daerah, dan yang dicantumkan dalam SKPDKB/ SKRDKB dan SKPDKBT/SKRDKBT;
3. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official assessment*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam SKPD/SKRD atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKPD/SKRD mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman;
4. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses eksekusi jaminan dicatat sebesar nilai jaminan yang dapat direalisasikan;
5. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil dijual, bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut;
6. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya *(actual price)* yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
7. Pendapatan Operasional Non Pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang *(recurring)* atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut; dan
11. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian Pendapatan-LO dijelaskan CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO antara lain adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;

2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

F. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset

   Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

   Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi)

4. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus *(straight line method).*
6. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas..
7. Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

8. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.
9. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Pengukuran

1. Beban Pegawai
   a. Beban diukur dan dicatat dalam satuan rupiah sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.
   b. Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi beban pegawai dibukukan sebagai pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
2. Beban Barang dan Jasa
   a. Beban Barang

      Beban dicatat sebesar pemakaian Barang/persediaan. Penghitungan beban barang/persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. SKPD mencatat persediaan dengan metode sebagai berikut.

      1) Sistem Perpetual

         Dalam sistem perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Sistem ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pencatatan perpetual terhadap persediaan obat-obatan pada Gudang Farmasi di Dinas Kesehatan, Gudang Obat di RSUD, dan persediaan obat-obatan di OPD lainnya, dengan menggunakan metode FIFO.

      2) Sistem Periodik

         Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik *(stock opname)* pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menggunakan metode ini untuk semua persediaan yang dimiliki SKPD kecuali persediaan obat-obatan. Dalam hal ini metode yang dipakai adalah metode harga pembelian terakhir.

b. Beban Jasa

1) Beban jasa terdiri atas Beban jasa, barang, pemeliharaan, dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen; dan

2) Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. Beban Bunga

Beban bunga utang dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah perselisihan di kemudian hari.

d. Beban Subsidi

1) Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan; dan

2) Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali beban subsidi yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban Hibah

1) Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku; dan

2) Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi/penerimaan

kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

f. Beban Bantuan Sosial

1) Pengukuran beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga; dan

2) Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

g. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan beban piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Beban Lain-lain

1) Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan

2) Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

i. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.

j. Beban Tidak terduga

k. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional antara lain meliputi beban penjualan aset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset non lancar tersebut.

Pengungkapan

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam CaLK.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban;
2. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

G. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah.

Pengakuan

1. Kas dan setara kas diakui pada saat:
   a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas;
   b. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; dan
   c. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah daerah.
2. Penambahan Kas Daerah dicatat pada saat diterima di RKUD yang berasal dari:
   a. Penyetoran PAD;
   b. Penyetoran pengembalian sisa UYHD dari Bendahara Pengeluaran;
   c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
   d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
   e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
3. Pengeluaran Kas Daerah dicatat pada saat dikeluarkan dari RKUD yang digunakan untuk:
   a. Uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
   b. Pembayaran tagihan pihak ketiga;

c. belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja tidak terduga dan belanja lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan

e. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam Saldo Kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK.

Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CALK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian kas dan setara kas serta dokumen-dokumen yang dijadikan dasar manajemen kas, dan disajikan pada Aset Lancar;
2. Rincian kas yang disajikan pada Aset Non Lancar beserta penjelasannya;
3. Kebijakan manajemen setara kas; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap penting.

H. Piutang

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika memenuhi kriteria :

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan Piutang sesuai dengan kelompok piutangnya adalah sebagai berikut.

1. Piutang Pajak Daerah

   Piutang pajak pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan.

   Perbedaan dasar pengakuan Piutang pendapatan dengan mekanisme sistem *official assessment* dengan mekanisme sistem *self assessment* adalah pada *self assessment* wajib pajak menghitung dan membayar sendiri pajak tersebut tanpa didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sehingga pemerintah daerah perlu melakukan perhitungan sendiri pula berdasarkan hasil inventarisasi SKPD untuk mengetahui adanya pajak yang kurang bayar atau lebih bayar. Jika diketahui kurang bayar, maka pemerintah daerah perlu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

   Jika tidak terealisasi sampai akhir tahun maka diakuilah menjadi piutang. Demikian juga dengan mekanisme sistem *official assessment*, jika tidak terealisasi sesuai jumlah yang ditetapkan maka jumlah ini diakui sebagai piutang pada akhir tahun.

   Pengakuan piutang tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah sudah seharusnya mendapatkan haknya, akan tetapi belum mendapatkan pembayaran oleh wajib pajak.

2. Piutang Retribusi Daerah

   Piutang Retribusi Daerah pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD yang belum dilunasi hingga tanggal 3l Desember pada periode pelaporan.

   Pengakuan piutang tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah sudah seharusnya mendapatkan haknya, akan tetapi belum mendapatkan pembayaran oleh wajib retribusi.

3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

   Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, Piutang Dividen diakui berdasarkan hasil

keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta *(joint venture)*.

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

   Piutang Lain-lain PAD yang Sah diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

   Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang sewa dan piutang dari angsuran/cicilan penjualan dan piutang lainnya yang sejenis.

5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

   Piutang Transfer Pemerintah Pusat dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila per 31 Desember telah ada dokumen sumber resmi yang diakui dan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atas DAU, DAK dan DBH yang terutang dan akan dibayarkan ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mengakui jumlah tersebut sebagai piutang di neraca. Sebaliknya, sepanjang Pemerintah Pusat belum menetapkan dan mengakui adanya DAU, DAK dan DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran, maka pemerintah daerah tidak dapat mengakui adanya piutang. Informasi tentang hal ini cukup diungkapkan dalam CaLK.

6. Piutang Transfer Antar Daerah, terdiri dari:

   Dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut gubernur/kepala daerah telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

7. Piutang lainnya

   Diakui pada saat munculnya Peristiwa yang menimbulkan hak tagih, berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Terkait Uang Muka, piutang ini terjadi apabila terdapat uang muka pekerjaan pengadaan barang dan jasa maupun hal yang mengharuskannya uang muka tidak terealisasi sebagaimana harusnya hak daerah.

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut dan apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut.

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah atau Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar yang diterbitkan; atau
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran Piutang berdasarkan jenis piutang adalah sebagai berikut.

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah berdasarkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
2. Pengukuran piutang karena perikatan, adalah sebagai berikut.
   a. Pemberian pinjaman

      Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

      Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran dan biaya-biaya yang harus ditanggung pembeli, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan yang diakui oleh pihak yang melakukan transfer dan didukung dengan adanya dokumen resmi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

4. Pengukuran piutang lainnya adalah sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah yang didukung oleh dokumen yang sah.

   Khusus untuk piutang yang bersifat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dilakukan sebagai berikut.

   a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

   b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran piutang:

1. Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)* Terhadap Pengakuan Awal

   Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

2. Pemberhentian Pengakuan

   Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu : penghapus-tagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

   Penghapus-tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang

dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Misalnya, terhadap piutang ganti rugi yang tidak dapat ditagih oleh instansi/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat, penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL. Sementara itu, instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Setelah mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapus-tagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan untuk pemerintah daerah, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 Miliar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 Miliar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Penghapus-tagihan piutang berkonotasi terhadap penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapus-tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Sedangkan penghapusbukuan piutang adalah kebijakan internal manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

3. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

   Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berhutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value).* Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat)dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria :
   a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
   c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
   e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
   a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
   a. Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure).*

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
   a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
   a. Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure)*.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut.

1. Lancar, apabila pelunasan dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan lewat dari tanggal jatuh tempo sampai dengan enam bulan setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
3. Kualitas Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan di atas 6 bulan sampai dengan 12 bulan setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
4. Kualitas Macet, apabila belum melakukan pelunasan lebih dari 12 bulan setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Penggolongan Kualitas Piutang bukan Pajak dan Retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan tanggal jatuh tempo;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lewat dari tanggal jatuh tempo sampai dengan 12 bulan setelah jatuh tempo;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 12 bulan sampai dengan 24 bulan setelah jatuh tempo; dan
4. Kualitas Macet, jika umur piutang di atas 24 bulan setelah jatuh tempo.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	25 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

Tabel 4. 2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Objek Retribusi

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	< 1 tahun	Lancar	0,5%
2.	1 – 3 tahun	Kurang Lancar	25%
3.	3 – 5 tahun	Diragukan	50%
4.	> 5 tahun	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Tabel 4. 3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Objek Bukan Pajak Selain Retribusi

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	< 1 bulan	Lancar	0,5%
2.	1 – 3 bulan	Kurang Lancar	25%
3.	3 – 12 bulan	Diragukan	50%
4.	> 12 bulan	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 25% (dua puluh lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Tabel 4. 4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Objek Bukan Pajak Selain Retribusi

No.	Uraian	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,5%
2.	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	25%
3.	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	50%
4.	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis piutang, saldo menurut umur dan kualitas untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

I. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan

   Persediaan diakui pada saat:

   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
   b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah; dan
   c. Akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

2. Pengakuan Beban Persediaan

   Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan yaitu :

   a. Pendekatan aset

      Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

b. Pendekatan beban

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menerapkan pengakuan Beban persediaan dengan pendekatan beban, artinya pada saat terjadi pembelian persediaan, akan dibukukan pada akun beban, namun pada saat pemakaian persediaan tidak dibukukan (karena metode Periodik) pada akhir periode laporan dihitung nilai persediaan dengan cara jumlah persediaan yang ada dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Selanjutnya dihitung jumlah saldo akhir persediaan dengan cara menghitung sisa persediaan di gudang Farmasi Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta persediaan obat-obatan di SKPD lainnya, kemudian dibukukan pada akun Persediaan.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

3. Selisih Persediaan

Selisih persediaan dapat terjadi antara catatan persediaan menurut Bendahara Barang/Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal,maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar *(arm length transaction).*

Persediaan di SKPD dinilai dengan menggunakan metode harga pembelian terakhir. Khusus untuk Persediaan obat obatan di gudang Farmasi Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta persediaan obat-obatan di SKPD lainnya, menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) kecuali persediaan obat-obatan yang dibeli terakhir namun masa berlakunya (expired) lebih singkat dari yang dibeli sebelumnya maka digunakan metode *First Expired First Out* (FEFO).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Sistem Pencatatan Persediaan.

Persediaan dicatat dengan sistem perpetual (*perpetual methods*) dan sistem fisik yang disebut juga sistem periodik (*periodic methods*).

1. Sistem Perpetual

   Dalam sistem perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar.

   Sistem ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pencatatan perpetual terhadap persediaan obat-obatan pada Gudang Farmasi di Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu serta persediaan obat-obatan di SKPD lainnya, dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) kecuali persediaan obat-obatan yang dibeli terakhir namun masa berlakunya (*expired*) lebih singkat dari yang dibeli sebelumnya maka digunakan metode *First Expired First Out* (FEFO).

2. Sistem Periodik

   Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik *(stock opname)* pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menggunakan metode ini untuk semua persediaan yang dimiliki SKPD kecuali persediaan obat-obatan. Dalam hal ini metode yang dipakai adalah metode harga pembelian terakhir.

   Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, penilaian dan pencatatan persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang/kadaluarsa.

J. Investasi

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai *(reliable).*

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi yang nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal, suatu investasi diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau bukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan, dapat menggunakan nilai estimasi yang layak.

Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenisnya, yaitu :

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
   a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
      1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
      2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
   b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
   a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
   b. Investasi non permanen:
      1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
      2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
      3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

6. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
7. Perubahan pos investasi.

K. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

1. Tanah

   Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

   Tanah dapat diklasifikasikan menjadi:

   a. Tanah untuk gedung dan bangunan; dan
   b. Tanah untuk bukan gedung dan bangunan.

2. Peralatan dan Mesin

   Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (Dua Belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

   Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap, berupa alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/produksi, rambu-rambu dan peralatan olahraga.

3. Gedung dan Bangunan

   Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

   Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (*lift*, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *air conditioning*), dan komponen penunjang lain yang berupa saluran air dan telepon.

   Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah bangunan gedung, monumen, bangunan menara, tugu titik kontrol/prasasti.

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

   Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

   Jalan, jaringan dan irigasi tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, jaringan dan irigasi adalah jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya

   Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan, jaringan dan irigasi, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

   Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya dan aset tetap dalam renovasi (biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya).

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

   Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pengakuan

1. Tanah

   Aset tetap tanah diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

   a. Berwujud;

   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

   d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

   Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

   Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat

bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut.

a. dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan;

b. dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain;

c. dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan;

d. perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

    1) dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan;

    2) dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan;

    3) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan;

    4) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Tanah Wakaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah daerah yang masih berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap

tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan.

2. Peralatan dan Mesin

   Aset tetap peralatan dan mesin diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

   a. Berwujud;

   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

   d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

   Untuk itu, suatu aset diakui sebagai peralatan dan mesin jika memenuhi kriteria tersebut di atas.

   Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap peralatan dan mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan.

   Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

   Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

   Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi kas umum negara/daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam laporan realisasi anggaran, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin pada neraca dan sebagai Pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.

3. Gedung dan Bangunan

   Aset tetap gedung dan bangunan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

   a. Berwujud;

   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Untuk itu, suatu aset diakui sebagai gedung dan bangunan jika memenuhi kriteria tersebut di atas.

Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai "Gedung dan Bangunan", melainkan disajikan sebagai "Persediaan".

Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Perolehan gedung dan bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

4. Jalan Jaringan dan Irigasi

Untuk dapat diakui sebagai jalan jaringan dan irigasi maka jalan jaringan dan irigasi harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, jaringan dan irigasi diakui pada saat jalan, jaringan dan irigasi telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, jaringan dan irigasi pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, ketentuannya sebagai berikut.

a. apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dari aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset tetap dalam renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap sesuai kelompoknya dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;

b. apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan;

c. apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap–renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir a dan b di atas adalah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Perolehan aset tetap lainnya, selain aset tetap dalam renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan aset tetap lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal; dan

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan aset yang bersangkutan.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai berita acara penyelesaian pekerjaan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut.

a. apabila aset telah selesai dibangun, berita acara penyelesaian pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya;

b. apabila aset tetap telah selesai dibangun, berita acara penyelesaian pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya;

c. apabila aset telah selesai dibangun yang didukung dengan bukti yang sah walaupun berita acara penyelesaian pekerjaan belum diperoleh, namun aset

tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan dan diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan;

d. apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan;

e. apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan) karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tetap tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut konstruksi dalam pengerjaan dapat dihapusbukukan;

f. apabila Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam beberapa kasus, suatu konstruksi dalam pengerjaan dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian konstruksi dalam pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.

Apabila suatu konstruksi dalam pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka konstruksi dalam pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam catatan atas laporan keuangan.

Namun, apabila pembangunan konstruksi dalam pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka konstruksi dalam pengerjaan tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1. Tanah

   Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

   Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja

perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut termasuk dalam harga perolehan tanah.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

Untuk aset tetap tanah, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapapun nilai perolehan tanah dikapitalisasi. Tanah disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut tanpa mengurangi akumulasi penyusutan.

2. Peralatan dan Mesin

   Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

   Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Apabila biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun diakui dan disajikan sebagai ekstra komptabel.

3. Gedung dan Bangunan

   Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan PBG, notaris, dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

   Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan PBG, notaris, dan pajak. Sementara itu, gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk gedung dan bangunan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum. Gedung dan bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan.

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

   Jalan, jaringan dan irigasi dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, jaringan dan irigasi meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan irigasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan irigasi tersebut siap pakai.

   Biaya perolehan untuk jalan, jaringan dan irigasi yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

   Jalan, jaringan dan Irigasi yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

   Untuk jalan, jaringan dan irigasi tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum. Jalan, jaringan dan irigasi disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

5. Aset Tetap Lainnya

   Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

   Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap dalam renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

   Nilai satuan minimum perolehan aset tetap lainnya berupa tanaman adalah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per batang. Apabila biaya perolehan aset tetap lainnya berupa tanaman kurang dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) maka aset tetap lainnya berupa tanaman tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun diakui dan disajikan sebagai ekstra komptabel. Untuk aset tetap lainnya berupa hewan dan biota perairan dihitung sebagai aset tetap lainnya adalah indukan, sedangkan anakan tercatat sebagai persediaan.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

   Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

   Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai konstruksi dalam pengerjaan tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

   Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan konstruksi dalam pengerjaan tersebut meliputi:

   a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

   b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan

   c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

   Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

   Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut.

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount)*;
2. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.

3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   a. penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);
   b. pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);
   c. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
   d. mutasi aset tetap lainnya.
4. Informasi penyusutan, meliputi:
   a. nilai penyusutan;
   b. metode penyusutan yang digunakan;
   c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
   a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
   b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
   c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
   d. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
6. Untuk KDP perlu diungkapkan:
   a. rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian pada tanggal neraca;
   b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
   c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
   d. uang muka kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
   e. jumlah retensi (yaitu persentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak).
7. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

L. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme-LS.

Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

   Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

   Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

   Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

M. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut.

1. Tagihan jangka panjang

   Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

   a. Tagihan penjualan angsuran.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah/dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

b. Tagihan tuntutan kerugian daerah,

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

2. Kemitraan dengan pihak ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang - undangan.

a. Kemitraan dengan pihak ketiga-sewa.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa;

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP);

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*).

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer,Operate-BTO*).

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB).

   Untuk dapat diakui sebagai ATB, suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan.

   Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

   Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

   Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

   a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

   b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset lain-lain

   Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

   Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan atau direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

1. Tagihan jangka Panjang

   a. Tagihan penjualan angsuran.

      Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKPJM) dan dokumen lainnya yang dipersamakan.

2. Kemitraan dengan pihak ketiga

a. Sewa.

Dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan dengan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build Transfer Operate-BTO)*

Dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build Transfer Operate-BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

a. Pengukuran pada saat perolehan

Secara umum ATB awalnya diukur pada saat perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

b. Pengukuran setelah perolehan

Pengeluaran setelah perolehan dari ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi dimasa datang atau jasa potensial yang terkandung pada ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya.

4. Aset budaya/bersejarah tak berwujud (*intangible heritage asset*)

Aset Tak Berwujud yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

5. Amortisasi

   Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

   Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.

   Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

6. Aset lain-lain

   Yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain antara lain aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat (nilai perolehan aset tetap yang direklasifikasi beserta akumulasi penyusutannya) atau nilai bukunya, dengan tetap memperhitungkan pembebanan penyusutan untuk aset lain-lain tersebut.

7. Penurunan nilai (*impairment*)

   Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji ATB dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapan pun terdapat indikasi bahwa ATB mengalami penurunan nilai.

   Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat

ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Penghentian dan pelepasan ATB

   Aset Tak Berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

   Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara:

   a. Dijual;
   b. Dipertukarkan;
   c. Dihibahkan; dan
   d. Dijadikan penyertaan modal daerah.

N. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan
2. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan).

Pengakuan dan Pengukuran

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

Pengungkapan

Pengungkapan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

1. Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

2. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Pemutakhiran pengungkapan kondisi pada tanggal pelaporan.

1. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
2. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

Pengungkapan peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan.

Apabila peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:

1. sifat peristiwa; dan
2. estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

Berikut adalah contoh peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

1. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
2. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
3. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
4. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
5. Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
6. dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak signifikan.

O. Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

1. Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
2. Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah padang pariaman yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

1. Disediakan oleh mitra, yang:
   a. dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
   b. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
2. Disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
   a. merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
   b. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

Hal-Hal yang diatur dalam pengakuan dan pengukuran aset adalah sebagai berikut.

1. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang di partisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
   a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa saja publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan:
   b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
2. Pernyataan kebijakan ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam Poin 1 huruf (a) terpenuhi.
3. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan poin 1 (atau poin 2-untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam poin 4.

4. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud poin 1 huruf (a) dan poin 1 huruf (b) (atau poin 2 - untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasinya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

5. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur aset tak berwujud.

6. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan akuntansi yang mengatur akuntansi aset tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur akuntansi aset tak berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

7. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur aset tak berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

8. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud poin 1 (atau poin 2-untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam poin 4, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam poin 9.

9. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud poin 8 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud poin 3, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

10. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

11. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

    a. pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);

    b. pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:

        1) pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau

        2) pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

12. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud poin 8 sebagai kewajiban keuangan.

13. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

    a. jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau

    b. kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam poin 13 huruf (a), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

14. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana poin 8 berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam pernyataan kebijakan ini.

15. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:

    a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud poin 8;

    b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan

    c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

16. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud poin 15 huruf (b) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud poin 15 huruf (c) sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.

17. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi. Skema pemberian hak usaha kepada mitra.

18. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan poin 8 sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

19. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud poin 18 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

20. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban-pendapatan tangguhan.

21. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun mengurangi nilai kewajiban-pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

22. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud poin 12 dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud poin 18, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud poin 8 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud poin 9.
23. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam poin 22 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana poin 12 sampai dengan poin 21. Kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi.
24. Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi. pendapatan lainnya
25. Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud poin 18 sampai dengan poin 21, berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan.

Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan :

1. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
2. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
3. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
    a. hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
    b. hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
    c. nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
    d. hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;

e. opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;

f. ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*);

g. ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan

4. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pengungkapan merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai kebijakan akuntansi lain tersebut.

Pengungkapan disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

P. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

1. Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

2. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai;

3. Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

4. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; dan

5. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi properti investasi aset-aset sebagai berikut.

1. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
2. Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
3. Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri;
4. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan sewa di bawah harga pasar; dan
5. Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

PENGAKUAN PROPERTI INVESTASI

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.

PENGUNGKAPAN PROPERTI INVESTASI

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan dalam laporan keuangannya sebagai berikut.

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) properti investasi;

2. Metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
3. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
4. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
    a. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
    b. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
    c. pelepasan;
    d. penyusutan;
    e. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
    f. perubahan lain.
5. Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut.
    a. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
    b. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
    c. tanggal efektif penilaian kembali;
    d. nilai tercatat sebelum revaluasi
    e. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
    f. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
6. Metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi properti investasi, penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen;
7. Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
    a. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
    b. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
    c. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Penjabaran APBD ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 23 Oktober 2025 dan Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2025 tanggal 23 Oktober 2025, serta Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 12 Desember 2025.

Secara ringkas APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan menetapkan target pendapatan sebesar Rp1.382.388.487.709,06, belanja sebesar Rp1.420.388.030.413,60, dan defisit sebesar Rp(37.999.542.704,54). Defisit anggaran Tahun 2025 dianggarkan akan ditutup dengan pembiayaan neto sebesar Rp37.999.542.704,54.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat penyesuaian nomenklatur pada Tahun 2025 pada **Lampiran 1.**

Gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi APBD Kabupaten Padang Pariaman TA 2025 diuraikan sebagai berikut.

A. PENDAPATAN DAERAH

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1.382.388.487.709,06	**1.393.861.370.042,42**	**1.427.456.037.285,43**

Realisasi Pendapatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.393.861.370.042,42 dan Rp1.427.456.037.285,43 mengalami penurunan sebesar Rp33.594.667.243,01 atau sebesar 2,35%. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	176.741.930.578,00	173.961.154.312,42	98,43	144.739.185.746,43
2.	Pendapatan Transfer	1.201.646.557.131,06	1.215.900.215.730,00	101,19	1.282.716.851.539,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**1.382.388.487.709,06**	**1.393.861.370.042,42**	**100,83**	**1.427.456.037.285,43**

Penjelasan terhadap anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
176.741.930.578,00	**173.961.154.312,42**	**144.739.185.746,43**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp176.741.930.578,00 dengan realisasi sebesar Rp173.961.154.312,42 atau 98,43%. Jika dibandingkan realisasi PAD Tahun 2024 sebesar Rp144.739.185.746,43 maka realisasi Tahun 2025 lebih tinggi sebesar Rp29.221.968.565,99 atau 20,19%.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut.

a. Pajak Daerah

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
85.859.270.526,00	**84.061.584.978,00**	**61.253.259.287,50**

Untuk Tahun Anggaran 2025 penerimaan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp85.859.270.526,00 dengan realisasi sebesar Rp84.061.584.978,00 atau 97,91%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp61.253.259.287,50, Pajak Daerah untuk Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp22.808.325.690,50 atau 37,24%.

Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 2 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pajak Reklame	800.000.000,00	800.710.050,00	100,09	994.031.250,00
2.	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00	1.226.451.448,00	81,76	1.385.466.152,00
3.	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	500.000,00	5,00	0,00
4.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000.000,00	5.654.495.681,00	94,24	6.103.732.424,50
5.	PBB Pedesaan dan Perkotaan	18.000.000.000,00	15.330.990.474,00	85,17	16.406.733.263,00
6.	BPHTB	9.000.000.000,00	7.746.251.102,00	86,07	8.768.779.351,00

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
7.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.000.000.000,00	3.765.158.542,00	94,13	3.879.817.783,00
8.	PBJT-Tenaga Listrik	22.000.000.000,00	21.831.244.565,00	99,23	22.152.538.103,00
9.	PBJT-Jasa Perhotelan	400.000.000,00	479.381.671,00	119,85	439.635.143,00
10.	PBJT-Jasa Parkir	1.000.000.000,00	1.088.703.245,00	108,87	1.015.333.318,00
11.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	300.000.000,00	248.192.900,00	82,73	107.192.500,00
12.	Opsen PKB	14.698.982.049,00	17.247.533.700,00	117,34	0,00
13.	Opsen BBNKB	8.150.288.477,00	8.641.971.600,00	106,03	0,00
Jumlah		**85.859.270.526,00**	**84.061.584.978,00**	**97,91**	**61.253.259.287,50**

Berdasarkan tabel rincian penerimaan Pajak Daerah di atas menunjukkan bahwa Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2024 belum dipungut. Hal ini terjadi karena Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak baru yang menjadi objek tahun ini, namun belum terdapat petunjuk teknis pelaksanaan pemungutannya. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah menyatakan bahwa Opsen Pajak, khususnya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), resmi berlaku mulai 5 Januari 2025.

Apabila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi realisasi penerimaan Pajak Daerah yang tertinggi adalah penerimaan PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp21.831.244.565,00 atau 25,97% dari total realisasi Penerimaan Pajak Daerah.



Gambar 5. 1 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 - 2024

b. Retribusi Daerah

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
74.094.672.200,00	**75.436.647.214,00**	**66.154.972.984,00**

Anggaran penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp74.094.672.200,00 dengan realisasi sebesar Rp75.436.647.214,00 atau 101,81%. Dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp66.154.972.984,00, Retribusi Daerah untuk Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.281.674.230,00 atau 14,03%.

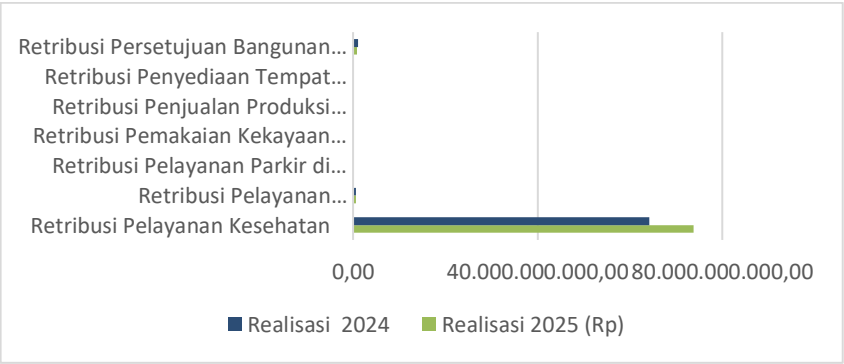
Tidak tercapainya target Pendapatan Retribusi tahun ini dikarenakan masih rendahnya penerimaan beberapa jenis Retribusi Daerah bahkan terdapat Retribusi Daerah tidak mencapai 75%, yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 3 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

No.	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	72.292.672.200,00	73.837.917.441,00	102,14	64.214.808.035,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	515.000.000,00	594.783.792,00	115,49	606.458.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	42.000.000,00	26.280.000,00	62,57	0,00
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	185.000.000,00	87.476.000,00	47,28	160.626.000,00
5.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	60.000.000,00	26.485.000,00	44,14	30.040.000,00
6.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	0,00	0,00	0,00	32.045.000,00
7.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	863.704.981,00	86,37	1.110.995.949,00
Jumlah		**74.094.672.200,00**	**75.436.647.214,00**	**101,81**	**66.154.972.984,00**

Pada Tahun 2025 terdapat penyesuaian nomenklatur Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan menjadi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.



Gambar 5. 2 Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 - 2024

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
8.728.317.039,00	**8.931.467.131,00**	**8.728.317.039,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp8.728.317.039,00 dengan realisasi sebesar Rp8.931.467.131,00 atau 102,33%. Jika dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp8.728.317.039,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp203.150.092,00 atau 2,33%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari setoran dividen PT Bank Nagari Tahun Buku 2024 yang diterima di Kas Umum Daerah pada tanggal 21 Maret 2025 sebesar Rp8.931.467.131,00.

Tabel 5. 4 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Dividen PT Bank Nagari	8.728.317.039,00	8.931.467.131,00	102,33	8.728.317.039,00
Jumlah		**8.728.317.039,00**	**8.931.467.131,00**	**102,33**	**8.728.317.039,00**

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
8.059.670.813,00	**5.531.454.989,42**	**8.602.636.435,93**

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp8.059.670.813,00 dengan realisasi sebesar Rp5.531.454.989,42 atau 68,63%. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp8.602.636.435,93 terjadi penurunan sebesar Rp3.071.181.446,51 atau 35,70%.

Gambaran realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 5 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	0,00	350.897.100,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	67.500.000,00	67,50	85.000.000,00
3.	Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	1.786.206.698,00	51,03	2.417.465.459,57

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
4.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.000.000.000,00	1.894.756.385,90	94,74	2.196.849.337,97
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.450.000.000,00	428.384.273,52	29,54	1.340.513.287,41
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	259.240.131,00	302.657.464,00	116,75	52.438.120,00
7.	Pendapatan dari Pengembalian	750.430.682,00	1.051.950.168,00	140,18	2.159.473.130,98
Jumlah		**8.059.670.813,00**	**5.531.454.989,42**	**70,23**	**8.602.636.435,93**

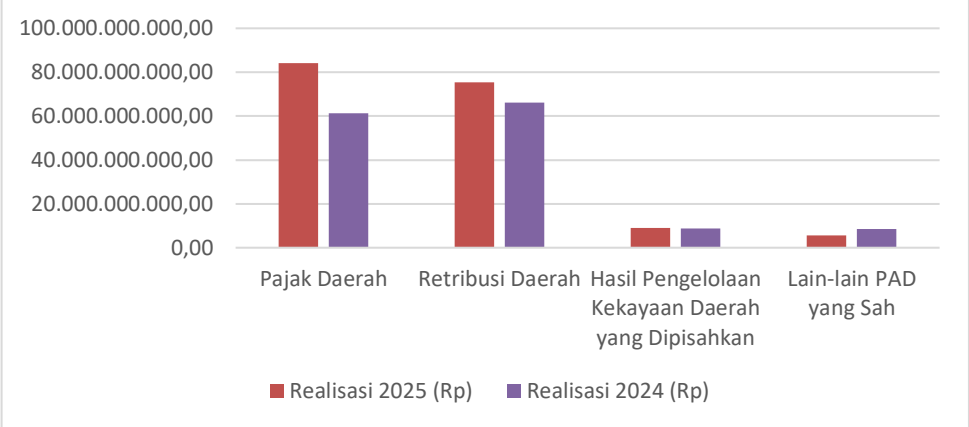
Dari rincian penerimaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

1) Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan merupakan salah satu komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dalam APBD. Pendapatan ini berasal dari penjualan aset daerah yang tidak dijadikan penyertaan modal/kekayaan BUMD;
2) Penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp67.500.000,00 merupakan Hasil Sewa BMD;
3) Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp1.786.206.698,00 merupakan pendapatan bunga atau imbal hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas saldo rekening giro yang mengendap pada Kas Daerah;
4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp1.894.756.385,90 merupakan pendapatan daerah yang didapat dari pengembalian atas temuan APIP dan BPK terkait honorarium, BBM dan pendapatan lainnya yang tidak ada rekening penerimaannya;
5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp428.384.273,52 merupakan penerimaan dana dari pihak ketiga yang terlambat menyelesaikan pekerjaan. Denda ini didasarkan pada kontrak kerja yang disepakati bersama;
6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp302.657.464,00 merupakan Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan
7) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.051.950.168,00 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp229.339.000,00 dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp822.611.168,00.

Berdasarkan penjelasan atas Pendapatan Asli Daerah di atas diketahui bahwa adanya kenaikan beberapa komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 bila dibandingkan dengan Tahun 2024.



Gambar 5. 3 Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 – 2024



Gambar 5. 4 Pendapatan Asli Daerah

2. PENDAPATAN TRANSFER

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1.201.646.557.131,06	**1.215.900.215.730,00**	**1.282.716.851.539,00**

Pendapatan Transfer merupakan akun yang menampung penerimaan transfer yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

A. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

1) Dana Perimbangan (nomenklatur tidak digunakan lagi pada Tahun 2025);
2) Dana Bagi Hasil (DBH);
3) Dana Alokasi Umum (DAU);
4) Dana Alokasi Khusus (DAK);
5) Insentif Fiskal; dan
6) Dana Desa.

B. Pendapatan transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil; dan

2) Bantuan Keuangan.

Adapun rincian dari Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.139.034.894.000,00**	**1.150.772.734.928,00**	**101,03**	**1.205.591.057.388,00**
A.	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.074.305.369.388,00
B.	Dana Bagi Hasil (DBH)	12.533.080.000,00	13.124.962.202,00	104,72	0,00
C.	Dana Alokasi Umum (DAU)	738.825.125.000,00	761.270.062.956,00	103,04	0,00
D.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	277.573.554.000,00	271.343.063.892,00	97,76	0,00
E.	Insentif Fiskal	7.113.627.000,00	7.113.627.000,00	100,00	27.827.229.000,00
F.	Dana Desa	102.989.508.000,00	97.921.018.878,00	95,08	103.458.459.000,00
2.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**62.611.663.131,06**	**65.127.480.802,00**	**104,02**	**77.125.794.151,00**
A.	Pendapatan Bagi Hasil	62.011.663.131,06	61.787.480.802,00	99,64	75.925.794.151,00
B.	Bantuan Keuangan	600.000.000,00	3.340.000.000,00	556,67	1.200.000.000,00
Jumlah		**1.201.646.557.131,06**	**1.215.900.215.730,00**	**101,19**	**1.282.716.851.539,00**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada Tahun 2025 realisasi Penerimaan dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.215.900.215.730,00 atau 101,19%.

Jika dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebesar Rp1.282.716.851.539,00 maka penerimaan untuk Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp66.816.635.809,00 atau 5,21%. Rincian Pendapatan Transfer diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1.139.034.894.000,00	**1.150.772.734.928,00**	**1.205.591.057.388,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Dasar penganggaran Dana Transfer Tahun Anggaran 2025 adalah Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.139.034.894.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.150.772.734.928,00 atau 101,03%. Rincian Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.074.305.369.388,00
2.	Dana Bagi Hasil (DBH)	12.533.080.000,00	13.124.962.202,00	104,72	0,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	738.825.125.000,00	761.270.062.956,00	103,04	0,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	277.573.554.000,00	271.343.063.892,00	97,76	0,00
5.	Dana Desa	102.989.508.000,00	97.921.018.878,00	95,08	103.458.459.000,00
6.	Insentif Fiskal	7.113.627.000,00	7.113.627.000,00	100,00	27.827.229.000,00
Jumlah		**1.139.034.894.000,00**	**1.150.772.734.928,00**	**101,03**	**1.205.591.057.388,00**

Dari tabel di atas terlihat realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp54.818.322.460,00 atau 4,55%.

Pemerintah menetapkan regulasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK), termasuk KMK Nomor 29 Tahun 2025 untuk penyesuaian rincian alokasi dan PMK Nomor 102 Tahun 2025 mengenai kebijakan khusus pascabencana. Fokusnya mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik.

Berikut dasar hukum penyaluran Dana Transfer ke daerah Tahun Anggaran 2025:

1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diuraikan sebagai berikut.

1) Dana Perimbangan

Anggaran Tahun 2025 (Rp	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
0,00	**0,00**	**1.074.305.369.388,00**

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2024 sebesar Rp1.074.305.369.388,00 realisasi Tahun 2025 turun sebesar Rp1.074.305.369.388,00.

Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Perimbangan sebagai berikut.

Tabel 5. 8 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	16.206.591.009,00
2.	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	784.480.463.956,00
3.	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	53.623.510.594,00
4.	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	219.994.803.829,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.074.305.369.388,00**

2) Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
12.533.080.000,00	**13.124.962.202,00**	**16.206.591.009,00**

Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp12.533.080.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.124.962.202,00 atau 104,72%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024 sebesar Rp16.206.591.009,00 realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.081.628.807,00 atau 19,01%.

Realisasi DBH Tahun 2025 merupakan gabungan dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) yang masing-masingnya berjumlah Rp9.354.838.202,00 dan Rp3.770.124.000,00. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan DBH disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 9 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH)

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	DBH PBB	1.274.333.000,00	1.515.251.202,00	118,91	3.713.200.009,00
2.	DBH PPh Pasal 21	7.460.034.000,00	7.791.917.000,00	104,45	5.151.038.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	45.778.000,00	47.670.000,00	104,13	37.292.000,00
4.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	214.363.000,00	219.390.000,00	102,35	147.572.000,00
5.	DBH SDA Mineral dan Batubara - *Royalty*	456.583.000,00	458.711.000,00	100,47	690.321.000,00
6.	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	31.218.000,00	41.252.000,00	132,14	0,00
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	53.265.000,00
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.060.775.000,00	1.060.775.000,00	100,00	1.425.506.000,00
9.	DBH Sawit	1.989.996.000,00	1.989.996.000,00	100,00	4.988.397.000,00
Jumlah		**12.533.080.000,00**	**13.124.962.202,00**	**104,72**	**16.206.591.009,00**

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
738.825.125.000,00	**761.270.062.956,00**	**784.480.463.956,00**

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp738.825.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp761.270.062.956,00 atau 103,04%. Dibandingkan realisasi DAU Tahun 2024 sebesar Rp784.480.463.956,00, penerimaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.210.401.000,00 atau 2,96%.

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) melebihi anggaran yang ditetapkan karena adanya tambahan transfer dari Pemerintah Pusat untuk pembayaran TPP THR untuk Guru sebesar Rp27.580.430.400,00.

Tabel 5. 10 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	638.430.057.000,00	666.001.255.000,00	104,32	631.041.835.000,00
2.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	100.395.068.000,00	95.268.807.956,00	94,89	153.438.628.956,00
Jumlah		**738.825.125.000,00**	**761.270.062.956,00**	**103,04**	**784.480.463.956,00**

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
277.573.554.000,00	**271.343.063.892,00**	**273.618.314.423,00**

Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp277.573.554.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp271.343.063.892,00 atau 97,76%. Dibandingkan realisasi DAK Tahun 2024 sebesar Rp273.618.314.423,00, penerimaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.275.250.531,00 atau 0,83%.

Tabel 5. 11 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	**DAK Fisik**	**22.864.258.000,00**	**21.812.067.075,00**	**95,40**	**53.623.510.594,00**
A.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.081.829.000,00	991.428.233,00	91,64	
B.	Dinas Kesehatan	14.132.827.000,00	13.337.924.542,00	94,38	
C.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.276.859.000,00	3.109.971.300,00	94,91	
D.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.372.743.000,00	4.372.743.000,00	100,00	
2.	**DAK Non Fisik**	**254.709.296.000,00**	**249.530.996.817,00**	**97,97**	**219.994.803.829,00**
A.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	215.067.235.000,00	215.861.796.161,00	100,37	
B.	Dinas Kesehatan	33.363.485.000,00	27.439.082.676,00	82,24	
C.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.986.736.000,00	5.938.277.980,00	99,19	
D.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	291.840.000,00	291.840.000,00	100,00	
Jumlah		**277.573.554.000,00**	**271.343.063.892,00**	**97,76**	**273.618.314.423,00**

5) Insentif Fiskal

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
7.113.627.000,00	**7.113.627.000,00**	**27.827.229.000,00**

Penerimaan dari Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.113.627.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.113.627.000,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi Insentif Fiskal Tahun 2024 sebesar Rp27.827.229.000,00, penerimaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp20.713.602.000,00 atau 74,44%.

6) Dana Desa

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
102.989.508.000,00	**97.921.018.878,00**	**103.458.459.000,00**

Penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp102.989.508.000,00 dengan realisasi sebesar Rp97.921.018.878,00 atau 95,08%. Dibandingkan dengan realisasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp103.458.459.000,00 penerimaan Dana Desa Tahun 2025 turun sebesar Rp5.537.440.122,00 atau 5,35%.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
62.611.663.131,06	**65.127.480.802,00**	**77.125.794.151,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 merupakan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp62.611.663.131,06 dengan realisasi sebesar Rp65.127.480.802,00 atau 104,02%. Bila dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp77.125.794.151,00 pendapatan Transfer Antar Daerah menurun sebesar Rp11.998.313.349,00 atau 15,56%.

Tabel 5. 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil	62.011.663.131,06	61.787.480.802,00	99,64	75.925.794.151,00
2.	Bantuan Keuangan	600.000.000,00	3.340.000.000,00	556,67	1.200.000.000,00
Jumlah		**62.611.663.131,06**	**65.127.480.802,00**	**104,02**	**77.125.794.151,00**

1) Pendapatan Bagi Hasil

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
62.011.663.131,06	**61.787.480.802,00**	**75.925.794.151,00**

Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2025 berasal dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp62.011.663.131,06 dengan realisasi sebesar Rp61.787.480.802,00 atau 99,64%. Dibanding penerimaan Tahun 2024 pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp14.138.313.349,00 atau 18,62%.

Tabel 5. 13 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.074.347.085,00	5.074.347.085,00	100,00	16.197.822.663,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.911.300.752,00	1.911.300.752,00	100,00	8.105.250.414,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.266.661.674,06	33.809.445.119,00	101,63	31.151.052.135,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	157.162.135,00	73.637.661,00	46,85	121.426.251,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.602.191.485,00	20.918.750.185,00	96,84	20.350.242.688,00
Jumlah		**62.011.663.131,06**	**61.787.480.802,00**	**99,64**	**75.925.794.151,00**

2) Bantuan Keuangan

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
600.000.000,00	**3.340.000.000,00**	**1.200.000.000,00**

Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun 2025 berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.340.000.000,00 atau sebesar 556,67%. Tingginya realisasi bantuan keuangan ini merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah daerah lainya pascabencana alam yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman pada akhir Tahun 2025.

Tabel 5. 14 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	500.000.000,00	2.720.000.000,00	544,00	1.200.000.000,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	620.000.000,00	620,00	0,00
Jumlah		**600.000.000,00**	**3.340.000.000,00**	**556,67**	**1.200.000.000,00**

Rincian BKK yang diterima dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya diuraikan sebagai berikut.

a) Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1-782-2025 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Penanggulangan Bencana Alam kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 5 Desember 2025 yang diterima di RKUD tanggal 9 Desember 2025 sebesar Rp500.000.000,00;

b) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahap Kedua untuk Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1-823-2025 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahap II untuk Penanggulangan Bencana Alam kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 15 Desember 2025 yang diterima di RKUD tanggal 24 Desember 2025 sebesar Rp550.000.000,00;

c) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahap Ketiga untuk Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1-869-2025 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahap II untuk Penanggulangan Bencana Alam kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 24 Desember 2025 yang diterima di RKUD tanggal 30 Desember 2025 sebesar Rp1.620.000.000,00;

d) Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Lahat kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan SK Bupati Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor 54/100.3.3.2/KEP/BPKAD/2025 yang diterima di RKUD tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp100.000.000,00;

e) Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Kepala BKAD Pemerintah Kabupaten Paser Nomor B900.1.15.5/1683/BKAD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 yang diterima di RKUD tanggal 17 Desember 2025 sebesar Rp500.000.000,00;

f) Donasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima di RKUD tanggal 17 Desember 2025 sebesar Rp50.000.000,00; dan

g) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Kabupaten Padang Pariaman dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam pada subkegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang diterima di RKUD tanggal 19 Desember 2025 sebesar Rp20.000.000,00.

Komposisi komponen Pendapatan Dana Transfer digambarkan dalam grafik berikut.



Gambar 5. 5 Perbandingan Realisasi Dana Transfer Tahun 2025 - 2024

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
4.000.000.000,00	**4.000.000.000,00**	**0,00**

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.000.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun 2024 sebesar Rp0,00, realisasi Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.000.000.000,00. Realisasi anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah tersebut merupakan dana darurat dari pemerintah pusat.

Tabel 5. 15 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**100,00**	**0,00**

a. Dana Darurat

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
4.000.000.000,00	**4.000.000.000,00**	**0,00**

Pendapatan Dana Darurat Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.000.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Dana Darurat Tahun 2024 sebesar Rp0,00 realisasi Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.000.000.000,00.

Dana tersebut merupakan Bantuan Presiden berdasarkan Surat Kementerian Sekretariat Presiden Nomor B-08/KSN/SP/KK.14.00/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Penyampaian Bantuan Kemasyarakatan Presiden untuk Provinsi Terdampak Bencana Alam.

Dari total realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebesar Rp1.393.861.370.042,42 diketahui bahwa kontribusi PAD 12,48%, Pendapatan Transfer 87,23%, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah 0,29%. Komposisi pendapatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2025 dan 2024 digambarkan dalam grafik berikut.



Gambar 5. 6 Porsi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

Dari gambar di atas diketahui bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap Dana Transfer masih cukup tinggi, yaitu sebesar 87,23%.

B. BELANJA DAERAH

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1.420.388.030.413,60	**1.329.872.011.279,00**	**1.450.657.035.870,68**

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp1.420.388.030.413,60 dengan realisasi sebesar Rp1.329.872.011.279,00 atau 93,63%. Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.450.657.035.870,68, Belanja Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp120.785.024.591,68 atau 8,33%.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Belanja Tahun 2025 dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Operasi
    a. Belanja Pegawai;
    b. Belanja Barang dan Jasa;
    c. Belanja Hibah;
2. Belanja Modal
    a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
    b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
    c. Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi;
    d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
    e. Belanja Modal Aset Lainnya
3. Belanja Tidak Terduga;
4. Belanja Transfer;
    a. Belanja Bagi Hasil; dan
    b. Belanja Bantuan Keuangan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024(Rp)
1.	Belanja Operasi	1.155.898.931.943,30	1.084.917.022.356,00	93,86	1.099.842.195.038,68
2.	Belanja Modal	62.558.156.321,30	57.462.936.998,00	91,86	155.053.257.852,00
3.	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000,00	7.200.264.113,00	51,43	7.691.341.000,00
4.	Belanja Transfer	187.930.942.149,00	180.291.787.812,00	95,94	188.070.241.980,00
Jumlah		**1.420.388.030.413,60**	**1.329.872.011.279,00**	**93,63**	**1.450.657.035.870,68**

Rincian Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. BELANJA OPERASI

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1.155.898.931.943,30	**1.084.917.022.356,00**	**1.099.842.195.038,68**

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.155.898.931.943,30 dengan realisasi sebesar Rp1.084.917.022.356,00 atau 93,86%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.099.842.195.038,68, Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.925.172.682,68 atau 1,36%. Rincian Belanja Operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	825.676.004.549,41	782.931.035.497,00	94,82	742.722.747.909,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	316.747.067.393,89	288.545.474.681,00	91,10	312.307.080.893,00
3.	Belanja Hibah	13.475.860.000,00	13.440.512.178,00	99,74	44.812.366.236,68
Jumlah		**1.155.898.931.943,30**	**1.084.917.022.356,00**	**93,86**	**1.099.842.195.038,68**

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
825.676.004.549,41	**782.931.035.497,00**	**742.722.747.909,00**

Belanja Pegawai Aahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp825.676.004.549,41 dengan realisasi sebesar Rp782.931.035.497,00 atau 94,82%. Nilai realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp783.025.277.337,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp742.722.747.909,00. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp40.208.287.588,00 atau 5,41%.

Adapun rincian dari Belanja Pegawai adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	485.449.302.827,00	465.239.952.688,00	95,84	459.833.756.054,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	291.432.822.249,41	271.709.278.748,00	93,23	92.473.535.960,00
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	0,00	0,00	0,00	147.783.786.646,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.749.664.825,00	15.513.426.685,00	98,50	15.447.526.164,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.053.258.906,00	857.976.167,00	81,46	675.917.896,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	710.238.500,00	99,91	694.844.000,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	31.280.075.742,00	28.900.162.709,00	92,39	25.813.381.189,00
Jumlah		**825.676.004.549,41**	**782.931.035.497,00**	**94,82**	**742.722.747.909,00**

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak terealisasi pada TA 2025 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur, sehingga jumlah anggaran dan realisasi Tahun 2025 tergabung ke dalam rekening Belanja Tambahan Penghasilan ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
316.747.067.393,89	**288.545.474.681,00**	**312.307.080.893,00**

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp316.747.067.393,89 dengan realisasi sebesar Rp288.545.474.681,00 atau 91,10%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp312.307.080.893,00, Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp23.761.606.212,00 atau 7,61%. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa per komponen biaya Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Barang	64.254.436.062,66	55.014.505.990,00	85,62	71.675.716.353,00
2.	Belanja Jasa	107.944.588.595,54	97.795.150.854,00	90,60	101.396.960.733,00
3.	Belanja Pemeliharaan	7.208.072.539,01	6.514.225.173,00	90,37	5.892.690.648,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	31.801.616.138,68	27.758.652.009,00	87,29	50.830.100.206,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.400.652.400,00	2.995.512.221,00	68,07	3.492.174.434,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	44.155.456.443,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BOSP	55.007.300.000,00	54.876.981.880,00	99,76	0,00
8.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.425.178.955,00	6.779.430.705,00	80,47	0,00
9.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.705.222.703,00	36.811.015.849,00	97,63	34.863.982.076,00
Jumlah		**316.747.067.393,89**	**288.545.474.681,00**	**91,10**	**312.307.080.893,00**

Belanja Barang dan Jasa BOSP tidak terealisasi pada TA 2025 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur, sehingga jumlah anggaran dan realisasi Tahun 2025 tergabung ke dalam rekening Belanja Barang dan Jasa BOSP.

c. Belanja Hibah

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
13.475.860.000,00	**13.440.512.178,00**	**44.812.366.236,68**

Belanja Hibah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp13.475.860.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.440.512.178,00 atau 99,74%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp44.812.366.236,68 Belanja Hibah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.371.854.058,68 atau 70,01%.

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah per komponen biaya Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	28.208.649.840,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.736.000.000,00	3.623.500.000,00	96,99	7.150.815.800,00
3.	Belanja Hibah Uang Dana BOSP yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.313.600.000,00	3.429.800.000,00	103,51	3.052.039.430,00
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	999.360.000,00	999.360.000,00	100,00	974.364.166,68
5.	Belanja Hibah Dana BOSP, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan	5.426.900.000,00	5.387.852.178,00	99,28	5.426.497.000,00
Jumlah		**13.475.860.000,00**	**13.440.512.178,00**	**99,74**	**44.812.366.236,68**

Penjelasan lebih lengkap disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 5. 21 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No.	Nama Penerima	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran Belanja Hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk organisasi KONI Kabupaten Padang Pariaman Tahap I. Dana Bersumber dari *Tagging* Tahun 2025.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	500.000.000,00

No.	Nama Penerima	SKPD	Jumlah (Rp)
2.	Pembayaran Dana Hibah PMI Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sesuai NPHD Nomor 058/Hibah/Dinkes/V/2025 dan Nomor 015/01.04.02/NPHD/V/2025 kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Bidang Yankes dengan sumber dana DAU SG KES.	Dinas Kesehatan	81.876.000,00
3.	Pembayaran Belanja Hibah Uang yang Diserahkan kepada Masyarakat a.n. Masjid Raya Toboh Ketek Kecamatan Enam Lingkung dan Masjid lainnya (119 Masjid) berdasarkan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 11/KEP/BPP/2025 tanggal 9 Januari 2025 sesuai daftar terlampir, dana *tagging* (DAU SG Kes).	Sekretariat Daerah	892.500.000,00
4.	Pembayaran Penggantian Belanja Hibah Uang untuk Veteran dalam rangka memperingati HUT RI ke 80 Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Pada Dinsosp3A TA 2025.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.000.000,00
5.	Pembayaran dana Hibah PMI Kabupaten Padang Pariaman 2025 NPHD No.058/Hibah/Dinkes/V/2025 dan Nomor 015/01.04.02/NPHD/V/2025 Bidang Yankes dengan sumber dana DAU SG KES.	Dinas Kesehatan	68.124.000,00
6.	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk Organisasi Pramuka Kabupaten Padang Pariaman Tahap I Tahun 2025, dana bersumber dari DAU *Tagging*.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	125.000.000,00
7.	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk Organisasi NPC Kabupaten Padang Pariaman Tahap I Tahun 2025, dana bersumber dari DAU *Tagging*.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	25.000.000,00
8.	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, Bersifat Sosial Kemasyarakatan Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Padang Pariaman Tahap I Tahun 2025, dana bersumber dari DAU *Tagging*.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	25.000.000,00
9.	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Organisasi PRAMUKA Tahap II Tahun 2025, dana bersumber dari DAU Peruntukan Bidang Pendidikan.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	125.000.000,00
10.	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang Undangan untuk organisasi NPC Kabupaten Padang Pariaman Tahap II TA 2025.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	25.000.000,00
11.	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Surau Tabek Gadang dan 29 (dua puluh sembilan) penerima hibah lainnya sesuai dengan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 234/KEP/BPP/2025 tanggal 16 Jun 2025	Sekretariat Daerah	1.245.000.000,00

No.	Nama Penerima	SKPD	Jumlah (Rp)
	sebagaimana persetujuan dan daftar terlampir, dana *tagging* (DAU SG-Kes).		
12.	Pembayaran Belanja Hibah Uang yang Diserahkan kepada Majelis Taklim Sakinah dan 20 (dua puluh) penerima hibah lainnya sesuai SK Bupati Padang Pariaman Nomor 338/KEP/BPP/2025 tanggal 23 Oktober 2025 sebagaimana persetujuan dan daftar terlampir, dana *tagging* (DAU SG-Kes).	Sekretariat Daerah	440.000.000,00
13.	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Surau Bancah dan 4 (empat) penerima hibah lainnya berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 172/NPHD/Kesra/2025 tanggal 17 November 2025 sebagaimana persetujuan dan daftar terlampir, dana *tagging* (DAU SG-Kes).	Sekretariat Daerah	25.000.000,00
14.	Pembayaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela bersifat kemasyarakatan untuk Orgaisasi KNPI Kabupaten Padang Pariaman Tahap II Tahun 2025.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	25.000.000,00
Jumlah			**3.623.500.000,00**

Tabel 5. 22 Belanja Hibah Dana BOSP

No.	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Hibah BOSP Satdikdas Swasta SD	3.029.600.000,00
2.	Belanja Hibah Dana BOSP SMP	400.200.000,00
Jumlah		**3.429.800.000,00**

Rincian Belanja Hibah Dana BOSP, BOP PAUDm dan BOP Kesetaraan dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

Tabel 5. 23 Anggaran dan Realisasi Hibah kepada Partai Politik

No.	Jenis	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	126.540.000,00	126.540.000,00	100,00	97.387.916,67
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	50.130.000,00	50.130.000,00	100,00	46.227.500,00
3.	Partai Persatuan Pembangunan	73.420.000,00	73.420.000,00	100,00	86.349.583,34
4.	Partai Demokrat	113.720.000,00	113.720.000,00	100,00	103.284.166,66
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	130.210.000,00	130.210.000,00	100,00	150.127.916,67
6.	Partai Keadilan Sejahtera	107.070.000,00	107.070.000,00	100,00	115.577.916,67
7.	Partai NasDem	110.920.000,00	110.920.000,00	100,00	87.583.750,00
8.	Partai Amanat Nasional	174.595.000,00	174.595.000,00	100,00	164.920.416,67
9.	Partai Golongan Karya	112.755.000,00	112.755.000,00	100,00	99.959.583,33
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0,00	0,00	0,00	22.945.416,67
Jumlah		**999.360.000,00**	**999.360.000,00**	**100,00**	**974.364.166,68**

2. BELANJA MODAL

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
62.558.156.321,30	**57.462.936.998,00**	**155.053.257.852,00**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun). Belanja Modal Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp62.558.156.321,30 dengan realisasi sebesar Rp57.462.936.998,00 atau 91,86%.

Dibandingkan realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp155.053.257.852,00 Belanja Modal Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp97.590.320.854,00, atau 62,94%. Anggaran dan realisasi Belanja Modal per komponen biaya Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 24 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	1.087.632.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.126.541.592,30	18.893.691.839,00	89,43	23.888.796.704,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.706.349.333,00	24.535.317.201,00	95,44	20.826.064.638,00
4.	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	15.515.265.396,00	13.896.607.658,00	89,57	103.545.442.710,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	110.000.000,00	84.206.800,00	76,55	5.705.321.800,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	53.113.500,00	53,11	0,00
Jumlah		**62.558.156.321,30**	**57.462.936.998,00**	**91,86**	**155.053.257.852,00**

Rincian Belanja Modal tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Modal Tanah

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
0,00	**0,00**	**1.087.632.000,00**

Belanja Modal Tanah pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00. Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.087.632.000,00 Belanja Modal Tanah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.087.632.000,00.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
21.126.541.592,30	**18.893.691.839,00**	**23.888.796.704,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp21.126.541.592,30 dengan realisasi sebesar Rp18.893.691.839,00 atau

89,43%. Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp23.888.796.704,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.995.104.865,00 atau 20,91%.

Tabel 5. 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.310.000.000,00	2.309.951.651,00	100,00	0,00
2.	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	20.535.000,00
3.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.051.075.000,00	1.006.673.000,00	95,78	1.818.286.200,00
4.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	26.000.000,00	25.974.000,00	99,90	0,00
5.	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	26.760.000,00
6.	Belanja Modal Alat Pengolahan	8.650.000,00	8.650.000,00	100,00	0,00
7.	Belanja Modal Alat Kantor	401.907.760,00	256.210.010,00	63,75	393.267.914,00
8.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.184.613.910,80	3.779.803.625,00	90,33	2.176.883.817,00
9.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	96.390.000,00	69.196.740,00	71,79	49.800.000,00
10.	Belanja Modal Alat Studio	346.600.000,00	197.118.400,00	56,87	1.025.259.800,00
11.	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	4.000.000,00	1.800.000,00	45,00	0,00
13.	Belanja Modal Alat Kedokteran	600.000.000,00	338.568.460,00	56,43	5.633.674.543,00
14.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	614.500.000,00
15.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	264.111.860,00
16.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	492.510.000,00	417.452.202,00	84,76	360.778.000,00
17.	Belanja Modal Komputer Unit	2.084.625.900,00	1.917.282.156,00	91,97	1.419.558.318,00
18.	Belanja Modal Peralatan Komputer	317.097.400,00	289.404.838,00	91,27	741.980.502,00
19.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
20.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	18.500.000,00	16.983.000,00	91,80	0,00
21.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	1.451.587.383,00
22.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	5.056.054.300,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
23.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.178.571.621,50	8.252.623.757,00	89,91	2.832.759.067,00
Jumlah		**21.126.541.592,30**	**18.893.691.839,00**	**89,43**	**23.888.796.704,00**

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
25.706.349.333,00	**24.535.317.201,00**	**20.826.064.638,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp25.706.349.333,00 dengan realisasi sebesar Rp24.535.317.201,00 atau 95,44%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp20.826.064.638,00, realisasi anggaran Tahun 2025 naik sebesar Rp3.709.252.563,00 atau 17,81%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk pembangunan gedung dan bangunan baru serta perbaikan/rehabilitasi gedung dan bangunan lama sehingga dapat menambah umur ekonomis bangunan tersebut.

Tabel 5. 26 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	24.248.849.333,00	23.111.217.722,00	95,31	18.966.047.837,00
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.397.500.000,00	1.382.952.604,00	98,96	1.860.016.801,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	60.000.000,00	41.146.875,00	68,58	0,00
Jumlah		**25.706.349.333,00**	**24.535.317.201,00**	**95,44**	**20.826.064.638,00**

d. Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
15.515.265.396,00	**13.896.607.658,00**	**103.545.442.710,00**

Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp15.515.265.396,00 dengan realisasi sebesar Rp13.896.607.658,00 atau 89,57%. Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp103.545.442.710,00 realisasi Tahun 2025 berkurang sebesar Rp89.648.835.052,00 atau 86,58%. Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi digunakan untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan rutin/periodik jalan dan jembatan serta jaringan air oleh Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang.

Tabel 5. 27 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan	5.207.627.890,00	4.718.777.142,00	90,61	77.308.741.236,00
2.	Belanja Modal Jembatan	5.321.602.024,00	4.971.933.303,00	93,43	2.540.310.974,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.830.000.000,00	1.776.167.200,00	97,06	21.482.345.050,00
4.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	900.000.000,00	357.145.523,00	39,68	0,00
5.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
6.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	1.132.718.000,00
7.	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	161.000.000,00	158.575.188,00	98,49	0,00
8.	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
9.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	297.967.720,00
10.	Belanja Modal Jaringan Listrik	718.876.240,00	710.159.130,00	98,79	722.463.900,00
11.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.373.159.242,00	1.200.850.172,00	87,45	51.895.830,00
Jumlah		**15.515.265.396,00**	**13.896.607.658,00**	**89,57**	**103.545.442.710,00**

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
110.000.000,00	**84.206.800,00**	**5.705.321.800,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp84.206.800,00 atau 76,55%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 yaitu sebesar Rp5.705.321.800,00, realisasi Tahun 2025 turun sebesar Rp5.621.115.000,00 atau 98,52%. Belanja ini digunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori empat jenis Belanja Modal sebelumnya, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, pembelian tanaman, bibit, dan barang bercorak seni dan budaya.

Tabel 5. 28 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	45.000.000,00	34.370.000,00	76,38	49.492.000,00
2.	Belanja Modal Hewan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
3.	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	45.000.000,00	29.836.800,00	66,30	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	0,00	0,00	2.104.268.000,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	0,00	0,00	3.551.561.800,00
Jumlah		**110.000.000,00**	**84.206.800,00**	**76,55**	**5.705.321.800,00**

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
100.000.000,00	**53.113.500,00**	**0,00**

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp53.113.500,00 atau sebesar 53,11%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 yaitu sebesar Rp0,00, realisasi Tahun 2025 naik sebesar Rp53.113.500,00 atau sebesar 100,00%.

Belanja Modal Aset Lainnya adalah pembelian *Software* SIMPKB *HYBRID full cycle* pada Dinas Perhubungan yang merupakan sistem aplikasi pengujian kendaraan bermotor *online*. *Software* tersebut mengintegrasikan data kendaraan secara langsung ke Kementerian Perhubungan dan bersifat *online* di UPT PKB seluruh Indonesia. Hasil/*output* dari aplikasi *blue full cycle* yaitu kartu KIR, sertifikat, serta QR kode dengan tampilan dan data lebih spesifik.

Belanja Modal Aset Lainnya mencakup pengeluaran untuk aset yang tidak termasuk tanah, peralatan, mesin, gedung, atau jalan, tetapi tetap memiliki nilai ekonomis jangka panjang.

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
14.000.000.000,00	**7.200.264.113,00**	**7.691.341.000,00**

Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp14.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.200.264.113,00 atau sebesar 51,43%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 yaitu sebesar Rp7.691.341.000,00 realisasi Tahun 2025 turun sebesar Rp491.076.887,00 atau sebesar 6,38%.

Tabel 5. 29 Rincian Belanja Tidak Terduga

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1.	13/01/2025	Pengembalian sisa hibah Rehabilitasi Rekonstruksi BNPB Tahun 2022 .	5.109.985.286,00
2.	04/12/2025	Pembayaran BTT Tahun 2025 pada kegiatan Belanja Bahan Makanan (nasi bungkus) terhadap penanggulangan darurat bencana cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	86.614.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
3.	16/12/2025	Pembayaran BTT Tahun 2025 pada Belanja Penanganan Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem, Banjir, dan Tanah Longsor di Kabupaten Padang Pariaman pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman.	666.984.250,00
4.	24/12/2025	Pembayaran BTT Tahun 2025 pada Belanja Penanganan Tanggap Darurat Bencana cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman untuk Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.	365.530.577,00
5..	30/12/2025	Pembayaran BTT Tahun 2025 pada Belanja Penanganan Tanggap Darurat Bencana cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	971.150.000,00
Jumlah			**7.200.264.113,00**

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengembalian pendapatan tahun lalu, dan pengeluaran tidak terduga lainnya dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

4. BELANJA TRANSFER

Anggaran Tahun 2025 (Rp	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
187.930.942.149,00	**180.291.787.812,00**	**188.070.241.980,00**

Belanja Transfer merupakan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Desa/Nagari. Belanja Transfer Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp187.930.942.149,00 dengan realisasi sebesar Rp180.291.787.812,00 atau 95,94%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp188.070.241.980,00, realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.778.454.168,00 atau 4,14%. Rincian Belanja Transfer sebagai berikut.

Tabel 5. 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

No.	Jenis	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	**Belanja Bagi Hasil**	**10.009.191.049,00**	**7.438.526.114,00**	**74,32**	**7.020.835.480,00**
A.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.801.293.480,00	7.286.086.320,00	74,34	6.765.183.918,00
B.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	207.897.569,00	152.439.794,00	73,32	255.651.562,00
2.	**Belanja Bantuan Keuangan**	**177.921.751.100,00**	**172.853.261.698,00**	**97,15**	**181.049.406.500,00**
A	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	177.921.751.100,00	172.853.261.698,00	97,15	181.049.406.500,00
Jumlah		**187.930.942.149,00**	**180.291.787.812,00**	**95,94**	**188.070.241.980,00**

a. Belanja Bagi Hasil

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
10.009.191.049,00	**7.438.526.114,00**	**7.020.835.480,00**

Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.009.191.049,00 dengan realisasi sebesar Rp7.438.526.114,00 atau sebesar 74,32%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.020.835.480,00 mengalami kenaikan sebesar Rp417.690.634,00 atau 5,95%. Rincian Belanja Bagi Hasil tersebut adalah sebagai berikut.

1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
9.801.293.480,00	**7.286.086.320,00**	**6.765.183.918,00**

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp9.801.293.480,00 dengan realisasi sebesar Rp7.286.086.320,00 atau 74,34%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.765.183.918,00 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp520.902.402,00 atau 7,70%.

Realisasi Transfer Bagi hasil Pajak Daerah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. 31 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran kekurangan Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada 103 (seratus tiga) Pemerintah Nagari Tahun 2024 berdasarkan SK Bupati Padang pariaman Nomor 361/KEP/BPP/2025 tanggal 24 November 2025, subkegiatan pengelolaan dana bagi hasil kab/kota.	1.215.366.360,00
2.	Pembayaran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada 103 (seratus tiga) Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berdasarkan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 380/KEP/BPP/2025.	6.070.719.960,00
Jumlah		**7.286.086.320,00**

2) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
207.897.569,00	**152.439.794,00**	**255.651.562,00**

Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp207.897.569,00 dengan realisasi sebesar Rp152.439.794,00 atau 73,32%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp255.651.562,00 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp103.211.768,00 atau 40,37%.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. 32 Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran kekurangan Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada 103 (seratus tiga) Pemerintah Nagari Tahun 2024 berdasarkan SK Bupati Padang pariaman Nomor 361/KEP/BPP/2025 tanggal 24 November 2025, subkegiatan pengelolaan dana bagi hasil kab/kota.	27.697.524,00
2.	Pembayaran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada 103 (seratus tiga) Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berdasarkan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 380/KEP/BPP/2025.	124.742.270,00
Jumlah		**152.439.794,00**

b. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
177.921.751.100,00	**172.853.261.698,00**	**181.049.406.500,00**

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp177.921.751.100,00 dengan realisasi sebesar Rp172.853.261.698,00 atau 97,15%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp181.049.406.500,00, Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.196.144.802,00 atau 4,53%.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Nagari terdiri dari:

1) Dana Desa (Nagari) sebesar Rp97.921.018.878,00

   Dana Desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa atau nagari di Kabupaten Padang Pariaman dari pemerintah pusat yang disalurkan kepada Pemerintah Nagari dengan mekanisme penyalurannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Desa langsung ditransfer dari KPPN ke rekening Desa (Nagari) yang bersumber dari pemerintah pusat.

2) Alokasi Dana Nagari sebesar Rp38.290.842.820,00

   Alokasi Dana Nagari merupakan dana yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemerintah Nagari sesuai peraturan perundang-undangan dan disalurkan kepada Pemerintah Nagari melalui Rekening Kas Umum Daerah.

3) Penghasilan Tetap (SILTAP) sebesar Rp36.641.400.000,00

   Siltap merupakan penghasilan tetap yang diberikan kepada Wali Nagari dan perangkatnya yang bersumber dari ADN (Alokasi Dana Nagari).

Daftar Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Tahun 2025, dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

C. SURPLUS / (DEFISIT)

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
(37.999.542.704,54)	**63.989.358.763,42**	**(23.200.998.585,25)**

Surplus/defisit anggaran merupakan pengurangan total Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah. Defisit APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp(37.999.542.704,54) dengan realisasi sebesar Rp63.989.358.763,42 atau (168,40)%.

D. PEMBIAYAAN

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
37.999.542.704,54	**38.137.542.704,54**	**63.700.541.289,79**

Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
40.499.542.704,54	**40.499.542.704,54**	**65.906.541.289,79**

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp40.499.542.704,54 dengan realisasi sebesar Rp40.499.542.704,54 atau sebesar 100,00%. Adapun rincian realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 adalah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp40.499.542.704,54.

Adapun rincian dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp40.499.542.704,54 adalah sebagai berikut.

a.	Sisa Dana Alokasi Fisik	Rp	5.186.959.870,00
b.	Sisa Dana Alokasi Nonfisik	Rp	12.745.790.628,00
c.	DAU Bidang Pendidikan	Rp	4.089.808.190,00
d.	DAU Bidang Kesehatan	Rp	1.620.065.182,00
e.	SiLPA DAU TPG/THR	Rp	1.565.531.570,04
f.	DBH Sawit	Rp	586.348.984,00
g.	SiLPA Dana BNPB	Rp	5.109.985.286,00
h.	SiLPA Dana Transfer ke Nagari	Rp	1.243.063.995,00
i.	SiLPA Insentif Fiskal dan DID Tambahan	Rp	1.047.631.890,00
j.	SiLPA BLUD	Rp	7.304.357.109,50
	Jumlah	**Rp**	**40.499.542.704,54**

2. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
2.500.000.000,00	**2.362.000.000,00**	**2.206.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.362.000.000,00 atau 94,48%. Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.206.000.000,00, Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp156.000.000,00 atau 7,07%.

Adapun rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 33 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran Penyertaan Modal pada PT Bank Nagari Tahun 2025 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Bank Nagari, serta surat dari Bank Nagari Nomor: SR/027/DIR/PD/05-2025 tanggal 8 Mei 2025.	2.362.000.000,00
Jumlah		**2.362.000.000,00**

E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
0,00	**102.126.901.467,96**	**40.499.542.704,54**

Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembiayaan neto Tahun 2025, pembiayaan neto dianggarkan sebesar Rp37.999.542.704,54 dengan realisasi sebesar Rp38.137.542.704,54.

Pembiayaan neto ditambah dengan surplus anggaran, merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Jumlah SiLPA akhir Tahun 2025 sebesar Rp102.126.901.467,96. Jika dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp40.499.542.704,54, maka SiLPA Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp61.627.358.763,42 atau 152,17%.

Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2025 dirinci Tahun 2025 sebesar Rp102.126.901.467,96 adalah sebagai berikut.

Kas di Kas Daerah	Rp	93.111.613.560,46
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	4.029,00
Kas BLUD	Rp	5.936.475.188,50
Kas BOSP	Rp	28.283.554,00
Kas BOK	Rp	3.050.545.136,00
Utang PFK	Rp	(20.000,00)
Jumlah	**Rp**	**102.126.901.467,96**

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SISA ANGGARAN LEBIH

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

   Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 sebesar Rp40.499.542.704,54.

2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL Tahun 2025 merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp40.499.542.704,54.

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 sebesar Rp102.126.901.467,96.

4. Saldo Anggaran Lebih pada Tahun 2025 sebesar Rp102.126.901.467,96 terdiri dari:

Tabel 5. 34 Rincian SILPA

No.	Uraian		Saldo (Rp)
A.	**DAK Fisik**		
1.	DAK Bidang Pendidikan		
	a.	DAK Pendidikan (PAUD)	15.349.950,00
	b.	DAK Pendidikan (SD)	149.000,00
	c.	DAK Pendidikan (SMP)	360.000,00
	d.	SiLPA Bidang pendidikan sampai dengan Tahun 2023	1.039.047.568,00
2.	DAK Bid. Kesehatan dan KB		
	a.	DAK Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Dasar)	25.000.000,00
	b.	DAK Kesehatan (Kesiapan Sistem Kesehatan)	3,00
	c.	DAK Kesehatan (Keluarga Berencana)	50.000,00
	d.	SiLPA Bidang Kesehatan sampai dengan Tahun 2023	3.471.508.559,00
3.	DAK Sanitasi		19.041.700,00
4.	DAK Perumahan dan Pemukiman		49.642.000,00
5.	Bidang Air Minum		14.087.000,00
6.	Irigasi		41.816.800,00
7.	DAK Penugasan Bid Pertanian		40.425.100,00
8.	Industri Menengah		122.484.950,00
9.	Kelautan dan Perikanan		14.443.450,00
10.	Pariwisata		23.756.088,00
	Jumlah DAK Fisik Reguler		**4.877.162.168,00**
B.	**DAK Non Fisik**		
1.	DAK Non Fisik-BOSP Reguler		28.071.554,00
2.	DAK Non Fisik-BOSP Kinerja		212.000,00
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD		3.812.698.975,00
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		736.750.000,00

No.	Uraian	Saldo (Rp)
5.	DAK Non Fisik-BOSP PAUD Reguler	11.707.305,00
6.	DAK Non Fisik-BOSP PAUD Kinerja	0,00
7.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	272.990.826,00
8.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	440.986,00
9.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja	0,00
10.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.608.041.636,00
11.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	3.050.545.537,00
12.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	249.037.315,00
13.	DAK Non Fisik-PK2UKM	21.088.000,00
14.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	209.872.600,00
15.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	47.771.475,00
16.	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.940.000,00
17.	DAK Non Fisik-BOKT	2.308.000,00
18.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	95.186,00
Jumlah DAK Nonfisik		**10.056.571.395,00**
Total DAK		**14.933.733.563,00**
C.	**Di Luar DAK**	
1.	DAU Bidang Pendidikan	6.589.989.861,00
2.	DAU Bidang Kesehatan	7.170.558.838,00
3.	SiLPA DAU TPG/THR	27.580.430.400,00
4.	DBH Sawit	621.098.059,00
5.	SiLPA Insentif Fiskal dan DID Tambahan	659.214.258,00
6.	SiLPA BLUD	5.936.475.188,50
7.	SiLPA Dana Transfer Kenagari	2.370.569.152,70
8.	Bantuan Keuangan Khusus (termasuk Dana Darurat)	7.340.000.000,00
9.	SiLPA Jaminan Reklamasi	41.824.407,00
10.	SiLPA Murni	27.068.184.626,76
Total SiLPA DAK dan di Luar DAK		**87.193.167.904,96**
TOTAL SiLPA		**102.126.901.467,96**

5.3. NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2025 dengan total nilai Aset sebesar Rp1.349.817.699.373,34 Kewajiban sebesar Rp9.370.888.433,70 dan Ekuitas sebesar Rp1.340.446.810.939,64.

Rincian masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

A. ASET LANCAR

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
167.695.725.372,48	**111.372.513.732,30**

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai untuk dimiliki, atau dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Pada tanggal 31 Desember 2025, Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berjumlah Rp167.695.725.372,48 yang terdiri atas:

1. Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
93.111.613.560,46	**28.984.627.889,04**

Saldo Kas di Kas Daerah pembukuan per 31 Desember 2025 sebesar Rp93.111.613.560,46 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.984.627.889,04. Sedangkan pada rekening koran Kas Umum Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp93.186.457.467,79 yang disimpan di Rekening Kas Umum Daerah Nomor 1700.0101.00052.9 PT Bank Nagari Kantor Cabang Lubuk Alung, sehingga terdapat selisih sebesar Rp74.843.907,33 dengan penjelasan sebagai berikut.

Penerimaan Kota Pariaman (2016)	Rp	811.000,00
Kurang Catat SP2D Nomor 1681 oleh Bank (2016)	Rp	8,00
Lebih Catat Saldo Awal oleh Bank (2016)	Rp	0,06
Koreksi PBB Pajak yang dipotong Bank (2016)	Rp	20,00
Pajak yang Dipotong Bank (2016)	Rp	(339,00)
Pajak yang Dipotong Bank (2017)	Rp	32.336,00
Kas yang Dibatasi Penggunaanya atas Jaminan Reklamasi yang Sudah di Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	41.824.407,00
Kesalahan Bank dalam Mencairkan 0222/SP2D-LS/GJ/BUD/2022	Rp	600,00
Kurang Potong Bank atas SP2D Nomor 6020	Rp	344.850,00
SP2D Nomor 8233 Tahun 2023 Terpotong Dua Kali	Rp	(1.380.000,00)
Kekurangan Debit Kas Daerah oleh Bank	Rp	33.211.025,27
Jumlah	**Rp**	**74.843.907,33**

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
4.029,00	**35.236.512,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.029,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam atas Jasa Giro yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp4.026,00 dan sisa kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 yang kurang setor ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun 2025 sebesar Rp3,00.

3. Kas BLUD

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
5.936.475.188,50	**7.304.357.109,50**

Kas BLUD per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp5.936.475.188,50 dan Rp7.304.357.109,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 35 Rincian Kas BLUD

No.	Uraian	Saldo Akhir (Rp)	Rincian Saldo Akhir (Rp)	
			Bank	Tunai
1.	UPTD Puskesmas Ulakan	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00
2.	UPTD Puskesmas Sikabu	797.100,00	797.100,00	0,00
3.	UPTD Puskesmas Lubuk Alung	67.955.664,00	67.955.664,00	0,00
4.	UPTD Puskesmas Kampung Guci	739.962,00	739.962,00	0,00
5.	UPTD Puskesmas Sicincin	79.667,00	79.667,00	0,00
6.	UPTD Puskesmas Pasar Usang	21.124.571,00	21.124.571,00	0,00
7.	Rumah Sakit Umum Daerah	5.826.178.224,50	5.826.178.224,50	0,00
Jumlah		**5.936.475.188,50**	**5.936.475.188,50**	**0,00**

4. Kas Dana BOSP

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
28.283.554,00	**119.606.781,00**

Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp28.283.554,00 dan Rp119.606.781,00. Saldo Kas sebesar Rp28.283.554,00 terdiri dari Kas di Bank sebesar Rp22.431.995,00 dan Kas Tunai sebesar Rp5.746.572,00 yang dikelola SD dan SMP. Dalam saldo Dana BOSP sebesar Rp28.283.554,00 termasuk SiLPA dana BOP Paud Tahun 2024 sebesar Rp104.987,00 yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun 2025. Rincian Kas Dana BOSP dapat dilihat pada **Lampiran 4.**

5. Kas Dana BOK

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
3.050.545.136,00	**4.055.734.413,00**

Saldo Dana BOK per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.050.545.136,00 dan Rp4.055.734.413,00 yang merupakan BOK seluruh Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman.

Rincian Kas BOK Puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 5**

6. Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
72.646.138.557,00	**66.577.672.791,00**

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp72.646.138.557,00 dan Rp66.577.672.791,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 36 Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
1.	Piutang Pajak Restoran	2.230.000,00
2.	Piutang Pajak Reklame	134.121.100,00
3.	Piutang Pajak Air Tanah	17.663.357,00
4.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	72.492.124.100,00
Jumlah		**72.646.138.557,00**

a. Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.230.000,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 (a)	**Rp**	**2.230.000,00**
Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2025 (b)	Rp	0,00
Penerimaan 2025 (c)	Rp	(2.230.000,00)
Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2025 = (a) + (b) + (c)	**Rp**	**2.230.000,00**

b. Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 sebesar Rp134.121.100,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 (a)	**Rp**	**79.152.800,00**
Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2025 (b)	Rp	855.678.350,00
Penerimaan 2025 (c)	Rp	(800.710.050,00)
Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 (a) + (b) + (c)	**Rp**	**134.121.100,00**

Rincian Piutang Pajak Reklame per Wajib Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 6a**.

c. Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.663.357,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 (a)	**Rp**	**60.776.368,00**
Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2025 (b)	Rp	1.183.384.122,00
Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2025 (c)	Rp	(1.226.451.448,00)
Beban Transfer (d)	Rp	(45.685,00)
Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025	**Rp**	**17.663.357,00**

Rincian Piutang Pajak Air Tanah per wajib pajak sebagai berikut.

Tabel 5. 37 Piutang Pajak Air Tanah

No.	Wajib Pajak	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	PT Multikon Jagad Perkasa	2020	437.964,00
2.	PT Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932,00
3.	PT Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932,00
4.	PT Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932,00
5.	PT Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932,00
6.	PT Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932,00
7.	PT Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932,00
8.	PT Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932,00
9.	PT.Jaya Sentrikon Indonesia	2025	7.544.869,00
Jumlah			**17.663.357,00**

d. Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp72.492.124.100,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Piutang PBB P2 per 31 Desember 2024 (a)	Rp	**66.435.513.623,00**
Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2025 (b)	Rp	21.176.289.597,00
SKP 2014 s/d 2024 terbit Tahun 2025 (c)	Rp	211.311.354,00
Penerimaan Pajak PBB-P2 Tahun 2025 (d)	Rp	(15.330.990.474,00)
Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 (a) + (b) + (c) + (d)	**Rp**	**72.492.124.100,00**

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp72.492.124.100,00 dirinci sebagai berikut.

1) Piutang PBB-P2 Tahun 2009 s.d. 2013 diserahkan oleh Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang ke Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan:

a) Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-23/WPJ.27/KP.04/2013 tanggal 19 Desember 2013;

b) Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-07/WPJ.27/KP.04/2014, tanggal 24 Januari 2014. Berdasarkan BAST tersebut piutang PBB P2 yang dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp18.198.672.111,00.

2) Piutang PBB-P2 Tahun 2009 sampai dengan 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 38 Piutang PBB-P2

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Piutang PBB-P2 Tahun 2009	2.843.675.290,00
2.	Piutang PBB-P2 Tahun 2010	2.911.173.985,00
3.	Piutang PBB-P2 Tahun 2011	4.152.722.763,00
4.	Piutang PBB-P2 Tahun 2012	3.717.761.420,00
5.	Piutang PBB-P2 Tahun 2013	4.573.338.653,00
6.	Piutang PBB-P2 Tahun 2014	2.430.808.231,00
7.	Piutang PBB-P2 Tahun 2015	2.225.602.221,00
8.	Piutang PBB-P2 Tahun 2016	2.261.444.867,00
9.	Piutang PBB-P2 Tahun 2017	2.240.175.092,00
10.	Piutang PBB-P2 Tahun 2018	2.826.801.375,00
11.	Piutang PBB-P2 Tahun 2019	3.783.441.645,00
12.	Piutang PBB-P2 Tahun 2020	3.896.094.331,00
13.	Piutang PBB-P2 Tahun 2021	3.633.312.980,00
14.	Piutang PBB-P2 Tahun 2022	4.555.114.405,00
15.	Piutang PBB-P2 Tahun 2023	11.169.622.350,00
16.	Piutang PBB-P2 Tahun 2024	8.609.629.952,00
17.	Piutang PBB-P2 Tahun 2025	6.661.423.312,00
Jumlah		**72.492.142.872,00**
Selisih Nilai antara SimPBB dan SIMDA Tahun Sebelumnya		(18.772,00)
Total		**72.492.124.100,00**

Piutang PBB-P2 tersebut diuraikan dalam kategori berikut.

a. Lunas Rp2.852.549.047,00

b. Lunas (bukti bayar hilang) Rp5.685.895.969,00

c. Belum Lunas Rp35.710.763.122,00

d. Objek Pajak dan Subjek Pajak Tidak Diketahui Rp21.693.645.188,00

e. Objek Pajak Tidak Diketahui Rp868.845.764,00

f. Subjek Pajak Tidak Diketahui Rp1.377.946.718,00

g. Objek Pajak Ganda	Rp541.645.781,00
h. Belum Verifikasi dan Validasi	Rp3.760.851.283,00
Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025	Rp72.492.142.872,00

Nilai Piutang PBB yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp72.492.124.100,00, sedangkan nilai tarikan sistem SimPBB sebesar Rp72.492.142.872,00 dikarenakan terdapat selisih lebih di sistem sebesar Rp18.772,00 yang merupakan selisih antara apliaksi SimPPB dengan SIMDA tahun sebelumnya.

Rincian Piutang PBB P2 dapat dilihat pada **Lampiran 6.b**.

7. Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.254.016.315,00	**576.240.650,00**

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.254.016.315,00 dan Rp576.240.650,00. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.254.016.315,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp572.625.665,00, Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp231.358.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, serta Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp450.032.650,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 39 Piutang Retribusi

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**572.625.665,00**
2.	**Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**	**231.358.000,00**
3.	**Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**	**450.032.650,00**
	PT Akses Prima Indonesia	14.250.000,00
	PT Tower Bersama Group (TBG)	2.500.000,00
	PT Mega Tower	63.060.729,00
	PT XL Axiata, Tbk	142.500.000,00
	PT Solusi Tunas Pratama, Tbk	22.750.000,00
	PT Infrasys Persada	22.284.263,00
	PT Indosat	134.500.000,00
	PT Telkomsel	6.937.658,00
	PT Inti Bangun Sejahtera	41.250.000,00
Jumlah (1 + 2 + 3)		**1.254.016.315,00**

8. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
150.637,00	**208.499.763,00**

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp150.637,00 dan Rp208.499.763,00. Sementara saldo piutang Lain-lain PAD yang Sah yang berasal dari puskesmas dan RSUD sudah di reklasifikasi ke Piutang Pelayanan Kesehatan. Total Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp150.637,00 merupakan Piutang Dana BOSP berasal dari Dana BOSP Tahun 2019 yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

9. Piutang Transfer Antar Daerah

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
18.297.317.867,00	**29.919.993.627,00**

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Dana Bagi Hasil dengan posisi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp18.297.317.867,00 dan Rp29.919.993.627,00. Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2025 merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/023/PPD-Bapenda/2026 tanggal 13 Mei 2026 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 6.c**

10. Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
11.140.305,00	**11.140.305,00**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp11.140.305,00 dan Rp11.140.305,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Reklasifikasi atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 ke Kas Negara di Tahun 2011 sebesar Rp3.040.305,00 ke Piutang Lainnya; dan

b. Reklasifikasi Tagihan Ganti Rugi sebesar Rp8.100.000,00 ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 40 Tagihan Ganti Rugi

No.	Tahun	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Tahun 2019	Piutang TGR ke Darfa Yenil	2.900.000,00
2.	Tahun 2019	Piutang TGR ke Nailus	250.000,00
3.	Tahun 2021	Piutang TGR ke By .Kenek	350.000,00
4.	Tahun 2022	Piutang TGR a.n. Qorri Suti Armi, A.Md.Keb	4.600.000,00
Jumlah			**8.100.000,00**

11. Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
(47.950.148.149,25)	**(42.604.370.681,66)**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp(47.950.148.149,25) dan Rp(42.604.370.681,66) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 41 Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Piutang Restoran	557.500,00
2.	Piutang Reklame	63.502.071,50
3.	Piutang Air Tanah	5.315.950,35
4.	Piutang PBB-P2	46.935.373.757,56
5.	Piutang Retribusi	842.621.338,50
6.	Piutang lain-lain PAD yang Sah	150.637,00
7.	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	91.486.589,34
8.	Piutang Lainnya	11.140.305,00
Jumlah		**47.950.148.149,25**

Rincian Penyisihan Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 7**

12. Beban Bayar Dimuka

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
186.927.468,75	**197.458.593,75**

Saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp186.927.468,75 dan Rp197.458.593,75. Beban Bayar Dimuka merupakan Sewa Bayar Dimuka atas lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai dengan perjanjian sewa menyewa lahan Nomor 06/PSML/DLHKPP/IX/2023.

13. Persediaan

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
21.123.260.904,02	**15.986.315.979,67**

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp21.123.260.904,02 dan Rp15.986.315.979,67.

Tabel 5. 42 Rincian Persediaan per jenis

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Persediaan Bahan	12.306.136,00
2.	Persediaan Suku Cadang	19.035.249,00
3.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	864.280.858,00
4.	Obat-obatan	14.618.135.420,12
5.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	5.609.503.240,90
Jumlah		**21.123.260.904,02**

Rincian Persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Persediaan tersebut sudah termasuk barang-barang yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam kegiatan penanggulangan bencana pada akhir Tahun 2025.

Selain persediaan yang tercatat di atas, juga terdapat obat kedaluwarsa sebesar Rp331.534.308,59, yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp180.367.086,01 dan RSUD sebesar Rp151.167.222,58. Disamping itu, juga terdapat Bahan Habis Pakai (Bahan Kimia) kedaluwarsa sebesar Rp467.733.194,97, yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp14.212.423,62 dan RSUD sebesar Rp453.520.771,35.

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
96.244.624.646,92	**92.435.723.017,54**

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp96.244.624.646,92 dan Rp92.435.723.017,54 berupa Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 43 Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)	4.224.465.232,00
2.	Penyisihan Investasi Non Permanen	(4.224.465.232,00)
3.	Investasi Permanen	96.244.624.646,92
Jumlah		**96.244.624.646,92**

Investasi jangka Panjang dapat dirinci sebagai berikut.

1. **Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)**

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
4.224.465.232,00	**4.232.465.232,00**

Saldo per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.224.465.232,00 dan Rp4.232.465.232,00.

2. **Penyisihan Investasi Non Permanen**

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
(4.224.465.232,00)	**(4.232.465.232,00)**

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Investasi Non Permanen dengan kemungkinan tidak tertagih yang diperoleh melalui *aging schedule*. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Penyisihan Piutang Non Permanen telah mencapai nilai maksimal dari nilai Investasi Non Permanen (telah disisihkan seluruhnya). Rincian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) dapat dilihat pada **Lampiran 9.**

3. **Investasi Permanen**

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
96.244.617.419,41	**92.435.723.017,54**

Investasi Permanen merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah. Saldo per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp96.244.617.419,41 dan Rp92.435.723.017,54. Rincian Investasi Permanen dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

Rincian Penyertaan modal tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 44 Penyertaan Modal Daerah

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	**PT Bank Nagari**	**48.509.000.000,00**
	Per 31 Desember 2025 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada PT Bank Nagari sebesar Rp48.509.000.000,00. Dari jumlah penyertaan modal sebesar Rp48.509.000.000,00, telah dikonversikan menjadi lembar saham dengan jumlah lembar sebanyak 48.509 lembar. Persentase penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2025 sebesar 2,52%. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Bank Nagari sebesar Rp48.509.000.000,00 dirinci sebagai berikut. Saldo awal penyertaan modal Tahun 2025 sebesar Rp46.147.000.000,00 Tambahan Penyertaan modal Tahun 2025 sebesar Rp2.362.000.000,00 Nilai Penyertaan Modal akhir Rp48.509.000.000,00	
2.	**PDAM**	**37.533.574.078,66**

No.	Kekayaan Pemda yang Dipisahkan		Jumlah (Rp)
1.	Tahun 1995		5.792.864.988,00
2.	Tahun 2002		1.185.764.899,00
3.	Tahun 2004		1.608.778.000,00
4.	Tahun 2005		48.444.000,00
5.	Tahun 2006		1.773.800.000,00
6.	Tahun 2007		1.827.799.300,00
7.	Tahun 2013		1.812.459.000,00
8.	Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-08/PK/2016 tentang Hibah Air Minum (MBR)		1.276.000.000,00
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Modal Non Tunai untuk Skema Penghapusan Utang PDAM Kabupaten Padang Pariaman kepada Pemerintah Pusat		52.254.085.000,00
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman		6.945.000.000,00
11.	Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-14/AMK/MK7/2018 tanggal 23 Mei 2018 berupa pemasangan 2.546 Sambungan Rumah Baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		7.638.000.000,00
12.	Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-136/MK7/2019 tanggal 5 Agustus 2019 berupa pemasangan 2.720 Sambungan Rumah Baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		8.160.000.000,00
13.	Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-91/MK7/DTK03/AMK/2021 tanggal 4 Mei 2021 berupa pemasangan 2.487 Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		7.461.000.000,00
14.	Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-5/MK.7/DTK.03/AMK/2022 tanggal 11 Februari 2022 berupa pemasangan 481 Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		1.299.000.000,00
	Jumlah Penyertaan Modal (a)		**99.082.995.187,00**
	Modal yang Belum Ditetapkan Statusnya		
	Pemda Tingkat II	Rp24.547.663.920,00	
	Pemerintah Pusat	Rp8.388.934.365,00	
	Jumlah Modal yang Belum Ditetapkan Statusnya (b)		**32.936.598.285,00**

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
	Total Penyertaan Modal ke PDAM (c) = (a) + (b)		**132.019.593.472,00**
	Persentase Kepemilikan Pemda atas PDAM (99.082.995.187,00 /132.019.593.472,00) (d)	**75,05%**	
	Nilai Penyertaan Modal pada PDAM per 31 Desember 2024 (e)		**36.375.686.597,70**
	Laba Tahun 2025 (f)		**1.542.821.427,00**
	Penyesuaian atas Laba Tahun 2025 (75,05% x Rp1.542.821.427,00) (g) = (d) x (f)		**1.157.887.480,96**
	Nilai Penyertaan Modal pada PDAM per 31 Desember 2025 (h) = (e) + (g)		**37.533.574.078,66**
3.	**PT BPR-PKPP**		**7.277.144.340,75**
	Nilai Modal Disetor PT BPR-PKPP	**6.771.500.000,00**	
	Setoran Modal Pemerintah Daerah		
	Setoran Awal Pendirian PT BPR-PKPP Tahun 2007		750.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2009		250.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2015		2.000.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2016		500.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2017		1.000.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2018		1.500.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2020		750.000.000,00
	Nilai Setoran Modal Pemda (a)		**6.750.000.000,00**
	Persentase Kepemilikan Pemda (6.750.000.000,00/6.771.500.000,00) (b)	**99,68%**	
	Nilai Penyertaan Modal pada PT BPR-PKPP per 31 Desember 2024 (c)		**6.988.137.419,83**
	Laba Tahun 2025 (d)		**289.934.712,00**
	Penyesuaian atas Laba Tahun 2025 (99,68% x Rp289.934.712,00) (e) = (b) x (d)		**289.006.920,92**
	Nilai Penyertaan Modal pada PT BPR-PKPP per 31 Desember 2025 (f) = (c) + (e)		**7.277.144.340,75**
4.	**KUD Dwi Sri**		**100.000.000,00**
	Penyertaan modal pada KUD Dwi Sri dengan nilai perolehan *(cost method)* sebesar Rp100.000.000,00. KUD Dwi Sri sudah tidak melakukan aktivitas operasional dan secara manajemen tidak ada lagi penanggung jawabnya. Sehingga sampai dengan penyusunan laporan keuangan Tahun 2025 laporan keuangan KUD Dwi Sri tidak diperoleh.		
5.	**Perusahaan Daerah Saiyo**		**0,00**
	Nilai perolehan *(cost method)* investasi permanen pada Perusda Saiyo sebesar Rp0,00. Perusda ini tidak beroperasi lagi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Saiyo Sakato Padang Pariaman, Perusahaan Daerah Saiyo Sakato telah resmi dibubarkan sejak tanggal 3 Mei 2016. Berdasarkan hal tersebut, sambil menunggu langkah selanjutnya, pencatatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Perusda Saiyo Sakato di reklasifikasi ke Aset Lain-lain.		
6.	**PT Balairung Citrajaya Sumbar**		**2.824.899.000,00**
	Penyertaan modal pada Tahun 2012 pada PT Balairung Citrajaya Sumbar dalam bentuk Saham Gabungan yang merupakan Saham atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1.132.593 lembar dengan rincian saham seri A sebanyak 1.694 lembar dan saham seri B sebanyak 1.130.899 lembar. Persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada PT Balairung Citrajaya Sumbar adalah sebesar 1,72%.		
	Jumlah		**96.244.617.419,41**

C. ASET TETAP

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.084.571.123.857,14	**1.143.029.740.245,69**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan adalah sebesar Rp1.084.571.123.857,14 dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024, nilai Aset Tetap Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp58.458.616.388,55 atau 5,11%.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.084.571.123.857,14 terdiri atas:

Saldo Awal (sebelum penyusutan)	**Rp**	**4.669.193.390.431,79**
Belanja Modal 2025 (+)	Rp	57.409.823.498,00
Kurang Catat (+)	Rp	811.620.000,00
Hibah dari Pihak Ketiga (+)	Rp	26.029.822.383,05
Reklasifikasi Ke Aset Tetap (+)	Rp	24.577.830.752,00
Penghapusan (-)	Rp	(2.067.253.845,00)
Reklasifikasi dari Aset Tetap (-)	Rp	(7.796.557.542,15)
Saldo Akhir (+)	**Rp**	**4.768.158.675.677,69**
Akumulasi Penyusutan (-)	Rp	(3.683.587.551.820,55)
Saldo Akhir Setelah Penyusutan	**Rp**	**1.084.571.123.857.14**

Uraian atas Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 45 Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Tanah	220.438.368.749,00
2.	Peralatan dan Mesin	521.205.508.982,43
3.	Gedung dan Bangunan	1.162.192.580.939,86
4.	Jalan Jaringan dan Irigasi	2.695.525.875.363,05
5.	Aset Tetap Lainnya	103.030.887.524,35
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.765.454.119,00
Jumlah Aset Tetap Sebelum Penyusutan		**4.768.158.675.677,69**

1. Tanah

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
220.438.368.749,00	**216.439.328.749,00**

Nilai tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp220.438.368.749,00 terdiri atas:

Saldo Awal	**Rp**	**216.439.328.749,00**
• Hibah dari Pihak Ketiga (+)	Rp	4.147.540.000,00
• Penghapusan (-)	Rp	(148.500.000,00)
Saldo Akhir	**Rp**	**220.438.368.749,00**

a. Penambahan Aset Tanah sebesar Rp4.147.540.000,00 berasal dari hibah pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut.

1) Hibah dari Pihak Ketiga pada Dinas Kesehatan sebesar Rp502.540.000,00, yaitu:

a) Tanah Puskesmas Sikucur seluas 520 m^2 senilai Rp5.200.000,00; dan

b) Tanah untuk RSUD Sungai Limau seluas 18.240 m^2 senilai Rp497.340.000,00;

2) Hibah dari Pihak Ketiga di Nagari Batang Anai untuk Kampung Nelayan pada Dinas Perikanan seluas 15.000 m^2 senilai Rp3.645.000.000,00.

b. Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp148.500.000,00 merupakan penghapusan atas tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari Penyertaan Modal ke Perumda Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman.

Nilai Tanah Tahun 2025 sebesar Rp220.438.368.749,00 secara ruas adalah sebanyak 1.469 persil tanah yang terdiri dari 368 persil tanah telah bersertifikat dan 1.101 persil tanah belum bersertifikat termasuk tanah jalan sebanyak 741 persil tanah.

Berdasarkan Surat Hibah pada Tahun 2007, tanah yang dihibahkan untuk IKK seluas 100 Hektar, namun hasil pengukuran untuk ganti rugi tanaman dan bangunan luas tanah ditemukan seluas ± 73 Hektar. Dari 73 Hektar tersebut, dihibahkan ke Kementerian Agama yang direncanakan untuk membangun Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) seluas 10 Hektar. Selanjutnya Tanah IKK yang dicatat dalam Daftar Barang Tanah pada Sekretariat Daerah adalah seluas ± 63 Hektar.

Selanjutnya untuk penggantian tanah BPP Buayan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang terdampak pembangunan jalan tol seluas +12.000 m^2 telah selesai proses pengurusan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Nilai Aset Tetap Tanah per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 46 Tanah per SKPD

No.	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	16.863.596.241,00	16.858.346.241,00
2.	Sekretariat DPRD	7.652.000,00	7.652.000,00
3.	Inspektorat Kabupaten	0,00	8.360.000,00
4.	Kecamatan Lubuk Alung	772.500.000,00	772.500.000,00
5.	Kecamatan Sungai Garinggiang	38.900.000,00	38.900.000,00
6.	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	10.000.000,00	10.000.000,00

No.	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
7.	Kecamatan Ulakan Tapakih	10.922.500,00	10.922.500,00
8.	Kecamatan Sungai Limau	55.485.000,00	55.485.000,00
9.	Kecamatan V Koto	11.000.000,00	11.000.000,00
10.	Kecamatan VII Koto	15.925.000,00	15.925.000,00
11.	Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang	60.480.000,00	60.480.000,00
12.	Kecamatan Nan Sabaris	11.325.000,00	11.325.000,00
13.	Kecamatan Batang Anai	12.900.000,00	12.900.000,00
14.	Kecamatan V Koto Timur	5.000.000,00	5.000.000,00
15.	Kecamatan VII Koto Padang Sago	4.970.000,00	4.970.000,00
16.	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	75.680.000,00	75.680.000,00
17.	Kecamatan VII Koto Patamuan	30.000.000,00	30.000.000,00
18.	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	8.000.000,00	8.000.000,00
19.	Kecamatan Batang Gasan	50.000.000,00	50.000.000,00
20.	Kecamatan Anam Lingkuang	70.000.000,00	70.000.000,00
21.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.489.946.113,00	13.073.133.533,00
22.	Dinas Kesehatan	3.323.215.520,00	2.385.988.100,00
23.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.222.160.000,00	1.222.160.000,00
24.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	141.003.591.225,00	141.003.591.225,00
25.	Dinas Perhubungan	483.109.000,00	483.109.000,00
26.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	30.020.747.750,00	30.020.747.750,00
27.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.100.000,00	14.740.000,00
28.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	300.000.000,00	300.000.000,00
29.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	335.370.000,00	335.370.000,00
30.	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	96.595.000,00	96.595.000,00
31.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.812.858.400,00	1.812.858.400,00
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.200.000,00	52.200.000,00
33.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	321.630.000,00	321.630.000,00
34.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.030.468.000,00	4.030.468.000,00
35.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	50.500.000,00	55.750.000,00
36.	Dinas Perikanan	6.758.542.000,00	3.113.542.000,00
Jumlah		**220.438.368.749,00**	**216.439.328.749,00**

Rincian Aset Tetap Tanah lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

2. Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
521.205.508.982,43	**497.426.717.246,58**

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp521.205.508.982,43 terdiri atas:

Saldo Awal	**Rp**	**497.426.717.246,58**
a. Belanja Modal 2025 (+)	Rp	18.893.691.839,00

b. Hibah dari pihak ketiga (+)	Rp	2.699.832.736,00
c. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin (+)	Rp	6.635.121.938,00
d. Penghapusan (-)	Rp	(445.213.466,00)
e. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin (-)	Rp	(4.004.641.311,15)
Saldo Akhir	**Rp**	**521.205.508.982,43**

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.893.691.839,00 berdasarkan LRA Tahun 2025;

b. Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp2.699.832.736,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Hibah dari Kemendikdasmen berupa Paket IFP dan Mobiler sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	550.272.626,00
2) Hibah dari BNPB berupa peralatan untuk Gedung Pusdalop ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	2.149.560.110,00

c. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.635.121.938,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pembelian meja dan kursi rapat di rumah dinas Bupati senilai Rp64.308.000,00;

2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp34.370.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

a) Pembelian *Infocus* sebanyak 2 unit pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah	Rp	15.500.000,00
b) Pembelian *Infocus* sebanyak 1 (satu) unit pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Rp	18.870.000,00

3) Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain merupakan aset yang dalam kondisi rusak berat bisa diperbaiki dan dipergunakan kembali senilai Rp418.093.456,00 dengan rincian sebagai berikut.

a) Kecamatan Patamuan dengan surat Pernyataan Nomor 120/SP/CPTM/2025	Rp	8.500.000,00
b) Rumah Sakit Umum Daerah dengan Surat Pernyataan Nomor	Rp	283.689.456,00

800/551/Umpeg/PKBMD/RSUD/2025 berupa Alat Kesehatan

c) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dengan Surat Pernyataan Nomor 900/235/DPMPTP/XII/2025 berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas — Rp 118.195.000,00

d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Surat Pernyataan Nomor 201/BPBD/V-2025 yaitu beberapa *Handy Talky* dan printer — Rp 7.709.000,00

4) Reklasifikasi dari belanja Barang dan Jasa senilai Rp6.118.350.482,00 dengan rincian sebagai berikut.

a) Badan Pengelola Keuangan Daerah, yaitu pembelian 3 (tiga) buah meja untuk resepsionis — Rp 16.500.000,00

b) Kecamatan Sungai Garinggiang, yaitu pembelian 2 (dua) unit printer — Rp 7.900.000,00

c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Belanja BOSP TKN, SDN, dan SMPN se Kabupaten Padang Pariaman — Rp 5.976.059.882,00

d) Dinas Kesehatan, yaitu berupa pembelian 2 (dua) unit laptop — Rp 37.740.000,00

e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu pembelian 2 unit laptop dan 2 unit printer — Rp 53.000.000,00

f) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, yaitu pembelian kursi rapat sebanyak 39 unit dan 4 unit kipas angin — Rp 27.150.600,00

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin diuraikan sebagai berikut.

1) Penghapusan senilai Rp445.213.466,00 merupakan penghapusan yang terdiri dari:

a) Penghapusan senilai Rp443.913.466,00 merupakan penghapusan aset Peralatan dan Mesin berupa kendaraan sesuai Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 431/KEP/BPP/2025 pada:

(1) Dinas Perhubungan sebesar Rp310.913.466,00;

(2) Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp133.000.000,00;

b) Penghapusan senilai Rp1.300.000,00 merupakan penghapusan aset Peralatan dan Mesin sesuai SK Bupati Nomor 599/KEB/BPP/2023 pada Kecamatan Patamuan.

2) Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.004.641.311,15 terdiri dari:

a) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain Rusak Berat sebesar Rp238.575.646,15 dengan rincian:

(1) Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp25.850.000,00;

(2) Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang sebesar Rp12.225.400,00;

(3) Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas Sicincin, Puskesmas Ampalu, Puskesmas Pasar Usang dengan total jumlahnya Rp175.842.246,15;

(4) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sebesar Rp24.658.000,00.

b) Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp3.255.190.230,00 dengan rincian:

(1) Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp12.628.640,00;

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.207.790.382,00;

(3) Dinas Kesehatan sebesar Rp32.001.598,00;

(4) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp949.610,00;

(5) Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran senilai Rp1.820.000,00.

c) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa sebesar Rp510.875.435,00 dengan rincian:

(1) Sekretariat Daerah sebesar Rp17.982.000,00;

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp76.140.062,00;

(3) Dinas Kesehatan sebesar Rp309.368.825,00;

(4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp107.384.548,00.

Selanjutnya pada Tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima Hibah dari Kementerian Dasar dan Menengah, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menegah berupa Sarana Digitalisasi Pembelajaran berupa 1 (satu) unit *Smartboard* dalam bentuk *Interactive Flat Panel* (IFP), 1 (satu) unit Laptop Inter Core i5, dan 1 (satu) unit media penyimpanan eksternal (*hardisk*) untuk seluruh sekolah SD dan SMPN se-Kabupaten Padang Pariaman. Barang tersebut sudah diterima oleh seluruh sekolah, tetapi belum dilengkapi dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sehingga belum dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah.

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 47 Nilai Peralatan dan Mesin per SKPD

No.	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	29.895.252.232,73	28.164.440.301,71
2.	Sekretariat DPRD	9.224.049.790,23	8.239.282.740,23
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	6.001.577.320,00	5.399.717.145,00
4.	Inspektorat Kabupaten	1.782.378.452,00	1.439.302.647,00
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.895.741.316,00	1.895.741.316,00
6.	Kecamatan Lubuak Alung	504.108.243,00	504.108.243,00
7.	Kecamatan Sungai Garinggiang	593.854.440,00	585.954.440,00
8.	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	514.568.578,00	503.068.578,00
9.	Kecamatan Ulakan Tapakih	464.164.191,00	464.164.191,00
10.	Kecamatan Sungai Limau	625.630.458,00	600.992.958,00
11.	Kecamatan V Koto	501.985.558,00	486.985.558,00
12.	Kecamatan VII Koto	508.401.431,00	508.401.431,00
13.	Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang	448.055.767,00	454.781.167,00
14.	Kecamatan Nan Sabaris	502.206.952,00	502.206.952,00
15.	Kecamatan Batang Anai	560.171.229,00	560.171.229,00
16.	Kecamatan V Koto Timur	552.080.027,00	552.080.027,00
17.	Kecamatan VII Koto Padang Sago	432.826.651,00	432.826.651,00
18.	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	530.768.052,00	506.356.251,00
19.	Kecamatan VII Koto Patamuan	619.911.008,00	588.711.008,00
20.	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	386.824.106,00	375.352.256,00
21.	Kecamatan Batang Gasan	559.737.107,00	529.237.107,00
22.	Kecamatan Anam Lingkuang	602.754.593,00	602.754.593,00
23.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	144.193.400.043,81	138.334.587.843,81
24.	Dinas Kesehatan	101.301.874.709,04	96.850.481.570,19
25.	Rumah Sakit Umum Daerah	106.073.679.527,75	99.472.857.626,75
26.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.260.950.621,10	17.178.850.621,10
27.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.521.072.244,00	2.354.072.243,00
28.	Dinas Perhubungan	10.225.544.660,00	10.392.393.126,00
29.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.124.238.210,60	4.040.004.460,60
30.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.683.323.643,00	8.592.709.519,00
31.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.524.875.677,00	3.429.707.225,00
32.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.067.003.815,00	1.040.060.615,00
33.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.198.192.185,00	8.974.194.984,00
34.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.332.970.429,00	2.332.970.429,00
35.	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	4.695.318.356,23	4.514.987.756,23
36.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	5.778.342.345,00	5.664.825.345,00
37.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	3.023.696.089,00	3.088.923.339,00
38.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	384.360.359,00	384.360.359,00
39.	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	11.638.335.625,00	11.771.335.625,00

No.	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
40.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.659.439.597,00	7.606.655.035,00
41.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.068.357.153,00	3.780.613.893,00
42.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.854.570.332,36	6.854.570.332,36
43.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.675.606.013,64	2.681.143.663,66
44.	Dinas Perikanan	4.213.309.844,94	4.189.774.844,94
Jumlah		**521.205.508.982,43**	**497.426.717.246,58**

Rincian lebih lengkap Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

3. Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.162,192.580.939,86	**1.111.965.690.027,81**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.162.192.580.939,86 yang terdiri atas:

Saldo Awal		Rp	**1.111.965.690.027,81**
a.	Belanja Modal 2025 (+)	Rp	24.535.317.201,00
b.	Hibah dari Pihak ketiga	Rp	19.182.449.647,05
c.	Penilaian	Rp	811.620.000,00
d.	Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan (+)	Rp	7.507.574.921,00
e.	Penghapusan (-)	Rp	(811.620.000,00)
f.	Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan (-)	Rp	(998.450.857,00)
Saldo Akhir		**Rp**	**1.162.192.580.939,86**

(Nilai tersebut tidak termasuk nilai gedung yang masih dalam pengerjaan Tahun 2025).

Penambahan Aset Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.535.317.201,00 adalah berdasarkan LRA Tahun 2025;

b. Hibah dari pihak ketiga adalah sebesar Rp19.182.449.647,05 dengan rincian sebagai berikut.

   1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupa Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan untuk SD dan SMP serta hibah dari komite sebesar Rp8.961.388.390,00;

   2) Dinas Kesehatan, yaitu hibah Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang diperoleh pada Tahun 2013 sebesar Rp8.295.614.000,00 namun baru diserahterimakan pada Tahun 2025;

3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa Pembangunan Gedung Pusat Pengendalian Operasi sebesar Rp1.925.447.257,05;

c. Penilaian Gedung senilai Rp811.620.000,00 adalah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Gedung eks UPT 2 x 11 Anam Lingkuang yang belum tercatat;

d. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.507.574.921,00 sebagai berikut.

1) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.191.087.350,00 yaitu Bangunan SN2 02 Batang Anai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2) Reklasifikasi dari Aset Lain-lain Rusak Berat berdasarkan inventarisasi ke lapangan ditemukan kondisi bangunan adalah baik/kurang baik dengan total nilai Rp3.745.200.680,00:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.723.225.933,00;

b) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.021.974,747,00;

3) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp940.406.705,00 dapat dirinci sebagai berikut.

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp15.840.000,00;

b) Dinas Kesehatan sebesar sebesar Rp924.566.705,00;

4) Reklasifikasi dari utang jangka pendek sebesar Rp1.630.880.186,00 terdiri dari:

a) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.626.388.612,00 adalah dari berupa rehabilitasi gedung Puskesmas/Puskesmas Pembantu; dan

b) Dinas Pendidikan sebesar Rp4.491.574,00 adalah termin 5% pekerjaan pada SDN 06 2 x 11 Kayu Tanam.

Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut.

a. Penghapusan senilai Rp811.620.000,00 merupakan penghapusan Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung eks-UPT 2 x 11 Anam Lingkuang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 431/KEP/BPP/2025. Merupakan bagian dari Penyertaan Modal ke Perumda Tirta Anai;

b. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp998.450.857,00 terdiri atas:

1) Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp64.308.000,00 adalah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan pembelian mobiler berupa meja dan kursi rapat.;

2) Reklasifikasi ke Jalan Jaringan Irigasi sebesar Rp27.807.000,00 merupakan Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pengaman Tebing pada SDN 05 Lubuk Alung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

3) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp363.114.737,00 dengan rincian:
   a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Pekerjaan Perencanan Pengaman Tebing pada SDN 05 Batang Anai) sebesar Rp23.854.000,00;
   b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp149.750.000,00 merupakan Lanjutan Pembangunan Kantor DPRD;
   c) Dinas Kesehatan sebesar Rp189.510.737,00 yaitu Pekerjaan Pembangunan Labor Puskesmas Sungai Geringging;
4) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp30.006.000,00 adalah rumah dinas pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
5) Dikeluarkan dari Gedung dan Bangunan dikarenakan peruntukannya bukan untuk Barang Milik Daerah sebesar Rp178.244.915,00 dengan rincian sebagai berikut.
   a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pembayaran termin 5% rehabilitasi TK Harapan Umat sebesar Rp3.434.415,00;
   b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang sebesar Rp174.810.500,00 dengan uraian sebagai berikut.
      (1) Rehabilitasi Pasar Lubuk Alung sebesar Rp74.866.500,00; dan
      (2) Rehabilitasi Rumah Dinas Kajari Pariaman sebesar Rp99.944.000,00;
6) Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek sebesar Rp334.970.205,00 mepakan utang jangka pendek Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu di SDN 02 Batang Anai dengan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, dan Pembangunan Ruang Labor Komputer.

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 48 Nilai Gedung dan Bangunan per SKPD

No.	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	119.369.345.945,97	118.455.039.885,97
2.	Sekretariat DPRD	5.595.516.907,00	5.595.516.907,00
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	8.447.792.643,00	8.447.792.643,00
4.	Inspektorat Kabupaten	6.042.690.700,00	6.355.963.180,00
5.	Kecamatan Lubuak Alung	777.241.996,00	777.241.996,00
6.	Kecamatan Sungai Garinggiang	1.058.031.803,00	1.058.031.803,00
7.	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	1.100.052.986,00	1.100.052.986,00
8	Kecamatan Ulakan Tapakih	737.238.000,00	737.238.000,00
9.	Kecamatan Sungai Limau	1.328.003.642,00	1.328.003.642,00
10.	Kecamatan V Koto	1.960.376.000,00	1.960.376.000,00
11.	Kecamatan VII Koto	2.722.535.567,76	2.722.535.567,76
12.	Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang	784.305.980,00	784.305.980,00

No.	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
13.	Kecamatan Nan Sabaris	1.366.565.000,00	1.366.565.000,00
14.	Kecamatan Batang Anai	697.992.900,00	697.992.900,00
15	Kecamatan V Koto Timur	634.140.000,00	634.140.000,00
16.	Kecamatan VII Koto Padang Sago	297.000.000,00	297.000.000,00
17.	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	2.259.848.679,48	2.259.848.679,48
18.	Kecamatan VII Koto Patamuan	787.339.363,00	787.339.363,00
19.	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	540.192.000,00	540.192.000,00
20.	Kecamatan Batang Gasan	870.852.181,00	870.852.181,00
21.	Kecamatan Anam Lingkuang	662.397.130,00	662.397.130,00
22.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	616.343.102.594,19	597.136.550.007,19
23.	Dinas Kesehatan	124.928.253.127,11	103.900.385.459,11
24.	Rumah Sakit Umum Daerah	92.885.878.705,39	87.903.985.405,39
25.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.539.559.137,60	17.339.753.137,60
26.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.205.138.715,06	10.205.138.715,06
27.	Dinas Perhubungan	9.235.123.443,80	9.235.123.443,80
28.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	24.857.422.678,00	24.857.422.678,00
30.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	801.615.905,00	488.343.425,00
31.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	65.000.000,00	65.000.000,00
32.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.713.590.676,82	5.181.090.576,82
33.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	912.089.524,00	912.089.524,00
34.	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	1.202.358.200,00	1.232.364.200,00
35.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	40.878.550.266,44	40.878.550.266,44
36.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	25.889.129.604,20	25.889.129.604,20
37.	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	755.076.617,00	755.076.617,00
39.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.621.134.507,05	3.695.687.250,00
40.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.575.544.240,00	1.575.544.240,00
41.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.294.198.795,00	13.294.198.795,00
42.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.394.342.950,00	3.073.332.010,00
43.	Dinas Perikanan	7.056.011.828,99	6.908.498.828,99
Jumlah		**1.162.192.580.939,86**	**1.111.965.690.027,81**

Selain itu, terdapat 26 unit gedung dan bangunan yang didanai oleh *District Health System* versi 2 (DHS2) pada Tahun 2025, yang saat ini dicatatkan sebanyak 14 Gedung dan Bangunan berdasarkan BAST Nomor 032.307/BAST-DINKES/IX/2019, sedangkan 12 unit Gedung dan Bangunan lainnya masih belum dilengkapi dokumen serah terima dan belum diserahterimakan ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman namun telah dimanfaatkan. Rincian Gedung dan Bangunan tersebut adalah:

Tabel 5. 49 Rincian Unit Gedung dan Bangunan DHS2 yang Telah Diserahterimakan

No.	Nama Fasilitas Kesehatan	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Puskesmas Sintuk	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	2.741.001.000,00
2.	Puskesmas Pembantu Pasar Sintuk	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	583.649.000,00
3.	Puskesmas Pembantu Batu Mangaum	Kecamatan Sungai Garinggiang	562.722.000,00
4.	Puskesmas Pembantu Kampung Dadok	Kecamatan Sungai Garinggiang	563.682.000,00
5.	Puskesmas Pembantu Malai Tangah	Kecamatan Batang Gasan	562.349.000,00
6.	Puskesmas Pembantu Barang-barangan	Kecamatan Batang Gasan	563.436.000,00
7.	Puskesmas Pembantu Sungai Pingai	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	557.153.000,00
8.	Puskesmas Pembantu Koto Dalam	Kecamatan VII Koto Padang Sago	560.284.000,00
9.	Puskesmas Pembantu Bukit Gonggang	Kecamatan V Koto	564.989.000,00
10.	Puskesmas Pembantu Labu Kumbung	Kecamatan VII Koto Patamuan	477.288.000,00
11.	Puskesmas Pembantu Durian Dangka	Kecamatan V Koto	559.061.000,00
12.	Polindes Du (Kp.Ladang Limau Purut)	Kecamatan V Koto Timur	556.351.000,00
13.	Polindes Kampung Tangah	Kecamatan V Koto	556.351.000,00
14.	Polindes Sunur Tangah	Kecamatan Nan Sabaris	478.709.000,00
Jumlah			**9.887.025.000,00**

Sedangkan 12 unit gedung bangunan lagi masih belum ada diserahterimakan ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian:

Tabel 5. 50 Rincian Unit Gedung dan Bangunan DHS2 yang Belum Diserahterimakan

No.	Nama Fasilitas Kesehatan	Alamat
1.	Kantor Dinas Kesehatan	Kecamatan Anam Lingkuang
2.	Polindes Kampung Kandang	Kecamatan Nan Sabaris
3.	Polindes Padang Karambia	Kecamatan Sungai Limau
4.	Polindes Lambeh	Kecamatan Sungai Garinggiang
5.	Polindes Satu (Talau Atas Limau Purut)	Kecamatan V Koto Timur
6.	Polindes Padang Kunik	Kecamatan Batang Anai
7.	Polindes Batang Piaman	Kecamatan V Koto Timur
8.	Polindes Ulakan	Kecamatan Ulakan Tapakih
9.	Polindes Kantarok	Kecamatan Batang Gasan
10.	Polindes Tanjung Alai	Kecamatan Sungai Garinggiang
11.	Polindes Lubuk Napa	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam
12.	Polindes Malai	Kecamatan Sungai Garinggiang

Rincian lebih lengkap Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

4. Jalan Jaringan dan Irigasi

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	2.695.525.875.363,05	**2.681.736.052.936,05**

Nilai Jalan Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.695.525.875.363,05 terdiri dari:

Saldo Awal	Rp	**2.681.736.052.936,05**
▪ Belanja Modal 2025 (+)	Rp	13.896.607.658,00
▪ Reklas Masuk ke Jalan, Jaringan dan Irigasi (+)	Rp	1.461.222.793,00
▪ Reklas ke Barang dan Jasa (-)	Rp	(2.142.000,00)
▪ Reklas ke Utang Jangka Pendek (-)	Rp	(171.602.024,00)
▪ Reklasifikasi ke Kontruksi Dalam Pengerjaan (-)	Rp	(1.394.264.000,00)
Saldo Akhir	**Rp**	**2.695.525.875.363,05**

Penambahan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp13.896.607.658,00 berdasarkan LRA Tahun 2025;

b. Reklasifikasi masuk ke Jalan Jaringan dan Irigasi senilai Rp1.461.222.793,00 dengan rincian sebagai berikut.

   1) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp27.807.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pembayaran Perencanaan dan Pengawasan kegiatan Pengaman Tebing pada SDN 05 Lubuk Alung;

   2) Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.419.437.213,00 dengan rincian:

      a) Pekerjaan Pengaman Badan Jalan Padang Baru-Kalawi sebesar Rp185.715.420,00;

      b) Rehabilitasi Jalan Lingkung Samping Jalan KA Korong Palembayan Sintuak sebesar Rp199.825.000,00;

      c) Peningkatan Jalan Tepi Rel Kampung Tangah Jambak Nagari Balah Hilir Rp199.800.000,00;

      d) Rabat Beton Jalan Simpang Indak Surau Gadang sebesar Rp149.684.000,00;

      e) Rabat Beton Jalan Sialangan sebesar Rp199.800.000,00; dan

      f) *Hotmix* Ulakan Tapaikis sebesar Rp484.612.793,00;

   3) Reklasifikasi dari Utang Jangka Pendek sebesar Rp13.978.580,00 merupakan kekurangan pembayaran pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pengurangan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi diuraikan sebagai berikut.

a. Reklasifikasi dari Aset Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.568.008.024,00 terdiri dari:

   1) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.394.264.000,00 terdiri dari:

      a) Realisasi Belanja Modal perencanaan Jalan dan Irigasi yang pekerjaannya belum selesai per 31 Desember 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.244.265.000,00;

      b) Realisasi Belanja Modal Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp149.999.000,00;

   2) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp2.142.000,00 pada Dinas Perhubungan adalah penggantian uang jaminan langganan UJL PJU Mandiri Lubuk Tarok; dan

   3) Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek atas Aset Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp171.602.024,00 merupakan pembayaran utang Tahun 2024 atas pekerjaan Jembatan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Nilai Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 51 Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

No	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	880.598.050,00	865.748.050,00
2.	Sekretariat DPRD	138.827.450,00	138.827.450,00
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	134.441.200,00	134.441.200,00
4.	Inspektorat Kabupaten	80.257.000,00	80.257.000,00
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41.015.000,00	41.015.000,00
6.	Kecamatan Lubuak Aluang	40.874.310,00	40.874.310,00
7.	Kecamatan Sungai Garinggiang	6.988.000,00	6.988.000,00
8.	Kecamatan IV Koto Aua Malintang	6.933.000,00	6.933.000,00
9.	Kecamatan Ulakan Tapakih	6.971.500,00	6.971.500,00
10.	Kecamatan Sungai Limau	6.988.000,00	6.988.000,00
11.	Kecamatan V Koto	7.000.000,00	7.000.000,00
12.	Kecamatan VII Koto	6.890.500,00	6.890.500,00
13.	Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang	13.730.500,00	13.730.500,00
14.	Kecamatan Nan Sabaris	6.988.000,00	6.988.000,00
15.	Kecamatan Batang Anai	6.992.000,00	6.992.000,00
16.	Kecamatan V Koto Timur	10.471.500,00	10.471.500,00
17.	Kecamatan VII Koto Padang Sago	9.842.000,00	9.842.000,00
18.	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	6.930.000,00	6.930.000,00
19.	Kecamatan VII Koto Patamuan	7.000.000,00	7.000.000,00

No	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
20.	Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	7.000.000,00	7.000.000,00
21.	Kecamatan Batang Gasan	6.988.000,00	6.988.000,00
22.	Kecamatan Anam Lingkuang	6.890.500,00	6.890.500,00
23.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.409.469.183,00	1.024.516.660,00
24.	Dinas Kesehatan	1.346.590.811,00	617.160.789,00
25.	Rumah Sakit Umum Daerah	4.725.941.906,00	3.544.362.626,00
26.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.667.800.678.366,81	2.638.927.092.998,81
27.	Dinas Perhubungan	7.609.931.514,00	7.453.498.326,00
28.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	133.946.000,00	133.946.000,00
29.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	118.061.808,00	118.061.808,00
30.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.000.000,00	25.000.000,00
31.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	139.975.000,00	139.975.000,00
32.	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	55.106.900,00	55.106.900,00
33.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	1.744.474.500,00	1.744.474.500,00
34.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	25.000.000,00	25.000.000,00
35.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	177.447.000,00	177.447.000,00
36.	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	8.550.000,00	8.550.000,00
37.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.740.000,00	17.567.897.954,00
38.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.265.000,00	10.265.000,00
39.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.587.840,00	29.587.840,00
40.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	38.000.000,00	52.850.000,00
41.	Dinas Perikanan	8.658.493.024,24	8.655.493.024,24
Jumlah		**2.695.525.875.363.05**	**2.681.736.052.936,05**

Rincian lengkap Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

5. Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
103.030.887.524,35	**96.245.793.604,35**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp103.030.887.524,35 merupakan nilai buku perpustakaan, barang bercorak seni/budaya, tanaman, dan lainnya yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam empat jenis Aset Tetap sebelumnya. Aset Tetap Lainnya terdiri atas:

Saldo Awal	Rp	**96.245.793.604,35**
▪ Belanja Modal 2025 (+)	Rp	84.206.800,00
▪ Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya (+)	Rp	6.735.257.120,00

▪ Reklase ke Peralatan dan Mesin (-)	Rp	(34.370.000,00)
Saldo Akhir	Rp	**103.030.887.524,35**

Penambahan Aset Tetap Lainnya diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp84.206.800,00 adalah berdasarkan LRA Tahun 2025; dan

b. Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp6.735.257.120,00 yang direalisasikan dalam Belanja Modal BOSP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp34.370.000,00 terdiri dari:

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp15.500.000,00 berupa pembelian 2 (dua) unit *infocus*;

b. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM sebesar Rp18.870.000,00 berupa pembelian 1 unit infocus.

Nilai Aset Tetap Lainnya per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 52 Nilai Aset Tetap Lainnya per SKPD

No.	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	139.135.100,00	109.298.300,00
2.	Sekretariat DPRD	239.960.000,00	239.960.000,00
3.	Kecamatan Batang Gasan	7.000.000,00	7.000.000,00
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.572.920.737,79	92.837.663.617,79
5.	Dinas Kesehatan	13.869.505,00	13.869.505,00
6.	Rumah Sakit Umum Daerah	50.454.300,00	50.454.300,00
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.550.000,00	49.550.000,00
8.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	49.269.000,00	49.269.000,00
9.	Dinas Perhubungan	193.861.200,00	193.861.200,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	678.469.998,00	678.469.998,00
11.	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	747.811.761,56	747.811.761,56
12.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	49.275.000,00	49.275.000,00
13.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	218.522.500,00	218.522.500,00
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	855.178.839,00	855.178.839,00
15.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.222.000,00	20.222.000,00
16.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.150.000,00	11.150.000,00
17.	Dinas Perikanan	134.237.583,00	114.237.583,00
Jumlah		**103.030.887.524,35**	**96.245.793.604,35**

Rincian lebih lengkap Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 15.**

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
65.765.454.119,00	**65.379.807.868,00**

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp65.765.454.119,00 terdiri atas:

Saldo Awal	Rp	**65.379.807.868,00**
Reklasifikasi dari Belanja Gedung Bangunan (+)	Rp	363.114.737,00
Reklasifikasi dari Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi (+)	Rp	1.394.264.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (+)	Rp	481.275.243,00
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan (-)	Rp	(1.191.087.350,00)
Penghapusan (-)	Rp	(661.920.379,00)
Saldo Akhir	**Rp**	**65.765.454.119,00**

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari:

a. Reklasifikasi dari Belanja Gedung Bangunan sebesar Rp363.114.737,00 merupakan:
   1) Pekerjaan Perencanaan Pengaman Tebing SDN 05 Batang Anai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp23.854.000,00;
   2) Pekerjaan Pembangunan Labor Puskesmas Sungai Geringgging pada Dinas Kesehatan senilai Rp189.510.737,00;
   3) Lanjutan Pembangunan Kantor DPRD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp149.750.000,00;

b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.394.264.000,00 merupakan:
   1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.244.265.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
      (a) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan yang fisiknya belum dilakukan pada Tahun 2025 sebesar Rp348.596.000,00;
      (b) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan yang kegiatan fisiknya belum dilakukan Tahun 2025 senilai Rp498.302.000,00;
      (c) Pekerjaan Perencanaan untuk Irigasi yang belum dilakukan tahun 2025 senilai Rp397.367.000,00;
   2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp149.999.000,00 merupakan pekerjaan pengawasan pembangunan 3 (tiga) unit jembatan.

c. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa merupakan pekerjaan Perencanaan pembangunan RSUD Tipe D pada Dinas Kesehatan senilai Rp481.275.243,00.

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.853.007.729,00 terdiri atas:

a. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pembangunan SDN 02 Batang Anai sebesar Rp1.191.087.350,00;

b. Penghapusan senilai Rp661.920.379,00 adalah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan Uang Muka pembelian peralatan dan Mesin.

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 53 Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

No.	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.854.000,00	1.191.087.350,00
2.	Dinas Kesehatan	729.985.980,00	59.200.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	122.040.940,00	122.040.940,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.426.097.821,00	63.032.082.821,00
5.	Dinas Perhubungan	59.066.925,00	59.066.925,00
6.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	0,00	661.920.379,00
7.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	43.851.200,00	43.851.200,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	360.557.253,00	210.558.253,00
Jumlah		**65.765.454.119,00**	**65.379.807.868,00**

Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 16.**

7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
(3.683.587.551.820,55)	**(3.526.163.650.186,10)**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp(3.683.587.551.820,55) terdiri atas:

Saldo Awal	**Rp**	**(3.526.163.650.186,10)**
• Koreksi Tambah (+)	Rp	(4.569.097.484,00)
• Koreksi Kurang (-)	Rp	784.355.933,15
• Penyusutan 2025 (+)	Rp	(153.639.160.083,60)
Saldo Akhir	**Rp**	**(3.683.587.551.820,55)**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 54 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	439.090.546.711,43
2.	Gedung dan Bangunan	649.478.085.086,07
3.	Jalan Jaringan dan Irigasi	2.595.018.920.023,05
Jumlah		**3.683.587.551.820,55**

Nilai koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut.

1) Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan sebesar Rp4.569.097.484,00 merupakan koreksi kurang catat akumulasi penyusutan sebagai akibat permasalahan aplikasi, penggabungan pencatatan, mutasi BMD antar SKPD, dan perubahan kondisi dari Aset Lain-Lain ke Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut.

   a) Belum terhitungnya penyusutan tahun sebelumnya karena permasalahan aplikasi sebesar Rp405.803.348,00 dengan rincian sebagai berikut.

      (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp40.044.848,00;

      (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp318.004.866,00;

      (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp736.300,00;

      (4) Dinas Perhubungan sebesar Rp43.992.334,00;

      (5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp3.025.000,00;

   b) Perubahan kondisi Barang Milik Daerah dari Aset Lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp4.163.294.136,00 dengan rincian sebagai berikut.

      (1) Kecamatan Patamuan sebesar Rp8.500.000,00;

      (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.723.225.933,00;

      (3) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.021.974.747,00;

      (4) Rumah Sakit Umum Daerah Rp283.689.456.00;

      (5) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sebesar Rp118.195.000,00;

      (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp7.709.000,00;

2) Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan sebesar Rp784.355.933,15 terdiri dari:

   a) Koreksi Lebih Catat sebesar Rp80.039.154,00 merupakan kelebihan penghitungan Akumulasi Penyusutan sebagai akibat penggabungan pencatatan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut.

      1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 41.273.028,00

      2) Dinas Kesehatan Rp 38.766.126,00

   b) Penghapusan sebesar Rp445.213.466,00 merupakan perhitungan akumulasi penyusutan sebagai akibat penghapusan Aset Tetap Peralatan

Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan Jaringan Irigasi masing-masing:

1)	Dinas Perhubungan	Rp	310.913.466,00
2)	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Rp	133.000.000,00
3)	Kecamatan Patamuan	Rp	1.300.000,00

c) Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp259.103.313,15 merupakan perhitungan akumulasi penyusutan sebagai akibat reklasifikasi ke Aset Lain-lain terdiri dari:

1)	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Rp	16.371.667,00
2)	Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang	Rp	12.225.400,00
3)	Dinas Kesehatan	Rp	175.842.246,15
4)	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	Rp	30.006.000,00
5)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Rp	24.658.000,00

Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp(153.639.160.083,60) terdiri dari:

a.	Peralatan dan Mesin	Rp	(33.204.310.325,08)
b.	Gedung dan Bangunan	Rp	(60.423.986.039,52)
c.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	(60.010.863.719,00)

Rincian lengkap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 17.**

D. ASET LAINNYA

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.306.225.496,80	**1.747.207.544,20**

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap, dan investasi jangka panjang. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.306.225.496,80 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 55 Aset Lainnya

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Tagihan Jangka Panjang	141.596.387,00
2.	Aset Tak Berwujud	6.755.796.464,00
3.	Aset Lain-lain	14.670.847.808,44
4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6.088.832.761,20)
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(14.173.182.401,44)
Jumlah		**1.306.225.496,80**

Penjelasan masing-masing akun Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

1. **Tagihan Jangka Panjang**

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
141.596.387,00	**141.596.387,00**

Jumlah Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp141.596.387,00 terdiri atas:

Tabel 5. 56 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No.	Nama	Nilai (Rp)
1.	Ali Arifin	3.700.000,00
2.	Chandra Mustika	2.110.000,00
3.	Rasul Hamidi	5.125.000,00
4.	Baharuddin	16.136.105,00
5.	Wirda Satria	22.917.900,00
6.	Sudirman	44.261.040,00
7.	Busri Noneh	3.432.500,00
8.	Ramlan	5.915.292,00
9.	Suripno Azhari	5.300.000,00
10.	Surya Warsilah	24.000.000,00
11.	Normansyah	8.698.550,00
Jumlah		**141.596.387,00**

2. **Aset Tak Berwujud**

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
6.755.796.464,00	**6.702.682.964,00**

Nilai Rp6.755.795.464,00 merupakan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025, yang terdiri dari:

Saldo Awal	Rp	**6.702.682.964,00**
Belanja Modal (+)	Rp	53.113.500,00
Saldo Akhir	Rp	**6.755.796.464,00**

Aset Tak Berwujud merupakan *software* dan kajian yang berada pada SKPD dan masih digunakan. Penambahan Aset Tak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp53.113.500,00 berupa *Software* SIMPKB *Hybrid full cycle* pada Dinas Perhubungan.

Rincian lebih lengkap Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 18.**

3. **Aset Lain-lain**

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
14.670.847.808,44	**18.565.560.298,29**

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.670.847.808,44 merupakan aset kondisi rusak berat yang belum diterbitkan SK penghapusannya, aset dalam penelusuran berkondisi rusak berat, dan Investasi Non Permanen yang krediturnya tidak diketahui.

Rincian saldo Aset Lain-lain adalah:

Saldo Awal	**Rp**	**18.565.560.298,29**
Reklasifikasi dari aset tetap (+)	Rp	268.581.646,15
Reklasifikasi ke Aset Tetap (-)	Rp	(4.163.294.136,00)
Saldo Akhir	**Rp**	**14.670.847.808,44**

Penambahan Aset Lain-lain diuraikan sebagai berikut.

Reklasifikasi dari Aset tetap ke Aset Lain-lain sebesar Rp268.581.646,15 dengan uraian sebagai berikut.

a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung Bangunan ke Gedung Rusak Berat sebesar Rp30.006.000,00, merupakan gedung yang tercatat pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;

b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp238.575.646,15 merupakan peralatan mesin yang sudah rusak berat dan tidak bisa dimanfaatkan.

Pengurangan Aset Lain-lain merupakan perubahan kondisi Peralatan dan Mesin Rusak Berat dan Gedung dan Bangunan menjadi Aset Tetap sebesar Rp4.163.294.136,00, dengan rincian :

1. Peralatan dan Mesin senilai Rp418.093.456,00 dengan uraian sebagai berikut.

a. Kecamatan VII Koto Patamuan	Rp	8.500.000,00
b. Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	283.689.456,00
c. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Rp	118.195.000,00
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	7.709.000,00

2. Gedung dan bangunan senilai Rp3.745.200.680,00 dengan uraian sebagai berikut.

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	1.723.225.933,00
b. Dinas Kesehatan	Rp	2.021.974.747,00

Aset Lain-lain dapat dirinci sebagai berikut.

a. Aset Rusak Berat sebesar Rp14.282.694.401,44 (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 20**);

b. Aset Lain-lain Dalam Penelusuran sebesar Rp25.629.000,00 (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 21**);

c. Kas dalam Penelusuran pada kegiatan reklamasi sebesar Rp41.824.407,00;

d. Dana Bergulir yang masih dalam penelusuran sebesar Rp170.700.000,00; dan

e. Investasi Non Permanen ke Perusda Saiyo yang sudah dibubarkan sebesar Rp150.000.000,00.

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
(6.088.832.761,20)	**(5.594.737.213,80)**

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(6.088.832.761,20) terdiri dari:

Saldo Awal	Rp	**(5.594.737.213,80)**
Amortisasi 2025 (+)	Rp	(494.095.547,40)
Saldo Akhir	Rp	**(6.088.832.761,20)**

Amortisasi Aset Tak Berwujud untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp(494.095.547,40)

Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 21.**

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
(14,173.182.401,44)	**(18.067.894.891,29)**

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp(14.173.182.401,44) terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	**(18.067.894.891,29)**
Reklasifikasi dari Aset Tetap (+)	Rp	(259.103.313,15)
Reklasifikasi ke Aset Tetap (-)	Rp	4.163.294.136,00
Penyusutan Tahun 2025 (+)	Rp	(9.478.333,00)
Saldo Akhir	Rp	**(14.173.182.401,44)**

Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain diuraikan sebagai berikut.

a. Penambahan akumulasi penyusutan Aset Lain-lain berasal dari:

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan Mesin yang berubah kondisi menjadi rusak berat sebesar Rp259.103.313,15, pada:

a)	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Rp	16.371.667,00
b)	Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang	Rp	12.225.400,00
c)	Dinas Kesehatan	Rp	175.842.246,15

d) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM — Rp 30.006.000,00

e) Dinas Penanaman Modol, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian — Rp 24.658.000,00

2) Pengurangan akumulasi penyusutan Aset Lain-lain berasal dari Reklasifikasi Penyususstan Aset Lain-Lain ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan sebesar Rp4.163.294.136,00, pada:

Kecamatan Patamuan	Rp	8.500.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	1.723.225.933,00
Dinas Kesehatan	Rp	2.021.974.747,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	283.689.456,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Rp	118.195.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	7.709.000,00

b. Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2025 sebesar Rp9.478.333,00.

Rincian Akumulasi Aset Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 22.**

E. KEWAJIBAN

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
9.370.888.433,70	**6.456.320.042,40**

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp9.370.888.433,70 dan sebesar Rp6.456.320.042,40. Saldo kewajiban Tahun 2025 sebesar Rp9.370.888.433,70 terdiri atas.

Tabel 5. 57 Kewajiban

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	9.329.064.026,70
2.	Kewajiban Jangka Panjang	41.824.407,00
Jumlah		**9.370.888.433,70**

1. Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
9.329.064.026,70	**6.414.495.635,40**

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.329.064.026,70 yang terdiri dari:

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
20.000,00	**20.000,00**

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp20.000,00 dan sebesar Rp20.000,00. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2025 merupakan utang Taperum Tahun 2021 sebesar Rp20.000,00 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2025.

b. Pendapatan Diterima Dimuka

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.301.000.000,00	**1.394.839.416,00**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.301.000.000,00 terdiri dari:

1) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa tanah untuk Bangunan Ruang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Nagari di RSUD Parik Malintang sebesar Rp9.375.000,00;
2) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa lahan untuk pemasangan dan penempatan Menara Telekomunikasi Bersama (Multi Operator) dan Fasilitas Penunjangnya antara PT Dayamitra Telekomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Rp59.500.000,00;
3) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa tanah untuk Bangunan Ruang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Kantor kas Bank Nagari di Sekretariat Daerah (IKK) Parik Malintang sebesar Rp22.000.000,00;
4) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Lahan Parkir beserta seluruh fasilitas pendukung lainnya PT Andalas Anai Permai Internasional sebesar Rp1.187.500.000,00;
5) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Fasilitas Gedung Kantor UPTD Puskesmas Kampung Dalam untuk Kantor Kas Bank Nagari dan Ruangan ATM sebesar Rp21.875.000,00; dan
6) Pendapatan atas Retribusi Pelayanan Sampah diterima Dimuka sebesar Rp750.000,00;

c. Utang Belanja

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
8.028.044.026,70	**5.019.636.219,40**

Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.028.044.026,70 terdiri dari:

Tabel 5. 58 Utang Belanja

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Utang Belanja Pegawai	281.185.296,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	3.528.979.224,00
3.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.630.880.186,00
4.	Utang Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	13.978.580,00
5.	Utang Belanja Bagi Hasil	2.573.020.740,70
Jumlah		**8.028.044.026,70**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

1) Utang Belanja Pegawai

Utang belanja pegawai sebelumnya tercatat sebesar Rp281.185.296,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 59 Utang Belanja Pegawai

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**37.372.455,00**
	Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2023 dengan rincian:	
	a. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada KSPW 2x11 Enam Lingkung Tahun 2023 sebesar Rp11.545.046,00	
	b. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada KSPW 2x11 Kayu Tanam Tahun 2023 sebesar Rp7.172.549,00	
	c. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada KSPW Lubuk Alung sebesar Rp4.382.047,00	
	d. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada SMPN 3 Sungai Geringging sebesar Rp12.925.813,00	
	e. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada SMPN 1 Enam Lingkung sebesar Rp1.347.000,00	
2.	**Dinas Kesehatan**	**39.009.082,00**
	a. Utang Belanja Pegawai atas Beban Tunjangan Fungsional Umum Pegawai PPPK per 31 Desember 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp39.009.082,00	
3.	**RSUD**	**123.982.050,00**
	a. Utang Belanja Pegawai atas Beban Tunjangan Gaji Pegawai PPPK Per 31 Desember 2025 sebesar Rp123.982.050,00	
4.	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**45.698.904,00**
	a. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2025 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.146.904,00	
	b. Utang Belanja Pegawai atas Beban Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Oktober, November dan Desember 2025 sebesar Rp44.552.000,00	
5.	**Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	**15.578.905,00**
	Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji Pegawai per 31 Desember 2024 pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp15.578.905,00	
6.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**19.543.900,00**
	Utang Belanja Pegawai atas Beban Kekurangan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Bulan Desember pada BPBD sebesar Rp19.543.900,00	
Jumlah		**281.185.296,00**

2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.528.979.224,00 dengan rincian:

Tabel 5. 60 Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	**Dinas Kesehatan**	**199.397.736,00**
	Utang Belanja Barang dan Jasa Barang Diserahkan ke Masyarakat atas sesuai hasil reviu Inspektorat Nomor LHR/10/INSP/2026 atas Pembangunan Posyandu Kampung Ladang sebesar Rp199.397.736,00.	
2.	**RSUD**	**3.051.399.848,00**
	Utang Belanja Barang dan Jasa atas Belanja Barang dan Jasa BLUD (Obat-obatan dan BMHP) sesuai hasil reviu Inspektorat Nomor LHR/7/INSP/2026 sebesar Rp3.051.399.848,00.	
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**270.078.140,00**
	a. Utang Belanja Barang dan Jasa, Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat pada Tahun 2023 atas kegiatan Kegiatan Bidang Bina Marga Kegiatan Jalan pada Peningkatan Jalan Korong Koto Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai sebesar Rp9.485.150,00.	
	b. Utang Belanja Barang dan Jasa, Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat atas Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Cipta Karya atas Rabat Beton Jalan Korong Sialangan Nagari Gunung Padang Alai sebesar Rp39.960.000,00 sesuai hasil reviu Inspektorat Nomor LHR/14/INSP/II/2026.	
	c. Utang Belanja Barang dan Jasa, Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat atas Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Cipta Karya atas Rabat Beton Jalan Surau Durian Siriah Korong Kampung Pilih Nagari Kudu Ganting sebesar Rp13.975.990,00 sesuai hasil reviu Inspektorat Nomor LHR/14/INSP/II/2026.	
	d. Utang Belanja Barang dan Jasa, Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat atas Peningkatan Jalan Lurah Ampalu Nagari Ampalu VII Koto Sungai Sariak sebesar Rp199.678.000,00 sesuai hasil reviu Inspektorat Nomor LHR/14/INSP/II/2026.	
	e. Utang Belanja Barang dan Jasa, Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat atas Pengawasan Pembangunan Jembatan Paket I sebesar Rp6.979.000,00 sesuai hasil reviu Inspektorat Nomor LHR/32/Insp_SA/V/2026.	
4	**Dinas Perikanan**	**6.894.500,00**
	Belanja Barang dan Jasa atas Tagihan Air Agustus, Septemberm dan November pada Dinas Perikanan sebesar Rp6.894.500,00.	
5	**Kecamatan Batang Anai**	**1.209.000,00**
	Belanja Tagihan Air Bulan Mei s.d. Desember 2025 sebesar Rp1.209.000,00.	
Jumlah		**3.528.979.224,00**

3) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.630.880.186,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan Penyediaan Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.626.388.612,00 sesuai Laporan Hasil Reviu Inspektorat Nomor LHR/10/Insp/2026; dan

b) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 06 2 x 11 Kayu Tanam sebesar Rp4.491.574,00 sesuai Laporan Hasil Reviu Inspektorat Nomor LHR/33/Insp/2026.

4) Utang Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi

Utang Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp13.978.580,00 merupakan Pembangunan Pengamanan Badan Jalan Padang Baru Kalawi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp13.978.580,00 sesuai Laporan Hasil Reviu Inspektorat Nomor LHR/14/INSP/II/2026.

5) Utang Belanja Bagi Hasil

Utang Belanja Transfer per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.573.020.740,70 merupakan Utang Transfer Dana Bagi Hasil yang terdiri dari:

a) Utang Belanja Transfer Pajak dan Retribusi ke Pemerintah Desa/Nagari sebagaimana uraian pada tabel berikut.

Tabel 5. 61 Utang Belanja Transfer Pajak dan Retribusi

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Transfer DBH Pajak Reklame ke Nagari	12.782.420,00
2.	Transfer DBH Pajak Air Tanah ke Nagari	25.115.486,80
3.	Transfer DBH Pajak MBLB ke Nagari	96.108.100,20
4.	Transfer DBH PBB ke Nagari	1.063.544.118,50
5.	Transfer DBH BPHTB ke Nagari	139.932.832,70
6.	Transfer DBH PBJT - Makan dan Minum ke Nagari	89.924.970,70
7.	Transfer DBH PBJT - Tenaga Listrik ke Nagari	385.956.336,20
8.	Transfer DBH PBJT - Hotel ke Nagari	13.670.263,90
9.	Transfer DBH PBJT - Parkir ke Nagari	22.193.398,20
10.	Transfer DBH PBJT - Hiburan ke Nagari	3.043.600,00
11.	Transfer DBH Opsen PKB ke Nagari	313.198.480,00
12.	Transfer DBH Opsen BBNKB ke Nagari	169.968.480,00
13.	Transfer DBH Retribusi Jasa Umum ke Nagari	14.122.824,00
14.	Transfer DBH Retribusi Jasa Usaha ke Nagari	4.671.500,00
15.	Transfer DBH Retribusi Perizinan Tertentu ke Nagari	16.336.341,50
Jumlah		**2.370.569.152,70**

b) Utang Belanja Transfer Pemerintah Pusat

Utang Belanja Transfer Pemerintah Pusat berupa lebih bayar dari pemerintah pusat atas Transfer DBH Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2019 sebesar Rp202.451.588,00. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat atas kelebihan bayar tersebut.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
41.824.407,00	**41.824.407,00**

Utang Jangka Panjang Tahun 2025 sebesar Rp41.824.407,00 merupakan Utang Jangka Panjang Lainnya berupa Utang Jaminan Reklamasi yang tercatat sejak Tahun 2010, namun berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan sampai ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, belum diketahui informasi perusahaan yang menyediakan jaminan reklamasi tersebut, sehingga dananya masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah.

F. EKUITAS

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.340.446.803.712,13	**1.342.128.864.497,33**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total Aset dan total Kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 di Neraca sebesar Rp1.340.446.803.712,13 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang sama tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya untuk TA 2025.

Atas penyajian LO terdapat perbedaan dengan LRA yang dijelaskan pada **Lampiran 23**

A. PENDAPATAN

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.167.715.239.035,52	**1.337.427.770.061,43**

Pendapatan-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.167.715.239.035,52 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.337.427.770.061,43 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 62 Realisasi Pendapatan-LO

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LO	180.596.215.663,42	154.035.386.421,43	26.560.829.241,99
Pendapatan Transfer-LO	954.192.274.044,00	1.182.840.786.723,00	(228.648.512.679,00)
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	32.926.749.328,10	551.596.917,00	32.375.152.411,10
Jumlah	**1.167.715.239.035,52**	**1.337.427.770.061,43**	**(169.712.531.025,91)**

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
180.596.215.663,42	**154.035.386.421,43**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2025 sebesar Rp180.596.215.663,42 dan Tahun 2024 sebesar Rp154.035.386.421,43 masing-masing dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 63 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	90.130.890.160,00	70.480.232.490,50	19.650.657.669,50
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	75.917.403.383,00	66.206.500.456,00	9.710.902.927,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.931.467.131,00	8.728.317.039,00	203.150.092,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	5.616.454.989,42	8.620.336.435,93	(3.003.881.446,51)
Jumlah	**180.596.215.663,42**	**154.035.386.421,43**	**26.560.829.241,99**

a. Pajak Daerah - LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
90.130.890.160,00	**70.480.232.490,50**

Rincian Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp90.130.890.160,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp70.480.232.490,50. Nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp90.130.890.160,00. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 64 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pajak Hotel-LO	479.381.671,00	439.635.143,00	39.746.528,00
Pajak Restoran–LO	3.765.158.542,00	3.882.047.783,00	(116.889.241,00)
Pajak Hiburan-LO	248.192.900,00	107.192.500,00	141.000.400,00
Pajak Reklame-LO	855.678.350,00	1.008.794.750,00	(153.116.400,00)
Pajak Penerangan Jalan-LO	21.831.244.565,00	22.152.538.103,00	(321.293.538,00)
Pajak Parkir-LO	1.088.703.245,00	1.015.333.318,00	73.369.927,00
Pajak Air Tanah-LO	1.184.177.853,00	1.394.081.440,00	(209.903.587,00)
Pajak Sarang Burung Walet-LO	500.000,00	0,00	500.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	5.654.495.681,00	6.103.732.424,50	(449.236.743,50)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO	21.387.600.951,00	25.608.097.678,00	(4.220.496.727,00)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	7.746.251.102,00	8.768.779.351,00	(1.022.528.249,00)
Opsen PKB-LO	17.247.533.700,00	0,00	17.247.533.700,00
Opsen BBNKB-LO	8.641.971.600,00	0,00	8.641.971.600,00
JUMLAH	**90.130.890.160,00**	**70.480.232.490,50**	**19.650.657.669,50**

Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp90.130.890.160,00 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2025	Rp	84.061.584.978,00
Piutang Pajak Tahun 2024 (-)	Rp	(66.577.672.791,00)
Piutang Pajak Tahun 2025 (+)	Rp	72.646.138.557,00
Pendapatan-LO atas Pendapatan Diterima Dimuka (+)	Rp	839.416,00
Jumlah	**Rp**	**90.130.890.160,00**

b. Retribusi Daerah-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
75.917.403.383,00	**66.206.500.456,00**

Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp75.917.403.383,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp66.206.500.456,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 65 Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	20.234.598.670,00	19.464.648.207,00	769.950.463,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	53.970.924.940,00	44.775.979.300,00	9.194.945.640,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	707.933.792,00	632.166.000,00	75.767.792,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	26.280.000,00	0,00	26.280.000,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	81.300.000,00	66.800.000,00	14.500.000,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	0,00	72.950.000,00	(72.950.000,00)
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	6.176.000,00	20.876.000,00	(14.700.000,00)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	26.485.000,00	30.040.000,00	(3.555.000,00)
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan-LO	0,00	32.045.000,00	(32.045.000,00)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	863.704.981,00	1.110.995.949,00	(247.290.968,00)
Jumlah	**75.917.403.383,00**	**66.206.500.456,00**	**9.710.902.927,00**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp75.917.403.383,00 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2025	Rp	75.436.647.214,00
Penerimaaan Piutang Retribusi Tahun 2024 (-)	Rp	(78.437.133,00)
Piutang Retribusi Tahun 2025 (+)	Rp	559.193.302,00
Jumlah	**Rp**	**75.917.403.383,00**

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
8.931.467.131,00	**8.728.317.039,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.931.467.131,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp8.728.317.039,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba PT Bank Nagari.

d. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.616.454.989,42	**8.620.336.435,93**

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 sebesar Rp5.616.454.989,42 dan Tahun 2024 sebesar Rp8.620.336.435,93 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 66 Penerimaan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	346.117.100,00	(346.117.100,00)
Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	0,00	4.780.000,00	(4.780.000,00)
Hasil Sewa BMD-LO	152.500.000,00	110.700.000,00	41.800.000,00
Jasa Giro-LO	1.786.206.698,00	2.414.843.597,57	(628.636.899,57)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.894.756.385,90	2.191.471.199,97	(296.714.814,07)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	428.384.273,52	1.340.513.287,41	(912.129.013,89)
Pendapatan Denda PBBP2-LO	100.526.064,00	52.438.120,00	48.087.944,00
Pendapatan Denda Opsen PKB-LO	201.879.800,00	0,00	201.879.800,00
Pendapatan Denda Opsen BBNKB-LO	251.600,00	0,00	251.600,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	229.339.000,00	1.750.372.234,98	(1.521.033.234,98)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	822.611.168,00	409.100.896,00	413.510.272,00
Jumlah	**5.616.454.989,42**	**8.620.336.435,93**	**(3.003.881.446,51)**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.616.454.989,42 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah-LRA Tahun 2025	Rp	5.531.454.989,42
Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka dan Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka (+)	Rp	85.000.000,00
Jumlah	**Rp**	**5.616.454.989,42**

2. PENDAPATAN TRANSFER-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
954.192.274.044,00	**1.182.840.786.723,00**

Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp954.192.274.044,00 dan Rp1.182.840.786.723,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 67 Rincian Pendapatan Transfer–LO

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	900.686.552.950,00	1.102.132.598.388,00	(201.446.045.438,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	53.505.721.094,00	80.708.188.335,00	(27.202.467.241,00)
Jumlah	**954.192.274.044,00**	**1.182.840.786.723,00**	**(228.648.512.679,00)**

Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp954.192.274.044,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer-LRA 2025	Rp	1.215.900.215.730,00
Piutang Dana Transfer Tahun 2025 (+)	Rp	18.297.317.867,00
Penerimaan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 (-)	Rp	(29.919.077.575,00)
Dana Desa Tahun 2025 (-)	Rp	(97.921.018.878,00)
Tunjangan Profesi Guru Tahun 2025 (-)	Rp	(151.521.663.100,00)
Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2025 (-)	Rp	(643.500.000,00)
Jumlah	**Rp**	**954.192.274.044,00**

Jika dibandingkan Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO maka terdapat perbedaan sebesar Rp261.707.941.686,00 dengan rincian sebagai berikut.

Penerimaan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024	Rp	29.919.077.575,00
Dana Desa Tahun 2024 (+)	Rp	97.921.018.878,00
Tunjangan Profesi Guru Tahun 2025 (+)	Rp	151.521.663.100,00
Tamsil Guru Tahun 2025 (+)	Rp	643.500.000,00

Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 (-)	Rp	(18.297.317.867,00)
Jumlah	**Rp**	**261.707.941.686,00**

Selisih Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp261.707.941.686,00 merupakan pendapatan yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp97.921.018.878,00, Tunjangan Profesi Guru Tahun 2025 Rp151.521.663.100,00, Tamsil Guru Tahun 2025 sebesar Rp643.500.000,00 tidak dicatat sebagai Pendapatan-LO karena tidak masuk ke Rekening Kas Umumm Daerah, namun tetap dicatat sebagai Pendapatan-LRA. Selanjutnya terdapat penerimaan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 sebesar Rp29.919.077.575,00 serta adanya Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 sebesar Rp18.297.317.867,00.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
900.686.552.950,00	**1.102.132.598.388,00**

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar Rp900.686.552.950,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.102.132.598.388,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 68 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Perimbangan-LO	0,00	1.074.305.369.388,00	(1.074.305.369.388,00)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	13.124.962.202,00	0,00	13.124.962.202,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	761.270.062.956,00	0,00	761.270.062.956,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	119.177.900.792,00	0,00	119.177.900.792,00
Insentif Fiskal-LO	7.113.627.000,00	27.827.229.000,00	(20.713.602.000,00)
Jumlah	**900.686.552.950,00**	**1.102.132.598.388,00**	**(201.446.045.438,00)**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp900.686.552.950,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer-LRA 2025	Rp	1.150.772.734.928,00
Dana Desa Tahun 2025 (-)	Rp	**(97.921.018.878,00)**
Tunjangan Profesi Guru Tahun 2025 (-)	Rp	(151.521.663.100,00)
Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2025 (-)	Rp	(643.500.000,00)
Jumlah	**Rp**	**900.686.552.950**

Jika dibandingkan Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO maka terdapat perbedaan sebesar Rp250.086.181.978,00 dengan rincian sebagai berikut.

Dana Desa Tahun 2024	Rp	97.921.018.878,00

Tunjangan Profesi Guru Tahun 2025 (+)	Rp	151.521.663.100,00
Tamsil Guru Tahun 2025 (+)	Rp	643.500.000,00
Jumlah	**Rp**	**250.086.181.978,00**

Selisih Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp250.086.181.978,00 merupakan pendapatan yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp97.921.018.878,00, Tunjangan Profesi Guru Tahun 2025 sebesar Rp151.521.663.100,00, dan Tamsil Guru Tahun 2025 sebesar Rp643.500.000,00 yang tidak dicatat sebagai Pendapatan-LO karena tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

1) Dana Perimbangan-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0,00	**1.074.305.369.388,00**

Rincian Pendapatan Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.074.305.369.388,00

2) Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
13.124.962.202,00	**16.206.591.009,00**

Rincian Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2025 sebesar Rp13.124.962.202,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp16.206.591.009,00 yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan Tahun 2024. Dana Bagi Hasil-LO Tahun 2024 tidak tersaji pada halaman depan Laporan Operasional dikarenakan pada Tahun 2024 Dana Bagi Hasil-LO Tahun 2024 tergabung dalam Dana Perimbangan-LO. Rincian Dana Bagi Hasil-LO dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 69 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
DBH PBB-LO	1.515.251.202,00	3.713.200.009,00	(2.197.948.807,00)
DBH PPh Pasal 21-LO	7.791.917.000,00	5.151.038.000,00	2.640.879.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	47.670.000,00	37.292.000,00	10.378.000,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	219.390.000,00	147.572.000,00	71.818.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	458.711.000,00	690.321.000,00	(231.610.000,00)
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	41.252.000,00	53.265.000,00	(12.013.000,00)
DBH SDA Perikanan-LO	1.060.775.000,00	1.425.506.000,00	(364.731.000,00)
DBH Sawit-LO	1.989.996.000,00	4.988.397.000,00	(2.998.401.000,00)
Jumlah	**13.124.962.202,00**	**16.206.591.009,00**	**(3.081.628.807,00)**

3) Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
761.270.062.956,00	**784.480.463.956,00**

Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp761.270.062.956,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp784.480.463.956,00 yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan Tahun 2024. Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2024 tidak tersaji pada halaman depan Laporan Operasional dikarenakan pada Tahun 2024 Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2024 tergabung dalam Dana Perimbangan-LO.

Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Transfer DAU-LO dengan Pendapatan Transfer DAU-LRA.

Tabel 5. 70 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	666.001.255.000,00	631.041.835.000,00	34.959.420.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	9.974.133.956,00	4.982.866.956,00	4.991.267.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	44.182.570.000,00	66.069.660.000,00	(21.887.090.000,00)
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	41.112.104.000,00	38.665.531.000,00	2.446.573.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	0,00	43.720.571.000,00	(43.720.571.000,00)
Jumlah	**761.270.062.956,00**	**784.480.463.956,00**	**(23.210.401.000,00)**

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
119.177.900.792,00	**273.618.314.423,00**

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Tahun 2025 sebesar Rp119.177.900.792,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp273.618.314.423,00 yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan Tahun 2024. Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2024 tidak tersaji pada halaman depan Laporan Operasional dikarenakan pada Tahun 2024 Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2024 tergabung dalam Dana Perimbangan-LO

Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Transfer DAK-LO dengan Pendapatan Transfer DAK-LRA.

Tabel 5. 71 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
DAK Fisik-LO	**21.812.067.075,00**	**53.623.510.594,00**	**(31.811.443.519,00)**
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	4.372.743.000,00	0,00	4.372.743.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD-LO	490.549.743,00	227.307.180,00	263.242.563,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD-LO	208.864.988,00	2.363.451.655,00	(2.154.586.667,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP-LO	292.013.502,00	2.410.416.420,00	(2.118.402.918,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	1.376.487.739,00	(1.376.487.739,00)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	7.002.900.000,00	(7.002.900.000,00)
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	0,00	1.997.222.572,00	(1.997.222.572,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	28.471.223.428,00	(28.471.223.428,00)
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	3.001.268.300,00	(3.001.268.300,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana-LO	3.109.971.300,00	973.914.000,00	2.136.057.300,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	13.337.924.542,00	5.799.319.300,00	7.538.605.242,00
DAK Non Fisik-LO	**97.365.833.717,00**	**219.994.803.829,00**	**(122.628.970.112,00)**
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	5.938.277.980,00	0,00	5.938.277.980,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOSP Reguler-LO	56.376.780.883,00	57.437.292.137,00	(1.060.511.254,00)
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOSP Kinerja-LO	1.887.000.000,00	1.925.000.000,00	(38.000.000,00)
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	4.296.042.178,00	4.209.897.000,00	86.145.178,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	45.000.000,00	90.000.000,00	(45.000.000,00)
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	1.046.810.000,00	0,00	1.046.810.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	12.258.198.112,00	9.082.148.704,00	3.176.049.408,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO	436.776.000,00	0,00	436.776.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	14.744.108.564,00	10.904.544.070,00	3.839.564.494,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO	291.840.000,00	602.373.990,00	(310.533.990,00)

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	0,00	123.205.562.000,00	(123.205.562.000,00)
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	3.979.500.000,00	(3.979.500.000,00)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	1.126.600.000,00	(1.126.600.000,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	0,00	4.852.673.600,00	(4.852.673.600,00)
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	529.902.300,00	(529.902.300,00)
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO	0,00	1.233.272.528,00	(1.233.272.528,00)
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	816.037.500,00	(816.037.500,00)
Jumlah	**119.177.900.792,00**	**273.618.314.423,00**	**(154.440.413.631,00)**

5) Insentif Fiskal-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
7.113.627.000,00	**27.827.229.000,00**

Pendapatan Transfer Insentif Fiskal-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.113.627.000,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp27.827.229.000,00. Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Transfer Insentif Fiskal-LO dengan Pendapatan Transfer Insentif Fiskal-LRA.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
53.505.721.094,00	**80.708.188.335,00**

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp53.505.721.094,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp80.708.188.335,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 72 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil-LO	50.165.721.094,00	79.508.188.335,00	(29.342.467.241,00)
Bantuan Keuangan	3.340.000.000,00	1.200.000.000,00	2.140.000.000,00
Jumlah	**53.505.721.094,00**	**80.708.188.335,00**	**(27.202.467.241,00)**

Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sebesar Rp53.505.721.094,00 diperoleh dariperhitungan sebagai berikut.

Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA 2025	Rp	65.127.480.802,00
Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 (+)	Rp	18.297.317.867,00

Penerimaan Piutang Transfer Pusat Tahun 2024 (-)	Rp	(29.919.077.575,00)
Jumlah	**Rp**	**53.505.721.094,00**

Apabila dibandingkan antara Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sebesar Rp53.505.721.094,00 dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA sebesar Rp65.127.480.802,00, maka terdapat perbedaan sebesar Rp11.621.759.708,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara penerimaan piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 sebesar Rp29.919.077.575,00 dengan Piutang Dana Transfer Tahun 2025 sebesar Rp18.297.317.867,00.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
32.926.749.328,10	**551.596.917,00**

Rincian penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2025 sebesar Rp32.926.749.328,10 dan Tahun 2024 sebesar Rp551.596.917,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 73 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	16.453.595.328,10	294.071.917,00	16.159.523.411,10
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	8.295.614.000,00	0,00	8.295.614.000,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	532.540.000,00	26.525.000,00	506.015.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	3.645.000.000,00	231.000.000,00	3.414.000.000,00
Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana-LO	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00
Jumlah	**32.926.749.328,10**	**551.596.917,00**	**32.375.152.411,10**

Apabila Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp32.429.409.328,10 dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00, maka terdapat selisih sebesar Rp28.429.409.328,10 yang tidak dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA. Selisih tersebut merupakan Pendapatan Hibah berupa Barang dan Jasa yang direklasifikasi dari Aset Tetap.

Penjelasan atas rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO sebagai berikut.

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
16.453.595.328,10	**294.071.917,00**

Penerimaan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar Rp16.453.595.328,10 terdiri dari:

1) Hibah dari BNPB berupa Peralatan dan Mesin Pusdalop di Pakandangan sebesar Rp2.149.560.110,05;
2) Hibah dari BNPB berupa Gedung Pusdalop di Pakandangan sebesar Rp1.925.447.257,00;
3) Hibah Peralatan dan Mesin dari Kemendikdasmen sebesar Rp9.481.661.016,00 (Rp550.272.626,00 + Rp8.931.388.390,00);
4) Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Bantuan Bencana dari Pusat pada BPBD sebesar Rp1.877.664.318,00;
5) Persediaan Barang Logistik Bantuan Bencana dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp1.019.262.627,00; dan
6) Kurang catat atas Hibah Masuk dari BNPB sebesar Rp0,05.

b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
8.295.614.000,00	**0,00**

Penerimaan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2025 sebesar Rp8.295.614.000,00 merupakan hibah Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan.

c. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
532.540.000,00	**26.525.000,00**

Penerimaan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri Tahun 2025 sebesar Rp532.540.000,00 merupakan :

1) Hibah Tanah Puskesmas Sikucur dari masyarakat sebesar Rp5.200.000,00;
2) Hibah dari Komite Sekolah sebesar Rp30.000.000,00; dan
3) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat sebesar Rp497.340.000,00.

d. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3.645.000.000,00	**231.000.000,00**

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp3.645.000.000,00 merupakan Hibah dari Nagari Batang Anai untuk Kampung Merah Putih.

e. Dana Darurat-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4.000.000.000,00	**0,00**

Pendapatan Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana-LO Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat untuk penanggulangan bencana daerah.

B. BEBAN

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.204.578.488.745,25	**1.345.645.619.094,56**

Rincian Beban Tahun 2025 sebesar Rp1.204.578.488.745,25 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.345.645.619.094,56 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 74 Rincian Beban

Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Pegawai	630.723.325.131,00	742.758.910.169,00	(112.035.585.038,00)
Beban Barang dan Jasa	275.356.549.522,70	314.318.864.631,23	(38.962.315.108,53)
Beban Hibah	13.440.512.178,00	44.801.118.235,68	(31.360.606.057,68)
Beban Penyisihan Piutang	47.426.572.079,85	42.604.370.681,66	4.822.201.398,19
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	33.204.310.325,08	38.272.019.860,00	(5.067.709.534,92)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	60.423.986.039,52	52.245.308.098,99	8.178.677.940,53
Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	60.010.863.719,00	26.092.890.591,00	33.917.973.128,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	494.095.547,40	641.847.047,40	(147.751.500,00)
Beban Bagi Hasil	8.566.031.382,70	6.319.342.279,60	2.246.689.103,10
Beban Bantuan Keuangan	74.932.242.820,00	77.590.947.500,00	(2.658.704.680,00)
Jumlah	**1.204.578.488.745,25**	**1.345.645.619.094,56**	**(141.067.130.349,31)**

Beban Tahun 2025 dibandingkan dengan Beban Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp141.067.130.349,31 atau 10,48%.

Penjelasan atas Beban pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

1. Beban Pegawai

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
630.723.325.131,00	**742.758.910.169,00**

Beban pegawai merupakan beban atas kompensasi yang dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp630.723.325.131,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp742.758.910.169,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 75 Rincian Beban Pegawai

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Gaji Pokok ASN	354.052.824.174,00	355.259.133.018,00	(1.206.308.844,00)
Beban Tunjangan Keluarga ASN	33.995.986.243,00	33.713.175.513,00	282.810.730,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.567.195.000,00	4.916.305.000,00	(349.110.000,00)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	26.935.276.500,00	23.859.691.360,00	3.075.585.140,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.729.461.998,00	5.585.159.082,00	(1.855.697.084,00)
Beban Tunjangan Beras ASN	18.911.787.695,00	18.521.342.540,00	390.445.155,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.347.401.456,00	584.908.784,00	762.492.672,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	4.931.205,00	4.829.589,00	101.616,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	18.667.144.582,00	14.509.606.674,00	4.157.537.908,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	730.333.210,00	728.945.170,00	1.388.040,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.190.967.459,00	2.186.821.584,00	4.145.875,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	86.109.576.338,00	86.388.097.168,00	(278.520.830,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.472.375.966,00	3.382.200.602,00	90.175.364,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.154.124.162,00	2.703.238.190,00	450.885.972,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	26.872.135.082,00	0,00	26.872.135.082,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	2.300.100.000,00	(2.300.100.000,00)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	73.939.600,00	(73.939.600,00)
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	133.315.161.625,00	(133.315.161.625,00)
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	4.392.500.000,00	(4.392.500.000,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	2.040.140.421,00	(2.040.140.421,00)
Beban Honorarium	0,00	5.661.945.000,00	(5.661.945.000,00)

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	877.665.544,00	14.624.456,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	79.571.100,00	75.677.700,00	3.893.400,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	114.496.020,00	112.251.000,00	2.245.020,00
Beban Uang Paket DPRD	76.482.000,00	75.306.000,00	1.176.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.272.201.000,00	21.619.500,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	113.700.300,00	104.732.775,00	8.967.525,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.016.700,00	14.844.375,00	1.172.325,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000,00	2.977.109.216,00	46.890.784,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	756.000.000,00	497.700.000,00	258.300.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	549.761,00	664.128,00	(114.367,00)
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.220.100.304,00	3.166.855.210,00	53.245.094,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.926.400.000,00	5.913.734.216,00	12.665.784,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	358.785.000,00	(358.785.000,00)
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	101.400.000,00	54.600.000,00	46.800.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00	7.056.000,00	(504.000,00)
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	90.720.000,00	7.560.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.228.120,00	7.097.160,00	(869.040,00)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	821.813,00	328.576,00	493.237,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	800,00	360,00	440,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.466.720,00	5.181.120,00	285.600,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	634.043.434,00	504.900.000,00	129.143.434,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	4.734.000,00	5.585.400,00	(851.400,00)
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.238.500,00	94.844.000,00	15.394.500,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	28.900.162.709,00	25.813.381.189,00	3.086.781.520,00
Jumlah	**630.723.325.131,00**	**742.758.910.169,00**	**(112.035.585.038,00)**

Beban Pegawai pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp112.035.585.038,00 atau 15,08%.

2. Beban Barang dan Jasa

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
275.356.549.522,70	**314.318.864.631,23**

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp275.356.549.522,70 dan Tahun 2024 sebesar Rp314.318.864.631,23 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 76 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Barang Pakai Habis	53.701.649.862,02	72.682.161.026,40	(18.980.511.164,38)
Beban Barang Tak Habis Pakai	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	139.256.770,00	0,00	139.256.770,00
Beban Jasa Kantor	73.258.637.386,00	74.233.854.258,00	(975.216.872,00)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	17.152.392.880,00	15.050.309.899,00	2.102.082.981,00
Beban Sewa Tanah	13.031.125,00	0,00	13.031.125,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.829.661.477,00	5.905.501.158,00	(1.075.839.681,00)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.633.776.660,00	4.014.556.500,00	(2.380.779.840,00)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	11.250.000,00	(5.250.000,00)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	34.077.663,00	1.615.470,00	32.462.193,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	6.979.000,00	890.663.065,00	(883.684.065,00)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	129.371.870,00	448.537.000,00	(319.165.130,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	270.795.000,00	584.447.983,00	(313.652.983,00)
Beban Pemeliharaan Tanah	9.960.000,00	99.918.000,00	(89.958.000,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.260.621.651,00	2.126.185.975,00	134.435.676,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.478.538.309,00	701.645.851,00	1.776.892.458,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.748.605.213,00	2.964.940.822,00	(1.216.335.609,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.725.998.294,00	50.830.100.206,00	(23.104.101.912,00)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	32.653.715,00	0,00	32.653.715,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	231.451.730,00	2.303.845.400,00	(2.072.393.670,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.766.202.491,00	1.188.329.034,00	1.577.873.457,00
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	44.155.456.443,00	(44.155.456.443,00)

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	42.120.664.878,00	0,00	42.120.664.878,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.779.430.705,00	0,00	6.779.430.705,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	37.979.542.843,68	36.125.546.540,83	1.853.996.302,85
Jumlah	**275.356.549.522,70**	**314.318.864.631,23**	**(38.962.315.108,53)**

Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp38.962.315.108,53 atau 12,40%.

3. Beban Hibah

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
13.440.512.178,00	**44.801.118.235,68**

Rincian Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp13.440.512.178,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp44.801.118.235,68 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 77 Rincian Beban Hibah

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	28.208.649.840,00	(28.208.649.840,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	971.000.000,00	1.867.315.800,00	(896.315.800,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.652.500.000,00	5.283.500.000,00	(2.631.000.000,00)
Beban Hibah Uang Dana BOSP yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	2.927.039.430,00	(2.927.039.430,00)
Beban Hibah Uang Dana BOSP yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.429.800.000,00	125.000.000,00	3.304.800.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	999.360.000,00	974.364.166,68	24.995.833,32
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.296.042.178,00	4.288.648.999,00	7.393.179,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.091.810.000,00	1.126.600.000,00	(34.790.000,00)
Jumlah	**13.440.512.178,00**	**44.801.118.235,68**	**(31.360.606.057,68)**

Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp13.440.512.178,00 terdiri atas:

a. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp971.000.000,00, yaitu:

   1) Hibah Kepada KONI sebesar Rp500.000.000,00;

2) Hibah Kepada PMI sebesar Rp150.000.000,00;

3) Hibah Kepada Veteran LVRI sebesar Rp21.000.000,00;

4) Hibah Kepada Pramuka sebesar Rp250.000.000,00;

5) Hibah Kepada NPC sebesar Rp50.000.000,00;

b. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba dan Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp2.652.500.000,00 sebagaimana yang telah dirinci pada Belanja Hibah-LRA;

c. Beban Hibah Uang Dana BOSP yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp3.429.800.000,00 merupakan hibah yang diberikan kepada sekolah swasta yang berasal dari dana BOSP;

d. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp999.360.000,00 merupakan hibah yang diberikan kepada partai politik; dan

e. Beban Hibah Dana BOSP sebesar Rp5.387.852.178,00, yaitu :

1) Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp4.296.042.178,00 merupakan Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD; dan

2) Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp1.091.810.000,00.

4. Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
47.426.572.079,85	**42.604.370.681,66**

Beban Penyisihan Piutang merupakan pencatatan atas kenaikan piutang berdasarkan persentase tertentu berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp47.426.572.079,85 dan Tahun 2024 sebesar Rp42.604.370.681,66 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 78 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Penyisihan Pajak Restoran	546.350,00	11.150,00	535.200,00
Beban Penyisihan Pajak Reklame	4.221.491,50	59.280.580,00	(55.059.088,50)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2.204.565,95	3.111.384,40	(906.818,45)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	46.935.373.757,56	41.805.296.599,61	5.130.077.157,95
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	392.588.688,50	550.229.650,00	(157.640.961,50)
Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro	150.637,00	3.480.267,00	(3.329.630,00)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	0,00	22.220.777,50	(22.220.777,50)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	91.486.589,34	149.599.968,15	(58.113.378,81)
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	11.140.305,00	(11.140.305,00)
Jumlah	**47.426.572.079,85**	**42.604.370.681,66**	**4.822.201.398,19**

5. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
33.204.310.325,08	**38.272.019.860,00**

Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp33.204.310.325,08 dan Tahun 2024 sebesar Rp38.272.019.860,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 79 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	3.506.092.950,00	3.790.128.769,00	(284.035.819,00)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.698.217.375,08	34.481.891.091,00	(4.783.673.715,92)
Jumlah	**33.204.310.325,08**	**38.272.019.860,00**	**(5.067.709.534,92)**

6. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
60.423.986.039,52	**52.245.308.098,99**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp60.423.986.039,52 dan Tahun 2024 sebesar Rp52.245.308.098,99 terjadi peningkatan sebesar Rp8.178.677.940,53 atau 15,65%.

7. Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
60.010.863.719,00	**26.092.890.591,00**

Rincian Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp60.010.863.719,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp26.092.890.591,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 80 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	47.831.995.398,00	16.650.969.261,00	31.181.026.137,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	10.322.255.857,00	940.790.198,00	9.381.465.659,00

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Penyusutan Instalasi	1.636.576.463,00	8.215.329.913,00	(6.578.753.450,00)
Beban Penyusutan Jaringan	220.036.001,00	285.801.219,00	(65.765.218,00)
Jumlah	**60.010.863.719,00**	**26.092.890.591,00**	**33.917.973.128,00**

8. Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
494.095.547,40	**641.847.047,40**

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp494.095.547,40 dan Tahun 2024 sebesar Rp641.847.047,40 terjadi penurunan sebesar Rp147.751.500,00 atau 23,02%.

9. Beban Bagi Hasil

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
8.566.031.382,70	**6.319.342.279,60**

Rincian Beban Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp8.566.031.382,70 dan Tahun 2024 sebesar Rp6.319.342.279,60 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 81 Rincian Beban Bagi Hasil

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.406.158.447,20	6.125.325.873,40	2.280.832.573,80
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	159.872.935,50	194.016.406,20	(34.143.470,70)
Jumlah	**8.566.031.382,70**	**6.319.342.279,60**	**2.246.689.103,10**

10. Beban Bantuan Keuangan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
74.932.242.820,00	**77.590.947.500,00**

Rincian Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp74.932.242.820,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp77.590.947.500,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.658.704.680,00 atau 3,43% dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 82 Rincian Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	74.932.242.820,00	77.590.947.500,00	(2.658.704.680,00)
Jumlah	**74.932.242.820,00**	**77.590.947.500,00**	**(2.658.704.680,00)**

C. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.622.040.379,00	**4.808.360.429,00**

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp1.622.040.379,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp4.808.360.429,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 83 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	17.532.251.341,00	16.486.299.583,00	1.045.951.758,00
Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(19.154.291.720,00)	(11.677.939.154,00)	(7.476.352.566,00)
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(1.622.040.379,00)**	**4.808.360.429,00**	**(6.430.400.808,00)**

1. SURPLUS KEGIATAN NON OPERASIONAL

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
17.532.251.341,00	**16.486.299.583,00**

Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp17.532.251.341,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp16.486.299.583,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 84 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah-LO	13.610.000,00	52.200.000,00	(38.590.000,00)
Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO	621.124.285,00	1.523.352.201,00	(902.227.916,00)
Surplus Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO	235.317.000,00	977.630.519,00	(742.313.519,00)
Surplus Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO	16.662.200.056,00	13.933.116.863,00	2.729.083.193,00
Jumlah	**17.532.251.341,00**	**16.486.299.583,00**	**1.045.951.758,00**

2. DEFISIT NON OPERASIONAL-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
19.154.291.720,00	**11.677.939.154,00**

Rincian Defisit Non Operasional-LO Tahun 2025 sebesar Rp19.154.291.720,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp11.677.939.154,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 85 Defisit Kegiatan Non Operasional-LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-LO	248.927.000,00	52.200.000,00	196.727.000,00
Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO	621.124.285,00	0,00	621.124.285,00
Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-LO	0,00	540.716.624,00	(540.716.624,00)
Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	0,00	982.635.577,00	(982.635.577,00)
Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung	0,00	977.630.519,00	(977.630.519,00)
Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan	16.662.200.056,00	8.741.627.036,00	7.920.573.020,00
Defisit Penghapusan Tanah-Lapangan	148.500.000,00	57.200.000,00	91.300.000,00
Defisit Penghapusan Alat Besar-Alat Besar Darat	661.920.379,00	325.929.398,00	335.990.981,00
Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	811.620.000,00	0,00	811.620.000,00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**19.154.291.720,00**	**11.677.939.154,00**	**7.476.352.566,00**

D. POS LUAR BIASA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
7.200.264.113,00	**7.691.341.000,00**

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik seperti kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp7.200.264.113,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 86 Rincian Pos Luar Biasa

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembalian sisa hibah RR Tahun 2022 Kabupaten Padang Pariaman	5.109.985.286,00
2.	Pembayaran BTT Tahun 2025 pada TU1 untuk kegiatan belanja bahan makanan (nasi bungkus) terhadap penanggulangan darurat bencana cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman	86.614.000,00
3.	Pembayaran BTT Tahun 2025 pada TU untuk Belanja Penanganan Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem, Banjir, dan Tanah Longsor di Kabupaten Padang Pariaman pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman	666.984.250,00
4.	Pembayaran Belanja Tidak terduga (BTT) Tahun 2025 TU untuk Belanja Penanganan Tanggap Darurat bencana cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman untuk SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran	365.530.577,00
5.	Pembayaran Belanja Tidak terduga (BTT) Tahun 2025 TU untuk Belanja Penanganan Tanggap Darurat bencana cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman	971.150.000,00
Jumlah		**7.200.264.113,00**

E. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, dan Kejadian Luar Biasa. Pada Tahun 2025 terdapat Defisit–LO sebesar Rp(45.685.554.201,73) dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan – LO	Rp	1.167.715.239.035,52
Beban – LO	Rp	1.204.578.488.745,25
Surplus/Defisit Dari Operasional	Rp	(36.863.249.709,73)
Kegiatan Non Operasional	Rp	(1.622.040.379,00)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(38.485.290.088,73)
Pos Luar Biasa	Rp	7.200.264.113,00
Surplus/Defisit-LO	Rp	(45.685.554.201,73)

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp121.452.295.761,42 yang merupakan selisih surplus antara Arus Kas Masuk dikurangi Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi, dengan uraian sebagai berikut.

1. Arus Masuk Kas selama TA 2025 sebesar Rp1.393.861.370.042,42 terdiri atas:

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp	84.061.584.978,00
b. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	75.436.647.214,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	8.931.467.131,00
d. Lain-lain PAD yang Sah	Rp	5.531.454.989,42
e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	1.150.772.734.928,00
f. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp	65.127.480.802,00
g. Pendapatan Hibah	Rp	4.000.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**Rp**	**1.393.861.370.042,42**

2. Arus Keluar Kas selama TA 2025 sebesar Rp1.272.409.074.281,00 terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	Rp	782.931.035.497,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	288.545.474.681,00
c. Belanja Hibah	Rp	13.440.512.178,00
d. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	172.853.261.698,00
e. Belanja Bagi Hasil	Rp	7.438.526.114,00
f. Pembayaran Kejadian Luar Biasa	Rp	7.200.264.113,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**Rp**	**1.272.409.074.281,00**

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama TA 2025 defisit sebesar Rp(59.824.936.998,00) yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dikurangi Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi, dengan uraian sebagai berikut.

1. Arus Masuk Kas

Arus Kas Masuk merupakan penerimaan kas yang diharapkan diperoleh dari penjualan Aset Daerah. Dalam TA 2025 arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan yang berasal dari pendapatan dari penjualan aset sebesar Rp0,00.

2. Arus Keluar Kas

Selama Tahun 2025 arus Kas Keluar sebesar Rp59.824.936.998,00. Pengeluaran ini merupakan pengeluaran dana dari Kas Daerah untuk Belanja Modal, yaitu:

a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp0,00 merupakan pengeluaran untuk mendapatkan tanah, termasuk pengadaan, pembelian, pembebasan, dan penyelesaian. Belanja Modal Tanah juga mencakup pengosongan, perataan, pematangan, dan pembuatan sertifikat tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.893.691.839,00 merupakan total realisasi pengeluaran Tahun 2025 yang dibelanjakan untuk kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor/rumah tangga, alat studio, dan alat kedokteran;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.535.317.201,00 merupakan total realisasi pengeluaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk pembangunan gedung dan bangunan baru serta perbaikan/rehabilitasi gedung dan bangunan lama sehingga dapat berfungsi serta menambah umur ekonomis bangunan tersebut;

d. Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp13.896.607.658,00 merupakan realisasi pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan, peningkatan, dan perbaikan jalan, jembatan, bangunan irigasi, dan jaringan;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp84.206.800,00 merupakan realisasi pengeluaran belanja Aset Tetap Lainnya yang digunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori empat jenis belanja modal sebelumnya, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, pembelian tanaman, dan barang-barang bercorak budaya;

f. Belanja Aset Lainnya sebesar Rp53.113.500,00 yang digunakan untuk perolehan aset tidak berwujud berupa *software*; dan

g. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp2.362.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal pada PT Bank Nagari.

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan Pendanaan Defisit atau Penggunaan Surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00.

D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi anggaran. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp20.000,00 dengan uraian sebagai berikut.

1. Penerimaan PFK Rp71.421.821.530,00 terdiri atas:

a.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp	534.196.518,00
b.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp	186.173.472,00
c.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp	1.602.595.836,00
d.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp	558.501.214,00
e.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp	10.688.231.518,00
f.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp	3.672.577.818,00
g.	Iuran Wajib Pegawai 1% PNS	Rp	2.672.059.665,00
h.	Iuran Wajib Pegawai 1% PPPK	Rp	918.142.116,00
i.	Iuran Wajib Pegawai 8% PNS	Rp	19.502.709.733,00
j.	Iuran Wajib Pegawai 8% PPPK	Rp	2.770.614.593,00
k.	Lainnya	Rp	5.126.535.286,00
l.	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	617.019.909,00
m.	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	211.730.049,00
n.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp	821.374.823,00
o.	Pajak Pertambahan Nilai	Rp	9.494.046.966,00
p.	PPH 21	Rp	11.916.124.744,00
q.	Taperum	Rp	20.000,00
r.	Taspen	Rp	129.167.270,00
	Jumlah	**Rp**	**71.421.821.530,00**

2. Pengeluaran PFK Rp71.421.801.530,00 terdiri atas:

a.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp	534.196.518,00
b.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp	186.173.472,00
c.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp	1.602.595.836,00
d.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp	558.501.214,00
e.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp	10.688.231.518,00
f.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp	3.672.577.818,00
g.	Iuran Wajib Pegawai 1% PNS	Rp	2.672.059.665,00
h.	Iuran Wajib Pegawai 1% PPPK	Rp	918.142.116,00
i.	Iuran Wajib Pegawai 8% PNS	Rp	19.502.709.733,00
j.	Iuran Wajib Pegawai 8% PPPK	Rp	2.770.614.593,00
k.	Lainnya	Rp	5.126.535.286,00
l.	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	617.019.909,00
m.	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	211.730.049,00
n.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp	821.374.823,00
o.	Pajak Pertambahan Nilai	Rp	9.494.046.966,00
p.	PPH 21	Rp	11.916.124.744,00
q.	Taperum	Rp	0,00
r.	Taspen	Rp	129.167.270,00
	Jumlah	Rp	**71.421.801.530,00**

Akumulasi dari kenaikan/penurunan kas pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan/ Penurunan Kas sebesar Rp61.627.378.763,42 yang bersumber dari:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	121.452.295.761,42
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(59.824.936.998,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
Arus Kas Bersih dari Transitoris	Rp	20.000,00
Jumlah	**Rp**	**61.627.378.763,42**

2. Saldo akhir kas sebesar Rp102.126.901.467,96 yang bersumber dari:

Saldo Akhir Kas di BUD + BLUD	Rp	99.048.068.748,96
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	4.029,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
Saldo Akhir Kas BOSP	Rp	28.283.554,00

Saldo Akhir Kas BOK	Rp	3.050.545.136,00
Jumlah	**Rp**	**102.126.901.467,96**

Dengan demikian Saldo kas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp102.126.901.467,96 yang terdiri dari Saldo Kas di BUD dan BLUD sebesar Rp99.048.068.748,96, (masing-masing sebesar Rp93.111.613.560,46 kas BUD dan kas BLUD sebesar Rp5.936.475.188,50, dikurang dengan utang PFK sebesar Rp20.000,00) , Saldo Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp4.029,00, Kas di Bendahara BOSP sebesar Rp28.283.554,00 dan Saldo Kas BOK sebesar Rp3.050.545.136,00.

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit-LO dan perubahan ekuitas lainnya. Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2025 di Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp1.340.446.803.712,13 merupakan nilai Ekuitas yang juga tersaji di Neraca per 31 Desember 2025.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp1.342.128.864.497,33.

B. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(45.685.554.201,73). Perhitungan Defisit-LO adalah sebagai berikut.

Pendapatan – LO	Rp	1.167.715.239.035,52
Beban – LO	Rp	1.204.578.488.745,25
Surplus/Defisit Dari Operasional	Rp	(36.863.249.709,73)
Kegiatan Non Operasional	Rp	(1.622.040.379,00)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(38.485.290.088,73)
Pos Luar Biasa	Rp	7.200.264.113,00
Surplus/Defisit-LO	Rp	(45.685.554.201,73)

C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN

1. Koreksi Ekuitas Lainnya

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya pada LPE Tahun 2025 sebesar Rp44.003.493.416,53 terdiri atas koreksi tambah sebesar Rp44.349.616.242,51 dan koreksi kurang sebesar Rp(346.122.825,98).

Rincian Koreksi Tambah Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp44.349.616.242,51 sebagai berikut.

Tabel 5. 87 Koreksi Tambah Ekuitas

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang PBB-P2	41.805.296.599,61
2.	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.197.000,00
3.	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	22.220.777,50

No.	Uraian	Nilai (Rp)
4.	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	3.480.267,00
5.	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	24.770.437,02
6.	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.991.620,59
7.	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	115.566.096,91
8.	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	271.813,63
9.	Koreksi Ekuitas atas Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.600.000,00
10.	Koreksi Ekuitas atas Bangunan Gedung Kantor	811.620.000,00
11.	Koreksi Ekuitas atas Utang Belanja Gaji Pokok ASN - Gaji Pokok PNS	72.500,00
12.	Koreksi Ekuitas atas Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	67,00
13.	Koreksi Ekuitas atas Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa	44,40
14.	Koreksi atas penyesuaian rugi PDAM menjadi Laba	1.453.529.018,85
Jumlah		**44.349.616.242,51**

2. Koreksi Kurang Ekuitas

Selanjutnya Koreksi Kurang Ekuitas sebesar Rp(346.122.825,98) terdiri atas:

Tabel 5. 88 Koreksi Kurang Ekuitas

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Koreksi Ekuitas atas Kas Dana BOS	3.329.630,00
2.	Koreksi Ekuitas atas Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	916.052,00
3.	Koreksi Ekuitas atas Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.627.389,47
4.	Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	24.117.317,00
5.	Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	258.213.008,00
6.	Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik - Jaringan Distribusi	11.240.535,00
7.	Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	32.193.334,00
8.	Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	9.478.333,00
9.	Koreksi Ekuitas atas Penyesuaian Laba PT BPR-PKPP	7.227,50
10.	Koreksi Ekuitas atas Penyertaan Modal pada PT BPR-PKPP	0,01
Jumlah		**346.122.825,98**

D. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir sebesar Rp1.340.446.803.712,13 sama dengan nilai ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025.

BAB VI
PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

6.1. *MANDATORY SPENDING*

Mandatory Spending merupakan belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh Undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

A. Bidang Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada bagian hal khusus lainnya menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan sebesar 46,27% dari total belanja daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6. 1 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending*

Bidang Pendidikan TA 2025

No.	Komponen Perhitungan				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	a.	Belanja pada Dinas Pendidikan			603.845.730.344,41	578.657.551.238,00	95,83
		1)	Belanja Operasi		592.272.454.228,41	567.983.410.619,00	95,90
			a.	Belanja Pegawai	504.265.433.843,41	484.535.634.007,00	96,08
			b.	Belanja Barang dan Jasa	79.266.520.385,00	74.707.276.612,00	94,24
			c.	Belanja Hibah	8.740.500.000,00	8.740.500.000,00	100,00
			d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		2)	Belanja Modal		11.573.276.116,00	10.674.140.619,00	92,23
	b.	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Arsip dan Pustaka)			11.440.512.045,00	10.482.696.339,00	91,63
		1)	Belanja Operasi		11.377.512.045,00	10.421.043.589,00	91,59
			a.	Belanja Pegawai	6.034.156.506,00	5.740.883.709,00	95,14
			b.	Belanja Barang dan Jasa	4.388.355.539,00	3.830.159.880,00	87,28
			c.	Belanja Hibah	955.000.000,00	850.000.000,00	89,01
			d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		2)	Belanja Modal		63.000.000,00	61.652.750,00	97,86
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)				615.286.242.389,41		

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Total Belanja Daerah		1.329.872.011.279,00	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		46,27 %	

B. Bidang Kesehatan

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan program prioritas bidang kesehatan lainnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan sebesar 34,79% dari total belanja daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending*

Bidang Kesehatan TA 2025

No.	Komponen Perhitungan			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	a.	Belanja pada Dinas Kesehatan		196.375.121.576,99	180.426.818.644,00	91,87
		1)	Belanja Operasi	181.068.010.254,99	166.417.688.473.00	91,90
			a. Belanja Pegawai	112.425.452.340,00	106.736.309.522,00	94,93
			b. Belanja Barang dan Jasa	68.492.557.914,99	59.531.378.951,00	86,91
			c. Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
			d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		2)	Belanja Modal	15.307.111.322,00	14.009.130.171,00	91,52
	b.	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan		104.504.016.816,00	101.779.270.337,00	97,39
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)				300.879.138.392,99	
3.	Total Belanja Daerah				1.329.872.011.279,00	
4.	Gaji ASN				465.239.952.688,00	
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)				864.730.838.350,00	
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%				34,79 %	

C. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah mengalokasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan transfer kepada daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 tahun.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 atas Realisasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik baru memenuhi sebesar 21,77% dan diupayakan

untuk terpenuhi secara optimal secara bertahap. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 3 Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2025

Kabupaten Padang Pariaman%

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)		
		APBD 2025 (Rp)	P-APBD 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	1.552.919.707.637,00	1.420.388.030.413,60	1.329.872.011.279,00
2.	Belanja Transfer			
	a Belanja Bagi Hasil	9.488.627.053,00	10.009.191.049,00	7.438.526.114,00
	b Bantuan Keuangan	178.135.000.500,00	177.921.751.100,00	172.853.261.698,00
	c Jumlah (a+b)	183.451.257.100,00	187.930.942.149,00	180.291.787.812,00
3.	Selisih (1-2)	1.369.468.450.537,00	1.232.457.088.264,00	1.149.679.003.226,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	547.787.380.214,80	492.982.835.305,80	459.871.601.290,40

Tabel 6. 4 Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah TA 2025

Kabupaten Padang Pariaman

No.	Komponen Perhitungan		Jumlah (Rp)		
			APBD 2025	P-APBD 2025	Realisasi
1.	a	Belanja Modal	**96.113.987.170,41**	**62.558.156.321,30**	**57.462.936.998,00**
		Tanah	10.000.000,00	0,00	0,00
		Peralatan dan Mesin	13.589.700.402,00	21.126.541.592,30	18.893.691.839,00
		Gedung dan Bangunan	21.733.454.000,41	25.706.349.333,00	24.535.317.201,00
		Jalan Jaringan dan Irigasi	60.710.822.768,00	15.515.265.396,00	13.896.607.658,00
		Aset Tetap Lainnya	0,00	110.000.000,00	84.206.800,00
		Aset Lainnya	45.000.000,00	100.000.000,00	53.113.500,00
	b	Belanja Pemeliharaan	3.781.184.204,70	7.208.072.539,01	6.514.225.173,00
	Jumlah 1 = (a + b)		99.895.171.375,11	69.766.228.860,31	63.977.162.171,00
2.	a	Belanja Hibah	14.738.010.000,00	13.475.860.000,00	13.440.512.178,00
	b	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	c	Belanja Bantuan Keuangan	183.451.257.100,00	177.921.751.100,00	172.853.261.698,00
	jumlah 2 = (a + b + c)		198.189.267.100,00	191.397.611.100,00	186.293.773.876,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		298.084.438.475,11	261.163.839.960,31	250.270.936.047,00

6.2. PERGANTIAN MANAJEMEN

Selama Tahun 2025 terjadi pergantian manajemen dan pegawai sebanyak 151 orang dengan rincian:

1. Pelantikan Pejabat PPT Pratama tanggal 14 Mei 2025 sebanyak 1 orang;
2. Pelantikan sebanyak 12 orang pegawai tanggal 9 September 2025, dengan rincian:
   a) Pelantikan Pejabat PPT Pratama 10 orang; dan
   b) Pelantikan JF melalui Perpindahan 2 orang;
3. Pelantikan sebanyak 115 orang pegawai tanggal 3 Oktober 2025, dengan rincian:
   a) Pelantikan Pejabat Administrator 70 orang; dan
   b) Pelantikan Pejabat Pengawas 45 orang;
4. Pelantikan Pejabat Pengawas tanggal 8 Desember 2025 sebanyak 3 orang; dan
5. Pelantikan sebanyak 20 orang pegawai tanggal 16 Desember 2025, dengan rincian:
   a) Pelantikan Pejabat PPT Pratama 7 orang; dan
   b) Pelantikan JF melalui Perpindahan 13 orang.

6.3. KOMITMEN DAN KONTINGENSI

Terdapat beberapa Kasus Hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2025, antara lain:

1. Tanah yang terletak di Tanjuang Basung I Kenagaraian Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai dengan Nomor Perkara 89/PDT.G/2024/PN.PMN, Penggugat: Soetan Adityawarman Oesman Dkk, Tergugat: Bupati Padang Pariaman, Camat Batang Anai Selaku Turut Tergugat II dengan putusan menyatakan eksepsi Tergugat 1 a.n. Tetgugat 3 Dapat diterima Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
2. Tanah Pusako Tinggi milik Kaum Penggugat yang terletak di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung seluas 12.000 m^2 yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang tercatat dengan NIS.15,16, dan 17 dengan Nomor Perkara 25/PDT.G/2025/PN.PMN, Penggugat: Bakaruddin Dkk, Tergugat: Bupati Padang Pariaman, Sedang Berjalan dengan Agenda berikutnya Saksi tergugat;
3. Sebidang Tanah Pusako Tinggi berupa Sebelas Petak Sawah dan Tanah Perbukitan yang terletak di Padang Toboh, Nagari Parik Malintang, Kabupaten Padang Pariaman dengan Luas $\pm$ 22.258 m^2. Nomor Perkara 34/PDT.G/2025/PN.PMN, Penggugat: Adinar, Tergugat: Bupati Padang Pariaman, Menyatakan eksepsi Tergugat 1 an Tergugat 3 Dapat diterima; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Bangunan Toko atau Kedai Bertingkat yang terletak di Nagari Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, dengan Ukuran Luas seluruhnya 281,25 m^2. Nomor Perkara 45/PDT.G/2025/PN.PMN, Penggugat: Yunarni, Dkk, Tergugat: Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman, Sedang Berjalan Agenda Berikutnya Jawaban;

5. Objek gugatan tanah harta pusaka rendah berupa 3 tumpuk/bidang tanah persawahan dan tanah perparakan yang didapatkan dari harta peninggalan dari nenek kandung penggugat yang terletak di Korong Kabun, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dan sebagian tanah tersebut telah menjadi jalan raya menuju Asrama Embarkasi Haji Sumatera Barat. Nomor Perkara 71/PDT.G/2025/PN.PMN, Penggugat: Rosmaniar, Tergugat: Bupati Padang Pariaman dalam kedudukannya selaku Tergugat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Kedudukannya selaku Tergugat 3, Inspektur Kabupaten Padang Pariaman dalam kedudukannya selaku Tergugat 4, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam kedudukannya selaku Tergugat 5, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam kedudukannya selaku Tergugat 6, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dalam kedudukannya selaku Tergugat 7, Sedang Berjalan dengan Agenda Berikutnya Mediasi;

6. Taman Kehati

   Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Ninik Mamak (Penghulu Pucuk) dari 6 (enam) kaum/suku di Kanagarian Parik Malintang yang dibuat pada Tahun 2007, telah disepakati kesediaan penyerahan tanah ulayat Nagari (milik Nagari) secara cuma-cuma seluas ± 100 Ha. Sejak Tahun 2007 s.d. Tahun 2011, dicapai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemuka Masyarakat (ninik mamak) tersebut agar diberikan *siliah jariah* (Ganti Kerugian) berupa ganti kerugian terhadap bangunan (pondok-pondok) dan ganti rugi tanaman kepada masyarakat yang menggarap Tanah Ulayat Nagari (tanah milik adat) tersebut yang dilakukan secara bertahap dengan membebankan pembiayaan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Dari pendataan terhadap tanaman dan bangunan masyarakat penggarap tanah kawasan IKK (Ibukota Kabupaten) Padang Pariaman tersebut, ditemukan luas tanah oleh Tim Pengadaan Tanah seluas ± 73 Ha.

   Tanah IKK seluas ± 73 Ha tersebut telah dikeluarkan peta bidangnya oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantah Padang Pariaman dengan rincian sebagai berikut.

   a. Tanah IKK seluas ± 10 Ha telah diberikan kepada Kementerian Agama untuk dibangun Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) dan telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 Register 03.13.12.04.6.00015 pada tanggal 13 April 2009;

   b. Tanah IKK seluas ± 63 Ha dalam kawasan yang sama dan diproses pada waktu bersamaan belum keluar Sertifikat Hak Pakainya dan masih sampai tahap Peta Bidang yang dikeluarkan oleh BPN Kantah Padang Pariaman. Tanah seluas ± 63 Ha telah dicatat sebagai Aset Pemerintah Daerah yang dicatatkan pada Daftar Barang Tanah Kabupaten Padang Pariaman.

Sebagian besar tanah IKK seluas ± 73 Ha yang telah dilakukan penyerahan secara cuma-cuma dan pemberian *siliah jariah* (Ganti Kerugian) tersebut kepada masyarakat penggarap, maka secara langsung telah terjadi pelepasan hak atas Tanah Ulayat Nagari (tanah milik adat) tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (berdasarkan surat pernyataan masyarakat), sehingga dengan dasar telah beralihnya hak tersebut Pemerintah Daerah melakukan pembangunan kantor-kantor pemerintah dan fasilitas umum di Kawasan IKK Kanagarian Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung.

Sejak Tahun 2010 s.d. Tahun 2020 telah dilakukan pembangunan kantor pemerintahan di Kawasan Ibukota Padang Pariaman yang bersumber dari Anggaran APBD Kabupaten Padang Pariaman dan APBN. Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman mulai beroperasi dan berkantor di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung pada tanggal 2 Januari 2012 yang ditandai dengan penempatan Kantor Bupati Padang Pariaman bersama Sekretariat Daerah.

Pada Tahun 2014 s.d. Tahun 2016 dilakukan pembangunan "Taman Kehati" dengan luas ± 10 Ha dan dana sekita Rp300 juta menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup di kawasan tanah IKK. Aset Taman Kehati telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Tahun 2015.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Padang – Sicincin mulai Tahun 2018, Taman Kehati menjadi kawasan di daerah IKK yang dilalui proyek tersebut. Pada akhir Tahun 2020 dilakukan proses Uang Ganti Kerugian (UGK) dalam kawasan IKK tersebut kepada masyarakat penggarap oleh PPK Jalan Tol dengan total dana UGK sekitar Rp28 miliar. Hal ini yang mengakibatkan adanya proses persidangan dikarenakan pembayaran UGK terindikasi merugikan negara.

Saat ini, persidangan terkait pembebasan lahan Jalan Tol masih berlanjut, namun berdasarkan Putusan Sidang Kasus Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pmn pada Pengadilan Negeri Pariaman secara jelas dan terang benderang dibuktikan di pengadilan bahwa tanah "Taman Kehati" merupakan aset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di ranah hukum Perdata maupun ranah hukum Pidana.

6.4. STRUKTUR ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah yang dibentuk mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terdiri atas:

1. Bupati dan Wakil Bupati;
2. Sekretariat Daerah;
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Inspektorat Daerah;
5. Dinas, yang terdiri dari:
    a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
f. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
j. Dinas Perhubungan;
k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
l. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
m. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
n. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
o. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
p. Dinas Perikanan;
q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
r. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

6. Badan, yang terdiri dari:
   a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
   b. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
   c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Kecamatan, yang terdiri dari:
   a. Kecamatan Batang Anai;
   b. Kecamatan Lubuak Aluang;
   c. Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam;
   d. Kecamatan IV Koto Aua Malintang;
   e. Kecamatan VII Koto;
   f. Kecamatan V Koto;
   g. Kecamatan V Koto Timur;
   h. Kecamatan Sungai Limau;
   i. Kecamatan Sungai Garinggiang;
   j. Kecamatan VII Koto Patamuan;
   k. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang;

l. Kecamatan Ulakan Tapakih;

m. Kecamatan Nan Sabaris;

n. Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang;

o. Kecamatan Anam Lingkuang;

p. Kecamatan VII Koto Padang Sago;

q. Kecamatan Batang Gasan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat Daerah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli, terdiri dari:
   a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
   b. Staf Ahli Bidang Pembangunan , Ekonomi dan Keuangan;
   c. Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya;
3. Asisten Sekretariat Daerah, terdiri dari:
   a. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi 3 (tiga) bagian:
      1) Bagian Pemerintahan Umum;
      2) Bagian Hukum;
      3) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
   b. Asisten Bidang Pembangunan, membawahi 3 (Tiga) bagian:
      1) Bagian Pembangunan Ekonomi;
      2) Bagian Pembangunan Fisik dan Prasarana;
      3) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
   c. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi 4 (Empat) bagian:
      1) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
      2) Bagian Umum dan Perlengkapan;
      3) Bagian Humas dan Protokol;
      4) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Selain itu terdapat BLUD pada Puskesmas dan RSUD Padang Pariaman.

6.5. KEPEMIMPINAN DAERAH

Susunan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut.

Tabel 6. 5 Susunan Pimpinan DPRD/Pejabat Legislatif Kabupaten Padang Pariaman

Nama	Jabatan
APRINALDI, S.Pd, M.Pd, AIFO	Ketua
WIRA SATRIA, S. Sos	Wakil Ketua I
FIRMAN, S. Si	Wakil Ketua II

Susunan Pejabat Eksekutif Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut.

Tabel 6. 6 Susunan Pejabat Eksekutif Kabupaten Padang Pariaman

Nama	Jabatan
DR. H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H.	BUPATI
RAHMAT HIDAYAT, S.E., M.M.	WAKIL BUPATI
RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, M.M.	SEKRETARIS DAERAH
HENDRA ASWARA, SSTP, M.M., CGCAE, CFrA	INSPEKTUR
M. FADHLY S.AP., M.M.	BENDAHARA UMUM DAERAH

6.6. PENGUNGKAPAN LAINNYA

Pada akhir bulan November 2025, Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera Barat. Bencana tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem, curah hujan yang sangat tinggi, serta luapan sungai yang membawa material vulkanik dan bebatuan. Bencana tersebut mengakibatkan kehilangan jiwa dan tempat tinggal, kerusakan infrastruktur, serta melumpuhkan akses jalan.

Dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan Status Tanggap Darurat melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman berikut.

1. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 357/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem, Banjir, dan Tanah Longsor pada Tanggal 23 November 2025;
2. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 375/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem, Banjir, dan Tanah Longsor pada Tanggal 23 November 2025;
3. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 388/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem, Banjir, dan Tanah Longsor pada Tanggal 23 November 2025.

Selain itu, Bupati Padang Pariaman juga menetapkan Pengurus Padang Pariaman Peduli Bencana sesuai Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 368/KEP/BPP/2025 tentang Penepatan Pengurus Padang Pariaman Peduli Bencana tanggal 26 November 2025. Kepengurusan Padang Pariaman Peduli Bencana terdiri dari:

1) Ketua : Sekretaris Daerah
2) Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra
3) Bendahara : Kepala BPKD

Dalam Keputusan Bupati tersebut diantaranya ditetapkan Pengurus Padang Pariaman Peduli Bencana untuk melakukan pembukaan rekening Bank Nagari dalam penyaluran donasi dan bantuan keuangan terhadap korban terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) diketahui bahwa rekening peduli bencana yang dibentuk dengan Nomor Rekening 71000201122141 atas nama Padang Pariaman Peduli Bencana pada Bank Nagari yang digunakan untuk menerima donasi dari berbagai sumber. Namun, rekening tersebut belum ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Adapun saldo kas pada rekening Padang Pariaman Peduli Bencana per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp574.374.973,00 dengan total penerimaan sebesar Rp1.032.922.973,00 dan pengeluaran sebesar Rp458.548.000,00.

Dalam penanggulangan bencana di sebagian wilayah Sumatera khususnya di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah pusat juga menyalurkan Dana Darurat berupa Bantuan Presiden berdasarkan Surat Kementerian Sekretariat Presiden Nomor B-08/KSN/SP/KK.14.00/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Penyampaian Bantuan Kemasyarakatan Presiden untuk Provinsi Terdampak Bencana Alam sebesar Rp4.000.000.000,00 yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 12 Desember 2025. Sampai saat ini, dana tersebut masih tersedia di Rekening Kas Umum Daerah dan direncanakan akan digunakan dalam pemulihan pascabencana.

Selanjutnya, atas kerusakan infrastruktur akibat bencana, BPBD bersama SKPD teknis terkait dan SKPD yang terdampak bencana telah melakukan identifikasi Barang Milik Daerah (BMD) serta sarana dan prasarana yang terdampak bencana, baik yang berakibat rusak ringan, rusak berat, maupun hilang. BPBD telah melakukan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang menjadi dokumen dalam memandu pemulihan pascabencana yang didasarkan pada kajian kebutuhan (Jitupasna). R3P berisi data kerusakan, kerugian, serta strategi pendanaan untuk pemulihan pascabencana.

Atas BMD yang terdampak bencana, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah membentuk Tim Inventarisasi BMD. Namun, belum terdapat hasil inventarisasi atas BMD yang terdampak bencana tersebut.

BAB VII
PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota selaku Kepala Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025.

Terakhir, kami berharap peran serta seluruh masyarakat termasuk pihak pemeriksa eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan masukan dan perbaikan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

BUPATI PADANG PARIAMAN



JOHN KENEDY AZIS

Pemutakhiran Rekening

Tahun 2024			Tahun 2025	
No	**Kode Rekening**	**URAIAN**	**Kode Rekening**	**URAIAN**
1	4.1.01.06	Pajak Hotel		
2	4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan
3	4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel
4	4.1.01.07	Pajak Restoran	4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
5	4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman
6	4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran
7	4.1.01.08	Pajak Hiburan	4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
8	4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
9	4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
10	4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
11	4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik
12	4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
13	4.1.01.11	Pajak Parkir	4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
14	4.1.01.11.01	Pajak Parkir	4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir
15	4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
16	4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)
17	4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)
18	4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)
19	4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.2.01.09.01	DAK Fisik
20	4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.2.01.09.02	DAK Non Fisik
21	7.1.01.06	Pajak Hotel-LO	7.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
22	7.1.01.06.01	Pajak Hotel-LO	7.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan-LO
23	7.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel-LO	7.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel-LO
24	7.1.01.07	Pajak Restoran–LO	7.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
25	7.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	7.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO
26	7.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	7.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran-LO
27	7.1.01.08	Pajak Hiburan-LO	7.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO

Tahun 2024			Tahun 2025	
No	**Kode Rekening**	**URAIAN**	**Kode Rekening**	**URAIAN**
28	7.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	7.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO
29	7.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	7.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO
30	7.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan-LO	7.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
31	7.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	7.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik-LO
32	7.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	7.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO
33	7.1.01.11	Pajak Parkir-LO	7.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
34	7.1.01.11.01	Pajak Parkir-LO	7.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir-LO
35	7.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir-LO	7.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO
36	7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	7.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
37	7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	7.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
38	7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	7.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO
39	7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	7.2.01.09.01	DAK Fisik-LO
40	7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	7.2.01.09.02	DAK Non Fisik-LO

Lampiran : 2.a / 1 - 1

DAFTAR PENERIMA DAN PENGELUARAN DANA BOP SKB PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 TAHAP I DAN II

NO	Kecamatan	Nama Sekolah	Saldo Bank Awal 2025		Penyaluran Tahap 1 dan 2 Tahun 2025	JUMLAH BOP REGULER BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BOP REGULER Belanja Modal	Jumlah Pengeluaran	SALDO AKHIR 31 desember 2025	
			Bank	Tunai					BANK	TUNAI
1		2	3	4	5	15	20	21	22	23
1	SUNGAI LIMAU	SKB Kabupaten Padang Pariaman	-	-	156.200.000	127.898.414	27.860.600	155.759.014	440.986	-
	JUMLAH			-	**156.200.000**	**127.898.414**	**27.860.600**	**155.759.014**	**440.986**	**-**

Lampiran : 2.b / 1 - 1

DAFTAR PENERIMA DAN PENGELUARAN DANA BOS KINERJA PKBM TAHUN 2025

NO	Kecamatan	Nama Sekolah	Saldo Awal 1 Januari 2025		Penyaluran Tahun 2025	JUMLAH BOP REGULER BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BOP REGULER Belanja Modal	Jumlah Pengeluaran	SALDO AKHIR 30 desember 2025	
			Bank	Tunai					BANK	TUNAI
1		2			Rp 5	15	20	21	22	23
1	V KOTO KAMPUNG DALAM	PKBM MANDALI AJUNG	-	0	Rp 45.000.000	13.748.000	31.252.000	45.000.000	-	-
		JUMLAH				**13.748.000**	**31.252.000**	**45.000.000**	**-**	**-**

Lampiran : 2.c / 1 - 1

DAFTAR PENERIMA DAN PENGELUARAN DANA BOS KINERJA PAUD TAHUN 2025

NO	Kecamatan	Nama Sekolah	Saldo Awal 1 Januari 2025		Penyaluran Tahun 2025	JUMLAH BOP REGULER BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BOP REGULER Belanja Modal	Jumlah Pengeluaran	SALDO AKHIR 30 desember 2025	
			Bank	Tunai					BANK	TUNAI
1		2			Rp 5	15	20	21	22	23
1	Lubuk Alung	TK MERCY KIDS	-	-	Rp 15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	-
2	Ulakan Tapakis	TK BAITURRAHMAN AN-NUR	-	-	Rp 15.000.000	14.355.200	644.800	15.000.000	-	-
3	V Koto Kampung Dalam	TK ISLAM SILATURAHMI	-	-	Rp 15.000.000	14.550.000	450.000	15.000.000	-	-
		JUMLAH			45.000.000	43.905.200	1.094.800	45.000.000	-	-

Lampiran : 2.d / 1 - 1

DAFTAR PENERIMA DAN PENGELUARAN DANA BOP KESETARAAN TAHUN 2025 TAHAP II

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Saldo Bank Januari 2025		Penyaluran Tahap 1 dan 2 Tahun 2025	JUMLAH BOP REGULER BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BOP REGULER Belanja Modal	Jumlah Pengeluaran	SALDO AKHIR 30 desember 2025	
			Bank	Tunai					BANK	TUNAI
1		2	3	4	5	15	20	21	22	23
1	BATANG ANAI	PKBM DELIMA BANDARA	-	40.000,00	124.160.000,00	88.646.000,00	35.554.000,00	124.200.000,00		
2	BATANG ANAI	PKBM ULUL ALBAB PUTRA BANGSA	-	-	46.700.000,00	36.700.000,00	10.000.000,00	46.700.000,00		
3	NAN SABARIS	PKBM SAHABAT	-	-	189.700.000,00	158.025.000,00	31.675.000,00	189.700.000,00		
4	V KOTO KAMPUNG DALAM	PKBM MANDALI AJUNG	-	-	231.400.000,00	134.243.500,00	97.156.500,00	231.400.000,00		
5	PADANG SAGO	PKBM RAUDHATUL ULLUM	-	-	161.400.000,00	139.260.000,00	22.140.000,00	161.400.000,00		
6	2 X II KAYUTANAM	PKBM TITIAN AMANAH	50.000,00	-	113.950.000,00	97.710.000,00	16.290.000,00	114.000.000,00		
7	SINTUK TOBOH GADANG	PKBM GESCHOOL	-	-	23.300.000,00	17.200.000,00	6.100.000,00	23.300.000,00		
JUMLAH			50.000,00	40.000,00	890.610.000,00	671.784.500,00	218.915.500,00	890.700.000,00		

Lampiran : 2.e / 1 - 8

DAFTAR PENERIMA DAN PENGELUARAN DANA BOP PAUD TAHUN 2025 TAHAP I DAN II

NO	Kecamatan	Nama Sekolah	Saldo Awal 2025		Jumlah Penerima Tahun 2025	JUMLAH BOP REGULER BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BOP REGULER Belanja Modal	Jumlah Pengeluaran	SALDO BANK	SALDO TUNAI	KETERANGAN
			Saldo Bank	Saldo Tunai							
1		2	3	4	5	15	20	21	23	24	
1	batang Anai	TK Negeri 01 Kecamatan Batang Anai	-	40.000	28.160.000	18.380.000	9.820.000	28.200.000	-	-	
2	Batang Anai	TK Negeri 02 Kecamatan Batang Anai	-	40.000	19.160.000	14.580.000	4.620.000	19.200.000	-	-	
3	Batang Anai	TK PEMBINA KECAMATAN	-	-	16.800.000	14.400.000	2.400.000	16.800.000	-	-	
4	Batang Anai	TK ALQURAN KASANG	-	40.000	30.560.000	25.740.000	4.860.000	30.600.000	-	-	
5	Batang Anai	TK ALQURAN SYUBBANUL MUSLIMIN	-	53.000	29.347.000	20.360.000	9.040.000	29.400.000	-	-	
6	Batang Anai	TK BAITURRIDHA	-	40.000	18.560.000	15.240.000	3.360.000	18.600.000	-	-	
7	Batang Anai	TK BUAH HATI	40.000	-	29.960.000	25.883.000	4.117.000	30.000.000	-	-	
8	Batang Anai	TK DELIMA BANDARA	-	40.000	34.160.000	27.710.000	6.490.000	34.200.000	-	-	
9	Batang Anai	TK DHARMAWANITA	-	40.000	11.960.000	10.760.000	1.240.000	12.000.000	-	-	
10	Batang Anai	TK HADISYA	-	40.000	12.560.000	11.540.000	1.060.000	12.600.000	-	-	
11	Batang Anai	TK IT AL-KAUTSAR	-	-	7.800.000	7.410.000	390.000	7.800.000	-	-	
12	Batang Anai	TK IT FADHILAH AMAL	-	-	28.200.000	22.580.000	5.620.000	28.200.000	-	-	
13	Batang Anai	TK MAHIRAH	-	20.000	4.780.000	4.510.000	290.000	4.800.000	-	-	
14	Batang Anai	TK NURUL HIKMAH	-	46.000	12.554.000	8.042.100	4.553.900	12.596.000	4.000	-	
15	Batang Anai	TK Palapa	-	40.000	9.560.000	8.640.000	960.000	9.600.000	-	-	
16	Batang Anai	TK PELANGI	80.500	59.500	12.460.000	11.340.000	1.260.000	12.600.000	-	-	
17	Batang Anai	TK PERTASI KENCANA BUAYAN	-	-	11.400.000	9.260.000	2.140.000	11.400.000	-	-	
18	Batang Anai	TK PERTASI KENCANA II	-	40.000	4.760.000	4.320.000	480.000	4.800.000	-	-	
19	Batang Anai	TK QURAN DAARUL FIKRI	-	-	12.600.000	10.480.000	2.120.000	12.600.000	-	-	
20	Batang Anai	TK SABBIHISMA 06	-	40.000	25.160.000	21.325.000	3.875.000	25.200.000	-	-	
21	Batang Anai	KB AL-MUSTANIR	-	40.000	15.560.000	14.700.000	900.000	15.600.000	-	-	
22	Batang Anai	KB ALMUNAWWAROH	-	100.000	26.900.000	19.985.000	7.015.000	27.000.000	-	-	
23	Batang Anai	KB AR RAHMAN	-	-	5.400.000	4.860.000	540.000	5.400.000	-	-	
24	Batang Anai	KB AR RASYID	-	40.000	20.960.000	18.860.000	2.140.000	21.000.000	-	-	
25	Batang Anai	KB AZ-ZAHRA	-	40.000	10.160.000	9.180.000	1.020.000	10.200.000	-	-	
26	Batang Anai	KB Bintungan Indah	-	-	18.000.000	16.200.000	1.800.000	18.000.000	-	-	
27	Batang Anai	KB DELIMA BANDARA	-	40.000	7.760.000	5.530.000	2.270.000	7.800.000	-	-	
28	Batang Anai	KB NUANSA INDAH	-	40.000	22.760.000	20.120.000	2.680.000	22.800.000	-	-	
29	Batang Anai	KB TITIAN AKA	-	40.000	14.960.000	13.500.000	1.500.000	15.000.000	-	-	
30	Batang Anai	SPS TONG BLAU	-	40.000	13.760.000	12.900.000	900.000	13.800.000	-	-	
31	Lubuk Alung	TK Negeri 01 Kecamatan Lubuk ALung	-	-	22.800.000	18.180.000	4.620.000	22.800.000	-	-	
32	Lubuk Alung	TK AISYIYAH LUBUK ALUNG	-	-	19.800.000	17.970.000	1.830.000	19.800.000	-	-	
33	Lubuk Alung	TK ALMUNAWWAROH	-	-	12.000.000	10.400.000	1.600.000	12.000.000	-	-	

NO	Kecamatan	Nama Sekolah	Saldo Awal 2025		Jumlah Penerima Tahun 2025	JUMLAH BOP REGULER BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BOP REGULER Belanja Modal	Jumlah Pengeluaran	SALDO BANK	SALDO TUNAI	KETERANGAN
			Saldo Bank	Saldo Tunai							
1		2	3	4	5	15	20	21	23	24	
34	Lubuk Alung	TK AMANAH UMI	-	-	24.000.000	20.640.000	3.360.000	24.000.000	-	-	
35	Lubuk Alung	TK AN NUUR	-	-	12.000.000	10.200.000	1.800.000	12.000.000	-	-	
36	Lubuk Alung	TK AR RAZZAQ AL MUGHNI OK	-	-	6.600.000	5.940.000	660.000	6.600.000	-	-	
37	Lubuk Alung	TK ATTAUBAH INSANI	-	-	5.700.000	5.448.000	-	5.448.000	252.000	-	
38	Lubuk Alung	TK DHARMA WANITA LUBUK ALUNG	-	-	16.200.000	13.330.000	2.870.000	16.200.000	-	-	
39	Lubuk Alung	TK FAWWAZ*KIDS	-	40.000	14.960.000	12.955.000	2.045.000	15.000.000	-	-	
40	Lubuk Alung	TK GLOBAL KIDS	-	-	18.000.000	9.500.000	8.500.000	18.000.000	-	-	
41	Lubuk Alung	TK ISLAM ANANDA	20.000	-	26.980.000	19.680.000	7.320.000	27.000.000	-	-	
42	Lubuk Alung	TK ISLAM BAKTI XX	-	-	15.600.000	14.050.000	1.550.000	15.600.000	-	-	
43	Lubuk Alung	TK ISLAM NUR HIDAYAH	-	-	67.200.000	49.040.000	18.160.000	67.200.000	-	-	
44	Lubuk Alung	TK IT AL-KHAIRA	-	-	4.800.000	4.320.000	480.000	4.800.000	-	-	
45	Lubuk Alung	TK KARYA	-	-	36.600.000	29.496.000	7.104.000	36.600.000	-	-	
46	Lubuk Alung	TK MANUNGGAL XXIII SIKABU	-	-	18.600.000	17.670.000	930.000	18.600.000	-	-	
47	Lubuk Alung	TK MERCY KIDS	-	-	19.800.000	18.070.000	1.730.000	19.800.000	-	-	
48	Lubuk Alung	KB AL- IKHLAS	-	-	5.940.000	5.158.000	600.000	5.758.000	182.000	-	
49	Lubuk Alung	KB AZ-ZAHRAH	-	-	15.000.000	9.400.000	5.600.000	15.000.000	-	-	
50	Lubuk Alung	KB BUNGA BANGSA	-	-	15.000.000	13.750.000	1.250.000	15.000.000	-	-	
51	Lubuk Alung	KB BUSTANUL YAQIN	-	-	13.200.000	12.230.000	970.000	13.200.000	-	-	
52	Lubuk Alung	KB CAHAYA BUNDA	-	-	13.200.000	11.880.000	1.320.000	13.200.000	-	-	
53	Lubuk Alung	KB DURIAN BANGKOK	-	-	10.800.000	9.720.000	1.080.000	10.800.000	-	-	
54	Lubuk Alung	KB FAWWAZ TAMIR	-	-	9.600.000	6.690.000	2.910.000	9.600.000	-	-	
55	Lubuk Alung	PAUD SIKABU LUBUK ALUNG	-	-	28.800.000	25.920.000	2.880.000	28.800.000	-	-	
56	Lubuk Alung	Paud Delima Muda	-	40.000	26.360.000	23.752.000	2.648.000	26.400.000	-	-	
57	Lubuk Alung	Paud Terpadu Aura Kasih	-	40.000	10.007.000	7.992.000	2.055.000	10.047.000	-	-	
58	Ulakan Tapakis	TK AQILA MADHANI	-	-	13.800.000	11.600.000	2.200.000	13.800.000	-	-	
59	Ulakan Tapakis	TK BAITURRAHMAN AN-NUR	-	-	14.400.000	12.840.000	1.560.000	14.400.000	-	-	
60	Ulakan Tapakis	TK IKhwal Hanifa	-	-	15.600.000	15.600.000	-	15.600.000	-	-	
61	Ulakan Tapakis	TK IT AL-FITRAH	-	100.000	17.900.000	17.700.000	300.000	18.000.000	-	-	
62	Ulakan Tapakis	TK IT AR-RAHMAH	-	-	10.200.000	9.180.000	1.020.000	10.200.000	-	-	
63	Ulakan Tapakis	TK QURAN AR-RASYIID	26.500	-	20.373.500	18.000.000	2.400.000	20.400.000	-	-	
64	Ulakan Tapakis	TK TUNAS HARAPAN TAPAKIS	-	40.000	11.960.000	10.800.000	1.200.000	12.000.000	-	-	
65	Ulakan Tapakis	KB Al - Amin	-	-	10.800.000	9.720.000	1.080.000	10.800.000	-	-	
66	Ulakan Tapakis	KB AL- MA'ARUF	-	40.000	5.360.000	4.860.000	540.000	5.400.000	-	-	
67	Ulakan Tapakis	KB AL-FURQON	-	-	7.800.000	5.420.000	2.380.000	7.800.000	-	-	
68	Ulakan Tapakis	KB SEMAI BENIH BANGSA	-	-	6.600.000	5.940.000	660.000	6.600.000	-	-	
69	Nan Sabaris	TK Negeri 01 Kecamatan Nan Sabaris	-	-	21.000.000	18.900.000	2.100.000	21.000.000	-	-	
70	Nan Sabaris	TK AL IKHSAN	-	-	7.200.000	7.200.000	-	7.200.000	-	-	
71	Nan Sabaris	TK ANDESSA	-	-	18.600.000	14.090.000	4.510.000	18.600.000	-	-	
72	Nan Sabaris	TK CARANO INDAH	-	40.000	35.360.000	33.600.000	1.800.000	35.400.000	-	-	

NO	Kecamatan	Nama Sekolah	Saldo Awal 2025		Jumlah Penerima Tahun 2025	JUMLAH BOP REGULER BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BOP REGULER Belanja Modal	Jumlah Pengeluaran	SALDO BANK	SALDO TUNAI	KETERANGAN
			Saldo Bank	Saldo Tunai							
1		2	3	4	5	15	20	21	23	24	
73	Nan Sabaris	TK FAJAR HIDAYAH	-	-	6.000.000	4.750.000	1.250.000	6.000.000	-	-	
74	Nan Sabaris	TK IT AL-HIKMAH AINI	-	-	15.600.000	13.930.000	1.670.000	15.600.000	-	-	
75	Nan Sabaris	TK IT ASH SHABUUR	-	900.000	14.700.000	13.540.000	2.060.000	15.600.000	-	-	
76	Nan Sabaris	TK IT CAHAYA HATI	-	40.000	40.160.000	28.200.000	12.000.000	40.200.000	-	-	
77	Nan Sabaris	TK NURWARNA	-	-	27.600.000	22.450.000	5.150.000	27.600.000	-	-	
78	Nan Sabaris	TK UMMI	-	-	3.600.000	3.215.000	385.000	3.600.000	-	-	
79	Nan Sabaris	TK WADESMA	-	-	14.400.000	7.760.000	6.640.000	14.400.000	-	-	
80	Nan Sabaris	TKS NURUL SYUHADAH	-	-	14.400.000	11.160.000	3.240.000	14.400.000	-	-	
81	Nan Sabaris	KB AZ-ZAHRA SUNUR III	-	40.000	19.160.000	17.140.000	2.060.000	19.200.000	-	-	
82	Nan Sabaris	KB AL FATIHAH	-	-	18.000.000	16.000.000	2.000.000	18.000.000	-	-	
83	Nan Sabaris	KB ANUGRAH	-	-	16.200.000	14.780.000	1.420.000	16.200.000	-	-	
84	Nan Sabaris	KB AUZIA SAHABAT	-	-	4.200.000	3.780.000	420.000	4.200.000	-	-	
85	Nan Sabaris	KB AZZAHRAH SUNUR I	-	40.000	8.960.000	8.100.000	900.000	9.000.000	-	-	
86	Nan Sabaris	KB KAPALO KOTO	-	500	16.799.500	14.600.000	2.200.000	16.800.000	-	-	
87	Nan Sabaris	KB TUNAS MEKAR	-	20.000	18.580.000	18.600.000	-	18.600.000	-	-	
88	Nan Sabaris	PAUD CAHAYA GEMILANG	-	-	15.600.000	15.100.000	500.000	15.600.000	-	-	
89	Nan Sabaris	KB BUAH HATI	-	40.000	11.246.000	10.260.000	1.026.000	11.286.000	-	-	
90	Nan Sabaris	KB PUSPA MEKAR	-	-	21.600.000	16.640.000	4.960.000	21.600.000	-	-	
91	Nan Sabaris	SPS MAWAR	-	280.000	8.120.000	7.050.000	1.350.000	8.400.000	-	-	
92	Nan Sabaris	TK ISLAM ELSUNURY	-	40.000	5.960.000	3.300.000	2.700.000	6.000.000	-	-	
93	2 x 11 Anam Lingkuang	TK AISYIYAH SICINCIN	-	-	35.400.000	31.850.000	3.550.000	35.400.000	-	-	
94	2 x 11 Anam Lingkuang	TK ASTER INDAH	-	-	19.800.000	14.220.000	5.580.000	19.800.000	-	-	
95	2 x 11 Anam Lingkuang	TK CEMPAKA PUTIH	-	-	31.800.000	28.600.000	3.200.000	31.800.000	-	-	
96	2 x 11 Anam Lingkuang	TK LEMBAH ANAI	-	100.000	29.900.000	25.672.000	3.000.000	28.672.000	1.328.000	-	
97	2 x 11 Anam Lingkuang	TK TUNAS MEKAR	340.000	-	24.860.000	22.680.000	2.520.000	25.200.000	-	-	
98	2 x 11 Anam Lingkuang	KB BINTANG KECIL	-	-	15.000.000	13.500.000	1.500.000	15.000.000	-	-	
99	2 x 11 Anam Lingkuang	KB JENIUS CILIK	-	40.000	9.560.000	8.297.000	1.303.000	9.600.000	-	-	
100	2 x 11 Anam Lingkuang	KB MARZIA PAUH	-	-	22.200.000	11.428.000	10.772.000	22.200.000	-	-	
101	2 x 11 Anam Lingkuang	POS PAUD FLAMBOYAN I	-	-	6.000.000	5.400.000	600.000	6.000.000	-	-	
102	2 x 11 Anam Lingkuang	POS PAUD MAWAR I	-	-	9.600.000	8.640.000	960.000	9.600.000	-	-	

NO	Kecamatan	Nama Sekolah	Saldo Awal 2025		Jumlah Penerima Tahun 2025	JUMLAH BOP REGULER BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BOP REGULER Belanja Modal	Jumlah Pengeluaran	SALDO BANK	SALDO TUNAI	KETERANGAN
			Saldo Bank	Saldo Tunai							
1		2	3	4	5	15	20	21	23	24	
103	2 x 11 Anam Lingkuang	POS PAUD MEKAR MAJU	-	-	15.000.000	13.500.000	1.500.000	15.000.000	-	-	
104	VII Koto Sungai Sarik	TK Negeri 01 VII Koto Sungai Sarik	-	-	14.400.000	14.010.000	390.000	14.400.000	-	-	
105	VII Koto Sungai Sarik	TK UNGGUL TERPADU PADANG PARIAMAN	-	-	37.200.000	25.480.000	11.720.000	37.200.000	-	-	
106	VII Koto Sungai Sarik	TK ADE IRMA	-	-	10.800.000	9.340.000	1.460.000	10.800.000	-	-	
107	VII Koto Sungai Sarik	TK AMAR MA ARUF	-	40.000	16.160.000	13.750.000	2.450.000	16.200.000	-	-	
108	VII Koto Sungai Sarik	TK DHARMAWANITA	-	-	13.200.000	10.780.000	2.420.000	13.200.000	-	-	
109	VII Koto Sungai Sarik	TK KURNIA	-	-	11.400.000	10.260.000	1.140.000	11.400.000	-	-	
110	VII Koto Sungai Sarik	TK MUSTHAQIM	-	40.000	14.360.000	11.980.000	2.420.000	14.400.000	-	-	
111	VII Koto Sungai Sarik	KB AL-ZIKRA	-	40.000	7.760.000	7.020.000	780.000	7.800.000	-	-	
112	VII Koto Sungai Sarik	KB BAHAGIA II	-	40.000	25.160.000	20.172.000	5.028.000	25.200.000	-	-	
113	VII Koto Sungai Sarik	KB Kasih Bunda	-	40.000	10.160.000	9.180.000	1.020.000	10.200.000	-	-	
114	VII Koto Sungai Sarik	KB MAWAR	-	40.000	8.360.000	7.500.000	900.000	8.400.000	-	-	
115	VII Koto Sungai Sarik	PAUD AL - HAKIM	-	40.000	23.360.000	20.150.000	3.250.000	23.400.000	-	-	
116	VII Koto Sungai Sarik	Paud IKHLAS MULIA	-	40.000	11.960.000	9.950.000	2.050.000	12.000.000	-	-	
117	VII Koto Sungai Sarik	Paud Insan Cipta Mandiri	-	40.000	11.960.000	10.800.000	1.200.000	12.000.000	-	-	
118	V Koto Kampung Dalam	TK Negeri 01 Kecamatan V Koto Kampung Dalam	-	-	25.200.000	22.680.000	2.520.000	25.200.000	-	-	
119	V Koto Kampung Dalam	TK AMANAH	-	-	8.400.000	7.560.000	840.000	8.400.000	-	-	
120	V Koto Kampung Dalam	TK AWAN BAJUNTAI	-	-	15.600.000	13.740.000	1.840.000	15.580.000	20.000	-	
121	V Koto Kampung Dalam	TK HARAPAN UMAT	-	-	17.400.000	15.400.000	2.000.000	17.400.000	-	-	
122	V Koto Kampung Dalam	TK IRSYADDUNAS	-	-	6.600.000	5.940.000	660.000	6.600.000	-	-	
123	V Koto Kampung Dalam	TK ISLAM SILATURAHMI	-	-	24.600.000	20.402.000	4.198.000	24.600.000	-	-	
124	V Koto Kampung Dalam	TK Islam Terpadu Al Marhamah	900.000	-	27.900.000	16.575.000	11.925.000	28.500.000	300.000	-	
125	V Koto Kampung Dalam	TK RAUDHATUL JANNAH	-	-	4.800.000	4.320.000	480.000	4.800.000	-	-	
126	V Koto Kampung Dalam	KB AL HIDAYAH	37.000	-	10.763.000	9.720.000	1.080.000	10.800.000	-	-	
127	V Koto Kampung Dalam	KB MANDALI AJUNG	-	-	11.400.000	8.690.000	2.710.000	11.400.000	-	-	
128	Sungai Limau	TK Negeri 01 Kecamatan Sungai Limau	-	-	16.800.000	6.970.000	9.830.000	16.800.000	-	-	
129	Sungai Limau	TK ABA SUNGAI LIMAU	-	-	38.400.000	32.540.000	5.860.000	38.400.000	-	-	
130	Sungai Limau	TK AISYIYAH	-	-	11.400.000	9.180.000	2.220.000	11.400.000	-	-	

NO	Kecamatan	Nama Sekolah	Saldo Awal 2025		Jumlah Penerima Tahun 2025	JUMLAH BOP REGULER BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BOP REGULER Belanja Modal	Jumlah Pengeluaran	SALDO BANK	SALDO TUNAI	KETERANGAN
			Saldo Bank	Saldo Tunai							
1		2	3	4	5	15	20	21	23	24	
131	Sungai Limau	TK AL-KAUTSAR	-	-	7.200.000	6.480.000	720.000	7.200.000	-	-	
132	Sungai Limau	TK ALLATIVUN BUKIT KERAMBIL	-	-	33.600.000	28.440.000	5.160.000	33.600.000	-	-	
133	Sungai Limau	TK ANUGRAH SAYANG IBU	-	40.000	17.360.000	16.320.000	1.080.000	17.400.000	-	-	
134	Sungai Limau	TK AZ ZAHRAH MA ARIF	-	-	3.600.000	3.240.000	360.000	3.600.000	-	-	
135	Sungai Limau	TK DAHLIA SUNGAI LIMAU	-	20.000	41.380.000	33.360.000	8.040.000	41.400.000	-	-	
136	Sungai Limau	TK-IT IZZATUL KHONSA	-	-	7.200.000	6.170.000	1.030.000	7.200.000	-	-	
137	Sungai Limau	KB AL-HAKIM	11.000	-	8.389.000	4.800.000	3.600.000	8.400.000	-	-	
138	Sungai Limau	KB AL FIKRI	-	24.000	11.376.000	10.540.000	860.000	11.400.000	-	-	
139	Sungai Limau	KB AL-BAITURRAHMAN	-	-	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-	-	
140	Sungai Limau	KB ANUGRAH ILLAHI	-	-	9.600.000	8.340.000	1.260.000	9.600.000	-	-	
141	Sungai Limau	KB AR-RAUDHATUL ILMI	-	-	6.600.000	5.940.000	660.000	6.600.000	-	-	
142	Sungai Limau	KB AR-ROHIM	-	108.000	16.092.000	15.750.000	450.000	16.200.000	-	-	
143	Sungai Limau	KB BALDATUN THAYYIBAH	-	-	14.400.000	14.400.000	-	14.400.000	-	-	
144	Sungai Limau	KB SUCI	-	-	5.910.000	-	-	-	5.910.000	-	
145	Sungai Limau	SKB KABUPATEN PADANG PARIAMAN	150.000	-	1.650.000	1.620.000	180.000	1.800.000	-	-	
146	Sungai Limau	KB CEMPAKA	-	-	16.200.000	7.080.000	9.120.000	16.200.000	-	-	
147	Sungai Limau	KB MUTIARA	-	2.000	4.198.000	3.780.000	420.000	4.200.000	-	-	
148	Sungai Geringging	TK ALIFYA	-	-	4.800.000	4.688.000	112.000	4.800.000	-	-	
149	Sungai Geringging	TK BUNDO KANDUANG	-	-	18.600.000	15.948.000	2.652.000	18.600.000	-	-	
150	Sungai Geringging	TK CAHAYA BUNDA	-	40.000	23.960.000	16.800.000	7.200.000	24.000.000	-	-	
151	Sungai Geringging	TK HARAPAN BUNDA	-	-	31.800.000	28.500.000	3.300.000	31.800.000	-	-	
152	Sungai Geringging	TK TERATAI PUTIH	-	-	13.800.000	12.420.000	1.380.000	13.800.000	-	-	
153	Sungai Geringging	KB AL-HUDA	-	-	20.400.000	16.390.000	4.010.000	20.400.000	-	-	
154	Sungai Geringging	KB AMANAH PELANGI	-	-	17.400.000	15.600.000	1.800.000	17.400.000	-	-	
155	Sungai Geringging	KB AN-NAFI U	-	40.000	18.560.000	17.050.000	1.550.000	18.600.000	-	-	
156	Sungai Geringging	KB ARRAZAAQ	-	-	12.600.000	11.340.000	1.260.000	12.600.000	-	-	
157	Sungai Geringging	KB HIDAYAH	-	-	15.000.000	13.100.000	1.900.000	15.000.000	-	-	
158	Sungai Geringging	KB HIKMAH SEJATI	-	-	16.200.000	14.580.000	1.620.000	16.200.000	-	-	
159	Sungai Geringging	KB LIMA PUTRI	-	-	18.600.000	16.740.000	1.860.000	18.600.000	-	-	
160	Sungai Geringging	KB PERMATA BUNDA	-	-	25.200.000	22.600.000	2.600.000	25.200.000	-	-	
161	Sungai Geringging	KB QHAIRA	-	-	3.600.000	-	-	-	-	-	TIDAK AKTIF (SUDAH DI KEMBALIKAN KE KAS DAERAH)
162	Sungai Geringging	KB. AUR SERUMPUN	-	40.000	19.160.000	11.420.000	7.780.000	19.200.000	-	-	
163	Sungai Geringging	SPS DURIAN AJUNG	-	-	36.000.000	32.600.000	3.400.000	36.000.000	-	-	
164	IV Koto Aur Malintang	TK AISIYAH ABA SIMPANG	-	-	5.400.000	4.860.000	540.000	5.400.000	-	-	
165	IV Koto Aur Malintang	TK CENDANA	-	30.000	5.370.000	4.860.000	540.000	5.400.000	-	-	
166	IV Koto Aur Malintang	TK IKHLAS BATU BASA	-	-	9.000.000	8.100.000	900.000	9.000.000	-	-	
167	IV Koto Aur Malintang	TK NURUL HUDA	-	40.000	15.560.000	11.590.000	4.010.000	15.600.000	-	-	
168	IV Koto Aur Malintang	TK RINTISAN HATI	-	-	4.800.000	3.070.000	1.730.000	4.800.000	-	-	

NO	Kecamatan	Nama Sekolah	Saldo Awal 2025		Jumlah Penerima Tahun 2025	JUMLAH BOP REGULER BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BOP REGULER Belanja Modal	Jumlah Pengeluaran	SALDO BANK	SALDO TUNAI	KETERANGAN
			Saldo Bank	Saldo Tunai							
1		2	3	4	5	15	20	21	23	24	
169	IV Koto Aur Malintang	TK RIZKY BUNDA	-	-	7.800.000	7.040.000	760.000	7.800.000	-	-	
170	IV Koto Aur Malintang	KB DARUL HIKMAH	-	-	13.200.000	11.880.000	1.320.000	13.200.000	-	-	
171	IV Koto Aur Malintang	KB MITRA	-	-	21.600.000	15.215.000	6.385.000	21.600.000	-	-	
172	IV Koto Aur Malintang	KB ANGGREK	-	-	12.600.000	11.340.000	1.260.000	12.600.000	-	-	
173	IV Koto Aur Malintang	KB ANJANI	-	-	12.600.000	11.340.000	1.260.000	12.600.000	-	-	
174	IV Koto Aur Malintang	KB Bundo Kanduang	-	-	14.400.000	12.660.000	1.740.000	14.400.000	-	-	
175	IV Koto Aur Malintang	KB CERDAS	-	-	30.000.000	23.100.000	6.900.000	30.000.000	-	-	
176	IV Koto Aur Malintang	KB LAZIATUL TUSIAH	-	-	5.400.000	4.820.000	580.000	5.400.000	-	-	
177	IV Koto Aur Malintang	KB MUSLIMIN	-	-	10.200.000	9.480.000	720.000	10.200.000	-	-	
178	IV Koto Aur Malintang	KB NURUL IKHLAS	-	-	16.200.000	12.040.000	4.160.000	16.200.000	-	-	
179	IV Koto Aur Malintang	KB RESTU BUNDA	-	-	9.600.000	8.638.695	960.000	9.598.695	1.305	-	
180	IV Koto Aur Malintang	KB RESTU IBU	-	-	10.800.000	9.900.000	900.000	10.800.000	-	-	
181	IV Koto Aur Malintang	KB SAYANG IBU	-	-	20.400.000	18.170.000	2.230.000	20.400.000	-	-	
182	IV Koto Aur Malintang	KB SUNNATUL IKHLAS	-	-	7.200.000	5.170.000	2.030.000	7.200.000	-	-	
183	IV Koto Aur Malintang	KB WARDATUN NADIYAH	-	-	16.800.000	13.150.000	3.650.000	16.800.000	-	-	
184	IV Koto Aur Malintang	PAUD MAWAR	-	-	4.800.000	1.840.000	-	1.840.000	560.000	-	TIDAK AKTIF TAHAP II (SUDAH DI KEMBALIAN KE KAS DAERAH
185	IV Koto Aur Malintang	KB BUAH HATI	-	-	3.300.000	-	-	-	-	-	TIDAK AKTIF (SUDAH DI KEMBALIKAN KE KAS DAERAH)
186	IV Koto Aur Malintang	TK NURUL AKHIRAH	-	-	17.400.000	14.160.000	3.240.000	17.400.000	-	-	
187	Batang Gasan	TK BUNGA TANJUNG	-	-	22.800.000	16.026.000	6.774.000	22.800.000	-	-	
188	Batang Gasan	KB AL-AZHAR	-	-	27.600.000	24.840.000	2.760.000	27.600.000	-	-	
189	Batang Gasan	KB KENANGA III	-	-	8.400.000	7.140.000	1.260.000	8.400.000	-	-	
190	Batang Gasan	KB MELATI	-	-	10.800.000	9.720.000	1.080.000	10.800.000	-	-	
191	Batang Gasan	KB RAHIMA	-	-	15.600.000	11.080.000	4.520.000	15.600.000	-	-	
192	V Koto Timur	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kudu Ganting	-	-	21.000.000	19.000.000	2.000.000	21.000.000	-	-	
193	V Koto Timur	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PADANG KAJAI	526.500	655.500	18.018.000	17.280.000	1.920.000	19.200.000	-	-	
194	V Koto Timur	TK ISLAM BUNGA ANGGREK	-	-	6.000.000	5.400.000	600.000	6.000.000	-	-	
195	V Koto Timur	KB AL-FALAH	-	-	8.400.000	7.560.000	840.000	8.400.000	-	-	
196	V Koto Timur	KB BALQIS	-	-	9.600.000	8.640.000	960.000	9.600.000	-	-	
197	V Koto Timur	KB BIRRUL WALIDAIN	-	-	16.800.000	15.120.000	1.680.000	16.800.000	-	-	
198	V Koto Timur	KB INDAH	-	150.000	4.650.000	4.320.000	480.000	4.800.000	-	-	
199	V Koto Timur	KB SURIA BAKTI	-	-	13.200.000	11.880.000	1.320.000	13.200.000	-	-	
200	V Koto Timur	Paud Kasih Ibu	-	-	9.600.000	8.621.000	979.000	9.600.000	-	-	
201	Patamuan	TK Negeri 01 Kecamatan Patamuan	-	-	18.000.000	15.800.000	2.200.000	18.000.000	-	-	
202	Patamuan	TK ASMAUL HUSNA	-	-	7.800.000	7.020.000	780.000	7.800.000	-	-	
203	Patamuan	TK HARAPAN BANGSA	-	-	25.800.000	23.220.000	2.580.000	25.800.000	-	-	

NO	Kecamatan	Nama Sekolah	Saldo Awal 2025		Jumlah Penerima Tahun 2025	JUMLAH BOP REGULER BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BOP REGULER Belanja Modal	Jumlah Pengeluaran	SALDO BANK	SALDO TUNAI	KETERANGAN
			Saldo Bank	Saldo Tunai							
1		2	3	4	5	15	20	21	23	24	
204	Patamuan	TK NASIONAL	-	40.000	10.760.000	9.572.400	1.227.600	10.800.000	-	-	
205	Patamuan	TK PUSAKO NAGARI	-	-	13.200.000	11.880.000	1.320.000	13.200.000	-	-	
206	Patamuan	KB ALKAUTSAR INSANI	-	40.000	11.960.000	10.800.000	1.200.000	12.000.000	-	-	
207	Patamuan	KB BUNDO KANDUANG	232.000	68.000	9.300.000	7.890.000	1.710.000	9.600.000	-	-	
208	Patamuan	KB BUNGA TANJUNG	-	40.000	11.960.000	10.800.000	1.200.000	12.000.000	-	-	
209	Patamuan	KB CEMERLANG	-	40.000	13.760.000	11.220.000	2.580.000	13.800.000	-	-	
210	Patamuan	KB HARAPAN BANGSA	-	-	7.200.000	6.480.000	720.000	7.200.000	-	-	
211	Patamuan	KB JASA BUNDA	5.100.000	-	8.100.000	11.300.000	1.900.000	13.200.000	-	-	
212	Patamuan	KB LADA	-	40.000	12.560.000	11.010.000	1.590.000	12.600.000	-	-	
213	Patamuan	KB PELANGI CERDAS	-	40.000	11.360.000	10.700.000	700.000	11.400.000	-	-	
214	Patamuan	PAUD NASIONAL	-	40.000	6.560.000	5.885.000	665.000	6.550.000	50.000	-	
215	Padang Sago	TK MANUNGGAL XVII	-	160.000	26.240.000	23.400.000	3.000.000	26.400.000	-	-	
216	Padang Sago	TK MEKAR MELATI	-	-	3.528.000	3.168.000	360.000	3.528.000	-	-	
217	Padang Sago	TK PERMATA NAGARI	3.000.000	-	1.800.000	900.000	800.000	1.700.000	3.100.000	-	
218	Padang Sago	KB BUNGA TANJUNG	-	-	10.800.000	8.820.000	1.980.000	10.800.000	-	-	
219	Padang Sago	KB KIAU CERIA	-	-	11.400.000	10.250.000	1.150.000	11.400.000	-	-	
220	Padang Sago	KB TUNGKA KOTO BARU	-	-	13.200.000	13.125.000	75.000	13.200.000	-	-	
221	2 x 11 Kayu Tanam	TK Negeri 01 Kecamatan 2x11 Kayutanam	-	-	35.400.000	24.750.400	10.649.600	35.400.000	-	-	
222	2 x 11 Kayu Tanam	TK BUNDO KANDUANG	50.000	-	11.350.000	10.237.600	1.162.400	11.400.000	-	-	
223	2 x 11 Kayu Tanam	TK CINTA ALAM	-	-	16.800.000	12.076.800	4.723.200	16.800.000	-	-	
224	2 x 11 Kayu Tanam	TK CITRA PIRANDU	-	-	13.800.000	12.920.000	880.000	13.800.000	-	-	
225	2 x 11 Kayu Tanam	TK IT HAZIMA	-	-	27.600.000	24.700.000	2.900.000	27.600.000	-	-	
226	2 x 11 Kayu Tanam	TK PERMATA BUNDA	-	-	10.800.000	9.720.000	1.080.000	10.800.000	-	-	
227	2 x 11 Kayu Tanam	TK TUNAS BANGSA	-	40.000	24.560.000	22.120.000	2.480.000	24.600.000	-	-	
228	2 x 11 Kayu Tanam	KB BUNDO	-	-	10.800.000	9.720.000	1.080.000	10.800.000	-	-	
229	2 x 11 Kayu Tanam	KB ARAFAH	-	-	9.600.000	6.340.000	3.260.000	9.600.000	-	-	
230	2 x 11 Kayu Tanam	KB BELAIAN BUNDA	-	-	19.200.000	16.458.000	2.742.000	19.200.000	-	-	
231	2 x 11 Kayu Tanam	KB DOA BUNDA	-	-	12.000.000	10.800.000	1.200.000	12.000.000	-	-	
232	2 x 11 Kayu Tanam	KB FLAMBOYAN II	-	-	16.200.000	14.580.000	1.620.000	16.200.000	-	-	
233	2 x 11 Kayu Tanam	KB HATI MULIA	-	-	13.200.000	11.880.000	1.320.000	13.200.000	-	-	
234	2 x 11 Kayu Tanam	KB KENANGA	-	-	15.000.000	13.500.000	1.500.000	15.000.000	-	-	
235	2 x 11 Kayu Tanam	KB MAWADDAH	-	-	6.600.000	5.940.000	660.000	6.600.000	-	-	
236	2 x 11 Kayu Tanam	KB NUR IKHLAS	-	-	24.000.000	17.600.000	6.400.000	24.000.000	-	-	
237	2 x 11 Kayu Tanam	KB NUSA INDAH	-	-	10.800.000	9.720.000	1.080.000	10.800.000	-	-	
238	2 x 11 Kayu Tanam	KB TITIAN AMANAH	-	-	7.056.000	6.036.000	1.020.000	7.056.000	-	-	
239	2 x 11 Kayu Tanam	KB TUNAS HARAPAN	-	-	22.800.000	20.520.000	2.280.000	22.800.000	-	-	
240	2 x 11 Kayu Tanam	KB TUNAS INSANI	-	-	18.600.000	16.740.000	1.860.000	18.600.000	-	-	
241	2 x 11 Kayu Tanam	KB YARAHMAN YARAHIM	-	-	8.400.000	7.560.000	840.000	8.400.000	-	-	
242	Sintuk Toboh Gadang	TK Negeri 01 Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	-	23.400.000	21.060.000	2.340.000	23.400.000	-	-	

NO	Kecamatan	Nama Sekolah	Saldo Awal 2025		Jumlah Penerima Tahun 2025	JUMLAH BOP REGULER BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH BOP REGULER Belanja Modal	Jumlah Pengeluaran	SALDO BANK	SALDO TUNAI	KETERANGAN
			Saldo Bank	Saldo Tunai							
1		2	3	4	5	15	20	21	23	24	
243	Sintuk Toboh Gadang	TK AL IHSAN	42.500	57.500	6.500.000	5.940.000	660.000	6.600.000	-	-	
244	Sintuk Toboh Gadang	TK AL-FITRAH	-	-	15.000.000	13.500.000	1.500.000	15.000.000	-	-	
245	Sintuk Toboh Gadang	TK AMANDA KIDS	37.822	-	25.762.178	23.210.000	2.590.000	25.800.000	-	-	
246	Sintuk Toboh Gadang	TK DAHLIA	-	-	19.200.000	17.280.000	1.920.000	19.200.000	-	-	
247	Sintuk Toboh Gadang	TK IT AL-KHAIRA II	-	-	18.000.000	14.300.000	3.700.000	18.000.000	-	-	
248	Sintuk Toboh Gadang	TK Nur Fakhira	-	-	11.400.000	10.260.000	1.140.000	11.400.000	-	-	
249	Sintuk Toboh Gadang	TK SARI BULAN	-	-	7.800.000	7.020.000	780.000	7.800.000	-	-	
250	Sintuk Toboh Gadang	TK SAYANG IBU	-	-	7.200.000	6.480.000	720.000	7.200.000	-	-	
251	Sintuk Toboh Gadang	KB AMANAH WANITA ISLAM	12.000	-	11.388.000	10.400.000	1.000.000	11.400.000	-	-	
252	Sintuk Toboh Gadang	KB IT AR-RAUDHAH	35.000	-	25.765.000	23.220.000	2.580.000	25.800.000	-	-	
253	Sintuk Toboh Gadang	KB NURUL IHSAN CENDEKIA	-	-	22.200.000	19.075.000	3.125.000	22.200.000	-	-	
254	Sintuk Toboh Gadang	KB PALEMBAYAN	-	-	17.400.000	15.660.000	1.740.000	17.400.000	-	-	
255	Sintuk Toboh Gadang	KB RAUDATHUL ILMI	-	20.000	30.580.000	28.815.000	1.785.000	30.600.000	-	-	
256	Sintuk Toboh Gadang	PAUD HARAPAN BANGSA	-	-	12.000.000	10.800.000	1.200.000	12.000.000	-	-	
257	VI Lingkung	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN	-	-	49.200.000	38.200.000	11.000.000	49.200.000	-	-	
258	VI Lingkung	TK Negeri 01 Kecamatan Enam Lingkung	-	-	16.800.000	11.120.000	5.680.000	16.800.000	-	-	
259	VI Lingkung	TK Negeri 02 Kecamatan Enam Lingkung	-	-	14.400.000	11.460.000	2.940.000	14.400.000	-	-	
260	VI Lingkung	TK Negeri 03 Kecamatan Enam Lingkung	-	40.000	32.960.000	25.400.000	7.600.000	33.000.000	-	-	
261	VI Lingkung	TK Negeri 04 Kecamatan Enam Lingkung	-	-	21.000.000	15.950.000	5.050.000	21.000.000	-	-	
262	VI Lingkung	TK ABA PAKANDANGAN	-	40.000	8.960.000	6.245.500	2.754.500	9.000.000	-	-	
263	VI Lingkung	TK AL HIDAYAH RIMBO DADOK	-	-	30.000.000	23.400.000	6.600.000	30.000.000	-	-	
264	VI Lingkung	TK AL MUSLIM	-	-	9.600.000	8.640.000	960.000	9.600.000	-	-	
265	VI Lingkung	TK HARAPAN KITA TANJUNG AUR	-	-	10.800.000	7.626.000	3.174.000	10.800.000	-	-	
266	VI Lingkung	TK SERUMPUN	-	-	4.800.000	4.320.000	480.000	4.800.000	-	-	
267	VI Lingkung	TK SIMPANG TIGO	-	110.000	17.290.000	15.660.000	1.740.000	17.400.000	-	-	
268	VI Lingkung	TK Negeri 05 Kecamatan Enam Lingkung	1.580.000	-	26.020.000	24.090.000	3.510.000	27.600.000	-	-	
269	VI Lingkung	KB Aisyiyah	-	-	10.200.000	9.330.000	870.000	10.200.000	-	-	
270	VI Lingkung	KB FLAMBOYAN II	60.000	40.000	16.100.000	14.480.000	1.720.000	16.200.000	-	-	
271	VI Lingkung	KB MEKAR SARI	-	-	15.000.000	13.625.000	1.375.000	15.000.000	-	-	
272	VI Lingkung	PAUD NURUL ILMI	-	-	11.400.000	10.250.000	1.150.000	11.400.000	-	-	
273	VI Lingkung	TPA SALSABILA	-	60.000	5.340.000	4.860.000	540.000	5.400.000	-	-	
274	VI Lingkung	POS PAUD FLAMBOYAN III	-	40.000	11.960.000	8.000.000	4.000.000	12.000.000	-	-	
275	VI Lingkung	SPS MELATI III	-	-	2.700.000	-	-	-			TIDAK AKTIF (SUDAH DI KEMBALIKAN KE KAS DAERAH)
JUMLAH			12.280.822	5.344.004	**4.296.042.178**	**3.609.319.495**	**680.640.200**	**4.289.959.695**	**11.707.305**		

IKHTISAR TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE NAGARI TAHUN 2025

NO.	KECAMATAN	NAGARI		ADN		SILTAP		DANA DESA		TOTAL	
				ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	LUBUK ALUNG	1	LUBUK ALUNG	422.630.700,00	422.630.700,00	402.600.000,00	402.600.000,00	1.249.300.000,00	1.059.518.800,00	2.074.530.700,00	1.884.749.500,00
		2	PUNGGUANG KASIAK LUBUK ALUNG	416.360.800,00	416.360.800,00	378.600.000,00	378.600.000,00	1.118.851.000,00	880.561.840,00	1.913.811.800,00	1.675.522.640,00
		3	PASIE LAWEH LUBUK ALUNG	419.538.500,00	419.538.500,00	377.400.000,00	377.400.000,00	1.119.607.000,00	1.119.607.000,00	1.916.545.500,00	1.916.545.500,00
		4	AIE TAJUN LUBUK ALUNG	378.408.900,00	378.408.900,00	327.000.000,00	327.000.000,00	1.068.526.000,00	1.068.526.000,00	1.773.934.900,00	1.773.934.900,00
		5	SIKABU LUBUK ALUNG	343.258.300,00	343.258.300,00	301.800.000,00	301.800.000,00	922.160.000,00	922.160.000,00	1.567.218.300,00	1.567.218.300,00
		6	SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG	347.373.700,00	347.373.700,00	301.800.000,00	301.800.000,00	908.921.000,00	908.921.000,00	1.558.094.700,00	1.558.094.700,00
		7	SINGGULIANG LUBUK ALUNG	334.054.700,00	334.054.700,00	327.000.000,00	327.000.000,00	904.535.000,00	904.535.000,00	1.565.589.700,00	1.565.589.700,00
		8	SALIBUTAN LUBUK ALUNG	345.245.900,00	345.245.900,00	301.800.000,00	301.800.000,00	682.664.000,00	682.664.000,00	1.329.709.900,00	1.329.709.900,00
		9	BALAH HILIA LUBUK ALUNG	402.021.800,00	402.021.800,00	427.800.000,00	427.800.000,00	1.241.868.000,00	991.801.200,00	2.071.689.800,00	1.821.623.000,00
2	BATANG ANAI	10	KATAPIANG	522.562.600,00	522.562.600,00	429.000.000,00	429.000.000,00	1.566.900.000,00	1.566.900.000,00	2.518.462.600,00	2.518.462.600,00
		11	KASANG	490.621.100,00	490.621.100,00	479.400.000,00	479.400.000,00	1.481.175.000,00	1.227.221.622,00	2.451.196.100,00	2.197.242.722,00
		12	SUNGAI BULUAH	328.343.500,00	328.343.500,00	378.600.000,00	378.600.000,00	845.504.000,00	845.504.000,00	1.552.447.500,00	1.552.447.500,00
		13	BUAYAN LUBUK ALUNG	339.717.700,00	339.717.700,00	353.400.000,00	353.400.000,00	1.163.627.000,00	1.163.627.000,00	1.856.744.700,00	1.856.744.700,00
		14	SUNGAI BULUAH TIMUR	404.320.800,00	404.320.800,00	377.400.000,00	377.400.000,00	892.194.000,00	892.194.000,00	1.673.914.800,00	1.673.914.800,00
		15	SUNGAI BULUAH BARAT	378.177.700,00	378.177.700,00	377.400.000,00	377.400.000,00	1.128.094.000,00	1.128.094.000,00	1.883.671.700,00	1.883.671.700,00
		16	SUNGAI BULUAH UTARA	324.150.100,00	324.150.100,00	301.800.000,00	301.800.000,00	762.621.000,00	762.621.000,00	1.388.571.100,00	1.388.571.100,00
		17	SUNGAI BULUAH SELATAN	362.500.100,00	362.500.100,00	353.400.000,00	353.400.000,00	992.461.000,00	992.461.000,00	1.708.361.100,00	1.708.361.100,00
3	NAN SABARIS	18	KAPALO KOTO	314.354.100,00	314.354.100,00	303.000.000,00	303.000.000,00	754.218.000,00	635.036.400,00	1.371.572.100,00	1.252.390.500,00
		19	PAUH KAMBAR	362.588.100,00	362.588.100,00	429.000.000,00	429.000.000,00	1.362.052.000,00	1.362.052.000,00	2.153.640.100,00	2.153.640.100,00
		20	PADANG BINTUNGAN	334.882.300,00	334.882.300,00	301.800.000,00	301.800.000,00	817.818.000,00	817.818.000,00	1.454.500.300,00	1.454.500.300,00
		21	KURAI TAJI	394.982.600,00	394.982.600,00	403.800.000,00	403.800.000,00	1.232.491.000,00	1.232.491.000,00	2.031.273.600,00	2.031.273.600,00
		22	SUNUA	342.484.400,00	342.484.400,00	328.200.000,00	328.200.000,00	867.389.000,00	867.389.000,00	1.538.073.400,00	1.538.073.400,00
		23	PADANG KANDANG PULAU AIE PADANG BINTUNGAN	317.129.500,00	317.129.500,00	327.000.000,00	327.000.000,00	768.858.000,00	768.858.000,00	1.412.987.500,00	1.412.987.500,00
		24	SUNUA TENGAH	333.920.300,00	333.920.300,00	327.000.000,00	327.000.000,00	851.613.000,00	851.613.000,00	1.512.533.300,00	1.512.533.300,00
		25	SUNUA BARAT	330.840.000,00	330.840.000,00	327.000.000,00	327.000.000,00	798.162.000,00	798.162.000,00	1.456.002.000,00	1.456.002.000,00
		26	KURAI TAJI TIMUR	328.448.100,00	328.448.100,00	353.400.000,00	353.400.000,00	797.445.000,00	797.445.000,00	1.479.293.100,00	1.479.293.100,00
4	2 X 11 ENAM LINGKUNG	27	SICINCIN	424.326.300,00	424.326.300,00	301.800.000,00	301.800.000,00	1.270.210.000,00	1.080.287.060,00	1.996.336.300,00	1.806.413.360,00
		28	LUBUK PANDAN	360.591.800,00	360.591.800,00	327.000.000,00	327.000.000,00	1.288.291.000,00	1.288.291.000,00	1.975.882.800,00	1.975.882.800,00
		29	SUNGAI ASAM	355.223.900,00	355.223.900,00	276.600.000,00	276.600.000,00	955.100.000,00	746.924.248,00	1.586.923.900,00	1.378.748.148,00
5	VII KOTO	30	BALAH AIA	347.973.100,00	347.973.100,00	328.200.000,00	328.200.000,00	921.041.000,00	921.041.000,00	1.597.214.100,00	1.597.214.100,00
		31	SUNGAI SARIAK	386.754.600,00	386.754.600,00	328.200.000,00	328.200.000,00	1.027.759.000,00	1.027.759.000,00	1.742.713.600,00	1.742.713.600,00
		32	LURAH AMPALU	419.698.800,00	419.698.800,00	579.000.000,00	579.000.000,00	1.361.917.000,00	1.361.917.000,00	2.360.615.800,00	2.360.615.800,00
		33	LAREH NAN PANJANG	325.359.200,00	325.359.200,00	328.200.000,00	328.200.000,00	1.019.997.000,00	1.019.997.000,00	1.673.556.200,00	1.673.556.200,00
		34	LAREH NAN PANJANG SELATAN	328.351.600,00	328.351.600,00	327.000.000,00	327.000.000,00	1.033.020.000,00	1.033.020.000,00	1.688.371.600,00	1.688.371.600,00
		35	LAREH NAN PANJANG BARAT	317.335.800,00	317.335.800,00	301.800.000,00	301.800.000,00	696.494.000,00	696.494.000,00	1.315.629.800,00	1.315.629.800,00
		36	BISATI SUNGAI SARIAK	340.306.500,00	340.306.500,00	327.000.000,00	327.000.000,00	1.184.954.000,00	1.184.954.000,00	1.852.260.500,00	1.852.260.500,00
		37	AMBUANG KAPUA SUNGAI SARIAK	321.402.500,00	321.402.500,00	301.800.000,00	301.800.000,00	682.427.000,00	682.427.000,00	1.305.629.500,00	1.305.629.500,00
		38	LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK	348.300.100,00	348.300.100,00	378.600.000,00	378.600.000,00	1.177.790.000,00	1.177.790.000,00	1.904.690.100,00	1.904.690.100,00
		39	LIMPATO SUNGAI SARIAK	338.712.000,00	338.712.000,00	377.400.000,00	377.400.000,00	1.038.912.000,00	1.038.912.000,00	1.755.024.000,00	1.755.024.000,00
		40	BALAH AIE UTARA	337.184.800,00	337.184.800,00	301.800.000,00	301.800.000,00	895.367.000,00	686.814.968,00	1.534.351.800,00	1.325.799.768,00
		41	BALAH AIE TIMUR	344.186.100,00	344.186.100,00	301.800.000,00	301.800.000,00	838.827.000,00	838.827.000,00	1.484.813.100,00	1.484.813.100,00
6	V KOTO KAMPUNG DALAM	42	CAMPAGO	379.152.000,00	379.152.000,00	402.600.000,00	402.600.000,00	1.101.199.000,00	1.027.075.828,00	1.882.951.000,00	1.808.827.828,00
		43	SIKUCUR	356.944.700,00	356.944.700,00	301.800.000,00	301.800.000,00	968.099.000,00	873.657.908,00	1.626.843.700,00	1.532.402.608,00
		44	CAMPAGO BARAT	347.122.600,00	347.122.600,00	352.200.000,00	352.200.000,00	927.059.000,00	927.059.000,00	1.626.381.600,00	1.626.381.600,00
		45	CAMPAGO SELATAN	329.868.500,00	329.868.500,00	352.200.000,00	352.200.000,00	778.170.000,00	778.170.000,00	1.460.238.500,00	1.460.238.500,00
		46	SIKUCUA UTARA	336.903.500,00	336.903.500,00	327.000.000,00	327.000.000,00	757.524.000,00	757.524.000,00	1.421.427.500,00	1.421.427.500,00
		47	SIKUCUA TIMUR	370.509.700,00	370.509.700,00	402.600.000,00	402.600.000,00	933.455.000,00	904.863.140,00	1.706.564.700,00	1.677.972.840,00
		48	SIKUCUA TENGAH	323.232.100,00	323.232.100,00	327.000.000,00	327.000.000,00	673.184.000,00	569.442.146,00	1.323.416.100,00	1.219.674.246,00
		49	SIKUCUA BARAT	354.346.100,00	354.346.100,00	403.800.000,00	403.800.000,00	856.431.000,00	628.412.400,00	1.614.577.100,00	1.386.558.500,00

7	SUNGAI GARINGGIANG	50	KURANJI HULU	462.169.500,00	462.169.500,00	429.000.000,00	429.000.000,00	1.212.454.000,00	1.212.454.000,00	2.103.623.500,00	2.103.623.500,00
		51	MALAI III KOTO	397.233.600,00	397.233.600,00	353.400.000,00	353.400.000,00	1.082.308.000,00	967.390.420,00	1.832.941.600,00	1.718.024.020,00
		52	BATU GADANG KURANJI HULU	387.262.800,00	387.262.800,00	378.600.000,00	378.600.000,00	1.008.509.000,00	924.988.760,00	1.774.371.800,00	1.690.851.560,00
		53	SUNGAI SIRAH KURANJI HULU	510.857.500,00	510.857.500,00	402.600.000,00	402.600.000,00	1.891.884.000,00	1.750.238.682,00	2.805.341.500,00	2.663.696.182,00
8	SUNGAI LIMAU	54	KURANJI HILIR	463.839.600,00	463.839.600,00	402.600.000,00	402.600.000,00	1.220.920.000,00	817.409.320,00	2.087.359.600,00	1.683.848.920,00
		55	PILUBANG	544.512.100,00	544.512.100,00	402.600.000,00	402.600.000,00	1.559.979.000,00	1.559.979.000,00	2.507.091.100,00	2.507.091.100,00
		56	GUGUAK KURANJI HILIR	351.472.100,00	351.472.100,00	352.200.000,00	352.200.000,00	848.820.000,00	848.820.000,00	1.552.492.100,00	1.552.492.100,00
		57	KOTO TINGGI KURANJI HILIR	362.335.900,00	362.335.900,00	352.200.000,00	352.200.000,00	919.046.000,00	719.652.626,00	1.633.581.900,00	1.434.188.526,00
9	IV KOTO AUR MALINTANG	58	III KOTO AUR MALINTANG	402.880.800,00	402.880.800,00	378.600.000,00	378.600.000,00	1.166.740.000,00	1.166.740.000,00	1.948.220.800,00	1.948.220.800,00
		59	III KOTO AUR MALINTANG UTARA	380.330.200,00	380.330.200,00	378.600.000,00	378.600.000,00	913.628.000,00	913.628.000,00	1.672.558.200,00	1.672.558.200,00
		60	III KOTO AUR MALINTANG TIMUR	363.587.000,00	363.587.000,00	328.200.000,00	328.200.000,00	800.484.000,00	631.833.600,00	1.492.271.000,00	1.323.620.600,00
		61	III KOTO AUR MALINTANG SELATAN	547.537.500,00	547.537.500,00	403.800.000,00	403.800.000,00	1.302.349.000,00	1.302.349.000,00	2.253.686.500,00	2.253.686.500,00
		62	BALAI BAIAK MALAI III KOTO	373.845.500,00	373.845.500,00	377.400.000,00	377.400.000,00	925.782.000,00	925.782.000,00	1.677.027.500,00	1.677.027.500,00
10	ULAKAN TAPAKIH	63	TAPAKIH	413.672.000,00	413.672.000,00	553.800.000,00	553.800.000,00	1.130.869.000,00	1.130.869.000,00	2.098.341.000,00	2.098.341.000,00
		64	ULAKAN	346.171.200,00	346.171.200,00	327.000.000,00	327.000.000,00	900.836.000,00	900.836.000,00	1.574.007.200,00	1.574.007.200,00
		65	PADANG TOBOH ULAKAN	318.259.700,00	318.259.700,00	327.000.000,00	327.000.000,00	727.166.000,00	727.166.000,00	1.372.425.700,00	1.372.425.700,00
		66	SUNGAI GIMBA ULAKAN	324.889.400,00	324.889.400,00	327.000.000,00	327.000.000,00	813.693.000,00	813.693.000,00	1.465.582.400,00	1.465.582.400,00
		67	SEULAYAT ULAKAN	323.941.800,00	323.941.800,00	301.800.000,00	301.800.000,00	781.584.000,00	781.584.000,00	1.407.325.800,00	1.407.325.800,00
		68	MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN	337.900.700,00	337.900.700,00	377.400.000,00	377.400.000,00	891.891.000,00	891.891.000,00	1.607.191.700,00	1.607.191.700,00
		69	SANDI ULAKAN	345.677.600,00	345.677.600,00	427.800.000,00	427.800.000,00	899.855.000,00	899.855.000,00	1.673.332.600,00	1.673.332.600,00
		70	KAMPUANG GELAPUANG ULAKAN	308.916.100,00	308.916.100,00	301.800.000,00	301.800.000,00	633.185.000,00	633.185.000,00	1.243.901.100,00	1.243.901.100,00
11	SINTUAK TOBOH GADANG	71	SINTUAK	427.402.300,00	427.402.300,00	427.800.000,00	427.800.000,00	1.331.988.000,00	1.331.988.000,00	2.187.190.300,00	2.187.190.300,00
		72	TOBOH GADANG	344.846.000,00	344.846.000,00	352.200.000,00	352.200.000,00	889.781.000,00	889.781.000,00	1.586.827.000,00	1.586.827.000,00
		73	TOBOH GADANG SELATAN	334.508.300,00	334.508.300,00	301.800.000,00	301.800.000,00	854.181.000,00	651.665.094,00	1.490.489.300,00	1.287.973.394,00
		74	TOBOH GADANG BARAT	335.150.800,00	335.150.800,00	352.200.000,00	352.200.000,00	860.139.000,00	860.139.000,00	1.547.489.800,00	1.547.489.800,00
		75	TOBOH GADANG TIMUR	331.832.400,00	331.832.400,00	301.800.000,00	301.800.000,00	839.061.000,00	839.061.000,00	1.472.693.400,00	1.472.693.400,00
12	PADANG SAGO	76	KOTO BARU	342.691.500,00	342.691.500,00	301.800.000,00	301.800.000,00	769.167.000,00	577.650.000,00	1.413.658.500,00	1.222.141.500,00
		77	KOTO DALAM	337.436.400,00	337.436.400,00	328.200.000,00	328.200.000,00	764.301.000,00	698.899.824,00	1.429.937.400,00	1.364.536.224,00
		78	BATU KALANG	320.320.300,00	320.320.300,00	301.800.000,00	301.800.000,00	764.247.000,00	612.062.976,00	1.386.367.300,00	1.234.183.276,00
		79	KOTO DALAM BARAT	340.173.900,00	340.173.650,00	301.800.000,00	301.800.000,00	791.529.000,00	536.520.600,00	1.433.502.900,00	1.178.494.250,00
		80	KOTO DALAM SELATAN	325.528.000,00	325.528.000,00	301.800.000,00	301.800.000,00	727.370.000,00	727.370.000,00	1.354.698.000,00	1.354.698.000,00
		81	BATU KALANG UTARA	311.630.200,00	311.630.200,00	301.800.000,00	301.800.000,00	676.880.000,00	676.880.000,00	1.290.310.200,00	1.290.310.200,00
13	BATANG GASAN	82	MALAI V SUKU	366.804.300,00	366.804.300,00	327.000.000,00	327.000.000,00	976.073.000,00	720.342.968,00	1.669.877.300,00	1.414.147.268,00
		83	GASAN GADANG	395.706.600,00	395.706.600,00	301.800.000,00	301.800.000,00	1.062.745.000,00	1.062.745.000,00	1.760.251.600,00	1.760.251.600,00
		84	MALAI V SUKU TIMUR	368.486.500,00	368.486.500,00	352.200.000,00	352.200.000,00	893.070.000,00	629.724.000,00	1.613.756.500,00	1.350.410.500,00
14	V KOTO TIMUR	85	KUDU GANTING	353.944.500,00	353.944.500,00	352.200.000,00	352.200.000,00	958.124.000,00	958.124.000,00	1.664.268.500,00	1.664.268.500,00
		86	LIMAU PURUIK	359.191.600,00	359.191.600,00	454.200.000,00	454.200.000,00	953.684.000,00	953.684.000,00	1.767.075.600,00	1.767.075.600,00
		87	GUNUNG PADANG ALAI	435.412.200,00	435.412.200,00	427.800.000,00	427.800.000,00	1.168.891.000,00	1.168.891.000,00	2.032.103.200,00	2.032.103.200,00
		88	KUDU GANTIANG BARAT	335.763.700,00	335.763.700,00	328.200.000,00	328.200.000,00	861.702.000,00	861.702.000,00	1.525.665.700,00	1.525.665.700,00
15	2 X 11 KAYU TANAM	89	KAYU TANAM	389.686.100,00	389.686.100,00	378.600.000,00	378.600.000,00	1.371.025.000,00	1.371.025.000,00	2.139.311.100,00	2.139.311.100,00
		90	GUGUAK	480.285.600,00	480.285.600,00	328.200.000,00	328.200.000,00	1.499.737.000,00	1.499.737.000,00	2.308.222.600,00	2.308.222.600,00
		91	ANDURIANG	689.860.600,00	689.860.600,00	377.400.000,00	377.400.000,00	1.406.047.000,00	1.279.141.918,00	2.473.307.600,00	2.346.402.518,00
		92	KAPALO HILALANG	453.924.400,00	453.924.400,00	301.800.000,00	301.800.000,00	1.143.847.000,00	1.143.847.000,00	1.899.571.400,00	1.899.571.400,00
16	PATAMUAN	93	SUNGAI DURIAN	332.176.100,00	332.176.100,00	301.800.000,00	301.800.000,00	798.780.000,00	798.780.000,00	1.432.756.100,00	1.432.756.100,00
		94	TANDIKEK	377.806.100,00	377.806.100,00	402.600.000,00	402.600.000,00	955.811.000,00	802.999.610,00	1.736.217.100,00	1.583.405.710,00
		95	TANDIKEK UTARA	356.287.700,00	356.287.700,00	352.200.000,00	352.200.000,00	829.365.000,00	829.365.000,00	1.537.852.700,00	1.537.852.700,00
		96	TANDIKEK SELATAN	378.786.100,00	378.786.100,00	427.800.000,00	427.800.000,00	991.148.000,00	956.151.392,00	1.797.734.100,00	1.762.737.492,00
		97	TANDIKEK BARAT	341.614.170,00	341.614.170,00	402.600.000,00	402.600.000,00	815.940.000,00	746.343.528,00	1.560.154.170,00	1.490.557.698,00
		98	KAMPUANG TANJUANG KOTO MAMBANG SUNGAI DURIAN	353.530.200,00	353.530.200,00	352.200.000,00	352.200.000,00	945.401.000,00	945.401.000,00	1.651.131.200,00	1.651.131.200,00
17	ENAM LINGKUNG	99	PAKANDANGAN	362.666.500,00	362.666.500,00	327.000.000,00	327.000.000,00	1.321.255.000,00	1.321.255.000,00	2.010.921.500,00	2.010.921.500,00
		100	KOTO TINGGI	353.675.200,00	353.675.200,00	328.200.000,00	328.200.000,00	1.163.240.000,00	1.163.240.000,00	1.845.115.200,00	1.845.115.200,00
		101	TOBOH KETEK	339.060.800,00	339.060.800,00	301.800.000,00	301.800.000,00	804.807.000,00	804.807.000,00	1.445.667.800,00	1.445.667.800,00
		102	PARIT MALINTANG	398.541.800,00	398.541.800,00	454.200.000,00	454.200.000,00	1.366.642.000,00	1.366.642.000,00	2.219.383.800,00	2.219.383.800,00
		103	GADUR	336.117.000,00	336.117.000,00	353.400.000,00	353.400.000,00	1.115.267.000,00	1.115.267.000,00	1.804.784.000,00	1.804.784.000,00
JUMLAH				38.290.843.070,00	38.290.842.820,00	**36.641.400.000,00**	**36.641.400.000,00**	**102.989.508.000,00**	**97.921.018.878,00**	**177.921.751.070,00**	**172.853.261.698,00**

DAFTAR SALDO AKHIR DANA BOS TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Sekolah	Saldo Belanja	Saldo Bank	Saldo Tunai
1	2	33	34	35
1	SDN 01 2X11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
2	SDN 02 2X11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
3	SDN 03 2X11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
4	SDN 04 2X11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
5	SDN 05 2X11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
6	SDN 06 2X11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
7	SDN 07 2X11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
8	SDN 08 2X11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
9	SDN 09 2X11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
10	SDN 10 2X11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
11	SDN 11 2X11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
12	SDN 12 2X11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
13	SDN 13 2X11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
14	SD N 01 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
15	SD N 02 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
16	SD N 03 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
17	SD N 04 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
18	SD N 05 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
19	SD N 06 2X11 KAYUTANAM	50.000,00	50.000,00	-
20	SD N 07 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
21	SD N 08 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
22	SD N 09 1X11 KAYUTANAM	-	-	-
23	SD N 10 2X11 KAYUTANAM	6.500,00	-	6.500,00
24	SD N 11 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
25	SD N 12 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
26	SD N 13 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
27	SD N 14 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
28	SD N 15 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
29	SD N 162X11 KAYUTANAM	-	-	-
30	SD N 17 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
31	SD N 18 2X11 KAYUTANAM	100.000,00	-	100.000,00
32	SD N 01 BATANG ANAI	-	-	-
33	SD N 02 BATANG ANAI	-	-	-
34	SD N 03 BATANG ANAI	-	-	-
35	SD N 04 BATANG ANAI	-	-	-
36	SD N 05 BATANG ANAI	232,00	232,00	-
37	SD N 06 BATANG ANAI	-	-	-
38	SD N 07 BATANG ANAI	-	-	-
39	SD N 08 BATANG ANAI	-	-	-
40	SD N 09 BATANG ANAI	-	-	-
41	SD N 10 BATANG ANAI	-	-	-
42	SD N 11 BATANG ANAI	-	-	-
43	SD N 12 BATANG ANAI	-	-	-

No.	Sekolah	Saldo Belanja	Saldo Bank	Saldo Tunai
44	SD N 13 BATANG ANAI	-	-	-
45	SD N 14 BATANG ANAI	-	-	-
46	SD N 15 BATANG ANAI	-	-	-
47	SD N 16 BATANG ANAI	-	-	-
48	SD N 17 BATANG ANAI	-	-	-
49	SD N 18 BATANG ANAI	-	-	-
50	SD N 19 BATANG ANAI	-	-	-
51	SD N 20 BATANG ANAI	-	-	-
52	SD N 21 BATANG ANAI	-	-	-
53	SD N 22 BATANG ANAI	-	-	-
54	SD N 23 BATANG ANAI	-	-	-
55	SD N 24 BATANG ANAI	-	-	-
56	SD N 25 BATANG ANAI	-	-	-
57	SD N 26 BATANG ANAI	-	-	-
58	SD N 27 BATANG ANAI	-	-	-
59	SD N 28 BATANG ANAI	-	-	-
60	SD N 29 BATANG ANAI	-	-	-
61	SD N 30 BATANG ANAI	-	-	-
62	SD N 01 BATANG GASAN	-	-	-
63	SD N 02 BATANG GASAN	-	-	-
64	SD N 03 BATANG GASAN	-	-	-
65	SD N 04 BATANG GASAN	-	-	-
66	SD N 05 BATANG GASAN	-	-	-
67	SD N 06 BATANG GASAN	-	-	-
68	SD N 07 BATANG GASAN	-	-	-
69	SD N 08 BATANG GASAN	-	-	-
70	SD N 09 BATANG GASAN	-	-	-
71	SD N 10 BATANG GASAN	-	-	-
72	SD N 11 BATANG GASAN	-	-	-
73	SD N 12 BATANG GASAN	-	-	-
74	SD N 13 BATANG GASAN	-	-	-
75	SD N 14 BATANG GASAN	-	-	-
76	SD N 15 BATANG GASAN	-	-	-
77	SD N 16 BATANG GASAN	-	-	-
78	SD N 17 BATANG GASAN	-	-	-
79	SD N 18 BATANG GASAN	-	-	-
80	SD N 19 BATANG GASAN	-	-	-
81	SD N 01 ENAM LINGKUNG	-	-	-
82	SD N 02 ENAM LINGKUNG	-	-	-
83	SD N 03 ENAM LINGKUNG	-	-	-
84	SD N 04 ENAM LINGKUNG	-	-	-
85	SD N 05 ENAM LINGKUNG	-	-	-
86	SD N 06 ENAM LINGKUNG	-	-	-
87	SD N 07 ENAM LINGKUNG	-	-	-
88	SD N 08 ENAM LINGKUNG	-	-	-
89	SD N 09 ENAM LINGKUNG	-	-	-
90	SD N 10 ENAM LINGKUNG	-	-	-
91	SD N 11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
92	SD N 12 ENAM LINGKUNG	-	-	-

No.	Sekolah	Saldo Belanja	Saldo Bank	Saldo Tunai
93	SD N 13 ENAM LINGKUNG	-	-	-
94	SD N 14 ENAM LINGKUNG	-	-	-
95	SD N 15 ENAM LINGKUNG	-	-	-
96	SD N 16 ENAM LINGKUNG	-	-	-
97	SD N 17 ENAM LINGKUNG	-	-	-
98	SD N 18 ENAM LINGKUNG	-	-	-
99	SD N 19 ENAM LINGKUNG	-	-	-
100	SD N 01 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
101	SD N 02 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
102	SD N 03 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
103	SD N 04 IV KOTO AUR MALINTANG	31.052,00	31.052,00	-
104	SD N 05 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
105	SD N 06 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
106	SD N 07 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
107	SD N 08 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
108	SD N 09 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
109	SD N 10 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
110	SD N 11 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
111	SD N 12 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
112	SD N 13 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
113	SD N 14 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
114	SD N 15 IV KOTO AUR MALINTANG	428,00	428,00	-
115	SD N 16 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
116	SD N 17 IV KOTO AUR MALINTANG	645,00	645,00	-
117	SD N 18 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
118	SD N 19 IV KOTO AUR MALINTANG	50.000,00	-	50.000,00
119	SD N 20 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
120	SD N 21 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
121	SD N 22 IV KOTO AUR MALINTANG	2.997.000,00	2.997.000,00	-
122	SD N 23 IV KOTO AUR MALINTANG	17.000,00	4.306,00	12.694,00
123	SD N 24 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
124	SD N 01 LUBUK ALUNG	-	-	-
125	SD N 02 LUBUK ALUNG	-	-	-
126	SD N 03 LUBUK ALUNG	-	-	-
127	SD N 04 LUBUK ALUNG	-	-	-
128	SD N 05 LUBUK ALUNG	-	-	-
129	SD N 06 LUBUK ALUNG	-	-	-
130	SD N 07 LUBUK ALUNG	-	-	-
131	SD N 08 LUBUK ALUNG	-	-	-
132	SD N 09 LUBUK ALUNG	-	-	-
133	SDN 10 LUBUK ALUNG	-	-	-
134	SD N 11 LUBUK ALUNG	-	-	-
135	SD N 12 LUBUK ALUNG	-	-	-
136	SD N 13 LUBUK ALUNG	-	-	-
137	SD N 14 LUBUK ALUNG	-	-	-
138	SD N 15 LUBUK ALUNG	-	-	-
139	SD N 16 LUBUK ALUNG	-	-	-
140	SD N 17 LUBUK ALUNG	-	-	-
141	SD N 18 LUBUK ALUNG	-	-	-

No.	Sekolah	Saldo Belanja	Saldo Bank	Saldo Tunai
142	SD N 19 LUBUK ALUNG	-	-	-
143	SD N 20 LUBUK ALUNG	-	-	-
144	SD N 21 LUBUK ALUNG	-	-	-
145	SD N 22 LUBUK ALUNG	-	-	-
146	SD N 23 LUBUK ALUNG	-	-	-
147	SD N 24 LUBUK ALUNG	-	-	-
148	SD N 25 LUBUK ALUNG	-	-	-
149	SD N 26 LUBUK ALUNG	-	-	-
150	SD N 27 LUBUK ALUNG	-	-	-
151	SD N 28 LUBUK ALUNG	-	-	-
152	SD N 29 LUBUK ALUNG	-	-	-
153	SD N 30 LUBUK ALUNG	-	-	-
154	SD N 31 LUBUK ALUNG	-	-	-
155	SD N 32 LUBUK ALUNG	-	-	-
156	SD N 33 LUBUK ALUNG	-	-	-
157	SD N 34 LUBUK ALUNG	-	-	-
158	SD N 01 NAN SABARIS	-	-	-
159	SD N 02 NAN SABARIS	-	-	-
160	SD N 03 NAN SABARIS	-	-	-
161	SD N 04 NAN SABARIS	-	-	-
162	SD N 05 NAN SABARIS	-	-	-
163	SD N 06 NAN SABARIS	-	-	-
164	SD N 07 NAN SABARIS	-	-	-
165	SD N 08 NAN SABARIS	-	-	-
166	SD N 09 NAN SABARIS	-	-	-
167	SD N 10 NAN SABARIS	-	-	-
168	SD N 11 NAN SABARIS	-	-	-
169	SD N 12 NAN SABARIS	-	-	-
170	SD N 13 NAN SABARIS	-	-	-
171	SD N 14 NAN SABARIS	-	-	-
172	SD N 15 NAN SABARIS	45.200,00	45.200,00	-
173	SD N 16 NAN SABARIS	274,00	274,00	-
174	SD N 17 NAN SABARIS	-	-	-
175	SD N 18 NAN SABARIS	-	-	-
176	SD N 19 NAN SABARIS	10.159,00	10.159,00	-
177	SD N 20 NAN SABARIS	-	-	-
178	SD N 21 NAN SABARIS	-	-	-
179	SD N 22 NAN SABARIS	971,00	971,00	-
180	SD N 23 NAN SABARIS	-	-	-
181	SD N 01 PADANG SAGO	-	-	-
182	SD N 02 PADANG SAGO	-	-	-
183	SD N 03 PADANG SAGO	-	-	-
184	SD N 04 PADANG SAGO	-	-	-
185	SD N 05 PADANG SAGO	-	-	-
186	SD N 06 PADANG SAGO	-	-	-
187	SD N 07 PADANG SAGO	-	-	-
188	SD N 08 PADANG SAGO	-	-	-
189	SD N 09 PADANG SAGO	615,00	615,00	-
190	SD N 10 PADANG SAGO	-	-	-

No.	Sekolah	Saldo Belanja	Saldo Bank	Saldo Tunai
191	SD N 11 PADANG SAGO	-	-	-
192	SDN 01 PATAMUAN	-	-	-
193	SDN 02 PATAMUAN	-	-	-
194	SDN 03 PATAMUAN	-	-	-
195	SDN 04 PATAMUAN	-	-	-
196	SDN 05 PATAMUAN	-	-	-
197	SDN 06 PATAMUAN	-	-	-
198	SDN 07 PATAMUAN	-	-	-
199	SDN 08 PATAMUAN	-	-	-
200	SDN 09 PATAMUAN	-	-	-
201	SDN 10 PATAMUAN	-	-	-
202	SDN 11 PATAMUAN	-	-	-
203	SDN 12 PATAMUAN	-	-	-
204	SDN 13 PATAMUAN	-	-	-
205	SDN 14 PATAMUAN	-	-	-
206	SDN 15 PATAMUAN	-	-	-
207	SD N 01 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
208	SD N 02 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
209	SD N 03 V KOTO KAMPUNG DALAM	12.482,00	12.482,00	-
210	SD N 04 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
211	SD N 05 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
212	SD N 06 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
213	SD N 07 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
214	SD N 08 V KOTO KAMPUNG DALAM	90.000,00	-	90.000,00
215	SD N 09 V KOTO KAMPUNG DALAM	36.106,00	-	36.106,00
216	SD N 10 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
217	SD N 11 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
218	SD N 12 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
219	SD N 13 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
220	SD N 14 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
221	SD N 15 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
222	SD N 16 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
223	SD N 17 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
224	SD N 18 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
225	SD N 19 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
226	SD N 20 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
227	SD N 21 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
228	SD N 22 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
229	SD N 23 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
230	SD N 24 V KOTO KAMPUNG DALAM	80.000,00	67.000,00	13.000,00
231	SD N 25 V KOTO KAMPUNG DALAM	5.000,00	5.000,00	-
232	SD N 26 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
233	SD N 27 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
234	SD N 28 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
235	SD N 29 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
236	SD N 30 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
237	SD N 01 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
238	SD N 02 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
239	SD N 03 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-

No.	Sekolah	Saldo Belanja	Saldo Bank	Saldo Tunai
240	SD N 04 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
241	SD N 05 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
242	SD N 06 SINTUK TOBOH GADANG	2.417.080,00	169.680,00	2.247.400,00
243	SD N 07 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
244	SD N 08 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
245	SD N 09 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
246	SD N 10 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
247	SD N 11 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
248	SD N 12 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
249	SD N 13 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
250	SD N 14 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
251	SD N 15 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
252	SD N 16 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
253	SD N 17 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
254	SD N 01 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
255	SD N 02 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
256	SD N 03 SUNGAI GERINGGING	1.100,00	-	1.100,00
257	SD N 04 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
258	SD N 05 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
259	SD N 06 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
260	SD N 07 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
261	SD N 08 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
262	SD N 09 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
263	SD N 10 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
264	SD N 11 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
265	SD N 12 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
266	SD N 13 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
267	SD N 14 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
268	SD N 15 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
269	SD N 16 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
270	SD N 17 SUNGAI GERINGGING	14.232.900,00	14.232.900,00	-
271	SD N 18 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
272	SD N 19 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
273	SD N 20 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
274	SD N 21 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
275	SD N 22 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
276	SD N 23 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
277	SD N 24 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
278	SD N 25 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
279	SD N 26 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
280	SD N 27 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
281	SD N 28 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
282	SD N 29 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
283	SD N 30 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
284	SD N 01 SUNGAI LIMAU	-	-	-
285	SD N 02 SUNGAI LIMAU	-	-	-
286	SD N 03 SUNGAI LIMAU	-	-	-
287	SD N 04 SUNGAI LIMAU	-	-	-
288	SD N 05 SUNGAI LIMAU	-	-	-

No.	Sekolah	Saldo Belanja	Saldo Bank	Saldo Tunai
289	SD N 06 SUNGAI LIMAU	-	-	-
290	SD N 07 SUNGAI LIMAU	-	-	-
291	SD N 08 SUNGAI LIMAU	-	-	-
292	SD N 09 SUNGAI LIMAU	-	-	-
293	SD N 10 SUNGAI LIMAU	-	-	-
294	SD N 11 SUNGAI LIMAU	-	-	-
295	SD N 12 SUNGAI LIMAU	-	-	-
296	SD N 13 SUNGAI LIMAU	-	-	-
297	SD N 14 SUNGAI LIMAU	-	-	-
298	SD N 15 SUNGAI LIMAU	-	-	-
299	SD N 16 SUNGAI LIMAU	-	-	-
300	SD N 17 SUNGAI LIMAU	-	-	-
301	SD N 18 SUNGAI LIMAU	-	-	-
302	SD N 19 SUNGAI LIMAU	-	-	-
303	SD N 20 SUNGAI LIMAU	3.000,00	105,00	2.895,00
304	SD N 21 SUNGAI LIMAU	-	-	-
305	SD N 22 SUNGAI LIMAU	-	-	-
306	SD N 23 SUNGAI LIMAU	-	-	-
307	SD N 24 SUNGAI LIMAU	-	-	-
308	SD N 25 SUNGAI LIMAU	-	-	-
309	SD N 26 SUNGAI LIMAU	-	-	-
310	SD N 27 SUNGAI LIMAU	-	-	-
311	SD N 28 SUNGAI LIMAU	-	-	-
312	SD N 29 SUNGAI LIMAU	-	-	-
313	SD N 30 SUNGAI LIMAU	-	-	-
314	SD N 31 SUNGAI LIMAU	-	-	-
315	SD N 32 SUNGAI LIMAU	-	-	-
316	SD N 33 SUNGAI LIMAU	-	-	-
317	SD N 34 SUNGAI LIMAU	-	-	-
318	SD N 35 SUNGAI LIMAU	-	-	-
319	SD N 36 SUNGAI LIMAU	-	-	-
320	SD N 37 SUNGAI LIMAU	-	-	-
321	SD N 38 SUNGAI LIMAU	-	-	-
322	SD N 39 SUNGAI LIMAU	-	-	-
323	SD N 40 SUNGAI LIMAU	-	-	-
324	SD N 41 SUNGAI LIMAU	-	-	-
325	SD N 01 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
326	SD N 02 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
327	SD N 03 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
328	SD N 04 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
329	SD N 05 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
330	SD N 06 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
331	SD N 07 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
332	SD N 08 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
333	SD N 09 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
334	SD N 10 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
335	SD N 11 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
336	SD N 12 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
337	SD N 13 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-

No.	Sekolah	Saldo Belanja	Saldo Bank	Saldo Tunai
338	SD N 14 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
339	SD N 15 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
340	SD N 16 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
341	SD N 17 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
342	SD N 01 V KOTO TIMUR	-	-	-
343	SD N 02 V KOTO TIMUR	-	-	-
344	SD N 03 V KOTO TIMUR	-	-	-
345	SD N 04 V KOTO TIMUR	-	-	-
346	SD N 05 V KOTO TIMUR	8.500,00	-	8.500,00
347	SD N 06 V KOTO TIMUR	-	-	-
348	SD N 07 V KOTO TIMUR	-	-	-
349	SD N 08 V KOTO TIMUR	-	-	-
350	SD N 09 V KOTO TIMUR	-	-	-
351	SD N 10 V KOTO TIMUR	-	-	-
352	SD N 11 V KOTO TIMUR	-	-	-
353	SD N 12 V KOTO TIMUR	70.581,00	70.581,00	-
354	SD N 13 V KOTO TIMUR	-	-	-
355	SD N 14 V KOTO TIMUR	4.292.500,00	4.292.500,00	-
356	SD N 15 V KOTO TIMUR	-	-	-
357	SD N 16 V KOTO TIMUR	-	-	-
358	SD N 17 V KOTO TIMUR	-	-	-
359	SD N 18 V KOTO TIMUR	-	-	-
360	SD N 19 V KOTO TIMUR	-	-	-
361	SD N 20 V KOTO TIMUR	-	-	-
362	SD N 21 V KOTO TIMUR	-	-	-
363	SD N 22 V KOTO TIMUR	-	-	-
364	SD N 23 V KOTO TIMUR	-	-	-
365	SD N 24 V KOTO TIMUR	320.000,00	305.000,00	15.000,00
366	SD N 01 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
367	SD N 02 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
368	SD N 03 VII KOTO SUNGAI SARIK	44.633,00	44.633,00	-
369	SD N 04 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
370	SD N 05 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
371	SD N 06 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
372	SD N 07 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
373	SD N 08 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
374	SD N 09 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
375	SD N 10 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
376	SD N 11 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
377	SD N 12 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
378	SD N 13 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
379	SD N 14 VII KOTO SUNGAI SARIK	488,00	488,00	-
380	SD N 15 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
381	SD N 16 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
382	SD N 17 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
383	SD N 18 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
384	SD N 19 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
385	SD N 20 VII KOTO SUNGAI SARIK	212.000,00	56.228,00	155.772,00
386	SD N 21 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-

No.	Sekolah	Saldo Belanja	Saldo Bank	Saldo Tunai
387	SD N 22 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
388	SD N 23 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
389	SD N 24 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
390	SD N 25 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
391	SD N 26 VII KOTO SUNGAI SARIK	50.000,00	-	50.000,00
392	SD N 27 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
393	SD N 28 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
394	SD N 29 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
395	SD N 30 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
396	SD N 31 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
397	SD N 32 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
398	SD N 33 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
399	SD N 34 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
400	SD N 35 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
401	SD UNGGUL TERPADU	-	-	-
	JUMLAH	25.186.446,00	22.397.479,00	2.788.967,00
402	SMPN 1 2 X 11 ENAM LINGKUNG	-		-
403	SMPN 2 2 X 11 ENAM LINGKUNG	-		-
404	SMPN 1 ENAM LINGKUNG	-	-	-
405	SMPN 2 ENAM LINGKUNG	-	-	-
406	SMPN 1 2 X 11 KAYU TANAM	-	-	-
407	SMPN 2 2 X 11 KAYU TANAM	-	-	-
408	SMPN 3 2 X 11 KAYU TANAM	-	-	-
409	SMPN 4 2 X 11 KAYU TANAM	-	-	-
410	SMPN 1 LUBUK ALUNG	-	-	-
411	SMPN 2 LUBUK ALUNG	-	-	-
412	SMPN 3 LUBUK ALUNG	17.363,00	-	17.363,00
413	SMPN 4 LUBUK ALUNG	-	-	-
414	SMPN 5 LUBUK ALUNG	-	-	-
415	SMPN 6 LUBUK ALUNG	-	-	-
416	SMPN 1 BATANG ANAI	-	-	-
417	SMPN 2 BATANG ANAI	956.000,00	-	956.000,00
418	SMPN 3 BATANG ANAI	-	-	-
419	SMPN 4 BATANG ANAI	-	-	-
420	SMPN 1 SINTUK TOBOH GADANG	80,00	-	80,00
421	SMPN 2 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
422	SMPN 1 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
423	SMPN 2 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
424	SMPN 3 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
425	SMPN 1 NAN SABARIS	926,00	497,00	429,00
426	SMPN 2 NAN SABARIS	3.540,00	-	3.540,00
427	SMPN 3 NAN SABARIS	103,00	103,00	-
428	SMPN 1 PATAMUAN	-	-	-
429	SMPN 2 PATAMUAN	-	-	-
430	SMPN 3 PATAMUAN	-	-	-
431	SMPN 1 PADANG SAGO	-	-	-
432	SMPN 2 PADANG SAGO	-	-	-
433	SMPN 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
434	SMPN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
435	SMPN 3 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
436	SMPN 4 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
437	SMPN 1 V KOTO TIMUR	-	-	-
438	SMPN 2 V KOTO TIMUR	-	-	-

No.	Sekolah	Saldo Belanja	Saldo Bank	Saldo Tunai
439	SMPN 1 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
440	SMPN 2 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
441	SMPN 3 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
442	SMPN 4 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
443	SMPN 1 SUNGAI LIMAU	-	-	-
444	SMPN 2 SUNGAI LIMAU	-		-
445	SMPN 3 SUNGAI LIMAU	23.000,00	-	23.000,00
446	SMPN 4 SUNGAI LIMAU	-		-
447	SMPN 5 SUNGAI LIMAU	-	-	-
448	SMPN 1 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
449	SMPN 2 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
450	SMPN 3 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
451	SMPN 4 SUNGAI GERINGGING	1.734.291,00	33.916,00	1.700.375,00
452	SMPN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	256.058,00	-	256.058,00
453	SMPN 2 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
454	SMPN 3 IV KOTO AUR MALINTANG	760,00	-	760,00
455	SMPN 4 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
456	SMPN 5 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
457	SMPN 1 BATANG GASAN	-	-	-
458	SMPN 2 BATANG GASAN	-		-
459	SMPN 3 BATANG GASAN	-		-
	JUMLAH	**2.992.121,00**	**34.516,00**	**2.957.605,00**
	TOTAL	**28.178.567,00**	**22.431.995,00**	**5.746.572,00**

LAPORAN REALISASI BOK PUSKESMAS
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

No	Puskesmas	Total Pagu	Jumlah Salur					Realisasi sd bulan lalu	Realisasi Desember	Total Realisasi	Sisa Pagu	%
			Saldo Awal	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total					
1	AMPALU	567.953.339	202.513.709	-	195.053.629	170.386.001	567.953.339	375.731.770	108.919.347	484.651.117	83.302.222	85,33
2	ANDURING	579.594.740	264.511.392	-	141.204.926	173.878.422	579.594.740	312.034.154	95.568.976	407.603.130	171.991.610	70,33
3	BATU BASA	771.686.331	343.111.874	-	197.068.557	231.505.900	771.686.331	464.800.986	127.337.446	592.138.432	179.547.899	76,73
4	ENAM LINGKUNG	648.169.700	250.529.507	-	203.189.283	194.450.910	648.169.700	381.061.314	61.536.702	442.598.016	205.571.684	68,28
5	GASAN GADANG	900.755.759	75.490.754	197.150.866	357.887.412	270.226.727	900.755.759	510.232.660	132.241.938	642.474.598	258.281.161	71,33
6	KAMPUNG DALAM	784.900.480	53.917.706	183.967.331	311.545.299	235.470.144	784.900.480	528.081.684	128.521.470	656.603.154	128.297.326	83,65
7	KAMPUNG GUCI	435.428.759	84.726.768	48.316.752	171.756.612	130.628.627	435.428.759	234.380.757	110.606.661	344.987.418	90.441.341	79,23
8	KAYU TANAM	508.982.426	254.704.667	-	101.583.031	152.694.728	508.982.426	263.038.400	158.939.620	421.978.020	87.004.406	82,91
9	KETAPING	824.544.252	72.347.775	177.430.393	327.402.809	247.363.275	824.544.252	504.597.426	213.029.896	717.627.322	106.916.930	87,03
10	KOTO BANGKO	696.227.983	46.133.577	165.149.711	276.076.300	208.868.395	696.227.983	454.337.651	74.134.230	528.471.881	167.756.102	75,91
11	LIMAU PURUT	542.988.107	100.554.409	64.756.916	214.780.350	162.896.432	542.988.107	288.577.160	156.142.233	444.719.393	98.268.714	81,90
12	LUBUK ALUNG	983.258.396	259.910.095	37.482.315	390.888.467	294.977.519	983.258.396	681.859.490	220.828.730	902.688.220	80.570.176	91,81
13	PADANG ALAI	649.721.792	158.269.288	39.062.142	257.473.825	194.916.537	649.721.792	409.544.891	98.104.659	507.649.550	142.072.242	78,13
14	PADANG SAGO	468.609.886	116.568.844	26.429.014	185.029.062	140.582.966	468.609.886	316.206.080	67.471.781	383.677.861	84.932.025	81,88
15	PASAR USANG	1.041.558.864	272.568.039	42.314.513	414.208.653	312.467.659	1.041.558.864	771.726.322	189.709.391	961.435.713	80.123.151	92,31
16	PATAMUAN	757.437.451	157.513.948	72.132.180	300.560.087	227.231.236	757.437.451	544.663.308	110.899.936	655.563.244	101.874.207	86,55
17	PAUH KAMBAR	889.844.338	110.781.619	158.586.575	353.522.842	266.953.302	889.844.338	668.414.901	125.570.773	793.985.674	95.858.664	89,23
18	SICINCIN	706.960.443	288.581.718	-	206.290.592	212.088.133	706.960.443	493.755.082	126.370.690	620.125.772	86.834.671	87,72
19	SIKABU	647.262.428	125.532.427	71.061.194	256.490.078	194.178.729	647.262.428	423.116.652	82.249.280	505.365.932	141.896.496	78,08
20	SIKUCUR	601.704.616	64.884.387	118.041.890	238.266.954	180.511.385	601.704.616	400.861.456	106.366.164	507.227.620	94.476.996	84,30
21	SINTUK	745.452.154	85.806.702	140.243.837	295.765.969	223.635.646	745.452.154	625.618.475	79.814.179	705.432.654	40.019.500	94,63
22	SUNGAI GERINGGING	980.946.122	253.370.732	43.327.997	389.963.557	294.283.836	980.946.122	562.005.823	214.615.638	776.621.461	204.324.661	79,17
23	SUNGAI LIMAU	1.219.242.284	239.332.957	128.854.621	485.282.021	365.772.685	1.219.242.284	899.967.977	120.294.475	1.020.262.452	198.979.832	83,68
24	SUNGAI SARIAK	861.032.320	127.821.815	132.902.772	341.998.037	258.309.696	861.032.320	602.572.034	175.814.901	778.386.935	82.645.385	90,40
25	ULAKAN	985.580.700	46.249.704	251.839.191	391.817.110,00	295.674.002	985.580.007	756.933.711	190.088.561	947.022.272	38.558.428	96,09
		18.799.843.670	**4.055.734.413**	**2.099.050.210**	**7.005.105.462**	**5.639.952.892**	**18.799.842.977**	**12.474.120.164**	**3.275.177.677**	**15.749.297.841**	**3.050.545.829**	83,77

PIUTANG PAJAK REKLAME TAHUN 2025

NO	NO.SKP	URAIAN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH	TAHUN	KET
1	015	RAT SALON	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	130.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
2	035	PT.GUDANG GARAM	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	520.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
3	036	PT.GUDANG GARAM	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	325.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
4	044	BENGKEL MOBIL FIRDAUS	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	156.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
5	047	RM. AMPERA DUA SAUDARA	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	146.250,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
6	106	DSM MOTOR	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	97.500,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
7	107	GIPER	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
8	137	IRHAS	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	325.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
9	140	RM. PONDOK SAKINAH	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	93.600,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017
10	149	YODA MART	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	166.400,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017
11	150	DEPOT ISI ULANG SYAUFIFA	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	97.500,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017
12	154	RUMAH BERSALIN BUAH HATI	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	487.500,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017
13	173	TIRTA BENING	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	124.800,00	2016	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017
14	314	BENGKEL AJI MAMBO	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	96.000,00	2016	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17
15	316	DUTA MOTOR	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	96.000,00	2016	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17
16	264	DIANA SALON	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	130.000,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017
17	362	ORGEN GISEL	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	150.000,00	2016	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017
18	408	PARMA FOTOCOPY	18 JULI 2016 S/D 17 JULI 2017	100.000,00	2016	18 JULI 2016 S/D 17 JULI 2017
19	446	TOMMY TOUR & TRAVEL	25 JULI 2016 S/D 24 JULI 2017	162.000,00	2016	25 JULI 2016 S/D 24 JULI 2017
20	455	HUSNI MOTOR	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	128.000,00	2016	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017
21	458	BENGKEL ALFAS MANDIRI	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	100.000,00	2016	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017
22	157	RM. SAMBALADO	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	650.000,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017
23	163	AZZAHRA	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	260.000,00	2016	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017
24	182	RM CAHAYA SURYA	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	325.000,00	2016	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017
25	183	KAISAR	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	325.000,00	2016	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017
26	191	KAWACHI	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	260.000,00	2016	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017

27	235	RAFA MART DAN CELL	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	195.000,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017
28	238	CAHAYA SURYA	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	260.000,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017
29	246	PISANG SALAI MAMA	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	130.000,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017
30	252	ALIBI SHOP	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	195.000,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017
31	275	PUTRA TANJUNG FURNITURE	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	130.000,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017
32	284	HANNOCH KETAPING	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	1.125.000,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017
33	309	PONDOK LESEHAN TIANG BULEK	02 APR 2016 S/D 1 APR 2017	75.000,00	2016	02 APR 2016 S/D 1 APR 2017
34	326	BAKSO NGUDI	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	120.000,00	2016	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17
35	338	RAGNI AQUARIUM	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	60.000,00	2016	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017
36	384	KUE BIKA IDOLA	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	96.000,00	2016	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017
37	419	RM KASIAH BUNDO	20 JULI 2016 S/D 19 JULI 2017	88.000,00	2016	20 JULI 2016 S/D 19 JULI 2017
38	449	UMEGA PENGANTEN	25 JULI 2016 S/D 24 JULI 2017	112.000,00	2016	25 JULI 2016 S/D 24 JULI 2017
39	453	DAFFA KONSTRUKSI	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	120.000,00	2016	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017
40	029	SETIAWAN MOTOR	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	260.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
41	041	PRIMADONA CAR WASH	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	650.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
42	139	AJOES DIGITAL	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	900.000,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017
43	186	BUDI MULYA II	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	487.500,00	2016	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017
44	358	USAHA MUDA	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	77.000,00	2016	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017
45	293	PT.BUANA LESTARI	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	843.750,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017
46	144	CANON DIGITAL COPIER	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	130.000,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017
47	161	FDI DIGITAL FUJI TECK	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	650.000,00	2016	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017
48	165	ADVAN UTAMA COMPUTER	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	292.500,00	2016	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017
49	166	AXIO COMPUTER	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	260.000,00	2016	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017
50	228	NASI SOP ELOK EVO	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	195.000,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017
51	243	TB.AMANAH / IKAD KERAMIK	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	1.096.900,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017
52	266	EVERCROSS	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	325.000,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017
53	268	YULHERI ALIOES, SH	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	260.000,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017
54	317	MENTARI / INDOSAT	01 APRIL 16 S/D 31 MAR 17	2.900.000,00	2016	01 APRIL 16 S/D 31 MAR 17
55	332	PT.WORLD INNOVATIVE	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	162.500,00	2016	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017
56	333	EVERCOSS AZHARA	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	240.000,00	2016	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017
57	346	COOLPAD AZHARA	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	225.000,00	2016	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017

58	348	EVERCOSS	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	240.000,00	2016	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017
59	352	PT.DWITAMA WUKIRINDO SOLUSI	08 JUNI 2016 S/D 7 JUNI 2017	2.250.000,00	2016	08 JUNI 2016 S/D 7 JUNI 2017
60	381	NESHA PUTRI	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	126.000,00	2016	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017
61	389	UNCU FENY	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	156.000,00	2016	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017
62	415	ALVONI ADVERTISING	18 JULI 2016 S/D 17 JULI 2017	144.000,00	2016	18 JULI 2016 S/D 17 JULI 2017
63	020	TOKO BANGUNAN MAKMUR	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	650.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
64	021	TOKO BANGUNAN RUCITA	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	243.750,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
65	032	SIEC I SICINCIN	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	146.250,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
66	034	PRAKTEK DOKTER GIGI	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	91.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
67	121	LAPAU COKLAT	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	2.400.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
68	122	LAPAU COKLAT	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	1.200.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017
69	134	RM.CAHAYA SURYA	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	260.000,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017
70	136	ANISA TOURS DAN TRAVEL	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	731.250,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017
71	152	MASTRO COMPUTER	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	195.000,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017
72	180	PT. ASURANSI BUMI PUTERA	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	136.500,00	2016	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017
73	206	NOTARIS MIRA FEBRIANI	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	243.750,00	2016	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017
74	236	SPBU JAMBAK LUBUK ALUNG	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	1.800.000,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017
75	272	NOTARIS INDRA SAKTI	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	292.500,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017
76	276	NOTARIS ADE (BLM)	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	292.500,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017
77	277	MUHAMMAD YUS, SH	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	130.000,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017
78	285	RIRI AGUSTIEN, SH. MKn	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	168.750,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017
79	289	NOTARIS DESMAYANTI	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	168.750,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017
80	291	LAPAU COKLAT	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	4.500.000,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017
81	297	NOTARIS DEVI HASIBUAN	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	225.000,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017
82	345	TITIPAN KILAT BINGKUANG MAS	03 JUNI 2016 S/D 02 JUNI 2017	240.000,00	2016	03 JUNI 2016 S/D 02 JUNI 2017
83	369	FAREL PROFIL	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	104.000,00	2016	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017
84	394	DUA PUTRI MAMA L.ALUNG	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	150.000,00	2016	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017
85	395	DUA PUTRI MAMA PAUH KAMBAR	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	540.000,00	2016	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017
86	192	SUZUKI	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	97.500,00	2016	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017
87	164	pajak reklame pt wordl innovative telecomunication oppo rafaa cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	250.000,00	2017	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018

88	169	pajak reklame pt world innovative telecomunication oppo matahari cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	1.800.000,00	2017	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018
89	172	pajak reklame pt world innovative telecomunication oppo matahari cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	325.000,00	2017	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018
90	174	pajak reklame pt world innovative telecomunication oppo raffa cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	325.000,00	2017	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018
91	176	pajak reklame pt world innovative telecomunication oppo prima cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	325.000,00	2017	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018
92	268	pajak reklame pt citra media nusantara/oskar	6 SEPT 2017 S/D 4 SEPT 2018	1.800.000,00	2017	6 SEPT 2017 S/D 4 SEPT 2018
93	205	PAJAK REKLAME WESTERN UNION	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	250.000,00	2017	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018
94	206	pajak reklame pt pos indonesia ky tanam	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018
95	207	pajak reklame pt pos indonesia sicincin	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018
96	208	pajak reklame pt pos indonesia pasar usang	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018
97	209	pajak reklame pt pos indonesia pauh kambar	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018
98	272	pajak reklame PT BUANA LESTARI NUSANTARA reklame honda gajah motor	1 MAR.2017 - 1 MAR 2018	11.718.750,00	2017	1 MAR.2017 - 1 MAR 2018
99	053	PT BUMI SARIMAS INDONESIA	25 FEB 19 S/D 24 FEB 2020	200,00	2019	25 FEB 19 S/D 24 FEB 2020
100	107	OPTIK MUSTIKA	30 MRT 19 S/D 29 MRT 2020	400,00	2019	30 MRT 19 S/D 29 MRT 2020
101	211	RM SELAYU MUTIARA	12 JUNI 19 S/D 11 JUNI 2020	75.600,00	2019	12 JUNI 19 S/D 11 JUNI 2020
102	127	PT BANDANO CITRA BANUA	12 APR 19 S/D 11 APR 2020	270.000,00	2019	12 APR 19 S/D 11 APR 2020
103	279	OPTIK MULIA PASAR MUDIK	06 SEPT 19 S/D 05 SEPT 2020	500,00	2019	06 SEPT 19 S/D 05 SEPT 2020
104		SMK KESEHATAN MANDIRI	08 FEB 2020 S/D 07 FEBRUARI 2021	360.000,00	2020	08 FEB 2020 S/D 07 FEBRUARI 2021
105	066	APOTIK MUSTIKA	28 MARET 2020 S/D 28 MARET 2021	410.400,00	2020	28 MARET 2020 S/D 28 MARET 2021
106	121	CAHAYA SUCI	16 APRIL 2020 S/D 15 APRIL 2021	360.000,00	2020	16 APRIL 2020 S/D 15 APRIL 2021
107	033	HONDA KENDAL	30 JANUARI 2021 S/D 29 JANUARI 2022	450.000,00	2021	30 JANUARI 2021 S/D 29 JANUARI 2022
108	130	CHIA SAGITAKO	16 MARET 2021 S/D 15 MARET 2022	121.500,00	2021	16 MARET 2021 S/D 15 MARET 2022
109	152	CV BAKRI MANDIRI	01 APRIL 2021 S/D 31 MARET 2022	270.000,00	2021	01 APRIL 2021 S/D 31 MARET 2022
110	216	DECO CELL	17 MEI 2021 S/D 16 MEI 2022	675.000,00	2021	17 MEI 2021 S/D 16 MEI 2022
111	356A	OPTIK SURJAYA	04 OKTOBER 2021 S/D 03 OKTOBER 2022	360.000,00	2021	04 OKTOBER 2021 S/D 03 OKTOBER 2022
112	384	VIVO (ASYA GROUP)	11 OKTOBER 2021 S/D 10 OKTOBER 2022	750.000,00	2021	11 OKTOBER 2021 S/D 10 OKTOBER 2022

113	413	ROMANTIS ADVERTISING	18 NOVEMBER 2021 S/D 17 NOVEMBER 2022	216.000,00	2021	18 NOVEMBER 2021 S/D 17 NOVEMBER 2022
114	331	MARTABAK KUBANG HAYUDA	28 MARET 2023 - 27 MARET 2024	360.000,00	2023	28 MARET 2023 - 27 MARET 2024
115	332	SURYA KOMPUTER	01 APRIL 2023 S/D 31 MARET 2024	540.000,00	2023	01 APRIL 2023 S/D 31 MARET 2024
116	333	R.M LINTAS RAYA	16 APRIL 2023 S/D 15 APRIL 2024	360.000,00	2023	16 APRIL 2023 S/D 15 APRIL 2024
117	338	VALENCIA PESTA	03 JULI 2023 S/D 02 JULI 2024	360.000,00	2023	03 JULI 2023 S/D 02 JULI 2024
118	109	NADIA ELEKTRONIK	25 JULI 2023 S/D 24 JULI 2024	57.000,00	2023	25 JULI 2023 S/D 24 JULI 2024
119	333	MARTABAK MESIR KUBANG	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	200.000,00	2023	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024
120	334	MARTABAK MESIR KUBANG	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	360.000,00	2023	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024
121	335	PALANTA NASI UNI EVI	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	625.000,00	2023	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024
122	336	PINYARAM TINA	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	500.000,00	2023	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024
123	337	AMPERA GAYA BARU	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	400.000,00	2023	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024
124	262	ALEXIS MEDIAPRO ADVERTISING	18 SEPTEMBER 2023 s/d 17 SEPTEMBER 2024	843.750,00	2023	18 SEPTEMBER 2023 s/d 17 SEPTEMBER 2024
125	339	CINTO SATWA	3 APRIL 2023 S/D 2 APRIL 2023	270.000,00	2023	3 APRIL 2023 S/D 2 APRIL 2023
127	114	SPBU 13.225.522 SICINCIN	20 MAR 2024 - 20 MAR 2025	1.875.000,00	2024	20 MAR 2024 - 20 MAR 2025
129	227	BRI CABANG PADANG PANJANG	28 MEI 2024 - 27 MEI 2025	750.000,00	2024	28 MEI 2024 - 27 MEI 2025
130	310	PT. ARVINDO BANGUN MULIA	22 AGUS 2024 - 21 SEPT 2024	1.687.500,00	2024	22 AGUS 2024 - 21 SEPT 2024
131	381	PROFESIONAL	11 SEPT 2024 - 10 SEPT 2025	1.020.000,00	2024	11 SEPT 2024 - 10 SEPT 2025
132	34	RM.SYAKINAH	1 FEB 2025 S/D 31 JAN 2026	388.800,00	2025	1 FEB 2025 S/D 31 JAN 2026
133	55	MOMOYO	12 FEB 2025 S/D 11 FEB 2026	405.000,00	2025	12 FEB 2025 S/D 11 FEB 2026
134	66	SPBU.13.255.522 SICINCIN	20 MAR 2025 S/D 20 MAT 2026	1.875.000,00	2025	20 MAR 2025 S/D 20 MAT 2026
135	69	RM LINTAS RAYA	1 MAR 2025 S/D 28 FEB 2026	360.000,00	2025	1 MAR 2025 S/D 28 FEB 2026
136		NUR PERABOT	7 MAR 2025 S/D 6 MAR 2026	360.000,00	2025	7 MAR 2025 S/D 6 MAR 2026
137	91	PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	18 MAR 2025 S/D 17 MAR 2026	720.000,00	2025	18 MAR 2025 S/D 17 MAR 2026
138	92	PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	18 MAR 2025 S/D 17 MAR 2026	1.102.500,00	2025	18 MAR 2025 S/D 17 MAR 2026
139	94	PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	18 MAR 2025 S/D 17 MAR 2026	1.440.000,00	2025	18 MAR 2025 S/D 17 MAR 2026
140	99	SEMPURNA PRINTING	13 MAR S/D 27 MAR 2025	2.520.000,00	2025	13 MAR S/D 27 MAR 2025
141	115	PENGINAPAN NAN GOMBANG	5 APR 2025 S/D 4 APR 2026	300.000,00	2025	5 APR 2025 S/D 4 APR 2026
142	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	810.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026
143	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	900.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026
144	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	225.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026

145	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	225.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026
146	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	225.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026
147	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	225.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026
148	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	225.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026
149	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026
150	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026
151	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026
152	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026
153	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026
154	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026
155	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026
156	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026
157	204	PT ARVINDO BANGUN MULIA	13 JUN 2025 S/D 12 JUN 2026	11.250.000,00	2025	13 JUN 2025 S/D 12 JUN 2026
158	217	YOESANI SHOES	9 JUL 2025 S/D 8 JUL 2026	360.000,00	2025	9 JUL 2025 S/D 8 JUL 2026
159	225	DELTA CAR WASH	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026	450.000,00	2025	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026
160	230	FADLI FARFUM REFILL	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026	180.000,00	2025	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026
161	232	MARTABAK MESIR KUBANG	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026	200.000,00	2025	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026
162	233	MARTABAK MESIR KUBANG	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026	360.000,00	2025	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026
163	246	PT KREASI GIRI KUSALO	7 AGUS 2025 S/D 6 AGUS 2026	6.000.000,00	2025	7 AGUS 2025 S/D 6 AGUS 2026
164	247	PT KREASI GIRI KUSALO	7 AGUS 2025 S/D 6 AGUS 2026	5.400.000,00	2025	7 AGUS 2025 S/D 6 AGUS 2026
165	248	PT KREASI GIRI KUSALO	7 AGUS 2025 S/D 6 AGUS 2026	6.480.000,00	2025	7 AGUS 2025 S/D 6 AGUS 2026
166	262	PT KREASI GIRI KUSALO	9 AGUS S/D 9 SEPT 2025	4.050.000,00	2025	9 AGUS S/D 9 SEPT 2025
167	263	PT KREASI GIRI KUSALO	19 AGUS S/D 19 SEPT 2025	2.025.000,00	2025	19 AGUS S/D 19 SEPT 2025
168	264	PT KREASI GIRI KUSALO	19 AGUS S/D 19 SEPT 2025	1.620.000,00	2025	19 AGUS S/D 19 SEPT 2025
169	276	PROFESIONAL	11 SEP 2025 S/D 10 SEP 2026	1.020.000,00	2025	11 SEP 2025 S/D 10 SEP 2026
170	305	MARTANBAK MESIR KUBANG	4 OKT 2025 S/D 3 OKT 2026	500.000,00	2025	4 OKT 2025 S/D 3 OKT 2026
171	314	SATE MUDIAK DANGUANG-DANGUANG ASLI	4 OKT 2025 S/D 3 OKT 2026	288.000,00	2025	4 OKT 2025 S/D 3 OKT 2026
172	338	PT KREASI GIRI KUSALO	27 NOV S/D 26 DES 2025	3.645.000,00	2025	27 NOV S/D 26 DES 2025
173	343	NY.MEDIA	1O NOV S/D 9 DES 2025	2.160.000,00	2025	1O NOV S/D 9 DES 2025
174	366	PT. KREASI GIRI KUSALO	13 DES 2025 S/D 11 JAN 2026	4.050.000,00	2025	13 DES 2025 S/D 11 JAN 2026
JUMLAH				**134.121.100,00**		

Piutang PBB P2 Tahun 2014 per 31 Desember 2025

No	KODE	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2014 TERBIT 2025	TOTAL PIUTANG 2014	REALISASI PIUTANG 2014 JAN-DES 2025	DENDA PIUTANG	Piutang 2014 per 31 des 2025
	KECAMATAN			TUNGGAKAN	TUNGGAKAN	Realisasi		TUNGGAKAN
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	540.320.343,00	-	540.320.343,00	3.509.976,00	691.814,00	536.810.367,00
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	118.935.146,00	-	118.935.146,00	1.341.437,00	153.637,00	117.593.709,00
3	1305061	Kecamatan Sintoga	230.305.441,00	-	230.305.441,00	232.037,00	101.940,00	230.073.404,00
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	140.305.760,00	-	140.305.760,00	471.303,00	208.821,00	139.834.457,00
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	83.225.235,00	-	83.225.235,00	231.651,00	79.331,00	82.993.584,00
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	189.948.091,00	-	189.948.091,00	134.131,00	49.602,00	189.813.960,00
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	292.887.524,00	-	292.887.524,00	1.886.228,00	168.097,00	291.001.296,00
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	96.209.451,00	-	96.209.451,00	199.797,00	78.468,00	96.009.654,00
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	20.699.780,00	-	20.699.780,00	149.940,00	31.554,00	20.549.840,00
10	1305091	Kecamatan Patamuan	52.433.558,00	-	52.433.558,00	48.430,00	23.246,00	52.385.128,00
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	91.184.225,00	-	91.184.225,00	40.300,00	14.612,00	91.143.925,00
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	235.852.583,00	10.000,00	235.862.583,00	31.515,00	15.127,00	235.831.068,00
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	41.153.193,00	-	41.153.193,00	-	-	41.153.193,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	69.759.899,00	-	69.759.899,00	298.622,00	118.387,00	69.461.277,00
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	131.517.605,00	-	131.517.605,00	30.000,00	5.800,00	131.487.605,00
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	52.185.433,00	-	52.185.433,00	113.878,00	41.793,00	52.071.555,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	52.754.329,00	-	52.754.329,00	160.120,00	59.657,00	52.594.209,00
Jumlah			**2.439.677.596,00**	**10.000,00**	**2.439.687.596,00**	**8.879.365,00**	**1.841.886,00**	**2.430.808.231,00**

Piutang PBB P2 Tahun 2015 per 31 Desember 2025

No	KODE	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2015 TERBIT 2025	TOTAL PIUTANG 2015	REALISASI PIUTANG 2015 JAN-DES 2025	DENDA PIUTANG	Piutang 2015 per 31 des 2025
	KECAMATAN			TUNGGAKAN	TUNGGAKAN	Realisasi		TUNGGAKAN
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	632.121.700,00	-	632.121.700,00	6.410.223,00	649.716,00	625.711.477,00
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	58.258.253,00	-	58.258.253,00	867.770,00	233.383,00	57.390.483,00
3	1305061	Kecamatan Sintoga	291.993.187,00	-	291.993.187,00	137.922,00	66.202,00	291.855.265,00
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	125.592.494,00	-	125.592.494,00	488.943,00	199.993,00	125.103.551,00
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	73.569.458,00	-	73.569.458,00	80.650,00	26.022,00	73.488.808,00
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	150.809.411,00	-	150.809.411,00	230.864,00	110.813,00	150.578.547,00
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	233.055.778,00	-	233.055.778,00	638.813,00	384.953,00	232.416.965,00
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	83.858.280,00	-	83.858.280,00	246.222,00	100.752,00	83.612.058,00
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	12.684.327,00	72.530,00	12.756.857,00	75.940,00	24.194,00	12.680.917,00
10	1305091	Kecamatan Patamuan	47.125.240,00	-	47.125.240,00	84.600,00	40.607,00	47.040.640,00
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	79.077.115,00	-	79.077.115,00	10.000,00	12.200,00	79.067.115,00
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	148.139.951,00	20.000,00	148.159.951,00	20.000,00	9.600,00	148.139.951,00
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	41.045.972,00	-	41.045.972,00	31.889,00	15.306,00	41.014.083,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	28.228.000,00	-	28.228.000,00	138.850,00	41.697,00	28.089.150,00
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	144.471.677,00	-	144.471.677,00	20.000,00	5.600,00	144.451.677,00
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	47.212.687,00	-	47.212.687,00	115.710,00	50.940,00	47.096.977,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	37.978.877,00	-	37.978.877,00	114.320,00	46.673,00	37.864.557,00
Jumlah			**2.235.222.407,00**	**92.530,00**	**2.235.314.937,00**	**9.712.716,00**	**2.018.651,00**	**2.225.602.221,00**

Piutang PBB P2 Tahun 2016 per 31 Desember 2025

No	KODE KECAMATAN	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2016 TERBIT 2025	TOTAL PIUTANG 2016	REALISASI PIUTANG 2016 JAN-	DENDA PIUTANG	Piutang 2016 per 31 des 2025
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	932.354.853,00	-	932.354.853,00	10.057.166,00	1.459.624,00	922.297.687,00
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	367.570.824,00	-	367.570.824,00	2.414.656,00	215.936,00	365.156.168,00
3	1305061	Kecamatan Sintoga	32.929.315,00	-	32.929.315,00	189.482,00	80.170,00	32.739.833,00
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	49.261.260,00	-	49.261.260,00	90.510,00	38.533,00	49.170.750,00
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	26.016.968,00	-	26.016.968,00	131.075,00	49.026,00	25.885.893,00
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	73.622.024,00	-	73.622.024,00	284.988,00	126.013,00	73.337.036,00
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	206.544.294,00	-	206.544.294,00	405.211,00	302.416,00	206.139.083,00
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	112.840.495,00	-	112.840.495,00	241.885,00	94.670,00	112.598.610,00
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	153.190.316,00	72.530,00	153.262.846,00	127.210,00	16.423,00	153.135.636,00
10	1305091	Kecamatan Patamuan	40.913.642,00	-	40.913.642,00	48.430,00	23.246,00	40.865.212,00
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	4.421.815,00	-	4.421.815,00	-	-	4.421.815,00
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	44.993.068,00	-	44.993.068,00	21.515,00	10.327,00	44.971.553,00
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	12.261.157,00	-	12.261.157,00	31.889,00	15.306,00	12.229.268,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	92.076.393,00	15.000,00	92.091.393,00	90.515,00	27.247,00	92.000.878,00
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	51.288.699,00	-	51.288.699,00	30.000,00	5.800,00	51.258.699,00
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	36.472.933,00	-	36.472.933,00	-	-	36.472.933,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	38.773.813,00	-	38.773.813,00	10.000,00	4.800,00	38.763.813,00
Jumlah			**2.275.531.869,00**	**87.530,00**	**2.275.619.399,00**	**14.174.532,00**	**2.469.537,00**	**2.261.444.867,00**

Lampiran : 6.b / 10 - 18

Piutang PBB P2 Tahun 2017 per 31 Desember 2025

No	KODE KECAMATAN	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2017 TERBIT 2025	TOTAL PIUTANG 2017	REALISASI PIUTANG 2017 JAN-	DENDA PIUTANG	Piutang 2017 per 31 des 2025
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	1.135.111.745,00	-	1.135.111.745,00	10.307.323,00	1.882.095,00	1.124.804.422,00
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	346.029.589,00	-	346.029.589,00	2.693.675,00	221.746,00	343.335.914,00
3	1305061	Kecamatan Sintoga	28.538.669,00	-	28.538.669,00	84.115,00	35.538,00	28.454.554,00
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	42.234.644,00	-	42.234.644,00	252.918,00	97.721,00	41.981.726,00
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	22.930.119,00	-	22.930.119,00	74.800,00	8.688,00	22.855.319,00
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	42.100.679,00	-	42.100.679,00	20.000,00	5.200,00	42.080.679,00
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	206.114.763,00	10.000,00	206.124.763,00	337.333,00	142.403,00	205.787.430,00
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	95.316.153,00	-	95.316.153,00	179.475,00	60.714,00	95.136.678,00
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	66.197.820,00	72.530,00	66.270.350,00	20.000,00	5.600,00	66.250.350,00
10	1305091	Kecamatan Patamuan	2.520.531,00	-	2.520.531,00	88.910,00	42.676,00	2.431.621,00
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	99.711,00	-	99.711,00	36.300,00	17.424,00	63.411,00
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	19.031.751,00	10.000,00	19.041.751,00	76.967,00	36.944,00	18.964.784,00
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	10.078.476,00	-	10.078.476,00	46.912,00	22.517,00	10.031.564,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	77.000.246,00	15.000,00	77.015.246,00	35.000,00	5.000,00	76.980.246,00
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	49.563.169,00	-	49.563.169,00	20.000,00	5.600,00	49.543.169,00
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	53.821.297,00	-	53.821.297,00	27.500,00	8.600,00	53.793.797,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	57.753.748,00	-	57.753.748,00	74.320,00	35.673,00	57.679.428,00
Jumlah			**2.254.443.110,00**	**107.530,00**	**2.254.550.640,00**	**14.375.548,00**	**2.634.139,00**	**2.240.175.092,00**

Lampiran : 6.b / 11 - 18

Piutang PBB P2 Tahun 2018 per 31 Desember 2025

No	KODE KECAMATAN	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2018 TERBIT 2025	TOTAL PIUTANG 2018	REALISASI PIUTANG 2018 JAN-	DENDA PIUTANG	Piutang 2018 per 31 des 2025
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	1.505.769.954,00	28.840,00	1.505.798.794,00	10.989.556,00	1.804.990,00	1.494.809.238,00
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	515.445.324,00	9.523.071,00	524.968.395,00	3.632.227,00	485.641,00	521.336.168,00
3	1305061	Kecamatan Sintoga	30.802.242,00	-	30.802.242,00	97.200,00	35.875,00	30.705.042,00
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	33.242.898,00	-	33.242.898,00	64.262,00	20.748,00	33.178.636,00
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	16.953.348,00	174.655,00	17.128.003,00	218.886,00	14.280,00	16.909.117,00
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	44.915.074,00	-	44.915.074,00	117.181,00	47.846,00	44.797.893,00
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	219.722.122,00	10.000,00	219.732.122,00	498.031,00	240.605,00	219.234.091,00
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	107.094.914,00	-	107.094.914,00	392.475,00	170.954,00	106.702.439,00
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	56.111.679,00	72.530,00	56.184.209,00	149.610,00	31.174,00	56.034.599,00
10	1305091	Kecamatan Patamuan	7.356.386,00	-	7.356.386,00	42.830,00	20.558,00	7.313.556,00
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	86.305,00	-	86.305,00	36.300,00	17.424,00	50.005,00
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	38.179.698,00	-	38.179.698,00	76.967,00	36.944,00	38.102.731,00
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	3.530.748,00	-	3.530.748,00	31.889,00	15.306,00	3.498.859,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	75.356.572,00	15.000,00	75.371.572,00	243.222,00	84.595,00	75.128.350,00
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	65.035.783,00	-	65.035.783,00	20.000,00	5.000,00	65.015.783,00
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	50.103.611,00	-	50.103.611,00	156.962,00	35.538,00	49.946.649,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	64.132.339,00	-	64.132.339,00	94.120,00	45.177,00	64.038.219,00
Jumlah			**2.833.838.997,00**	**9.824.096,00**	**2.843.663.093,00**	**16.861.718,00**	**3.112.655,00**	**2.826.801.375,00**

Lampiran : 6.b / 12 - 18

Piutang PBB P2 Tahun 2019 per 31 Desember 2025

No	KODE KECAMATAN	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2019 TERBIT 2025	TOTAL PIUTANG 2019	REALISASI PIUTANG 2019 JAN-	DENDA PIUTANG	Piutang 2019 per 31 des 2025
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	2.271.155.342,00	28.840,00	2.271.184.182,00	12.714.214,00	2.085.323,00	2.258.469.968,00
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	630.998.571,00	9.523.071,00	640.521.642,00	3.731.720,00	464.443,00	636.789.922,00
3	1305061	Kecamatan Sintoga	11.631.046,00	-	11.631.046,00	110.483,00	43.830,00	11.520.563,00
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	29.322.135,00	-	29.322.135,00	310.308,00	111.653,00	29.011.827,00
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	21.692.750,00	-	21.692.750,00	88.700,00	10.460,00	21.604.050,00
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	43.011.171,00	-	43.011.171,00	85.412,00	30.217,00	42.925.759,00
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	280.642.597,00	-	280.642.597,00	594.883,00	222.606,00	280.047.714,00
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	105.226.770,00	-	105.226.770,00	298.604,00	143.329,00	104.928.166,00
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	53.461.481,00	72.530,00	53.534.011,00	66.456,00	26.242,00	53.467.555,00
10	1305091	Kecamatan Patamuan	16.455.197,00	-	16.455.197,00	78.830,00	33.238,00	16.376.367,00
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	96.105,00	-	96.105,00	36.300,00	17.424,00	59.805,00
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	37.914.884,00	-	37.914.884,00	10.000,00	400,00	37.904.884,00
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	2.395.251,00	-	2.395.251,00	-	-	2.395.251,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	70.254.159,00	15.000,00	70.269.159,00	175.732,00	72.551,00	70.093.427,00
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	78.124.813,00	-	78.124.813,00	20.000,00	5.000,00	78.104.813,00
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	51.539.198,00	-	51.539.198,00	10.000,00	4.800,00	51.529.198,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	88.242.376,00	-	88.242.376,00	30.000,00	10.000,00	88.212.376,00
Jumlah			**3.792.163.846,00**	**9.639.441,00**	**3.801.803.287,00**	**18.361.642,00**	**3.281.516,00**	**3.783.441.645,00**

Piutang PBB P2 Tahun 2020 per 31 Desember 2025

No	KODE KECAMATAN	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2020 TERBIT 2025	TOTAL PIUTANG 2020	REALISASI PIUTANG 2020 JAN-	DENDA PIUTANG	Piutang 2020 per 31 des 2025
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	2.233.150.810,00	28.840,00	2.233.179.650,00	14.750.853,00	2.753.535,00	2.218.428.797,00
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	696.137.838,00	9.523.071,00	705.660.909,00	4.269.661,00	499.668,00	701.391.248,00
3	1305061	Kecamatan Sintoga	10.133.119,00	-	10.133.119,00	30.000,00	600,00	10.103.119,00
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	30.497.815,00	-	30.497.815,00	279.975,00	115.641,00	30.217.840,00
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	15.555.756,00	-	15.555.756,00	174.262,00	41.266,00	15.381.494,00
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	46.076.045,00	-	46.076.045,00	53.362,00	21.213,00	46.022.683,00
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	236.313.321,00	-	236.313.321,00	422.505,00	169.024,00	235.890.816,00
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	121.591.655,00	-	121.591.655,00	344.619,00	161.416,00	121.247.036,00
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	95.309.370,00	72.530,00	95.381.900,00	126.506,00	49.545,00	95.255.394,00
10	1305091	Kecamatan Patamuan	16.514.583,00	-	16.514.583,00	42.830,00	20.558,00	16.471.753,00
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	764.575,00	-	764.575,00	-	-	764.575,00
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	42.426.563,00	-	42.426.563,00	91.375,00	39.460,00	42.335.188,00
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	8.640.049,00	-	8.640.049,00	31.889,00	15.306,00	8.608.160,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	73.680.847,00	15.000,00	73.695.847,00	165.732,00	67.751,00	73.530.115,00
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	59.693.246,00	-	59.693.246,00	30.000,00	5.800,00	59.663.246,00
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	105.707.269,00	-	105.707.269,00	173.126,00	69.060,00	105.534.143,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	115.382.844,00	-	115.382.844,00	134.120,00	59.777,00	115.248.724,00
Jumlah			**3.907.575.705,00**	**9.639.441,00**	**3.917.215.146,00**	**21.120.815,00**	**4.089.620,00**	**3.896.094.331,00**

Piutang PBB P2 Tahun 2021 per 31 Desember 2025

No	KODE KECAMATAN	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2021 TERBIT 2025	TOTAL PIUTANG 2021	REALISASI PIUTANG 2021 JAN-	DENDA PIUTANG	Piutang 2021 per 31 des 2025
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	2.010.068.793,00	14.897.681,00	2.024.966.474,00	26.439.760,00	3.603.192,00	1.998.526.714,00
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	727.505.766,00	10.167.558,00	737.673.324,00	5.799.330,00	763.860,00	731.873.994,00
3	1305061	Kecamatan Sintoga	11.254.687,00	167.090,00	11.421.777,00	197.090,00	600,00	11.224.687,00
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	16.483.566,00	309.647,00	16.793.213,00	551.036,00	118.094,00	16.242.177,00
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	10.307.199,00	578.357,00	10.885.556,00	453.582,00	5.592,00	10.431.974,00
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	53.318.386,00	63.648,00	53.382.034,00	329.262,00	147.264,00	53.052.772,00
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	250.781.906,00	726.563,00	251.508.469,00	1.465.273,00	325.217,00	250.043.196,00
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	121.583.394,00	20.000,00	121.603.394,00	405.725,00	185.946,00	121.197.669,00
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	102.766.717,00	95.054,00	102.861.771,00	260.817,00	78.062,00	102.600.954,00
10	1305091	Kecamatan Patamuan	14.728.710,00	503.056,00	15.231.766,00	126.576,00	-	15.105.190,00
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	449.653,00	-	449.653,00	-	-	449.653,00
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	17.970.766,00	154.370,00	18.125.136,00	119.332,00	47.879,00	18.005.804,00
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	4.162.013,00	-	4.162.013,00	15.023,00	7.211,00	4.146.990,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	60.422.120,00	356.838,00	60.778.958,00	280.130,00	28.888,00	60.498.828,00
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	73.943.247,00	50.650,00	73.993.897,00	70.650,00	10.600,00	73.923.247,00
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	67.430.296,00	230.000,00	67.660.296,00	99.244,00	33.637,00	67.561.052,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	98.511.831,00	62.368,00	98.574.199,00	146.120,00	29.780,00	98.428.079,00
Jumlah			**3.641.689.050,00**	**28.382.880,00**	**3.670.071.930,00**	**36.758.950,00**	**5.385.822,00**	**3.633.312.980,00**

Lampiran : 6.b / 15 - 18

Piutang PBB P2 Tahun 2022 per 31 Desember 2025

No	KODE KECAMATAN	Uraian	Saldo Piutang PBB Audited	PBB 2022 TERBIT 2025	TOTAL PIUTANG 2022	REALISASI PIUTANG 2022 JAN-	DENDA PIUTANG	Piutang 2022 per 31 des 2025
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	2.353.434.671,00	14.731.640,00	2.368.166.311,00	31.754.086,00	4.712.363,00	2.336.412.225,00
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	881.284.057,00	10.210.088,00	891.494.145,00	6.868.730,00	991.330,00	884.625.415,00
3	1305061	Kecamatan Sintoga	9.293.984,00	145.950,00	9.439.934,00	326.467,00	62.066,00	9.113.467,00
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	46.200.352,00	299.647,00	46.499.999,00	763.204,00	193.656,00	45.736.795,00
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	21.568.291,00	578.357,00	22.146.648,00	592.894,00	38.482,00	21.553.754,00
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	48.609.564,00	-	48.609.564,00	305.287,00	134.103,00	48.304.277,00
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	253.675.848,00	726.563,00	254.402.411,00	1.791.686,00	450.431,00	252.610.725,00
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	76.807.665,00	20.000,00	76.827.665,00	315.406,00	120.360,00	76.512.259,00
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	389.121.481,00	95.054,00	389.216.535,00	257.261,00	90.316,00	388.959.274,00
10	1305091	Kecamatan Patamuan	199.236.434,00	503.056,00	199.739.490,00	127.576,00	1.080,00	199.611.914,00
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	1.291.758,00	-	1.291.758,00	-	-	1.291.758,00
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	19.313.804,00	170.118,00	19.483.922,00	160.705,00	60.179,00	19.323.217,00
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	6.464.302,00	-	6.464.302,00	25.023,00	12.011,00	6.439.279,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	48.844.490,00	346.838,00	49.191.328,00	367.167,00	84.598,00	48.824.161,00
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	67.205.524,00	50.650,00	67.256.174,00	70.650,00	10.600,00	67.185.524,00
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	71.124.094,00	240.000,00	71.364.094,00	89.244,00	19.437,00	71.274.850,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	77.464.793,00	62.368,00	77.527.161,00	191.650,00	62.454,00	77.335.511,00
Jumlah			**4.570.941.112,00**	**28.180.329,00**	**4.599.121.441,00**	**44.007.036,00**	**7.043.466,00**	**4.555.114.405,00**

Piutang PBB P2 Tahun 2023 per 31 Desember 2025

No	KODE KECAMATAN	Uraian	Saldo Piutang PBB Audited	PBB 2023 TERBIT 2025	TOTAL PIUTANG 2023	REALISASI PIUTANG 2023 JAN-	DENDA PIUTANG	Piutang 2023 per 31 des 2025
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	8.205.669.387,00	25.782.672,00	8.231.452.059,00	107.701.153,00	22.868.574,00	8.123.750.906,00
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	2.223.869.365,00	28.582.593,00	2.252.451.958,00	27.152.826,00	4.896.515,00	2.225.299.132,00
3	1305061	Kecamatan Sintoga	13.887.383,00	246.315,00	14.133.698,00	458.886,00	77.352,00	13.674.812,00
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	31.200.221,00	299.647,00	31.499.868,00	530.190,00	97.928,00	30.969.678,00
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	24.606.097,00	578.357,00	25.184.454,00	698.707,00	80.478,00	24.485.747,00
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	52.391.029,00	21.070,00	52.412.099,00	275.726,00	81.948,00	52.136.373,00
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	236.345.927,00	754.143,00	237.100.070,00	1.883.052,00	407.437,00	235.217.018,00
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	119.901.545,00	48.590,00	119.950.135,00	652.089,00	228.507,00	119.298.046,00
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	73.455.482,00	108.504,00	73.563.986,00	232.494,00	41.836,00	73.331.492,00
10	1305091	Kecamatan Patamuan	3.648.265,00	503.056,00	4.151.321,00	124.576,00	10.560,00	4.026.745,00
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	1.861.270,00	10.000,00	1.871.270,00	10.000,00	-	1.861.270,00
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	15.443.206,00	278.088,00	15.721.294,00	35.748,00	4.800,00	15.685.546,00
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	12.353.090,00	-	12.353.090,00			12.353.090,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	50.123.252,00	346.838,00	50.470.090,00	1.060.667,00	380.423,00	49.409.423,00
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	53.499.733,00	50.650,00	53.550.383,00	70.650,00	8.000,00	53.479.733,00
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	70.258.896,00	240.000,00	70.498.896,00	160.126,00	41.794,00	70.338.770,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	64.407.001,00	85.218,00	64.492.219,00	187.650,00	43.075,00	64.304.569,00
Jumlah			**11.252.921.149,00**	**57.935.741,00**	**11.310.856.890,00**	**141.234.540,00**	**29.269.227,00**	**11.169.622.350,00**

Piutang PBB P2 Tahun 2024 per 31 Desember 2025

No	KODE KECAMATAN	Uraian	Saldo Piutang PBB Audited	PBB 2024 TERBIT 2025	TOTAL PIUTANG 2024	REALISASI PIUTANG 2024 JAN-	DENDA PIUTANG	Piutang 2023 per 31 des 2025
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	6.446.608.017,00	36.952.186,00	6.483.560.203,00	256.385.971,00	26.547.331,00	6.227.174.232,00
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	1.452.939.982,00	25.341.825,00	1.478.281.807,00	42.222.423,00	4.137.628,00	1.436.059.384,00
3	1305061	Kecamatan Sintoga	12.647.758,00	246.315,00	12.894.073,00	1.539.239,00	112.945,00	11.354.834,00
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	40.216.973,00	355.162,00	40.572.135,00	694.032,00	56.267,00	39.878.103,00
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	14.505.876,00	645.996,00	15.151.872,00	456.982,00	600,00	14.694.890,00
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	166.445.240,00	20.000,00	166.465.240,00	3.291.066,00	208.322,00	163.174.174,00
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	463.180.258,00	1.784.220,00	464.964.478,00	178.297.591,00	3.947.647,00	286.666.887,00
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	168.306.364,00	76.340,00	168.382.704,00	5.123.220,00	436.160,00	163.259.484,00
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	43.067.930,00	156.020,00	43.223.950,00	500.863,00	61.078,00	42.723.087,00
10	1305091	Kecamatan Patamuan	2.168.575,00	503.056,00	2.671.631,00	100.576,00	-	2.571.055,00
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	606.680,00	20.000,00	626.680,00	10.000,00	-	616.680,00
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	3.942.968,00	299.788,00	4.242.756,00	328.582,00	31.169,00	3.914.174,00
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	15.232.366,00	-	15.232.366,00	50.000,00	5.600,00	15.182.366,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	38.835.744,00	635.060,00	39.470.804,00	1.149.250,00	158.092,00	38.321.554,00
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	72.879.834,00	50.650,00	72.930.484,00	107.698,00	8.016,00	72.822.786,00
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	66.316.691,00	240.000,00	66.556.691,00	268.704,00	22.735,00	66.287.987,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	24.954.187,00	85.218,00	25.039.405,00	111.130,00	8.554,00	24.928.275,00
Jumlah			**9.032.855.443,00**	**67.411.836,00**	**9.100.267.279,00**	**490.637.327,00**	**35.742.144,00**	**8.609.629.952,00**

Piutang PBB P2 Tahun 2025 per 31 Desember 2025

No	KODE KECAMATAN	Uraian	KETETAPAN	REALISASI	DENDA	PIUTANG
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	14.901.338.607,00	11.283.077.476,00	2.288.273,00	3.618.261.131,00
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	1.963.306.447,00	447.989.151,00	779.941,00	1.515.317.296,00
3	1305061	Kecamatan Sintoga	355.597.097,00	264.522.751,00	-	91.074.346,00
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	299.206.243,00	125.244.337,00	80.653,00	173.961.906,00
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	211.387.010,00	121.534.297,00	18.564,00	89.852.713,00
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	383.119.573,00	152.769.840,00	205.393,00	230.349.733,00
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	1.307.483.307,00	1.011.064.996,00	29.221,00	296.418.311,00
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	432.666.553,00	173.618.390,00	43.716,00	259.048.163,00
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	282.747.176,00	175.537.491,00	161.488,00	107.209.685,00
10	1305091	Kecamatan Patamuan	200.842.299,00	193.860.466,00	-	6.981.833,00
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	59.774.093,00	58.356.078,00	76.974,00	1.418.015,00
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	126.534.518,00	113.340.423,00	3.646,00	13.194.095,00
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	106.745.473,00	77.889.691,00	-	28.855.782,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	143.036.834,00	86.511.157,00	27.689,00	56.525.677,00
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	103.823.764,00	32.529.464,00	2.400,00	71.294.300,00
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	169.217.274,00	101.741.851,00	2.765,00	67.475.423,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	129.463.329,00	95.278.426,00	7.937,00	34.184.903,00
Jumlah			**21.176.289.597,00**	**14.514.866.285,00**	**3.728.660,00**	**6.661.423.312,00**

PENYISIHAN PIUTANG PAJAK REKLAME TAHUN 2025

NO	NO.SKP	URAIAN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH	TAHUN	KET	TARIF	NILAI PENYISIHAN
1	015	RAT SALON	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	130.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	130.000,00
2	035	PT.GUDANG GARAM	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	520.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	520.000,00
3	036	PT.GUDANG GARAM	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	325.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	325.000,00
4	044	BENGKEL MOBIL FIRDAUS	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	156.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	156.000,00
5	047	RM. AMPERA DUA SAUDARA	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	146.250,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	146.250,00
6	106	DSM MOTOR	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	97.500,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	97.500,00
7	107	GIPER	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	100.000,00
8	137	IRHAS	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	325.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	325.000,00
9	140	RM. PONDOK SAKINAH	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	93.600,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	100%	93.600,00
10	149	YODA MART	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	166.400,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	100%	166.400,00
11	150	DEPOT ISI ULANG SYAUFIFA	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	97.500,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	100%	97.500,00
12	154	RUMAH BERSALIN BUAH HATI	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	487.500,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	100%	487.500,00
13	173	TIRTA BENING	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	124.800,00	2016	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	100%	124.800,00
14	314	BENGKEL AJI MAMBO	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	96.000,00	2016	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	100%	96.000,00
15	316	DUTA MOTOR	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	96.000,00	2016	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	100%	96.000,00
16	264	DIANA SALON	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	130.000,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	100%	130.000,00
17	362	ORGEN GISEL	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	150.000,00	2016	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	100%	150.000,00
18	408	PARMA FOTOCOPY	18 JULI 2016 S/D 17 JULI 2017	100.000,00	2016	18 JULI 2016 S/D 17 JULI 2017	100%	100.000,00
19	446	TOMMY TOUR & TRAVEL	25 JULI 2016 S/D 24 JULI 2017	162.000,00	2016	25 JULI 2016 S/D 24 JULI 2017	100%	162.000,00
20	455	HUSNI MOTOR	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	128.000,00	2016	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	100%	128.000,00
21	458	BENGKEL ALFAS MANDIRI	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	100.000,00	2016	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	100%	100.000,00
22	157	RM. SAMBALADO	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	650.000,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	100%	650.000,00
23	163	AZZAHRA	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	260.000,00	2016	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	100%	260.000,00
24	182	RM CAHAYA SURYA	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	325.000,00	2016	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	100%	325.000,00
25	183	KAISAR	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	325.000,00	2016	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	100%	325.000,00
26	191	KAWACHI	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	260.000,00	2016	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	100%	260.000,00
27	235	RAFA MART DAN CELL	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	195.000,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	100%	195.000,00
28	238	CAHAYA SURYA	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	260.000,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	100%	260.000,00
29	246	PISANG SALAI MAMA	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	130.000,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	100%	130.000,00
30	252	ALIBI SHOP	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	195.000,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	100%	195.000,00
31	275	PUTRA TANJUNG FURNITURE	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	130.000,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	100%	130.000,00
32	284	HANNOCH KETAPING	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	1.125.000,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	100%	1.125.000,00
33	309	PONDOK LESEHAN TIANG BULEK	02 APR 2016 S/D 1 APR 2017	75.000,00	2016	02 APR 2016 S/D 1 APR 2017	100%	75.000,00
34	326	BAKSO NGUDI	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	120.000,00	2016	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	100%	120.000,00
35	338	RAGNI AQUARIUM	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	60.000,00	2016	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	100%	60.000,00
36	384	KUE BIKA IDOLA	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	96.000,00	2016	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	100%	96.000,00
37	419	RM KASIAH BUNDO	20 JULI 2016 S/D 19 JULI 2017	88.000,00	2016	20 JULI 2016 S/D 19 JULI 2017	100%	88.000,00
38	449	UMEGA PENGANTEN	25 JULI 2016 S/D 24 JULI 2017	112.000,00	2016	25 JULI 2016 S/D 24 JULI 2017	100%	112.000,00
39	453	DAFFA KONSTRUKSI	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	120.000,00	2016	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	100%	120.000,00
40	029	SETIAWAN MOTOR	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	260.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	260.000,00

41	041	PRIMADONA CAR WASH	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	650.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	650.000,00
42	139	AJOES DIGITAL	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	900.000,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	100%	900.000,00
43	186	BUDI MULYA II	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	487.500,00	2016	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	100%	487.500,00
44	358	USAHA MUDA	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	77.000,00	2016	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	100%	77.000,00
45	293	PT.BUANA LESTARI	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	843.750,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	100%	843.750,00
46	144	CANON DIGITAL COPIER	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	130.000,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	100%	130.000,00
47	161	FDI DIGITAL FUJI TECK	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	650.000,00	2016	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	100%	650.000,00
48	165	ADVAN UTAMA COMPUTER	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	292.500,00	2016	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	100%	292.500,00
49	166	AXIO COMPUTER	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	260.000,00	2016	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	100%	260.000,00
50	228	NASI SOP ELOK EVO	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	195.000,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	100%	195.000,00
51	243	TB.AMANAH / IKAD KERAMIK	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	1.096.900,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	100%	1.096.900,00
52	266	EVERCROSS	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	325.000,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	100%	325.000,00
53	268	YULHERI ALIOES, SH	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	260.000,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	100%	260.000,00
54	317	MENTARI / INDOSAT	01 APRIL 16 S/D 31 MAR 17	2.900.000,00	2016	01 APRIL 16 S/D 31 MAR 17	100%	2.900.000,00
55	332	PT.WORLD INNOVATIVE	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	162.500,00	2016	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	100%	162.500,00
56	333	EVERCOSS AZHARA	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	240.000,00	2016	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	100%	240.000,00
57	346	COOLPAD AZHARA	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	225.000,00	2016	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	100%	225.000,00
58	348	EVERCOSS	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	240.000,00	2016	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	100%	240.000,00
59	352	PT.DWITAMA WUKIRINDO SOLUSI	08 JUNI 2016 S/D 7 JUNI 2017	2.250.000,00	2016	08 JUNI 2016 S/D 7 JUNI 2017	100%	2.250.000,00
60	381	NESHA PUTRI	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	126.000,00	2016	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	100%	126.000,00
61	389	UNCU FENY	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	156.000,00	2016	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	100%	156.000,00
62	415	ALVONI ADVERTISING	18 JULI 2016 S/D 17 JULI 2017	144.000,00	2016	18 JULI 2016 S/D 17 JULI 2017	100%	144.000,00
63	020	TOKO BANGUNAN MAKMUR	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	650.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	650.000,00
64	021	TOKO BANGUNAN RUCITA	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	243.750,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	243.750,00
65	032	SIEC I SICINCIN	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	146.250,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	146.250,00
66	034	PRAKTEK DOKTER GIGI	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	91.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	91.000,00
67	121	LAPAU COKLAT	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	2.400.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	2.400.000,00
68	122	LAPAU COKLAT	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	1.200.000,00	2016	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100%	1.200.000,00
69	134	RM.CAHAYA SURYA	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	260.000,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	100%	260.000,00
70	136	ANISA TOURS DAN TRAVEL	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	731.250,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	100%	731.250,00
71	152	MASTRO COMPUTER	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	195.000,00	2016	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	100%	195.000,00
72	180	PT. ASURANSI BUMI PUTERA	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	136.500,00	2016	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	100%	136.500,00
73	206	NOTARIS MIRA FEBRIANI	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	243.750,00	2016	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	100%	243.750,00
74	236	SPBU JAMBAK LUBUK ALUNG	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	1.800.000,00	2016	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	100%	1.800.000,00
75	272	NOTARIS INDRA SAKTI	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	292.500,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	100%	292.500,00
76	276	NOTARIS ADE (BLM)	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	292.500,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	100%	292.500,00
77	277	MUHAMMAD YUS, SH	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	130.000,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	100%	130.000,00
78	285	RIRI AGUSTIEN, SH. MKn	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	168.750,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	100%	168.750,00
79	289	NOTARIS DESMAYANTI	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	168.750,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	100%	168.750,00
80	291	LAPAU COKLAT	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	4.500.000,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	100%	4.500.000,00
81	297	NOTARIS DEVI HASIBUAN	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	225.000,00	2016	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	100%	225.000,00
82	345	TITIPAN KILAT BINGKUANG MAS	03 JUNI 2016 S/D 02 JUNI 2017	240.000,00	2016	03 JUNI 2016 S/D 02 JUNI 2017	100%	240.000,00
83	369	FAREL PROFIL	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	104.000,00	2016	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	100%	104.000,00
84	394	DUA PUTRI MAMA L.ALUNG	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	150.000,00	2016	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	100%	150.000,00
85	395	DUA PUTRI MAMA PAUH KAMBAR	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	540.000,00	2016	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	100%	540.000,00
86	192	SUZUKI	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	97.500,00	2016	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	100%	97.500,00

87	164	pajak reklame pt wordl innovative telecomunication oppo rafaa cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	250.000,00	2017	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	100%	250.000,00
88	169	pajak reklame pt world innovative telecomunication oppo matahari cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	1.800.000,00	2017	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	100%	1.800.000,00
89	172	pajak reklame pt world innovative telecomunication oppo matahari cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	325.000,00	2017	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	100%	325.000,00
90	174	pajak reklame pt world innovative telecomunication oppo raffa cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	325.000,00	2017	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	100%	325.000,00
91	176	pajak reklame pt world innovative telecomunication oppo prima cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	325.000,00	2017	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	100%	325.000,00
92	268	pajak reklame pt citra media nusantara/oskar	6 SEPT 2017 S/D 4 SEPT 2018	1.800.000,00	2017	6 SEPT 2017 S/D 4 SEPT 2018	100%	1.800.000,00
93	205	PAJAK REKLAME WESTERN UNION	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	250.000,00	2017	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	100%	250.000,00
94	206	pajak reklame pt pos indonesia ky tanam	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	100%	540.000,00
95	207	pajak reklame pt pos indonesia sicincin	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	100%	540.000,00
96	208	pajak reklame pt pos indonesia pasar usang	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	100%	540.000,00
97	209	pajak reklame pt pos indonesia pauh kambar	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	100%	540.000,00
98	272	pajak reklame PT BUANA LESTARI NUSANTARA reklame honda gajah motor	1 MAR.2017 - 1 MAR 2018	11.718.750,00	2017	1 MAR.2017 - 1 MAR 2018	100%	11.718.750,00
99	053	PT BUMI SARIMAS INDONESIA	25 FEB 19 S/D 24 FEB 2020	200,00	2019	25 FEB 19 S/D 24 FEB 2020	100%	200,00
100	107	OPTIK MUSTIKA	30 MRT 19 S/D 29 MRT 2020	400,00	2019	30 MRT 19 S/D 29 MRT 2020	100%	400,00
101	211	RM SELAYU MUTIARA	12 JUNI 19 S/D 11 JUNI 2020	75.600,00	2019	12 JUNI 19 S/D 11 JUNI 2020	100%	75.600,00
102	127	PT BANDANO CITRA BANUA	12 APR 19 S/D 11 APR 2020	270.000,00	2019	12 APR 19 S/D 11 APR 2020	100%	270.000,00
103	279	OPTIK MULIA PASAR MUDIK	06 SEPT 19 S/D 05 SEPT 2020	500,00	2019	06 SEPT 19 S/D 05 SEPT 2020	100%	500,00
104		SMK KESEHATAN MANDIRI	08 FEB 2020 S/D 07 FEBRUARI 2021	360.000,00	2020	08 FEB 2020 S/D 07 FEBRUARI 2021	100%	360.000,00
105	066	APOTIK MUSTIKA	28 MARET 2020 S/D 28 MARET 2021	410.400,00	2020	28 MARET 2020 S/D 28 MARET 2021	100%	410.400,00
106	121	CAHAYA SUCI	16 APRIL 2020 S/D 15 APRIL 2021	360.000,00	2020	16 APRIL 2020 S/D 15 APRIL 2021	100%	360.000,00
107	033	HONDA KENDAL	30 JANUARI 2021 S/D 29 JANUARI 2022	450.000,00	2021	30 JANUARI 2021 S/D 29 JANUARI 2022	100%	450.000,00
108	130	CHIA SAGITAKO	16 MARET 2021 S/D 15 MARET 2022	121.500,00	2021	16 MARET 2021 S/D 15 MARET 2022	100%	121.500,00
109	152	CV BAKRI MANDIRI	01 APRIL 2021 S/D 31 MARET 2022	270.000,00	2021	01 APRIL 2021 S/D 31 MARET 2022	100%	270.000,00
110	216	DECO CELL	17 MEI 2021 S/D 16 MEI 2022	675.000,00	2021	17 MEI 2021 S/D 16 MEI 2022	100%	675.000,00
111	356A	OPTIK SURJAYA	04 OKTOBER 2021 S/D 03 OKTOBER 2022	360.000,00	2021	04 OKTOBER 2021 S/D 03 OKTOBER 2022	100%	360.000,00
112	384	VIVO (ASYA GROUP)	11 OKTOBER 2021 S/D 10 OKTOBER 2022	750.000,00	2021	11 OKTOBER 2021 S/D 10 OKTOBER 2022	100%	750.000,00
113	413	ROMANTIS ADVERTISING	18 NOVEMBER 2021 S/D 17 NOVEMBER 2022	216.000,00	2021	18 NOVEMBER 2021 S/D 17 NOVEMBER 2022	100%	216.000,00
114	331	MARTABAK KUBANG HAYUDA	28 MARET 2023 - 27 MARET 2024	360.000,00	2023	28 MARET 2023 - 27 MARET 2024	50%	180.000,00
115	332	SURYA KOMPUTER	01 APRIL 2023 S/D 31 MARET 2024	540.000,00	2023	01 APRIL 2023 S/D 31 MARET 2024	50%	270.000,00
116	333	R.M LINTAS RAYA	16 APRIL 2023 S/D 15 APRIL 2024	360.000,00	2023	16 APRIL 2023 S/D 15 APRIL 2024	50%	180.000,00
117	338	VALENCIA PESTA	03 JULI 2023 S/D 02 JULI 2024	360.000,00	2023	03 JULI 2023 S/D 02 JULI 2024	50%	180.000,00
118	109	NADIA ELEKTRONIK	25 JULI 2023 S/D 24 JULI 2024	57.000,00	2023	25 JULI 2023 S/D 24 JULI 2024	50%	28.500,00
119	333	MARTABAK MESIR KUBANG	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	200.000,00	2023	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	50%	100.000,00
120	334	MARTABAK MESIR KUBANG	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	360.000,00	2023	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	50%	180.000,00
121	335	PALANTA NASI UNI EVI	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	625.000,00	2023	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	50%	312.500,00
122	336	PINYARAM TINA	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	500.000,00	2023	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	50%	250.000,00
123	337	AMPERA GAYA BARU	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	400.000,00	2023	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	50%	200.000,00
124	262	ALEXIS MEDIAPRO ADVERTISING	18 SEPTEMBER 2023 s/d 17 SEPTEMBER 2024	843.750,00	2023	18 SEPTEMBER 2023 s/d 17 SEPTEMBER 2024	50%	421.875,00

125	339	CINTO SATWA	3 APRIL 2023 S/D 2 APRIL 2023	270.000,00	2023	3 APRIL 2023 S/D 2 APRIL 2023	50%	135.000,00
127	114	SPBU 13.225.522 SICINCIN	20 MAR 2024 - 20 MAR 2025	1.875.000,00	2024	20 MAR 2024 - 20 MAR 2025	25,0%	468.750,00
129	227	BRI CABANG PADANG PANJANG	28 MEI 2024 - 27 MEI 2025	750.000,00	2024	28 MEI 2024 - 27 MEI 2025	25,0%	187.500,00
130	310	PT. ARVINDO BANGUN MULIA	22 AGUS 2024 - 21 SEPT 2024	1.687.500,00	2024	22 AGUS 2024 - 21 SEPT 2024	25,0%	421.875,00
131	381	PROFESIONAL	11 SEPT 2024 - 10 SEPT 2025	1.020.000,00	2024	11 SEPT 2024 - 10 SEPT 2025	25,0%	255.000,00
132	34	RM.SYAKINAH	1 FEB 2025 S/D 31 JAN 2026	388.800,00	2025	1 FEB 2025 S/D 31 JAN 2026	0,5%	1.944,00
133	55	MOMOYO	12 FEB 2025 S/D 11 FEB 2026	405.000,00	2025	12 FEB 2025 S/D 11 FEB 2026	0,5%	2.025,00
134	66	SPBU.13.255.522 SICINCIN	20 MAR 2025 S/D 20 MAT 2026	1.875.000,00	2025	20 MAR 2025 S/D 20 MAT 2026	0,5%	9.375,00
135	69	RM LINTAS RAYA	1 MAR 2025 S/D 28 FEB 2026	360.000,00	2025	1 MAR 2025 S/D 28 FEB 2026	0,5%	1.800,00
136		NUR PERABOT	7 MAR 2025 S/D 6 MAR 2026	360.000,00	2025	7 MAR 2025 S/D 6 MAR 2026	0,5%	1.800,00
137	91	PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	18 MAR 2025 S/D 17 MAR 2026	720.000,00	2025	18 MAR 2025 S/D 17 MAR 2026	0,5%	3.600,00
138	92	PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	18 MAR 2025 S/D 17 MAR 2026	1.102.500,00	2025	18 MAR 2025 S/D 17 MAR 2026	0,5%	5.512,50
139	94	PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	18 MAR 2025 S/D 17 MAR 2026	1.440.000,00	2025	18 MAR 2025 S/D 17 MAR 2026	0,5%	7.200,00
140	99	SEMPURNA PRINTING	13 MAR S/D 27 MAR 2025	2.520.000,00	2025	13 MAR S/D 27 MAR 2025	0,5%	12.600,00
141	115	PENGINAPAN NAN GOMBANG	5 APR 2025 S/D 4 APR 2026	300.000,00	2025	5 APR 2025 S/D 4 APR 2026	0,5%	1.500,00
142	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	810.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	4.050,00
143	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	900.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	4.500,00
144	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	225.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	1.125,00
145	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	225.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	1.125,00
146	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	225.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	1.125,00
147	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	225.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	1.125,00
148	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	225.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	1.125,00
149	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	1.350,00
150	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	1.350,00
151	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	1.350,00
152	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	1.350,00
153	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	1.350,00
154	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	1.350,00
155	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	1.350,00
156	124	PT.SEMEN PADANG	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	270.000,00	2025	17 APR 2025 S/D 16 APR 2026	0,5%	1.350,00
157	204	PT ARVINDO BANGUN MULIA	13 JUN 2025 S/D 12 JUN 2026	11.250.000,00	2025	13 JUN 2025 S/D 12 JUN 2026	0,5%	56.250,00
158	217	YOESANI SHOES	9 JUL 2025 S/D 8 JUL 2026	360.000,00	2025	9 JUL 2025 S/D 8 JUL 2026	0,5%	1.800,00
159	225	DELTA CAR WASH	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026	450.000,00	2025	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026	0,5%	2.250,00
160	230	FADLI FARFUM REFILL	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026	180.000,00	2025	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026	0,5%	900,00
161	232	MARTABAK MESIR KUBANG	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026	200.000,00	2025	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026	0,5%	1.000,00
162	233	MARTABAK MESIR KUBANG	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026	360.000,00	2025	1 JUL 2025 S/D 1 JUK 2026	0,5%	1.800,00
163	246	PT KREASI GIRI KUSALO	7 AGUS 2025 S/D 6 AGUS 2026	6.000.000,00	2025	7 AGUS 2025 S/D 6 AGUS 2026	0,5%	30.000,00
164	247	PT KREASI GIRI KUSALO	7 AGUS 2025 S/D 6 AGUS 2026	5.400.000,00	2025	7 AGUS 2025 S/D 6 AGUS 2026	0,5%	27.000,00
165	248	PT KREASI GIRI KUSALO	7 AGUS 2025 S/D 6 AGUS 2026	6.480.000,00	2025	7 AGUS 2025 S/D 6 AGUS 2026	0,5%	32.400,00
166	262	PT KREASI GIRI KUSALO	9 AGUS S/D 9 SEPT 2025	4.050.000,00	2025	9 AGUS S/D 9 SEPT 2025	0,5%	20.250,00
167	263	PT KREASI GIRI KUSALO	19 AGUS S/D 19 SEPT 2025	2.025.000,00	2025	19 AGUS S/D 19 SEPT 2025	0,5%	10.125,00
168	264	PT KREASI GIRI KUSALO	19 AGUS S/D 19 SEPT 2025	1.620.000,00	2025	19 AGUS S/D 19 SEPT 2025	0,5%	8.100,00
169	276	PROFESIONAL	11 SEP 2025 S/D 10 SEP 2026	1.020.000,00	2025	11 SEP 2025 S/D 10 SEP 2026	0,5%	5.100,00
170	305	MARTANBAK MESIR KUBANG	4 OKT 2025 S/D 3 OKT 2026	500.000,00	2025	4 OKT 2025 S/D 3 OKT 2026	0,5%	2.500,00
171	314	SATE MUDIAK DANGUANG-DANGUANG ASLI	4 OKT 2025 S/D 3 OKT 2026	288.000,00	2025	4 OKT 2025 S/D 3 OKT 2026	0,5%	1.440,00
172	338	PT KREASI GIRI KUSALO	27 NOV S/D 26 DES 2025	3.645.000,00	2025	27 NOV S/D 26 DES 2025	0,5%	18.225,00

173	343	NY.MEDIA	1O NOV S/D 9 DES 2025	2.160.000,00	2025	1O NOV S/D 9 DES 2025	0,5%	10.800,00
174	366	PT. KREASI GIRI KUSALO	13 DES 2025 S/D 11 JAN 2026	4.050.000,00	2025	13 DES 2025 S/D 11 JAN 2026	0,5%	20.250,00
				134.121.100,00				**63.502.071,50**

Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
Tahun 2025

NO	WAJIB PAJAK	TGL SKPD	MASA PAJAK	TAHUN	No.SKPD	JUMLAH (Rp)	TARIF	NILAI PENYISIHAN (Rp)	KET
1	PT Multikon Jagad Perkasa	04 Des 20	Des	2020	185	437.964,00	100%	437.964,00	
2	PT Multikon Jagad Perkasa	02 Januari	Januari	2023	002	1.382.932,00	50%	691.466,00	
3	PT Multikon Jagad Perkasa	01 Februari	Februari	2023	020	1.382.932,00	50%	691.466,00	
4	PT Multikon Jagad Perkasa	01 Mar	Maret	2023	038	1.382.932,00	50%	691.466,00	
5	PT Multikon Jagad Perkasa	03 A pril	April	2023	057	1.382.932,00	50%	691.466,00	
6	PT Multikon Jagad Perkasa	02 Mei	Mei	2023	076	1.382.932,00	50%	691.466,00	
7	PT Multikon Jagad Perkasa	05 Juni	Juni	2023	096	1.382.932,00	50%	691.466,00	
8	PT Multikon Jagad Perkasa	03 juli	Juli	2023	114	1.382.932,00	50%	691.466,00	
9	PT.Jaya Sentrikon Indonesia	1 Des 2025	November	2025	234	7.544.869,00	0,5%	37.724,35	sdh lunas tgl 7 Jan 2026
Jumlah Piutang						**17.663.357,00**		**5.315.950,35**	

PENYISIHAN PIUTANG PBB 2025

NO	TAHUN PAJAK	PIUTANG	%	PENYISIHAN
1	2009	2.843.675.290,00	100%	2.843.675.290,00
2	2010	2.911.173.985,00	100%	2.911.173.985,00
3	2011	4.152.722.763,00	100%	4.152.722.763,00
4	2012	3.717.761.420,00	100%	3.717.761.420,00
5	2013	4.573.338.653,00	100%	4.573.338.653,00
6	2014	2.430.808.231,00	100%	2.430.808.231,00
7	2015	2.225.602.221,00	100%	2.225.602.221,00
8	2016	2.261.444.867,00	100%	2.261.444.867,00
9	2017	2.240.175.092,00	100%	2.240.175.092,00
10	2018	2.826.801.375,00	100%	2.826.801.375,00
11	2019	3.783.441.645,00	100%	3.783.441.645,00
12	2020	3.896.094.331,00	100%	3.896.094.331,00
13	2021	3.633.312.980,00	50%	1.816.656.490,00
14	2022	4.555.114.405,00	50%	2.277.557.202,50
15	2023	11.169.622.350,00	25%	2.792.405.587,50
16	2024	8.609.629.952,00	25%	2.152.407.488,00
17	2025	6.661.423.312,00	0,5%	33.307.116,56
JUMLAH		**72.492.142.872,00**		**46.935.373.757,56**

Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun	Jumlah	Koreksi Audit	Penyisihan Piutang	%	Total
1	RSUD	2020	1.504.450,00	0,00	1.504.450,00	100%	1.504.450,00
		2021	1.453.900,00	0,00	1.453.900,00	100%	1.453.900,00
		2023	37.974.135,00	0,00	37.974.135,00	100%	37.974.135,00
		2024	86.399.878,00	0,00	86.399.878,00	100%	86.399.878,00
		2025	445.293.302,00	0,00	0,00	25,0%	111.323.325,50
Jumlah			**572.625.665,00**	0,00	**572.625.665,00**		**238.655.688,50**

Penyisihan Piutang Retribusi Sampah
Tahun Anggaran 2025

NO	REKAPITULASI PENERIMA RETRIBUSI SAMPAH TAHUN 2025								
	Nama Pihak Ke 3	Sisa Piutang Tahun 2024	Total Piutang Tahun 2025	Penyisihan tahun 2024		Penyisihan tahun 2025		Total Penyisihan	Keterangan
				%	Jumlah	%	Jumlah		
1	PT.JAPFA COMFEED INDONESIA, Tbk	-	-		-		-	-	
		-	-		-		-	-	
2	SMAN 1 BATANG ANAI	9.100.000	9.800.000,00	100%	9.100.000,00	25%	175.000,00	9.275.000,00	
		-	-		-		-	-	
3	PT.PLN	908.000	908.000,00	100%	908.000,00		-	908.000,00	
		-	-		-		-	-	
4	PUSKESMAS LUBUK ALUNG	-	-		-		-	-	
		-	-		-		-	-	
5	RUMAH MAKAN KIAMBANG RAYA	14.400.000	19.800.000,00	100%	14.400.000,00	25%	1.350.000,00	15.750.000,00	
		-	-		-		-	-	
6	PASAR NAGARI SUNGAI LIMAU	2.100.000	2.100.000,00	100%	2.100.000,00		-	2.100.000,00	
		-	-		-		-	-	
7	PT. BUMI SARIMAS INDONESIA	15.000.000	90.000.000,00	100%	15.000.000,00	25%	18.750.000,00	33.750.000,00	
		-	-		-		-	-	
8	PT. USAHA INTI PADANG	-	-		-		-	-	
		-	-		-		-	-	
9	SMP NEGERI 1 SINTUK TOBOH GADANG	4.000.000	4.000.000,00	100%	4.000.000,00		-	4.000.000,00	
		-	-		-		-	-	
10	PASAR USANG	10.800.000	13.200.000,00	100%	10.800.000,00	25%	600.000,00	11.400.000,00	
		-	-		-		-	-	
11	SMP NEGERI 1 ENAM LINGKUNG	600.000	600.000,00	100%	600.000,00		-	600.000,00	
		-	-		-		-	-	
13	PASAR SICINCIN	4.200.000	4.200.000,00	100%	4.200.000,00		-	4.200.000,00	
		-	-		-		-	-	
14	PASAR NAGARI CIMPAGO KAMPUNG DALAM	9.750.000	9.750.000,00	100%	9.750.000,00		-	9.750.000,00	
			-		-		-	-	
15	RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT	-	-		-		-	-	
		-	-		-		-	-	
16	PASAR NAGARI PAKANDANGAN	3.000.000	7.000.000,00	100%	3.000.000,00	25%	1.000.000,00	4.000.000,00	
		-	-		-		-	-	
17	RSUD PADANG PARIAMAN	3.600.000	3.600.000,00	100%	3.600.000,00		-	3.600.000,00	
		-	-		-		-	-	

NO	REKAPITULASI PENERIMA RETRIBUSI SAMPAH TAHUN 2025								
	Nama Pihak Ke 3	Sisa Piutang Tahun 2024	Total Piutang Tahun 2025	Penyisihan tahun 2024		Penyisihan tahun 2025		Total Penyisihan	Keterangan
				%	Jumlah	%	Jumlah		
18	PESANTREN NURUL YAQIN	10.500.000	10.500.000,00	100%	10.500.000,00		-	10.500.000,00	
		-	-		-		-	-	
19	PT. SUMATERA TROPICAL SPICES	7.500.000	7.500.000,00	100%	7.500.000,00		-	7.500.000,00	
		-	-		-		-	-	
20	PESANTREN SUBBU SALAM	9.000.000	10.000.000,00	100%	9.000.000,00	25%	250.000,00	9.250.000,00	
		-	-		-		-	-	
21	PT. ANGKASA PURA II	-	10.500.000,00		-	25%	2.625.000,00	2.625.000,00	
		-	-		-		-	-	
22	PT. HKI PROYEK TOL PADANG SICINCIN	-	5.600.000,00		-	25%	3.400.000,00	3.400.000,00	
		-	-		-		-	-	
23	DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN	-	-		-		-	-	
		-	-		-		-	-	
24	PUSKESMAS PAUH KAMBA	-	-		-		-	-	
		-	-		-		-	-	
25	SMA NEGERI 1 LUBUK ALUNG	-	-		-		-	-	
		-	-		-		-	-	
26	KLINIK UTAMA RMC (RINGAN-RINGAN MEDICAL CENTER)	9.000.000	9.000.000,00	100%	9.000.000,00		-	9.000.000,00	
		-	-		-		-	-	
27	SMP NEGERI 1 LUBUK ALUNG	-	-		-		-	-	
		-	-		-		-	-	
28	KLINIK UTAMA MATA PADANG EYE CENTER PADANG PARIAMAN	-			-		-	-	
		-	-		-		-	-	
29	PUSKESMAS SIKUCUR	-	-		-		-	-	
		-	-		-		-	-	
30	PT. JAYA SENTRIKON	6.000.000	7.300.000,00	100%	6.000.000,00	25%	325.000,00	6.325.000,00	
		-	-		-		-	-	
31	PASAR PAUH KAMBA	2.000.000	2.000.000,00	100%	2.000.000,00		-	2.000.000,00	
		-	-		-		-	-	
32	PT. PERTAMINA PATRA NIAGA AVIATION FUEL TERMINAL MINANGKABAU	-	-		-		-	-	
		-	-		-		-	-	
		-	-		-		-	-	
33	PNNI Sadaniah	4.000.000	4.000.000,00	100%	4.000.000,00		-	4.000.000,00	
		-	-		-		-	-	

Lampiran : 7.e / 11 - 14

NO	REKAPITULASI PENERIMA RETRIBUSI SAMPAH TAHUN 2025								
	Nama Pihak Ke 3	Sisa Piutang Tahun 2024	Total Piutang Tahun 2025	Penyisihan tahun 2024		Penyisihan tahun 2025		Total Penyisihan	Keterangan
				%	Jumlah	%	Jumlah		
	Jumlah	125.458.000	231.358.000		125.458.000		28.475.000	153.933.000	-

Lampiran : 7.f / 12 - 14

Penyisihan Piutang Menara Telekomunikasi
Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA PERUSAHAAN	Sisa Piutang tahun 2024	SKRD Tahun 2025	Penerimaan Tahun 2025	Sisa Piutang Sampai dengan Tahun 2024	% Penyisihan piutang tahun 2023	Penyisihan Piutang sampai tahun2023 di tahun 2024
1	PT. Centratama Menara	-	0	0		100,00%	- ,00
2	PT. Akses Prima Indonesia	14.250.000,00	0	0	14.250.000,00	100,00%	14.250.000,00
3	PT. Tower Bersama Group (TBG)	2.500.000,00	0	0	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00
4	PT. Mega Tower	63.060.729,00	0	0	63.060.729,00	100,00%	63.060.729,00
5	PT. XL Axiata, Tbk	142.500.000,00	0	0	142.500.000,00	100,00%	142.500.000,00
6	PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk	22.750.000,00	0	0	22.750.000,00	100,00%	22.750.000,00
7	PT. Infrasys Persada	22.284.263,00	0	0	22.284.263,00	100,00%	22.284.263,00
8	PT. Indosat	134.500.000,00	0	0	134.500.000,00	100,00%	134.500.000,00
9	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-	0	0	-	100,00%	-
10	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	-	0	0	-	100,00%	-
11	PT. Telkomsel	6.937.658,00	0	0	6.937.658,00	100,00%	6.937.658,00
12	PT Inti Bangun Sejahtera	41.250.000,00			41.250.000,00	100,00%	41.250.000,00
JUMLAH		**450.032.650,00**	**-**	**-**	**450.032.650,00**		**450.032.650,00**

Penyisihan Piutang lain-Lain PAD
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang
	Penyisihan Piutang Dana Bos				
	Piutang	2019-2021	150.637,00	100%	150.637,00
Total			**150.637,00**		**150.637,00**

Penyisihan Piutang Lainnya
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun	Jumlah	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
1	Reklasifikasi PPh Pasal 21	2011	3.040.305,00	100%	3.040.305,00
2	Reklass TGR ke Bagian Lancar TGR	2019	3.150.000,00	100%	3.150.000,00
3	Reklass TGR ke Bagian Lancar TGR	2020	350.000,00	100%	350.000,00
4	Reklas ke Bagian Lancar TGR	2022	4.600.000,00	100%	4.600.000,00
Jumlah			**11.140.305,00**		**11.140.305,00**

Lampiran : 8 / 1 - 1

LAMPIRAN DAFTAR PERSEDIAAN TAHUN 2025

No	SKPD	Persediaan					TOTAL
		Persediaan Barang Habis Pakai					
		Persediaan Bahan	Persediaan Suku Cadang	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	Persediaan Obat-Obatan	Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan	
1	DINAS KESEHATAN	-	-	7.633.000,00	9.976.153.269,50	-	**9.983.786.269,50**
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	12.306.136,00	-	81.465.858,00	4.641.982.150,62	-	**4.735.754.144,62**
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	19.035.249,00	-	-	2.346.121.000,00	**2.365.156.249,00**
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	1.877.664.318,00	**1.877.664.318,00**
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	1.019.262.627,00	**1.019.262.627,00**
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	225.541.000,00	-	-	**225.541.000,00**
5	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	543.925.000,00	-	-	**543.925.000,00**
6	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	361.955.295,90	**361.955.295,90**
7	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-	4.500.000,00	**4.500.000,00**
8	DINAS PERIKANAN	-	-	3.600.000,00	-	-	**3.600.000,00**
9	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	-	-	2.116.000,00	-	-	**2.116.000,00**
TOTAL		**12.306.136,00**	**19.035.249,00**	**864.280.858,00**	**14.618.135.420,12**	**5.609.503.240,90**	**21.123.260.904,02**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Ket	Neraca 31/12/2014	Rincian			Kesimpulan		
			Plafon	Angsuran	Tunggakan	Keterangan	over statement	under statement
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat							
	- Usaha Eko. Desa - Simpan Pinj.	116.500.000	330.000.000	213.500.000	116.500.000		-	
	- POKMAS Teknologi Tepat Guna	179.166.600	330.000.000	150.833.400	179.166.600		-	
2	Dinas Peternakan	234.065.682	381.400.000	147.334.318	234.065.682		-	
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	51.669.900	60.000.000	8.330.100	51.669.900		-	
	- Pry.Pemberdayaan Nelayan	36.857.000	39.500.000	2.643.000	36.857.000		-	
	- Pry.Pemberd. Ptn. Ikan Darat	23.913.300	27.000.000	3.086.700	23.913.300		-	
	- Pry.Perikanan Darat	6.095.000	8.000.000	1.905.000	6.095.000		-	
4	Perekonomian							
	- Kredit K-5	8.500.000	30.000.000	21.500.000	8.500.000		-	
	- Pasar	-						
	- PT. BPR PKPP	-						
5	Bantuan Penguatan Modal Pengrajin	58.172.000	68.000.000	9.828.000	58.172.000		-	
	Dana Bantuan untuk UKM	36.875.000	50.000.000	13.125.000	36.875.000		-	
	Perindagkoptam	177.070.000				Ditemukan SK Bupati No.454/KEP/2001 tentang Juklak Bantuan Modal Usaha Bergulir dengan Plafon sebesar Rp140,07 juta, masih dalam penelusuran, diusulkan dimasukan ke dalam aset lainnya sub kelompok dana bergulir dalam penelusuran. Neraca 31 Des 2015 = overstatement	177.070.000	
6	Pertanian	-						
7	Dana Bergulir pada Bank Nagari	3.406.808.250	6.492.950.000	3.086.141.750	3.406.808.250		-	
Total		**4.335.692.732**	**7.816.850.000**	**3.658.227.268**	**4.158.622.732**		**177.070.000**	**-**

REKAPITULASI AGING SCHEDULE
INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	KRITERIA	KONDISI	NAMA DANA BERGULIR	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	% PENYISIHAN	TIDAK TERTAGIH	DAPAT DITAGIH	KETERANGAN
1	**Lancar**	Tidak ada tunggakan						**0%**	-	-	
2	**Diragukan**	Tunggakan ≤ 1 Thn						**25%**	-	-	
3	**Macet**	> 1 s.d 3 Tahun						**50%**	-	-	
		> 3 s.d 5 Tahun						**75%**	-	-	
			Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)								
		> 7 Thn	- Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP)	330.000.000	213.500.000	116.500.000	2003	**100%**	116.500.000	-	Lampiran 7.b
		> 7 Thn	- Kelompok Masyarakat Teknologi Tepat Guna (Pokmas TTG)	330.000.000	150.833.400	179.166.600	2004	**100%**	179.166.600	-	Lampiran 7.c
			Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan (Distannakhut)								
		> 7 Thn	- Bantuan Penguatan Modal Peternak (BPMP) Tahun 2001	381.400.000	147.334.318	234.065.682	2004	**100%**	234.065.682	-	Lampiran 7.d
			Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Diskoperindag ESDM)								
			- Proyek Pembinaan Industri Kecil Bordir	68.000.000	9.828.000	58.172.000	2006	**100%**	58.172.000	-	Lampiran 7.e
			- Proyek Pemberdayaan Pengusaha Kecil dan Menengah	102.000.000	31.657.500	70.342.500	2006	**100%**	70.342.500	-	Lampiran 7.e
			- Untuk Pengusaha Kecil dan Menengah	50.000.000	13.125.000	36.875.000	2005	**100%**	36.875.000	-	Lampiran 7.f
			Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)								
			- Proyek Pemberdayaan Petani Ikan Darat Tahun 2002	27.000.000	3.086.700	23.913.300	2004	**100%**	23.913.300	-	Lampiran 7.g
			- Proyek Pemberdayaan Petani Nelayan	39.500.000	2.643.000	36.857.000	2004	**100%**	36.857.000	-	Lampiran 7.g
			- Proyek Bantuan Penguatan Modal Bidang Perikanan Darat/PAD TA 2002	8.000.000	1.905.000	6.095.000	2004	**100%**	6.095.000	-	Lampiran 7.g
			- Proyek Penguatan Modal Nelayan Tahun 2001	60.000.000	8.330.100	51.669.900	2004	**100%**	51.669.900	-	Lampiran 7.h
			Bagian Ekonomi dan Pembangunan								
			Kredit Usaha Pedagang Kaki Lima (Kredit K-5)	30.000.000	21.500.000	8.500.000	2002	**100%**	8.500.000	-	Lampiran 7.i

NO	KRITERIA	KONDISI	NAMA DANA BERGULIR	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	% PENYISIHAN	TIDAK TERTAGIH	DAPAT DITAGIH	KETERANGAN
		> 7 Thn	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 430/KEP/BPP/2003 (Revolfing Fund Tahap I)**								Lampiran 7.j
			Pertanian	387.500.000	238.810.000	148.690.000	2005	**100%**	148.690.000	-	
			Peternakan	950.000.000	303.666.000	646.334.000	2005	**100%**	646.334.000	-	
			Perindag	301.000.000	162.317.500	138.682.500	2005	**100%**	138.682.500	-	
			Perikanan dan Kelautan	257.500.000	108.355.500	149.144.500	2005	**100%**	149.144.500	-	
			Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam	115.000.000	95.860.000	19.140.000	2005	**100%**	19.140.000	-	
		> 7 Thn	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 52/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap II)**								Lampiran 7.k
			Perindag	58.750.000	51.343.750	7.406.250	2005	**100%**	7.406.250	-	
			Pertanian	265.000.000	211.800.000	53.200.000	2005	**100%**	53.200.000	-	
			Perikanan	118.000.000	84.125.000	33.875.000	2005	**100%**	33.875.000	-	
		> 7 Thn	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 42-98-407-437-440/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund KUD Sumber Rezeki)**								Lampiran 7.l
			Peternakan dan Koperasi	1.057.600.000	216.800.000	840.800.000	2006	**100%**	840.800.000	-	
		> 7 Thn	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 92/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap IV)**								Lampiran 7.m
			Perindag	203.000.000	82.598.000	120.402.000	2005	**100%**	120.402.000	-	
			Pertanian	57.500.000	21.430.000	36.070.000	2005	**100%**	36.070.000	-	
			Peternakan	389.000.000	103.400.000	285.600.000	2005	**100%**	285.600.000	-	
			Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam	47.500.000	47.500.000	-	2005	**100%**	-	-	
		> 7 Thn	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 137/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap VI)**								Lampiran 7.n
			Perikanan	35.000.000	35.000.000	-	2005	**100%**	-	-	
		> 7 Thn	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 451/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap VII)**								Lampiran 7.o
			Peternakan	32.000.000	16.188.000	15.812.000	2006	**100%**	15.812.000	-	
		> 7 Thn	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 467/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap XI)**								Lampiran 7.p
			Perindag	65.000.000	30.000.000	35.000.000	2006	**100%**	35.000.000	-	
			Perikanan	25.000.000	3.960.000	21.040.000	2006	**100%**	21.040.000	-	

NO	KRITERIA	KONDISI	NAMA DANA BERGULIR	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	% PENYISIHAN	TIDAK TERTAGIH	DAPAT DITAGIH	KETERANGAN
		> 7 Thn	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 512/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap XII)**								Lampiran 7.q
			Koperindag dan PKM	193.000.000	123.849.000	69.151.000	2006	**100%**	69.151.000	-	
			Pertanian	155.000.000	80.643.000	74.357.000	2006	**100%**	74.357.000	-	
			Perikanan	172.500.000	84.941.000	87.559.000	2006	**100%**	87.559.000	-	
		> 7 Thn	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 563/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap XIII)**								Lampiran 7.r
			Koperindag dan PKM	85.000.000	73.775.000	11.225.000	2006	**100%**	11.225.000	-	
			Peternakan	204.000.000	121.235.000	82.765.000	2006	**100%**	82.765.000	-	
		> 7 Thn	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 22/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap XIV)**								Lampiran 7.s
			Peternakan	30.000.000	10.000.000	20.000.000	2007	**100%**	20.000.000	-	
			Koperindag dan PKM	93.500.000	31.980.000	61.520.000	2007	**100%**	61.520.000	-	
			Pertanian	170.000.000	110.000.000	60.000.000	2007	**100%**	60.000.000	-	
		> 7 Thn	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 48/KEP/BPP/2005 (Revolfing Fund Tahap XV)**								Lampiran 7.t
			Peternakan	40.000.000	2.000.000	38.000.000	2007	**100%**	38.000.000	-	
		> 5 s.d 7 Thn	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 344/KEP/BPP/2005 (Revolfing Fund Tahap XVI)**								Lampiran 7.u
			Koperindag dan PKM	138.000.000	85.795.000	52.205.000	2008	**100%**	52.205.000	-	
			Perikanan	101.500.000	39.230.000	62.270.000	2008	**100%**	62.270.000	-	
		> 5 s.d 7 Thn	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 135/KEP/BPP/2006 (Revolfing Fund Tahap XVII)**								Lampiran 7.v
			Koperindag dan PKM	25.500.000	20.000.000	5.500.000	2008	**100%**	5.500.000	-	
			Pertanian	60.000.000	35.000.000	25.000.000	2008	**100%**	25.000.000	-	
			Peternakan	91.600.000	59.500.000	32.100.000	2008	**100%**	32.100.000	-	
		> 5 s.d 7 Thn	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 008/KEP/BPP/2007 (Revolfing Fund Tahap XVIII)**								Lampiran 7.w
			Koperindag dan PKM	359.500.000	232.800.000	126.700.000	2009	**100%**	126.700.000	-	
			Pertanian	205.000.000	162.240.000	42.760.000	2009	**100%**	42.760.000	-	
			Jumlah	**7.914.350.000**	**3.689.884.768**	**4.224.465.232**			**4.224.465.232**	**-**	

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)

NO	NAMA SKPD/KEGIATAN	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	Persentase					0,5%	25%	25%	25%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	**Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)**																
	- Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP)	330.000.000	213.500.000	116.500.000	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.500.000
	- Kelompok Masyarakat Teknologi Tepat Guna (Pokmas TTG)	330.000.000	150.833.400	179.166.600	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.166.600
2	**Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan (Distannakhut)**																
	- Bantuan Penguatan Modal Peternak (BPMP) Tahun 2001	381.400.000	147.334.318	234.065.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.065.682
3	**Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Diskoperindag ESDM)**																
	- Proyek Pembinaan Industri Kecil Bordir	68.000.000	9.828.000	58.172.000	2.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.172.000
	- Proyek Pemberdayaan Pengusaha Kecil dan Menengah	102.000.000	31.657.500	70.342.500	2.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.342.500
	- Untuk Pengusaha Kecil dan Menengah	50.000.000	13.125.000	36.875.000	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.875.000
4	**Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)**																
	- Proyek Pemberdayaan Petani Ikan Darat Tahun 2002	27.000.000	3.086.700	23.913.300	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.913.300
	- Proyek Pemberdayaan Petani Nelayan	39.500.000	2.643.000	36.857.000	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.857.000
	- Proyek Bantuan Penguatan Modal Bidang Perikanan Darat/PAD TA 2002	8.000.000	1.905.000	6.095.000	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.095.000
	- Proyek Penguatan Modal Nelayan Tahun 2001	60.000.000	8.330.100	51.669.900	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.669.900
5	**Bagian Ekonomi dan Pembangunan**																
	Kredit Usaha Pedagang Kaki Lima (Kredit K-5)	30.000.000	21.500.000	8.500.000	2.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500.000
6	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 430/KEP/BPP/2003 (Revolfing Fund Tahap I)**																
	Pertanian	387.500.000	238.810.000	148.690.000	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.690.000
	Peternakan	950.000.000	303.666.000	646.334.000	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646.334.000
	Perindag	301.000.000	162.317.500	138.682.500	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.682.500
	Perikanan dan Kelautan	257.500.000	108.355.500	149.144.500	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.144.500
	Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam	115.000.000	95.860.000	19.140.000	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.140.000
7	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 52/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap II)**																
	Perindag	58.750.000	51.343.750	7.406.250	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.406.250
	Pertanian	265.000.000	211.800.000	53.200.000	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.200.000
	Perikanan	118.000.000	84.125.000	33.875.000	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.875.000
8	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 42-98-407-437-440/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund KUD Sumber Rezeki)**																
	Peternakan dan Koperasi	1.057.600.000	216.800.000	840.800.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.800.000

NO	NAMA SKPD/KEGIATAN	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	Persentase					0,5%	25%	25%	25%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 92/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap IV)**																
	Perindag	203.000.000	82.598.000	120.402.000	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.402.000
	Pertanian	57.500.000	21.430.000	36.070.000	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.070.000
	Peternakan	389.000.000	103.400.000	285.600.000	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.600.000
	Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam	47.500.000	47.500.000	-	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 137/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap VI)**																
	Perikanan	35.000.000	35.000.000	-	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 451/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap VII)**																
	Peternakan	32.000.000	16.188.000	15.812.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.812.000
12	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 467/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap XI)**																
	Perindag	65.000.000	30.000.000	35.000.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000
	Perikanan	25.000.000	3.960.000	21.040.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.040.000
13	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 512/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap XII)**																
	Koperindag dan PKM	193.000.000	123.849.000	69.151.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.151.000
	Pertanian	155.000.000	80.643.000	74.357.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.357.000
	Perikanan	172.500.000	84.941.000	87.559.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.559.000
14	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 563/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap XIII)**																
	Koperindag dan PKM	85.000.000	73.775.000	11.225.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.225.000
	Peternakan	204.000.000	121.235.000	82.765.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.765.000
15	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 22/KEP/BPP/2004 (Revolfing Fund Tahap XIV)**																
	Peternakan	30.000.000	10.000.000	20.000.000	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
	Koperindag dan PKM	93.500.000	31.980.000	61.520.000	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.520.000
	Pertanian	170.000.000	110.000.000	60.000.000	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000
16	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 48/KEP/BPP/2005 (Revolfing Fund Tahap XV)**																
	Peternakan	40.000.000	2.000.000	38.000.000	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.000.000
17	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 344/KEP/BPP/2005 (Revolfing Fund Tahap XVI)**																
	Koperindag dan PKM	138.000.000	85.795.000	52.205.000	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.205.000	-
	Perikanan	101.500.000	39.230.000	62.270.000	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.270.000	-
18	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 135/KEP/BPP/2006 (Revolfing Fund Tahap XVII)**																
	Koperindag dan PKM	25.500.000	20.000.000	5.500.000	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000	-
	Pertanian	60.000.000	35.000.000	25.000.000	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-
	Peternakan	91.600.000	59.500.000	32.100.000	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.100.000	-
19	**SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 008/KEP/BPP/2007 (Revolfing Fund Tahap XVIII)**																
	Koperindag dan PKM	359.500.000	232.800.000	126.700.000	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.700.000	-	-
	Pertanian	205.000.000	162.240.000	42.760.000	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.760.000	-	-
	TOTAL	**7.914.350.000**	**3.689.884.768**	**4.224.465.232**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**169.460.000**	**177.075.000**	**3.885.930.232**
1	**% Dana Bergulir Tidak Tertagih**					**0,5%**	**25%**	**25%**	**25%**	**50%**	**50%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	**Dana Bergulir Tidak Tertagih**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**169.460.000**	**177.075.000**	**3.885.930.232**
	TOTAL DANA BERGULIR TIDAK TERTAGIH																**4.232.465.232,00**
	TOTAL DANA BERGULIR DAPAT DITAGIH																**-**
	TOTAL DANA BERGULIR YANG DIAGING																**4.232.465.232,00**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

USAHA EKONOMI DESA - SIMPAN PINJAM

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
1	Bunda	20.000.000	20.000.000	-	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gema Bakti	20.000.000	10.000.000	10.000.000	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
3	Bina Usaha	20.000.000	10.000.000	10.000.000	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
4	Selaras	15.000.000	15.000.000	-	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Nusa Indah	15.000.000	15.000.000	-	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Seayun	15.000.000	10.500.000	4.500.000	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
7	Sitawa Sidingin	15.000.000	1.500.000	13.500.000	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500.000
8	Sakato	15.000.000	15.000.000	-	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pauh Indah Lestari	15.000.000	3.000.000	12.000.000	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
10	Setuju	15.000.000	6.000.000	9.000.000	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
11	Bakti Sejahtera	20.000.000	20.000.000	-	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Mekar Sari	15.000.000	6.000.000	9.000.000	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
13	Mekar Timur	15.000.000	12.000.000	3.000.000	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
14	Sei Laban	15.000.000	9.000.000	6.000.000	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
15	Gemilang	15.000.000	6.000.000	9.000.000	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
16	Widuri	20.000.000	-	20.000.000	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
17	Timur Harapan	15.000.000	15.000.000	-	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Tunas Harapan Jaya	20.000.000	14.000.000	6.000.000	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
19	Sejahtera	15.000.000	15.000.000	-	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kembang Teratai	15.000.000	10.500.000	4.500.000	2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
	Jumlah	**330.000.000**	**213.500.000**	**116.500.000**	2003	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**116.500.000**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
1	Sejati	16.000.000	16.000.000	-	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Melati	18.000.000	7.717.500	10.282.500	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.282.500
3	Usaha Sepakat	16.000.000	4.000.000	12.000.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
4	Sintuk Saiyo	17.000.000	3.240.000	13.760.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.760.000
5	Usaha Sejati	15.000.000	-	15.000.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
6	Dilamun Ombak	18.000.000	10.106.400	7.893.600	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.893.600
7	Usaha Melati	18.000.000	13.720.000	4.280.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.280.000
8	Kreatif	17.000.000	1.545.500	15.454.500	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.454.500
9	Karya Bina Gurami	16.000.000	5.333.400	10.666.600	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.666.600
10	Guritex	18.000.000	6.857.600	11.142.400	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.142.400
11	Sejahtera	16.000.000	13.333.500	2.666.500	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.666.500
12	Kasihan Bersama	16.000.000	2.666.700	13.333.300	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.333.300
13	Lubuk Sati	16.000.000	16.000.000	-	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pauh Sejati	16.000.000	2.286.000	13.714.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.714.000
15	Gumai	16.000.000	5.333.400	10.666.600	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.666.600
16	Bintang Harapan	16.000.000	8.000.000	8.000.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
17	Usaha Ikan Sakato	16.000.000	2.286.000	13.714.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.714.000
18	Luak Jambak	17.000.000	14.574.000	2.426.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.426.000
19	Belati Group	17.000.000	2.833.400	14.166.600	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.166.600
20	Jaya Abadi	15.000.000	15.000.000	-	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**330.000.000**	**150.833.400**	**179.166.600**	2004	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**179.166.600**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BANTUAN PENGUATAN MODAL PETERNAK

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	SAPI																
1	Agus Salim	15.000.000	2.500.000	12.500.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500.000
2	Tarmizi	15.000.000	7.500.000	7.500.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
3	Muslim	15.000.000	2.500.000	12.500.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500.000
4	M. Nasir	15.000.000	10.000.000	5.000.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
5	Kamaruzaman	15.000.000	15.000.000	-	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Nasarudin AOT	15.000.000	7.500.000	7.500.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
7	Syahril	15.000.000	5.000.000	10.000.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
8	Syarifudin	15.000.000	2.500.000	12.500.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500.000
9	Syawir ST. B	15.000.000	2.500.000	12.500.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500.000
10	Taufik Hidayat	15.000.000	1.950.000	13.050.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.050.000
	Jumlah	**150.000.000**	**56.950.000**	**93.050.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93.050.000**
	AYAM BURAS																
1	Yendranita	2.775.000	2.775.000	-	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nursuhut	2.775.000	925.000	1.850.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000
3	Masnah	2.775.000	2.775.000	-	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bachtiar Syam	2.775.000	2.775.000	-	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**11.100.000**	**9.250.000**	**1.850.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.850.000**
	KERBAU																
1	Akhiruddin	8.000.000	-	8.000.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
2	Alisman	8.000.000	8.000.000	-	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Buyung Lukuak	8.000.000	1.733.333	6.266.667	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.266.667
4	Bukhari A	8.000.000	-	8.000.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
5	Bukhari	8.000.000	3.999.999	4.000.001	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.001
6	Darisman	8.000.000	1.333.333	6.666.667	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.666.667
7	Erwin	8.000.000	2.866.666	5.133.334	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.133.334
8	Feri	8.000.000	1.333.333	6.666.667	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.666.667
9	Irsadi	8.000.000	2.666.666	5.333.334	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.333.334
10	Ilyas	8.000.000	6.633.332	1.366.668	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.366.668
11	Jasril Bakar T	8.000.000	3.999.999	4.000.001	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.001
12	Joni Herman	8.000.000	2.666.666	5.333.334	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.333.334
13	Makmur	8.000.000	1.333.333	6.666.667	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.666.667

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
14	Muktar	8.000.000	1.333.333	6.666.667	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.666.667
15	Nasarudin	8.000.000	3.666.666	4.333.334	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.333.334
16	Novialdi	8.000.000	2.666.666	5.333.334	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.333.334
17	Suhelmi	8.000.000	2.866.666	5.133.334	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.133.334
18	Syamsul	8.000.000	3.999.999	4.000.001	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.001
19	Syafrudin	8.000.000	-	8.000.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
20	Syafrurizal	8.000.000	1.833.333	6.166.667	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.166.667
21	Taufik	8.000.000	6.583.332	1.416.668	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.416.668
22	Ukin	8.000.000	6.666.665	1.333.335	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.333.335
23	Udin Palo Mudo	8.000.000	2.666.666	5.333.334	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.333.334
24	Zulkarnaini	8.000.000	1.583.333	6.416.667	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.416.667
25	Harmaini	8.000.000	4.199.999	3.800.001	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800.001
Jumlah		**200.000.000**	**74.633.318**	**125.366.682**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**125.366.682**
1	Emi Murni	2.900.000	1.267.000	1.633.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.633.000
2	Sudami	2.900.000	483.500	2.416.500	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.416.500
3	Syafnil	2.900.000	2.900.000	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Joni Hendra	2.900.000	783.500	2.116.500	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.116.500
5	Yose Ade Putra	2.900.000	583.500	2.316.500	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.316.500
6	Charani ST	2.900.000	483.500	2.416.500	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.416.500
7	Syafriyandi	2.900.000	-	2.900.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900.000
	Jumlah	**20.300.000**	**6.501.000**	**13.799.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.799.000**
Jumlah		**381.400.000**	**147.334.318**	**234.065.682**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**234.065.682**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BANTUAN PENGUATAN MODAL PENGRAJIN

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
1	BAIYAR	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
2	NONA	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
3	M.NUR	3.400.000	1.984.500	1.415.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.415.500
4	AFRIZON	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
5	Ir. AMRIZAL ZAKIR	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
6	SYAIFUL BAHRI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
7	NURAINI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
8	AMRIL	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
9	MARNI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
10	SISRI EMA SYAFRIANI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
11	M. ZAHER	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
12	SRI LINDAWATI WANI	3.400.000	189.000	3.211.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.000
13	EVA SUSANTI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
14	AZARNI	3.400.000	472.500	2.927.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.927.500
15	MISRAWATI	3.400.000	472.500	2.927.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.927.500
16	WIARTINI	3.400.000	661.500	2.738.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.738.500
17	RINI SASMITA	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
18	IRMA YANTI	3.400.000	472.500	2.927.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.927.500
19	NURBAITI	3.400.000	3.024.000	376.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376.000
20	GUSWARTI	3.400.000	2.551.500	848.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848.500
Jumlah		**68.000.000**	**9.828.000**	**58.172.000**	2006	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58.172.000**
1	HAFIZAH	3.400.000	1.512.000	1.888.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.888.000
2	MURNI	3.400.000	1.512.000	1.888.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.888.000
3	DEWITA YANTI	3.400.000	2.646.000	754.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.000

BANTUAN PENGUATAN MODAL PENGRAJIN

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
4	JUNIARTI	3.400.000	2.551.500	848.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848.500
5	YUMISLIARNI	3.400.000	2.646.000	754.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.000
6	AZIZAH	3.400.000	2.646.000	754.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.000
7	AZMI	3.400.000	2.646.000	754.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.000
8	ABRIATI	3.400.000	472.500	2.927.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.927.500
9	RIZA ELVINA	3.400.000	2.457.000	943.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943.000
10	JAFRI YANTI	3.400.000	3.213.000	187.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.000
11	SALMAINI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
12	RAUDHATUL JANNAH	3.400.000	378.000	3.022.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.022.000
13	SITI ALIMAH	3.400.000	189.000	3.211.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.000
14	ELVI YANTI	3.400.000	189.000	3.211.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.000
15	ASNIMAR	3.400.000	1.512.000	1.888.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.888.000
16	MIMI SULASTRI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
17	MARNIS	3.400.000	1.984.500	1.415.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.415.500
18	SALMI	3.400.000	1.417.500	1.982.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.982.500
19	REFNITA	3.400.000	189.000	3.211.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.000
20	YULIMAR	3.400.000	94.500	3.305.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.305.500
21	RISMAWATI	3.400.000	189.000	3.211.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.000
22	ARNITA	3.400.000	756.000	2.644.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.644.000
23	NURAINI	3.400.000	472.500	2.927.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.927.500
24	ASRAYANTI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
25	UPIK	3.400.000	283.500	3.116.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.116.500
26	NURLELY	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
27	ZULFIYETTI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
28	HERLINDA INDRIANA RIZKI	3.400.000	945.000	2.455.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.455.000
29	MUZIARNI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
30	SAYANG	3.400.000	756.000	2.644.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.644.000
Jumlah		**102.000.000**	**31.657.500**	**70.342.500**	2006	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.342.500**
Total		**170.000.000**	**41.485.500**	**128.514.500**	2006	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128.514.500**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DANA BANTUAN UNTUK UKM

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
1	KOPERASI TUAH SAKATO	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
2	MTsN PAUH KAMBAR	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTP 4 2X11 E. LINGK	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KOP BINA SEJAHTERA	5.000.000	625.000	4.375.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.375.000
5	RISMAN	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
6	SAMIWARYNA YUSWIL	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
	Sub Total	**50.000.000**	**13.125.000**	**36.875.000**	2005	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.875.000**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BANTUAN PENGUATAN MODAL NELAYAN

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
I	**SK NO.396/KEP/BPP/2002 (Dana Penguatan Modal Proyek Pemberdayaan Petani Ikan Darat Pada DKP Kab. Padang Pariaman TA 2002)**																
1	TARMIHIM	2.700.000	771.600	1.928.400	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.928.400
2	EDI SUARMAN	2.700.000	-	2.700.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000
3	DEMRIONALDI	2.700.000	643.000	2.057.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.057.000
4	AFSARMAN	2.700.000	643.000	2.057.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.057.000
5	JON LISMAN	2.700.000	257.200	2.442.800	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.442.800
6	BJ. PAMAN	2.700.000	385.800	2.314.200	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.314.200
7	JAFRI, S.Ag	2.700.000	128.900	2.571.100	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.571.100
8	DEDI SALIM	2.700.000	-	2.700.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000
9	SYUPRIYENDI	2.700.000	257.200	2.442.800	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.442.800
10	ERMAN	2.700.000	-	2.700.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000
	Sub Total	**27.000.000**	**3.086.700**	**23.913.300**	2004	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.913.300**
II	**SK NO.466/KEP/BPP/2002 (Dana Penguatan Modal Proyek Pemberdayaan Petani Nelayan/DAU Tahun 2002 Pada DKP Kab. Padang Pariaman)**																
11	SAWIRMAN	5.250.000	-	5.250.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250.000
12	YULBER	5.250.000	500.000	4.750.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.750.000
13	GUSRIADI	5.250.000	500.000	4.750.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.750.000
14	ALI UMAR	5.250.000	-	5.250.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250.000
15	SAPI'I	5.250.000	500.000	4.750.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.750.000
16	SYAIFUL	5.250.000	-	5.250.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250.000
17	ILYAS UMAR	4.000.000	1.143.000	2.857.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.857.000
18	JAPRI	4.000.000	-	4.000.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
	Sub Total	**39.500.000**	**2.643.000**	**36.857.000**	2004	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.857.000**
III	**SK NO.511/KEP/BPP/2002 (Dana Penguatan Modal Proyek Bantuan Penguatan Modal Bidang Perikanan Darat/PAD Pada DKP Kab. Padang Pariaman TA 200**																
19	ZULI AMRI	4.000.000	1.333.500	2.666.500	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.666.500
20	ARISMAN	4.000.000	571.500	3.428.500	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.428.500
	Sub Total	**8.000.000**	**1.905.000**	**6.095.000**	2004	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.095.000**
	Jumlah	**74.500.000**	**7.634.700**	**66.865.300**	2004	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.865.300**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BANTUAN PENGUATAN MODAL NELAYAN GASAN GADANG (KELOMPOK NELAYAN SINAR LAUT)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
I	**SINAR LAUT**	60.000.000	8.330.100	51.669.900	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.669.900
1	TARMIHIM																
2	EDI SUARMAN																-
3	DEMRIONALDI																-
4	AFSARMAN																-
5	JON LISMAN																-
6	BJ. PAMAN																-
7	JAFRI, S.Ag																-
8	DEDI SALIM																-
9	SYUPRIYENDI																-
	Sub Total	**60.000.000**	**8.330.100**	**51.669.900**	2004	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.669.900**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KREDIT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (KREDIT K-5)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
1	MAWAR	6.000.000	5.000.000	1.000.000	2002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
2	ANGGREK	6.000.000	1.000.000	5.000.000	2002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
3	MELATI	6.000.000	6.000.000	-	2002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SEDAP MALAM	6.000.000	4.500.000	1.500.000	2002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
5	KEMBANG SEPATU	6.000.000	5.000.000	1.000.000	2002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
	Sub Total	**30.000.000**	**21.500.000**	**8.500.000**	2002	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.500.000**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 430/KEP/BPP/2003)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	PERTANIAN																
1	BUJANG SE	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	M. TORON DT. SINARO	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	AHMAD BASRI	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	H. YUSUF TK. SIDI	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SAHRUDIN	25.000.000	12.510.000	12.490.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.490.000
6	ABUZAMAR	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MARJOHAN	50.000.000	5.600.000	44.400.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.400.000
8	HERMAN LAMBUK	15.000.000	10.020.000	4.980.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.980.000
9	KUDRI LAMBUK	15.000.000	4.175.000	10.825.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.825.000
10	BURHANUDDIN	12.500.000	2.780.000	9.720.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.720.000
11	SUDIRMAN	130.000.000	63.725.000	66.275.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.275.000
12	YUDI ARTHA ANWAR	30.000.000	30.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**387.500.000**	**238.810.000**	**148.690.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	PETERNAKAN																-
1	ABUZANAR	12.000.000	3.000.000	9.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
2	ULI	12.000.000	3.188.000	8.812.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.812.000
3	HASAN BASRI	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
4	YAHYA	12.000.000	3.000.000	9.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
5	ZAINAL	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
6	ALEN	8.000.000	2.000.000	6.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
7	YEN	8.000.000	2.000.000	6.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
8	ABUTIAR	12.000.000	12.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SYAIFUL ALWI	12.000.000	6.070.000	5.930.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.930.000
10	ABITAL	12.000.000	6.000.000	6.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
11	ANER RKY DT BUNGSU	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
12	YUNISMAN DT	12.000.000	470.000	11.530.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.530.000
13	JARAN KATIB	8.000.000	188.000	7.812.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.812.000
14	YUSTAM EFENDI	15.000.000	3.750.000	11.250.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.250.000
15	MHD HERI	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
16	SAFRI	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
17	NASRUL	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MUKHLIS S.Sos	12.000.000	6.000.000	6.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
19	UNCU	8.000.000	-	8.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
20	JONI	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 430/KEP/BPP/2003)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
21	ERIZAL	8.000.000	2.000.000	6.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
22	ZULKIFLI JAMBAK	8.000.000	3.000.000	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
23	NAGUR	12.000.000	470.000	11.530.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.530.000
24	HERI TANJUNG	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
25	ADELMEN	10.000.000	940.000	9.060.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.060.000
26	ALI MASRIL	8.000.000	2.470.000	5.530.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.530.000
27	AKMAL	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
28	NURTI	10.000.000	3.920.000	6.080.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.080.000
29	YONAIDI	12.000.000	2.350.000	9.650.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.650.000
30	AGUSMAWI HASAN	12.000.000	6.000.000	6.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
31	MANSYARDIN	8.000.000	8.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	ANWAR	8.000.000	-	8.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
33	JEMPOL ISKANDAR	12.000.000	850.000	11.150.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.150.000
34	JAFRI S.Ag	12.000.000	-	12.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
35	H. TARMIZI	12.000.000	-	12.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
36	ALI NURDIN M. NUR	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
37	ALI SADIKIN	12.000.000	11.421.000	579.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579.000
38	YURNIS	10.000.000	2.641.000	7.359.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.359.000
39	ISMAEL	8.000.000	282.000	7.718.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.718.000
40	ABU BAKAR	8.000.000	2.470.000	5.530.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.530.000
41	NAZAR	8.000.000	-	8.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
42	ASRIL ISKANDAR	10.000.000	300.000	9.700.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.700.000
43	RIFIA MARNI	35.000.000	5.470.000	29.530.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.530.000
44	ZULKIFLI	12.000.000	3.000.000	9.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
45	AMIRUDDIN	12.000.000	-	12.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
46	DASRIL	12.000.000	3.500.000	8.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500.000
47	DEDI SUSANTO	12.000.000	4.500.000	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
48	AZWAR .M	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	REFRIZAL	12.000.000	-	12.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
50	NOVA ARDI	12.000.000	12.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	INDRA	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	IRSAL	35.000.000	8.500.000	26.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.500.000
53	ALIZAR	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	AGUSTAMI	8.000.000	8.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	ARKADIUS	12.000.000	3.000.000	9.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
56	HENDRI TASMEN	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	KAHARUDDIN	8.000.000	500.000	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
58	ARMI ZANIUS	8.000.000	6.000.000	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
59	BGD. JARAN	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 430/KEP/BPP/2003)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
60	DARLIS TANJUNG	12.000.000	-	12.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
61	Ir. MARKIYUS	12.000.000	12.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	EDI CHANDRA	8.000.000	-	8.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
63	ALIYASIR	8.000.000	1.000.000	7.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
64	ROSNIDA	8.000.000	6.470.000	1.530.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530.000
65	ZAIRIL	8.000.000	4.000.000	4.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
66	ALI ARDI	8.000.000	8.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	BAHRI	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Drs. YAMAN HIJAZ	10.000.000	5.000.000	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
69	SYAMSUL MARDAN	10.000.000	6.500.000	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
70	SUKIMAN	8.000.000	4.000.000	4.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
71	YUSUF	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	KARUDDIN	10.000.000	8.034.000	1.966.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.966.000
73	MANSUARDI	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
74	NAKIM	10.000.000	2.970.000	7.030.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.030.000
75	AKIRMAN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	USMAN	8.000.000	3.940.000	4.060.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.060.000
77	KARI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	INDRA	10.000.000	2.970.000	7.030.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.030.000
79	ARDONIS	10.000.000	2.641.000	7.359.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.359.000
80	ERIKA ICHWAN	12.000.000	12.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	AFRIZAL ERI GUNUNG	10.000.000	141.000	9.859.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.859.000
82	JALIUS	12.000.000	-	12.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
83	KIAN	8.000.000	8.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	IRVAN, S.Pt	8.000.000	1.000.000	7.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
85	M. RAIS ZEIN	35.000.000	10.750.000	24.250.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.250.000
86	Drs. ZUKIRMAN	20.000.000	7.000.000	13.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000.000
87	JONLISMAN	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
88	INDRA YAMAN	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
89	M. EFENDI	8.000.000	-	8.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
90	MUDASIR	8.000.000	8.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	ZAINUDDIN	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
	JUMLAH	**950.000.000**	**303.666.000**	**646.334.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	PERINDAG																
1	RATNAWILIS	7.500.000	1.670.000	5.830.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830.000
2	ADINAR	7.500.000	1.670.000	5.830.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830.000
3	ANIMAR	7.500.000	1.670.000	5.830.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830.000
4	FITRIYANI	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
5	DARFINIS	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 430/KEP/BPP/2003)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
6	MARLINA	7.500.000	1.670.000	5.830.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830.000
7	YUSNIMAR	7.500.000	6.340.000	1.160.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.160.000
8	ZALHAIDA	5.000.000	1.960.000	3.040.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.040.000
9	JUSFINADITA	6.000.000	1.340.000	4.660.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.660.000
10	NELLY SURYANI	5.000.000	1.960.000	3.040.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.040.000
11	GUSNAYETI	7.500.000	3.715.000	3.785.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.785.000
12	ZAINAL .A	10.000.000	2.800.000	7.200.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200.000
13	RISMAN	3.000.000	3.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ZAFDINUL	7.500.000	417.500	7.082.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.082.500
15	ERMAWATI	20.000.000	20.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	AKHIRUDDIN	20.000.000	20.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ALI ARDIN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MARLI	7.500.000	7.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ASRIL	8.000.000	445.000	7.555.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.555.000
20	DARMADI DARMAN	8.000.000	6.675.000	1.325.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325.000
21	YANHENDRI	20.000.000	20.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NAZARUDDIN	5.000.000	4.400.000	600.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000
23	YULINAR	3.000.000	2.000.000	1.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
24	YULIUS Dt. MARAJO	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	DESMITA	5.000.000	1.960.000	3.040.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.040.000
26	DIDI DARMADI	3.000.000	3.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ERMAWATI	4.000.000	4.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RIDWAN	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	H. BASRI/ Hj. JANIMAR	6.000.000	4.355.000	1.645.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.645.000
30	DELFI SATRIADI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MUDRIZAL	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SYAFARUDDIN	5.000.000	3.920.000	1.080.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080.000
33	SYAFRIZAL	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SUDIRMAN	20.000.000	-	20.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
35	EPI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	EMI/ERMI	35.000.000	5.850.000	29.150.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.150.000
	JUMLAH	**301.000.000**	**162.317.500**	**138.682.500**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	KELAUTAN DAN PERIKANAN																
1	PUTRA AGUNG	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
2	ZAKIRMAN	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUARDI SALIM	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ANAS RAUF	5.000.000	3.780.000	1.220.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.220.000
5	ZAKIRMAN	3.500.000	583.500	2.916.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.916.500
6	AINSYAH RAHMAT	3.500.000	3.112.000	388.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.000

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 430/KEP/BPP/2003)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
7	YAZID	10.000.000	556.000	9.444.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.444.000
8	AGUSTIAN	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SYAFRIZAL	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	MAAZ	2.000.000	-	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
11	AMIR SIDI	2.000.000	112.000	1.888.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.888.000
12	PURNAWIRMAN	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SUHARDIMAN AUS	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NASRIL	3.500.000	1.167.000	2.333.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.333.000
15	SYAMSUIR	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	MULYADI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MOTHIA AZIZ	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SYAMSAWIR	2.000.000	-	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
19	DESMAWATI	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ASRAF	2.000.000	336.000	1.664.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.664.000
21	NASRUL	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ZAINUDDIN	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	MUSADAR	3.500.000	583.500	2.916.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.916.500
24	ZULKI HENDRI	2.000.000	336.000	1.664.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.664.000
25	GUSMANTO	2.000.000	1.792.000	208.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.000
26	WELHI HERTI	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NURSYAHRUL	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	ZAL KHAIRI	3.500.000	1.361.500	2.138.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.138.500
29	M. NASIR	3.500.000	2.528.500	971.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971.500
30	Z. EFENDI	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	FIRDAUS	3.500.000	2.334.000	1.166.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.166.000
32	BASRI	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	JON EDI	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
34	JAKFARUDDIN	2.000.000	1.232.000	768.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.000
35	SABARUDDIN	2.500.000	976.500	1.523.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.523.500
36	A.H. DT. SINARO	2.500.000	1.255.500	1.244.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244.500
37	YUSRI, SE	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
38	RIKE WANDRA	2.500.000	-	2.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
39	ISMAIL	2.000.000	224.000	1.776.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.776.000
40	DENI ADRIAN, SE	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	MULYDISON	2.000.000	-	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
42	SYAFRIAL DEDI	2.000.000	-	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
43	AKHIRUDDIN	3.500.000	1.167.000	2.333.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.333.000
44	FERDINAL	2.000.000	-	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
45	JANUARISMAN	2.500.000	279.000	2.221.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.221.000

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 430/KEP/BPP/2003)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
46	ALI HUSIN	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	H. By. ADIK	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	ROSNAM	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
49	HENDRI	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
50	SUKURCAN	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	HARDAN TANJUNG	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
52	JANUAR	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	TASLIM	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
54	LAZUARDI	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
55	SYAKARUDDIN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	SALMAN	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
57	ALI WALDANA	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
58	ASRIL MAAZ	2.000.000	-	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
59	HIDAYAT SUTRISMAN	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
60	IRSYAD	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
61	ZUL EFENDI	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
62	SUMARDI	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	ALI MIRIN	2.500.000	139.500	2.360.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.360.500
64	SYAMSURIZAL	2.000.000	-	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
65	ANZARNI	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**257.500.000**	**108.355.500**	**149.144.500**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	UED-SP DAN BPM																
1	SARYAH	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SAIYO SUKA MAJU	25.000.000	23.630.000	1.370.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.370.000
3	USAHA BERSAMA	15.000.000	1.670.000	13.330.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.330.000
4	DURIAN BANGKOK	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MELATI	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	AMANAH	10.000.000	5.560.000	4.440.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.440.000
	JUMLAH	**115.000.000**	**95.860.000**	**19.140.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	REKAPITULASI																
1	PERTANIAN	387.500.000	238.810.000	148.690.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.690.000
2	PETERNAKAN	950.000.000	303.666.000	646.334.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646.334.000
3	PERINDAG	301.000.000	162.317.500	138.682.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.682.500
4	KELAUTAN DAN PERIKANA	257.500.000	108.355.500	149.144.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.144.500
5	UED-SP DAN BPM	115.000.000	95.860.000	19.140.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.140.000
	TOTAL	**2.011.000.000**	**909.009.000**	**1.101.991.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 52/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	KOPERINDAG DAN PKM																
1	RITA IRIANTI	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ASNIZAR	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MAIMUNAH	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KASMAWATI	2.000.000	1.375.000	625.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.000
5	NURHAYATI	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NASRI	12.500.000	12.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ZULKARNAINI	12.500.000	12.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	JONI Dt. MALIN	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NORA/NORA FERI	750.000	187.500	562.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562.500
10	JONI/JON KENEDI	750.000	140.625	609.375	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609.375
11	YETTI	750.000	750.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DESMIATI	750.000	140.625	609.375	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609.375
13	NAZRAN	750.000	750.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ALIATAR .MT	5.000.000	-	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
	JUMLAH	**58.750.000**	**51.343.750**	**7.406.250**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	PERTANIAN																
1	SYAMSUDIN	20.000.000	20.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BUKHARI	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ZAILI	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	YUNIRMAN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SYAFRUDDIN	20.000.000	20.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RAMLI	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Hj. SYOFINAR DOANI	20.000.000	12.735.000	7.265.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.265.000
8	DASRIL	20.000.000	20.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BAKAR .M	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	RIDWAN	20.000.000	20.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	AMIRUDDIN	20.000.000	1.250.000	18.750.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750.000
12	TRIA ZARFI	15.000.000	1.875.000	13.125.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.125.000
13	RIZAL IDRUS	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ASRIAL	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	AHMAD BAKHRI	15.000.000	940.000	14.060.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.060.000
16	ANTONI	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**265.000.000**	**211.800.000**	**53.200.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 52/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	PERIKANAN																
1	ZUPRIZAL/M. KAMIL	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	ALISAS PUTRA	2.500.000	-	2.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
3	ST. SD. BUJANG	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ADRIAL	2.000.000	750.000	1.250.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000
5	ANISTA BUNGHER	5.000.000	625.000	4.375.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.375.000
6	Ir. YUSALMAN	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ELINURHAYATI	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SUARNI	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ARNELI	2.000.000	1.875.000	125.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000
10	MUSLIM	2.000.000	500.000	1.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
11	MUCHNI .M	2.000.000	375.000	1.625.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.625.000
12	Ir. ERIZON	7.500.000	-	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
13	ZAINI (AJO PARIS)	70.000.000	70.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ARDIANTO	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ZUMARNI	5.000.000	-	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
	JUMLAH	**118.000.000**	**84.125.000**	**33.875.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	REKAPITULASI																
1	KOPERINDAG DAN PKM	58.750.000	51.343.750	7.406.250	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.406.250
2	PERTANIAN	265.000.000	211.800.000	53.200.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.200.000
3	PERIKANAN	118.000.000	84.125.000	33.875.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.875.000
	TOTAL	**441.750.000**	**347.268.750**	**94.481.250**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 42-98-407-437-440/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	PETERNAKAN DAN KOPERASI																
1	KUD SUMBER REZEKI	150.000.000	50.000.000	100.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000
2	KUD SUMBER REZEKI	500.000.000	166.800.000	333.200.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.200.000
3	KUD SUMBER REZEKI	407.600.000	-	407.600.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.600.000
	JUMLAH	**1.057.600.000**	**216.800.000**	**840.800.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**840.800.000**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 92/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	KOPERASI DAN PKM																
1	ZULBAINI	5.000.000	1.432.000	3.568.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.568.000
2	SURYANI	6.000.000	430.000	5.570.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.570.000
3	SUKIRMAN	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
4	SYAFRIMEN	6.500.000	930.000	5.570.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.570.000
5	SYAFIDAWATI	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
6	NURJALI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RENO ALI	7.500.000	-	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
8	SARI	5.000.000	-	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
9	GUSMANIDAR	7.500.000	-	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
10	YULMANIDAR	7.500.000	-	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
11	SYAMSIDAR SALEH	5.000.000	1.432.000	3.568.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.568.000
12	TIRANYAM	5.000.000	1.074.000	3.926.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.926.000
13	ROSNI	5.000.000	-	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
14	SYAFRIL .M	10.000.000	715.000	9.285.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.285.000
15	ZAINUDDIN .M	5.000.000	-	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
16	JUNAIDI	5.000.000	-	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
17	FEBRIDAWATI	5.000.000	1.790.000	3.210.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.210.000
18	SUPIK	4.000.000	4.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	TARIPAH	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SYAMSIR ALAM	4.000.000	1.430.000	2.570.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.570.000
21	ARNIS	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	DALMARNI	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ASNAM	3.000.000	860.000	2.140.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.140.000
24	JUMARI	3.000.000	645.000	2.355.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.355.000
25	MURSIDA	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KASMARI/UPIK	3.000.000	3.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ANI	3.000.000	430.000	2.570.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.570.000
28	ERMALELI	3.000.000	3.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ERMAN Dt. Bgd. MARAJO	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SURYADI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ASNI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	ANIBAR	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 92/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
33	YUSLINAR	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	NURJANAH	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KASMIARNI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ELI MARTI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	RITA	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	ERNAWANIS	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	SAPARUDIN	10.000.000	1.430.000	8.570.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.570.000
40	SYAMSIR	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**203.000.000**	**82.598.000**	**120.402.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	PERTANIAN																-
1	DALIMA	10.000.000	1.430.000	8.570.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.570.000
2	H. DARMAWI	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
3	FITRIA DELVITA	12.500.000	-	12.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500.000
4	RAFYUL AKYAR	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ISMAEL Lb. JALELO	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**57.500.000**	**21.430.000**	**36.070.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	PETERNAKAN																-
1	ABDUL MANAF SK	150.000.000	-	150.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000
2	YUNI HELMI, SH	75.000.000	-	75.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000
3	JAMARIS Dt. BATUAH	30.000.000	10.000.000	20.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
4	MARJOHAN	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	JAMARIS	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
6	ALI USMAN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RAMLI	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ALI AMRAN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ZAINUR/By. ZAINUR	12.000.000	3.000.000	9.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
10	ABDUL RAJAB	8.000.000	-	8.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
11	AMIN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ABDUL RAHMAN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	By. PUTIH	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SYOFYAN, S.Pd	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ERDISON	10.000.000	4.400.000	5.600.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600.000
16	BUYUNG ADANG	12.000.000	4.000.000	8.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
17	MURNI	12.000.000	12.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**389.000.000**	**103.400.000**	**285.600.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 92/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	UED-SP																-
1	TUNAS HARAPAN	16.500.000	16.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SAKATO	17.000.000	17.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TIGA SAPILIN	14.000.000	14.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**47.500.000**	**47.500.000**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	REKAPITULASI																-
1	KOPERASI DAN PKM	203.000.000	82.598.000	120.402.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.402.000
2	PERTANIAN	57.500.000	21.430.000	36.070.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.070.000
3	PETERNAKAN	389.000.000	103.400.000	285.600.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.600.000
4	UED-SP	47.500.000	47.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**697.000.000**	**254.928.000**	**442.072.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 137/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	PERIKANAN																
1	ALI AMRAN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DEDI EDWAR, SE	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**35.000.000**	**35.000.000**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 451/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	PETERNAKAN																
1	ROSMAN	8.000.000	2.000.000	6.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
2	KASMAWARDI	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SAPRUDIN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	YUSDI	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	FIRMANSYAH	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMSURIZAL	8.000.000	6.000.000	2.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
7	SUKIRMAN .A, SE	8.000.000	188.000	7.812.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.812.000
8	LUKMAN T	8.000.000	8.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
9	SYUFNI YETI	-		-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**32.000.000**	**16.188.000**	**15.812.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.812.000**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 467/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	KOPERINDAG & PKM																
1	YURNITA	25.000.000	-	25.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000
2	Hj. YULIAR PANYALAI	30.000.000	30.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARAHANI KATAK	10.000.000	-	10.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
	JUMLAH	**65.000.000**	**30.000.000**	**35.000.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.000.000**
	PERIKANAN																
1	ANDI ELJUSRA .B	25.000.000	3.960.000	21.040.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.040.000
	JUMLAH	**25.000.000**	**3.960.000**	**21.040.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.040.000**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 512/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	KOPERINDAG DAN PKM																
1	PUTRI DEWI ENDAYANI	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MARYUSNI	10.000.000	527.000	9.473.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.473.000
3	DAHNIMAR	2.000.000	-	2.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
4	YUNIZAR	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dra. JUS ARNI	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ZAINAL UJANG	10.000.000	2.635.000	7.365.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.365.000
7	PAIYAR	10.000.000	10.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BUCHARI	25.000.000	-	25.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000
9	M. SINER Dt. NAN BASA	7.500.000	1.975.000	5.525.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.525.000
10	YULIZAR	10.000.000	10.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RENALDI	7.500.000	7.500.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	FARIDA	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ROSNIDAWATI	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	KPP AWAN BAJUNTAI	30.000.000	30.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KP-RI SEI. GERINGGING	10.000.000	10.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	YENDRITA	3.000.000	-	3.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
17	NURMAWI	3.000.000	1.106.000	1.894.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.894.000
18	NUREWI, S.Ag	3.000.000	158.000	2.842.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.842.000
19	ANIS	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	AGUSNIMAR	3.000.000	948.000	2.052.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.052.000
21	LELI MARKONI	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ETI SUMARNI	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	MARIATUN	10.000.000	10.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	MAIRIZON	10.000.000	10.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	AFRIZON	10.000.000	-	10.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
26	TATI MURNI	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ASNI	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**193.000.000**	**123.849.000**	**69.151.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69.151.000**

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 512/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	PERTANIAN																
1	Hj. SUARNI ELOK	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ZULKIFLI .AS	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUKARDI, B.Sc	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	M. THAHER	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Hj. YUNINAR DARWIS	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SYAHRUL	15.000.000	470.000	14.530.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.530.000
7	YENNY	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SAWIR	15.000.000	1.580.000	13.420.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.420.000
9	EDIR ASNADI	10.000.000	10.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SAWIRMAN .LD	15.000.000	-	15.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
11	AYADI TIOMAS	10.000.000	4.743.000	5.257.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.257.000
12	LIPAP SYAHBUDDIN	20.000.000	6.330.000	13.670.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.670.000
13	KHAIDIR GUCI	20.000.000	20.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ZULAMRI	20.000.000	20.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	YUSMAN	15.000.000	2.520.000	12.480.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.480.000
16	ZAMZAMI	15.000.000	15.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**155.000.000**	**80.643.000**	**74.357.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74.357.000**
	PERIKANAN																
1	FAUZAN	6.000.000	6.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FATIMAH	5.000.000	-	5.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
3	SYAMSIMAR	7.000.000	-	7.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
4	MAWARDI Dt. MUNCAK	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SAIFUL BAHRI	10.000.000	10.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	INDRAWADI	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ZULFADRI ARUS	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	HASAN BASRI	7.500.000	-	7.500.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
9	SUDIRMAN	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ATMAJAYA RIANTI	3.000.000	1.753.000	1.247.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.247.000
11	MUSLIM	10.000.000	3.162.000	6.838.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.838.000
12	INDRA	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SYAHRIAL	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	IRWAN	5.000.000	-	5.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
15	Bgd. TANDO	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RIDWAN	3.000.000	-	3.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
17	NURMAINI	5.000.000	1.060.000	3.940.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.940.000
18	H. SYAFRI	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	H. RUSLI USMAN	6.000.000	6.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 512/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
20	ANWAR	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SYAHRUARDI	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	AZWAR	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	MASRIZAL	3.000.000	1.106.000	1.894.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.894.000
24	RIDWAN ABAS	7.500.000	3.160.000	4.340.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.340.000
25	SABIRIN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SALMAN	25.000.000	-	25.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000
27	S. Dt. RAJO BULAN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	GAZALI	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	TAUFIKURRAHMAN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	M. NUR JAMBAK	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SYAHRUDDIN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SYAKBANRI	3.000.000	948.000	2.052.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.052.000
33	BASRAINI	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	ZAIDI	3.000.000	2.054.000	946.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946.000
35	JAMUNIR	3.000.000	316.000	2.684.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.684.000
36	FADRI OSWIZAL	3.000.000	790.000	2.210.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.210.000
37	EDI MARDANIF	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	JAFRIZAL	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	RAFLES	3.000.000	316.000	2.684.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.684.000
40	DESMARDI USMAN	3.000.000	790.000	2.210.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.210.000
41	ERMAN FIRMAN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	TARJALIUS	3.000.000	948.000	2.052.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.052.000
43	MITRATURACHMAH	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	RISWANTO	3.000.000	2.370.000	630.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.000
45	MIBAT	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	AMRIL NURMAN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	RUDI SUSANTO	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	ERMAN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	ERMAN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	NURSYAMSU	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	AMIN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	ROSTAM	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	KURNIA HERMAN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	SALMI	8.500.000	7.168.000	1.332.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.332.000
	JUMLAH	**172.500.000**	**84.941.000**	**87.559.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87.559.000**

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 512/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	REKAPITULASI																
1	KOPERINDAG DAN PKM	193.000.000	123.849.000	69.151.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.519.000
2	PERTANIAN	155.000.000	80.643.000	74.357.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.357.000
3	PERIKANAN	172.500.000	84.941.000	87.559.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.559.000
	TOTAL	**520.500.000**	**289.433.000**	**231.067.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**233.435.000**

Lampiran : 9.r / 36 - 45

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 563/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	KOPERINDAG DAN PKM																
1	ERMATATI	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ANIDA	15.000.000	15.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	HERMAN KOTO	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	AREI REZA PUTRA	25.000.000	25.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ERLINDA	4.500.000	480.000	4.020.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.020.000
6	AZIMAH	1.000.000	605.000	395.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.000
7	SALFAHMI MARNI	1.000.000	275.000	725.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725.000
8	ANISMAR	1.000.000	440.000	560.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.000
9	EMI	1.000.000	165.000	835.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835.000
10	ERMAWATI	1.000.000	330.000	670.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670.000
11	MARTIAS	20.000.000	20.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ILYAS	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ALI MUNIR	4.500.000	480.000	4.020.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.020.000
	JUMLAH	**85.000.000**	**73.775.000**	**11.225.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.225.000**
	PETERNAKAN																
1	SUDIRMAN	8.000.000	8.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MURNIYATI	8.000.000	-	8.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
3	AMINULLAH	4.500.000	-	4.500.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
4	ELFAMA ZAIN	8.000.000	8.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SYAFRI	8.000.000	-	8.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
6	Drs. HARISMAN	6.000.000	6.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ALI ABUZAR	7.000.000	7.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MUSLIM M. NUR	8.000.000	8.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SAALUDIN	4.500.000	2.295.000	2.205.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.205.000
10	St. YURNALIS	8.000.000	6.000.000	2.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
11	St. ZAKIR	8.000.000	8.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Bgd. SUWIRMAN	4.500.000	940.000	3.560.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.560.000
13	OSMAN	10.000.000	10.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	AZRUL A. Tk. MUDO, SE	2.500.000	2.500.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	AHMAD DH Tk. B	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ALIBASAR Tk. SUTAN	2.500.000	2.500.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MULYADI Tk. SIDI	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 563/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
18	RAHMAD E.Y Tk. B	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	BULKAINI	2.500.000	-	2.500.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
20	DEDI MULYADI	10.000.000	-	10.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
21	RUSLI TANJUNG	8.000.000	-	8.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
22	IRKHASWANDI	9.000.000	9.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	HENDRIZAL	6.000.000	-	6.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
24	ISMAEL	8.000.000	8.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ISMAIL AMIN	4.500.000	4.500.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	MASRI	6.000.000	-	6.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
27	H. AZRA'I	4.500.000	2.500.000	2.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
28	BUKHARI	6.000.000	6.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NURJANI	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	MUZAHAR	10.000.000	10.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	M. NUR	12.000.000	12.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SYAIFUL RAMLI	8.000.000	-	8.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
33	NURMANTO	12.000.000	-	12.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
	JUMLAH	**204.000.000**	**121.235.000**	**82.765.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.765.000**
	REKAPITULASI																
1	KOPERINDAG DAN PKM	85.000.000	73.775.000	11.225.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.225.000
2	PETERNAKAN	204.000.000	121.235.000	82.765.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.765.000
	TOTAL	**289.000.000**	**195.010.000**	**93.990.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93.990.000**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 22/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	PETERNAKAN																
1	SUDIRMAN Rky. RM	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TUANKU KUNIANG	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
3	MULYADI	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
4	YONEDI, S.Pd	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
5	DASNI TANJUNG	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
6	ALI AMRAN	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
7	KARI	10.000.000	10.000.000	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**30.000.000**	**10.000.000**	**20.000.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000**
	KOPERINDAG DAN PKM																
1	IRWAN	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SYAFRINALDI	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SALDI	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUKIRMAN	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	HERI HENDRI	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JAMARIS	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SYAFEI	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MUSLIM	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tk. PADIN	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ISMAEL	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	AMRIZAL	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ZULKARNAINI	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	HENDRI .T	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DASMI TIAR	4.500.000	-	4.500.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
15	MISRIYANTI	4.500.000	-	4.500.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
16	ASMANIAR	4.500.000	-	4.500.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
17	NOFRIZAL	4.500.000	-	4.500.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
18	EDO	4.500.000	-	4.500.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
19	EMI	4.500.000	-	4.500.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
20	APRIDA	4.500.000	-	4.500.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
21	RAYO	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
22	ASNIMAR	3.000.000	-	3.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
23	AIDA RIFNI, INDO USAHA J	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	AFRIZAL .Z, UMEGA TANI	4.500.000	240.000	4.260.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.260.000

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 22/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
25	SUSI ALFIA/TOKO OBAT RI	12.000.000	12.000.000	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	MELATI BORDIR	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ALI ANAS	15.000.000	-	15.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
28	LISTRI YENTI	6.000.000	2.240.000	3.760.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.760.000
29	ASMA/BORDIR MELATI	15.000.000	15.000.000	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ANUARDI	2.500.000	2.500.000	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**93.500.000**	**31.980.000**	**61.520.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.520.000**
	PERTANIAN																
1	Hj. SUAMI ELOK	15.000.000		15.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
2	M. ANIS WAHAB	5.000.000	5.000.000	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ZULKIFLI .AS	15.000.000	-	15.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
4	SUKARDI, B.Sc	15.000.000	-	15.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
5	Mhd. TAHER	15.000.000	15.000.000	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Hj. YUNINAR DARWIS	25.000.000	25.000.000	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ALI AMRAN	15.000.000	-	15.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
8	YENNY	10.000.000	10.000.000	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ALMUNAWARMAN	15.000.000	15.000.000	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	MUSLIM	15.000.000	15.000.000	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	HERI MULYADI	10.000.000	10.000.000	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ir. FETRI MARIA	15.000.000	15.000.000	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hj. MALI	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**170.000.000**	**110.000.000**	**60.000.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60.000.000**
	REKAPITULASI																
1	PETERNAKAN	30.000.000	10.000.000	20.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2	KOPERINDAG DAN PKM	93.500.000	31.980.000	61.520.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.520.000
3	PERTANIAN	170.000.000	110.000.000	60.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000
	TOTAL	**293.500.000**	**151.980.000**	**141.520.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.520.000**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 48/KEP/BPP/2005)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	PETERNAKAN																
1	PIAN	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
2	ABDUL RAZAK	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
3	ELINERTI	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
4	YULIZAR	4.000.000	1.000.000	3.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
5	MARTINA	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
6	KASMA LONDI	4.000.000	1.000.000	3.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
7	AKHIRMANTO	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
8	SYAHRUL SYAH	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
9	AMY ISMAEL	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
10	MARNIATI	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
	JUMLAH	**40.000.000**	**2.000.000**	**38.000.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.000.000**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 344/KEP/BPP/2005)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	KOPERINDAG DAN PKM																
1	NURANI	2.500.000	140.000	2.360.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.360.000	-
2	YURNIATI	2.500.000	2.500.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NURAINI	2.500.000	420.000	2.080.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.080.000	-
4	ALISMAN	3.000.000	3.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KAMBARULLAH	3.000.000	1.350.000	1.650.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650.000	-
6	ARIZAL	2.500.000	1.680.000	820.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	820.000	-
7	AGUSMAN	2.500.000	2.500.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NURMA	2.500.000	2.500.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	AHMAD NURI	2.500.000	2.500.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	JAMALI	5.000.000	5.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RIDWAN AD	2.500.000	1.120.000	1.380.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380.000	-
12	NURHAYATI	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	HALIMAH	5.000.000	5.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	BASRI IRIAS	10.000.000	2.875.000	7.125.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.125.000	-
15	RISMAN	5.000.000	-	5.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
16	TUTI SUARNI	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	IRWAN	3.000.000	170.000	2.830.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.830.000	-
18	SYAFRINALDI	3.000.000	1.020.000	1.980.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980.000	-
19	SALDI	3.000.000	340.000	2.660.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.660.000	-
20	SUHARMAN	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	HERI HEDRI	3.000.000	-	3.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-
22	JAMARIS	3.000.000	680.000	2.320.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320.000	-
23	SYAFRI	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	YUNIZAR	2.000.000	2.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	FLAMBOYAN	10.000.000	-	10.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
26	YUNIDAR	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PULAU	1.000.000	1.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SUPVIRGO	4.500.000	-	4.500.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	-
29	KAIDIR	30.000.000	30.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	FIRMAN ALI INDRA	20.000.000	20.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ROSNITA	4.500.000	-	4.500.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	-
	JUMLAH	**138.000.000**	**85.795.000**	**52.205.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.205.000**	**-**

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 344/KEP/BPP/2005)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	PERIKANAN																
1	ZUARDIN KUD SINAR LAUT	20.000.000	12.650.000	7.350.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.350.000	-
2	JAMAL HIDAYAT KUD PIUN	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ZAINAL KOPERASI PESISIR	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SETIA BUANA KOP. SUKA M	7.500.000	-	7.500.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000	-
5	SYAHRIAL KOP. PINAGO IN	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ANAS RAUF	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ABIZAL	5.000.000	560.000	4.440.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.440.000	-
8	ALI MUNAR	5.000.000	5.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ZAILIS	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	AWALUDDIN WAN	3.000.000	1.020.000	1.980.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980.000	-
11	JOHN HENDRA, A.Md	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DAUD ZAKRI	3.000.000	340.000	2.660.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.660.000	-
13	TONI SETIAWAN	3.000.000	-	3.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-
14	SYAFRI MAYARDI	3.000.000	340.000	2.660.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.660.000	-
15	RUSLI	5.000.000	5.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	MULYADI	5.000.000	-	5.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
17	LUKMAN	5.000.000	-	5.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
18	LILY MARNI	5.000.000	560.000	4.440.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.440.000	-
19	MIBAT	5.000.000	-	5.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
20	RUDI SUSANTO	5.000.000	-	5.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
21	ERMAN	3.000.000	1.920.000	1.080.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080.000	-
22	BASRI TAUFAN DT. LABIH	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SYARIFUDDIN RAID	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SYAFRI PN	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	MARION RS	3.000.000	3.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SAHARUDIN	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	AFRIZAL	3.000.000	3.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	AKHIRUDDIN	5.000.000	840.000	4.160.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.160.000	-
29	SYAMSINAR	5.000.000	5.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SYAFIRMAN	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	M. RAFI	3.000.000	-	3.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-
	JUMLAH	**101.500.000**	**39.230.000**	**62.270.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.270.000**	**-**
	REKAPITULASI																
1	KOPERINDAG DAN PKM	138.000.000	85.795.000	52.205.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.205.000	-
2	PERIKANAN	101.500.000	39.230.000	62.270.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.270.000	-
	TOTAL	**239.500.000**	**125.025.000**	**114.475.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**114.475.000**	**-**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 135/KEP/BPP/2006)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	KOPERINDAG DAN PKM																
1	NURDIATI	10.000.000	10.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	AGUSMAINI	10.000.000	10.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	JASMANI	2.500.000	-	2.500.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	-
4	MAHYUDDIN	3.000.000	-	3.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-
	JUMLAH	**25.500.000**	**20.000.000**	**5.500.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.500.000**	**-**
	PERTANIAN																
1	Ir. BAHAR U Dt. M.L	25.000.000	25.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NURHAYATI	25.000.000	-	25.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-
3	TOGOK	10.000.000	10.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**60.000.000**	**35.000.000**	**25.000.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.000.000**	**-**
	PETERNAKAN																
1	ARZIL	15.000.000	15.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SYAFRIL AWALI	4.500.000	4.500.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	JUFRIZAL	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SYAFRIFUDDIN	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ABUTIAR	15.000.000	15.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RICKI	15.000.000	15.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BACHTARUDDIN	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000	-
8	SYAIFUL ANWAR	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	By. SUREK	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SYAHARUDDIN	5.600.000	-	5.600.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600.000	-
11	JAMALUDDIN/SUDDIN	7.000.000	7.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LILY SUSILA	15.000.000	-	15.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-
13	ERMIDAWATI	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ir. ZULKARDI	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	AZUZAR	4.500.000	500.000	4.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-
16	AMINURI	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**91.600.000**	**59.500.000**	**32.100.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.100.000**	**-**
	REKAPITULASI																
1	KOPERINDAG DAN PKM	25.500.000	20.000.000	5.500.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000	-
2	PERTANIAN	60.000.000	35.000.000	25.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-
3	PETERNAKAN	91.600.000	59.500.000	32.100.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.100.000	-
	TOTAL	**177.100.000**	**114.500.000**	**62.600.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.600.000**	**-**

AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO.008/KEP/BPP/2007)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	KOPERINDAG DAN PKM																
1	YUDELMI	15.000.000	5.010.000	9.990.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	9.990.000	-	-
2	ERWIN UMAR	5.000.000	-	5.000.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-
3	ADE FERNANDO	30.000.000	30.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	AMIR	20.000.000	20.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUTARMAN	15.000.000	15.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DARMAWI	20.000.000	-	20.000.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-
7	YULIZAR	6.000.000	6.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ALI AMRAN	15.000.000	15.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SYAHRIL	25.000.000	25.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	MULYADI	20.000.000	-	20.000.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-
11	JONI/NADIA BORDIR	15.000.000	15.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NURSIDA K	40.000.000	40.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	EDIR ASNADI	20.000.000	-	20.000.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-
14	FEBBY HENDRI	20.000.000	1.115.000	18.885.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	18.885.000	-	-
15	ZUL AMRI	30.000.000	30.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ISMAIL AMIN	20.000.000	1.115.000	18.885.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	18.885.000	-	-
17	ZULHERMAN	10.000.000	560.000	9.440.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	9.440.000	-	-
18	ROSMAINI	4.500.000	-	4.500.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	-	-
19	H. SUDIRMAN	4.500.000	4.500.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	DALMARNI	20.000.000	20.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	RITA IRIANTI	4.500.000	4.500.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REVOLFING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO.008/KEP/BPP/2007)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
22	BUYUNG GAYA	-	-	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ARIFIN	-	-	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. YASIN	-	-	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ALI BASAR TK ST SINARO	-	-	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	AZRUL ASWAT	-	-	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ASNI	-	-	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**359.500.000**	**232.800.000**	**126.700.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**126.700.000**	**-**	**-**
	PERTANIAN																
1	BAKAR .M	20.000.000	20.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RIZAL IDRUS	25.000.000	4.200.000	20.800.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	20.800.000	-	-
3	EDI TIWARMAN	30.000.000	30.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	AHMAD BASRI	30.000.000	30.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ZAMZAMI	20.000.000	20.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ZAILI	25.000.000	25.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SYAFRIAL	10.000.000	10.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Hj. SAMIAH	30.000.000	22.100.000	7.900.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	7.900.000	-	-
9	ANDI ERMAN SAYTI	15.000.000	940.000	14.060.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	14.060.000	-	-
	JUMLAH	**205.000.000**	**162.240.000**	**42.760.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.760.000**	**-**	**-**
	REKAPITULASI																
1	KOPERINDAG DAN PKM	359.500.000	232.800.000	126.700.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	126.700.000	-	-
2	PERTANIAN	205.000.000	162.240.000	42.760.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	42.760.000	-	-
	TOTAL	**564.500.000**	**395.040.000**	**169.460.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**169.460.000**	**-**	**-**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Laporan Keuangan
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Posisi Keuangan 1

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya 2

Laporan Perubahan Ekuitas 3

Laporan Arus Kas 4

Catatan atas Laporan Keuangan ..... 5 - 27

****

PERUMDA AIR MINUM
TIRTA ANAI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANAI
Jalan Raya Padang - Bukittinggi KM. 44 - Korong Kiambang – Nagari Lubuk Pandan-Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Email
perumdaairminumtirtaanai@gmail.com **Web :** www.perumdamtirtaanai.com **– Telpon. (0751) 4676001-Kode Pos 25584**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Dr. H. Aznil Mardin, S.Kom, M.Pd.T
Alamat Kantor	:	Jalan Raya Padang - Bukittinggi KM. 44 - Korong Kiambang – Nagari Lubuk Pandan-Kecamatan 2X11 Enam Lingkung
Jabatan	:	Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman;
2. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman..

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang Pariaman, 13 Mei 2026
Perumda Air Minum Tirta Anai



Dr. H. Aznil Mardin, S.Kom, M.Pd.T
Direktur

DJOKO, SIDIK & INDRA
Audit, Tax, and Business Consultant
Registered Public Accountant

International member of:
Antea
Alliance of independent firms

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00321/2.0999/AU.8/05/1482-1/1/V/2026

Kepada Yth.
Dewan Direksi dan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman** ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 23 April 2025.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan 21 atas laporan keuangan yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat sejak 1 Januari 2025 dan telah menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2024 untuk tujuan komparatif sesuai dengan ketentuan transisi standar tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan audit kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan audit kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

DJOKO, SIDIK & INDRA
Audit, Tax, and Business Consultant
Registered Public Accountant

International member of:
Antea
Alliance of independent firms

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Djoko, Sidik & Indra





Yansyafrin, CA., CMA., CPA., CFI
Izin Akuntan Publik No. AP. 1482

13 Mei 2026

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024*)	1 Januari 2024*)
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	2e, 4	2.005.597.068	1.156.360.829	1.284.223.115
Piutang usaha - neto	2f, 5	9.310.469.382	6.259.364.434	6.722.448.963
Piutang non usaha	6	472.060.878	126.805.361	94.134.179
Persediaan	2g, 7	853.430.104	986.639.884	676.118.511
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2h, 8	232.149.595	182.549.285	198.622.191
Jumlah Aset Lancar		**12.873.707.027**	**8.711.719.793**	**8.975.546.959**
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap *(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp125.311.569.614 tahun 2025 dan Rp121.195.340.006 tahun 2024)*	2i, 9	47.164.964.951	44.700.835.894	45.399.434.127
Aset lainnya - neto	10	58.295.145	88.930.172	2.155.826.589
Aset pajak tangguhan	2o, 14c	5.320.880.799	5.466.074.979	4.664.266.043
Jumlah Aset Tidak Lancar		**52.544.140.895**	**50.255.841.045**	**52.219.526.760**
JUMLAH ASET		**65.417.847.922**	**58.967.560.838**	**61.195.073.719**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha	2j, 11	657.676.663	459.401.913	246.116.033
Biaya yang masih harus dibayar	2k, 12	1.634.832.244	1.716.931.433	1.780.248.172
Utang pajak	2o, 14a	869.339.043	1.152.074.011	512.825.959
Titipan rekening ganda	13	5.950.550	-	-
Utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun	15	6.960.000	143.440.000	150.128.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**3.174.758.500**	**3.471.847.357**	**2.689.318.164**
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	15	-	6.960.000	143.440.000
Kewajiban imbalan pasca kerja	2l, 16	3.378.668.590	3.083.230.976	5.130.985.628
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**3.378.668.590**	**3.090.190.976**	**5.274.425.628**
Jumlah Liabilitas		**6.553.427.090**	**6.562.038.333**	**7.963.743.792**
Ekuitas				
Kekayaan pemda yang dipisahkan	17a	99.082.995.187	99.082.995.187	99.082.995.187
Penyertaan pemda yang belum ditetapkan statusnya	17b	32.936.598.285	28.020.521.385	28.020.521.385
Modal hibah	17c	1.909.193.333	1.909.193.333	1.592.016.000
Laba ditahan	17d	(76.607.187.400)	(76.105.402.580)	(70.044.810.856)
Laba (rugi) tahun berjalan		1.542.821.427	(501.784.820)	(5.419.391.787)
Jumlah Ekuitas		**58.864.420.832**	**52.405.522.505**	**53.231.329.927**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**65.417.847.922**	**58.967.560.838**	**61.195.073.719**

*) Disajikan kembali (catatan 21)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
Yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024*)
Pendapatan Usaha			
Penjualan air	2m, 18	25.477.301.160	25.165.381.130
Penjualan non air	2m, 18	2.984.682.584	2.054.666.140
Jumlah Pendapatan Usaha		**28.461.983.744**	**27.220.047.270**
Beban			
Beban usaha	2n, 19	(27.269.429.200)	(27.891.476.062)
Jumlah Beban Usaha		**(27.269.429.200)**	**(27.891.476.062)**
Pendapatan (Beban) Lain			
Pendapatan lain - neto	20	807.813.082	7.083.088
Jumlah Pendapatan Lain		**807.813.082**	**7.083.088**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		**2.000.367.626**	**(664.345.704)**
Beban pajak penghasilan	2o, 14b	(312.352.019)	(639.248.052)
Efek pajak tangguhan	2o, 14b	(145.194.180)	801.808.936
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		**1.542.821.427**	**(501.784.820)**
Penghasilan komprehensif lain		-	-
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**1.542.821.427**	**(501.784.820)**

*) Disajikan kembali (catatan 21)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
Yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Kekayaan Pemerintah Daerah yang Dipisahkan	Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya	Modah Hibah	Saldo Laba Ditahan	Jumlah
Saldo 1 Januari 2024		**99.082.995.187**	**28.020.521.385**	**1.592.016.000**	**(80.128.468.686)**	**48.567.063.886**
Dampak penyajian ulang karena perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian lainnya					4.664.266.043	4.664.266.043
Saldo 1 Januari 2024*)		**99.082.995.187**	**28.020.521.385**	**1.592.016.000**	**(75.464.202.643)**	**53.231.329.929**
Penambahan modal hibah	17			317.177.333		317.177.333
Laba tahun berjalan					(501.784.820)	(501.784.820)
Koreksi laba ditahan	17				(641.199.937)	(641.199.937)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024*)		**99.082.995.187**	**28.020.521.385**	**1.909.193.333**	**(76.607.187.400)**	**52.405.522.505**
Penambahan penyertaan Pemerintahan Daerah	17	-	2.075.685.000	-	-	2.075.685.000
Penambahan penyertaan Pemerintahan Pusat	17	-	2.840.391.900	-	-	2.840.391.900
Laba tahun berjalan		-	-	-	1.542.821.427	1.542.821.427
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**99.082.995.187**	**32.936.598.285**	**1.909.193.333**	**(75.064.365.973)**	**58.864.420.832**

*) Disajikan kembali (catatan 21

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
Yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (rugi) tahun berjalan	1.542.821.427	(501.784.820)
Penyesuaian		
Biaya (pemulihan) penyisihan piutang usaha	(955.411.159)	2.946.071.756
Beban imbalan kerja	645.666.059	698.514.316
Beban pajak penghasilan non kas (a)	312.352.019	639.248.052
Biaya penyusutan aset tetap	4.116.229.608	73.978.309.653
Biaya penyusutan aset lain-lain	30.635.026	2.066.896.417
Biaya amortisasi biaya dibayar dimuka	49.437.481	11.150.859
Aset pajak tangguhan	145.194.180	(5.466.074.979)
Dampak perubahan akuntansi	-	4.664.266.043
Koreksi laba ditahan	-	(641.199.937)
Jumlah Penyesuaian	**4.344.103.214**	**78.897.182.180**
Laba Bersih Setelah Penyesuaian	**5.886.924.641**	**78.395.397.360**
Perubahan Aset Lancar dan Liabilitas		
Penurunan (kenaikan) piutang usaha	(2.095.693.789)	(2.482.987.228)
Kenaikan piutang non usaha	(345.255.516)	(32.671.182)
Penurunan (kenaikan) persediaan	133.209.780	(310.521.373)
Penurunan (kenaikan) uang muka	(99.037.791)	4.922.050
Kenaikan (penurunan) utang usaha	198.274.750	213.285.880
Kenaikan (penurunan) biaya yang masih harus dibayar	(82.099.189)	(63.316.739)
Kenaikan (penurunan) utang pajak	(595.086.987)	-
Kenaikan titipan rekening ganda	5.950.550	-
Kenaikan (penurunan) utang sewa pembiayaan	(143.440.000)	(143.168.000)
Penurunan utang imbalan pasca kerja	(350.228.445)	(2.746.268.968)
Jumlah Perubahan Aset Lancar dan Liabilitas	**(3.373.406.637)**	**(5.560.725.560)**
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**2.513.518.004**	**72.834.671.800**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(6.580.358.665)	(73.279.711.419)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(6.580.358.665)**	**(73.279.711.419)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Perubahan Pemda yang belum Ditetapkan Statusnya	4.916.076.900	-
Penambahan modal hibah	-	317.177.333
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**4.916.076.900**	**317.177.333**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**849.236.239**	**(127.862.286)**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**1.156.360.829**	**1.284.223.115**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**2.005.597.068**	**1.156.360.829**
(a) Pajak penghasilan dibayar tunai	639.248.052	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
Yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR
PEMBANGUNAN KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT. BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN POSISI KEUANGAN 1

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 2

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 3

LAPORAN ARUS KAS 4

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ..... 5 – 34

LAMPIRAN : Rincian Beban Administrasi dan Umum

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PEMBANGUNAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
T E N T A N G
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
PT. BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dedviandri, SE**
   Alamat Kantor : Sungai Paku Jl. Raya Sungai Limau Kel. Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman
   Nomor Telepon : (0751)-9087601
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : **Syafriyanto, S.Pd**
   Alamat Kantor : Sungai Paku Jl. Raya Sungai Limau Kel. Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman
   Nomor Telepon : (0751)-9087601
   Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa :

1. PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas privat sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.
2. Dengan persetujuan pemegang saham dan Dewan Komisaris, Direksi PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman telah memutuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat dan ketentuan yang ditetapkan otoritas perbankan.
3. Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan terlampir.
4. Laporan keuangan PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat dan ketentuan yang ditetapkan otoritas
5. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PEMBANGUNAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

6. PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
7. Direksi PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, serta sistem pengendalian internal dalam PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BPR PEMBANGUNAN KAB. PADANG PARIAMAN
BPR PNPP

Dedyjandri, SE
Direktur Utama

Syafriyanto, S.Pd
Direktur

Sungai Limau, 30 Januari 2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kantor Akuntan Publik
Bustaman, Ezeddin & Putranto
Akuntan Publik Terdaftar dan Konsultan Manajemen
Izin Usaha No. : 1287/KM.1/2017

Kantor Cabang :
Jl. Bhakti No. 61, Asrama Haji Tabing, Padang 25171
Telp. 0751-7055101 • E-mail : herryputranto@kapbep.com
herryakuntan@yahoo.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00021/3.0361/AU.8/07/0329-1/1/I/2026

Kepada Yth.
Dewan Komisaris dan Direksi
PT. BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Opini Wajar

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signfikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Basis Opini Wajar

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Pada tanggal 1 Januari 2025, terjadi perubahan Standar Akuntansi Keuangan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Terhadap perubahan ini, laporan keuangan 31 Desember 2024 yang menjadi angka pembanding tahun buku 2025 disajikan kembali (Restatement) sesuai dengan SAK EP.

Seperti diungkapkan pada catatan 29 atas laporan keuangan, NPL kredit 31 Desember 2025 sebesar 16,80% dan 31 Desember 2024 sebesar 21,25%. Tingginya persentase NPL akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha bank.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Kantor Pusat :
Gedung Sentra Kramat Blok B No.18, Jl. Kramat Raya No.7-9
Telp. 021-3156131 • Fax. 021-3148966, Jakarta Pusat 10450
www.kapbep.com • E-mail : infokap@kapbep.com

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan
Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

1. *Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.*
2. *Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.*
3. *Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.*
4. *Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.*
5. *Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.*

Kantor Akuntan Publik
Bustaman, Ezeddin & Putranto

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Hal Lain
Laporan keuangan PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan Opini Wajar atas laporan keuangan tersebut, tanggal 12 Februari 2025.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BUSTAMAN, EZEDDIN & PUTRANTO



Herry Putranto, CA, CPA
Izin Akuntan Publik AP 0329

Padang, 30 Januari 2026

00021

LAPORAN KEUANGAN POKOK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LAPORAN ARUS KAS

PT. BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025
Dengan angka perbandingan tahun 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
Kas	4	158.085.500	183.310.100
Penempatan Pada Bank Lain	5	3.968.700.734	2.882.010.385
Penyisihan Kerugian		-	-
Total		3.968.700.734	2.882.010.385
Kredit Yang Diberikan	6	13.119.159.020	11.460.761.176
Selisih Penerapan SAK EP		-	687.487.605
Penyisihan Kerugian		(600.083.280)	(919.135.343)
Total		12.519.075.740	11.229.113.438
Aset Tetap dan Inventaris	7	1.120.468.050	1.093.395.050
Akumulasi Penyusutan		(775.080.547)	(668.707.478)
Total		345.387.503	424.687.572
Aset Tidak Berwujud	8	7.500.005	1
Aset Lain-Lain	9	301.572.923	321.724.004
Jumlah Aset		**17.300.322.405**	**15.040.845.500**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Liabilitas Segera	10	21.661.657	16.687.477
Hutang Bunga	11	10.399.113	7.649.345
Hutang Pajak	12	-	-
Simpanan	13		
Tabungan		5.320.432.455	4.356.680.506
Deposito		2.964.000.000	2.406.500.000
Simpanan dari Bank Lain	14	1.052.360.433	687.183.429
Liabilitas Lainnya	15	199.755.780	-
Jumlah Liabilitas		**9.568.609.438**	**7.474.700.757**
EKUITAS			
Modal			
Modal Disetor	1b	6.771.500.000	6.771.500.000
Saldo Laba	16		
Cadangan umum		438.832.570	438.832.570
Penerapan SAK EP (konversi bunga)		687.487.605	687.487.605
Penerapan SAK EP (imbalan pasca kerja)		(124.003.434)	-
Belum Ditentukan Tujuannya		(42.103.774)	(331.675.432)
Total		960.212.968	794.644.743
Jumlah Ekuitas		**7.731.712.968**	**7.566.144.743**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		**17.300.322.405**	**15.040.845.500**

30 Januari 2026

Dedviandri, SE
Direktur Utama

Syafriyanto, S.Pd
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN LABA-RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
Dengan angka perbandingan tahun 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024
Pendapatan Operasional			
Pendapatan bunga	17		
Penempatan pada bank lain		124.208.675	153.800.619
Kredit yang diberikan		1.761.947.964	1.322.485.947
Provisi kredit		75.004.623	72.488.771
Pendapatan lainnya	18	767.321.829	361.417.560
Jumlah Pendapatan Operasional		2.728.483.091	1.910.192.897
Beban Operasional			
Beban bunga	19	301.292.112	203.398.462
Beban kerugian penurunan aset	20	-	617.010.203
Beban pemasaran	21	20.560.000	18.335.000
Beban administrasi dan umum	22	2.068.580.715	1.468.789.756
Beban lainnya	23	41.955.552	64.964.908
Jumlah Beban Operasional		2.432.388.379	2.372.498.329
Laba (Rugi) Operasional		**296.094.712**	**(462.305.432)**
Pendapatan dan Beban Non Operasional	24		
Pendapatan Non Operasional		400.000	135.700.000
Beban Non Operasional		(6.560.000)	(5.070.000)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		(6.160.000)	130.630.000
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		289.934.712	(331.675.432)
Taksiran Pajak Penghasilan		-	-
Laba (Rugi) Netto		**289.934.712**	**(331.675.432)**

30 Januari 2026

Dedviandri, SE
Direktur Utama

Syafriyanto, S.Pd
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
Dengan angka perbandingan tahun 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Disetor	Saldo Laba				Jumlah
		Cadangan Umum	Penerapan SAK EP (konversi buga)	Penerapan SAK EP (imbalan pasca kerja)	Belum Ditentukan Tujuannya	
Saldo per 31 Desember 2023	**6.771.500.000**	**382.893.770**	**-**	**-**	**186.462.669**	**7.340.856.439**
Deviden	-	-	-	-	(186.462.669)	(186.462.669)
Pembentukan cadangan	-	55.938.801	-	-	-	55.938.801
Laba s/d tahun lalu (SAK EP - konversi bunga flat ke EIR)	-	-	687.487.605	-	-	687.487.605
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	-	-	(331.675.432)	(331.675.432)
Saldo per 31 Desember 2024	**6.771.500.000**	**438.832.570**	**687.487.605**	**-**	**(331.675.432)**	**7.566.144.744**
Deviden	-	-	-	-	-	-
Pembentukan cadangan	-	-	-	-	-	-
Koreksi laba tahun lalu	-	-	-	-	(363.054)	(363.054)
Laba s/d tahun lalu (SAK EP - konversi bunga flat ke EIR)	-	-	-	(124.003.434)	-	(124.003.434)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	-	-	289.934.712	289.934.712
Saldo per 31 Desember 2025	**6.771.500.000**	**438.832.570**	**687.487.605**	**(124.003.434)**	**(42.103.774)**	**7.731.712.968**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
Dengan angka perbandingan tahun 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Catatan	2025	2024
I	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL**			
	Penerimaan bunga, provisi dan komisi		1.937.922.737	1.558.981.432
	Pembayaran bunga		(298.027.082)	(199.007.671)
	Pembayaran beban karyawan		(1.710.261.005)	(1.092.831.818)
	Pembayaran beban administrasi dan umum		(254.219.119)	(258.140.202)
	Pembayaran beban lainnya		(41.955.552)	(64.964.908)
	Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya		767.321.829	361.218.856
	Penerimaan dari pendapatan (beban) non operasional		(6.160.000)	130.630.000
	Pembayaran pajak penghasilan		-	(17.052.435)
	Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasional		394.621.808	418.833.254
	Penurunan (Kenaikan) Aset Operasional			
	Penempatan pada bank lain > 3 bulan		150.000.000	(200.000.000)
	Kredit yang diberikan		(1.961.528.421)	(1.767.032.745)
	Aset lainnya		27.468.120	(123.044.007)
	Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasional			
	Liabilitas segera		(6.628.609)	1.998.380
	Tabungan		963.751.950	(389.240.551)
	Deposito		557.500.000	421.500.000
	Simpanan dari bank lain		365.177.004	500.741.656
	Liabilitas lainnya		199.755.780	(68.000.000)
	Arus kas bersih dari aktivitas operasi		690.117.632	(1.204.244.014)
II	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**			
	Pembelian (penjualan) aset tetap dan inventaris		(31.773.000)	(392.682.000)
	Pembelian (penjualan) aset tidak berwujud		(10.000.000)	-
	Arus kas bersih dari aktivitas investasi		(41.773.000)	(392.682.000)
III	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**			
	Penambahan modal disetor		-	-
	Penambahan (pengurangan) cadangan		-	55.938.801
	Penambahan (pengurangan) saldo laba		563.484.171	-
	Pembayaran deviden tunai		(363.054)	(186.462.669)
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		563.121.117	(130.523.868)
	Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		1.211.465.749	(1.727.449.882)
	Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode		2.515.320.485	4.242.770.367
	Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode		3.726.786.234	2.515.320.485
	Kas dan Setara Kas terdiri dari :			
	Kas		158.085.500	183.310.100
	Penempatan pada bank lain < 3 bulan		3.568.700.734	2.332.010.385
	Jumlah		3.726.786.234	2.515.320.485

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Balairung
Ethnic Moslem Friendly Hotel

LAPORAN KEUANGAN
UN AUDIT

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
PER 31 DESEMBER 2025

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

Jakarta, 21 Januari 2026

Nomor : 04/BCS/DIR/I-2026
Lampiran : 1 Berkas
Perihal **: Laporan Keuangan PT. Balairung Citrajaya Sumbar dan Konfirmasi Penyertaan Modal Kabupaten Padang Pariaman**

Kepada Yth
Kepala Badan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman
Cq. Bidang Akuntansi

di
Tempat

Dengan Hormat,

Semoga Bapak/Ibu dan jajaran staff dalam keadaan sehat wal'afiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amiin Yaa Rabbal'alamiin.

Menindaklanjuti surat nomor 900.1.15.1/591/BPKD/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Permintaan Laporan Keuangan sebagai data untuk penyusunan LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami lampirkan :

1. Laporan Keuangan PT. Balairung Citrajaya Sumbar Tahun 2025 (Un Audit)
2. Komposisi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam struktur modal perusahaan dari penyertaan modal yang sudah disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Oktofrida Wisnu Pamungkas
Direktur

Jl. Matraman Raya No.19, Jakarta 13140
Phone : +62-8591 7217, Fax : +62-21 8591 7216
www.balairung-hotel.co.id

PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

SURAT PERNYATAAN

No.4/BCS-SP/DIR/I-2026

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Oktofrida Wisnu Pamungkas
Tempat/Tgl Lahir	: Grobogan - Jawa Tengah, 12 Oktober 1984
Jabatan	: Direktur PT Balairung Citrajaya Sumbar (Perseroda)

Melalui surat ini kami sampaikan sbb :

1. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 2.824.899.000**,- *(dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)*
2. Total modal Perusahaan adalah sebesar **Rp 164.025.990.000**,- *(Seratus enam puluh empat milyar dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)*
3. Prosentase penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2025 adalah sebesar 1.72%
4. Jumlah lembar Saham sebanyak 1.132.593 lembar, yang terdiri dari:
   a. Saham seri A = Sebanyak : 1.694 lembar
   b. Saham seri B = Sebanyak : 1.130.899 lembar

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan

Oktofrida Wisnu Pamungkas
Direktur

Jl. Matraman Raya No.19, Jakarta 13140
Phone : +62-8591 7217, Fax : +62-21 8591 7216
www.balairung-hotel.co.id

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul……	i
Daftar Isi……	ii
Neraca……	1
Laporan Laba/Rugi……	2
Laporan Perubahan Modal……	3
Laporan Arus Kas……	4
Catatan atas Laporan Keuangan……	5-21

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)

KETERANGAN	2025
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	537.546.580
Piutang Usaha	1.372.635.897
Persediaan	166.755.041
Perlengkapan Operasional Hotel	-
Uang Muka	128.096.405
Jumlah Aset Lancar	**2.205.033.923**
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap (Setelah dikurangi depresiasi)	158.992.502.159
Aset Tidak Berwujud (Setelah dikurangi amortisasi)	-
Aset Pajak Tangguhan	90.447.006
Jumlah Aset Tidak Lancar	**159.082.949.165**
Aset Lain-lain	162.723.320
T O T A L A S E T	**161.450.706.408**
LIABILITAS DAN EKUITAS	
Liabilitas Lancar	
Utang Usaha	386.480.177
Beban Akrual	300.814.109
Utang Pajak	7.714.919.524
Utang Deposit	459.996.836
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	204.930.000
Utang Dividen	-
Utang Lain-lain	149.759.406
Jumlah Liabilitas Lancar	**9.216.900.052**
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas Pajak Tangguhan	3.034.899.797
Utang Imbalan Pasca Kerja	509.850.000
Jumlah Liabilitas	**12.761.649.849**
Ekuitas	
Modal Dasar Rp.308.078.000.000 terdiri dari 184.848 Saham Seri A Nilai Nominal Rp.1000.000 per Saham dan 123.230.000 Saham Seri B Nilai Nominal Rp.1.000 per Saham. Modal Ditempatkan dan Disetor terdiri dari 98.405 Saham Seri A dan 65.620.990 Saham Seri B	164.025.990.000
Tambahan Modal Disetor - TA	2.030.287.790
Selisih Revaluasi Aset Tetap	33.329.979.575
Defisit	(50.697.200.806)
Jumlah Modal	**148.689.056.559**
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**161.450.706.408**

Jakarta, 20 Januari 2026

Oktofrida Wisnu Pamung
Direktur

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)

K E T E R A N G A N	2025
Pendapatan Usaha	5.141.192.719
Beban Pokok Penjualan	1.222.160.548
LABA (RUGI) KOTOR	**3.919.032.171**
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	-
Jumlah Laba Kotor & Pendapatan Lainnya	**3.919.032.171**
Beban Usaha	
Beban Pemasaran	107.110.788
Beban Administrasi dan Umum	2.541.226.525
Jumlah Beban Usaha	2.648.337.313
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM PENYUSUTAN & AMORTISASI	**1.270.694.858**
Beban Penyusutan & Amortisasi	3.017.357.639
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**(1.746.662.781)**
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan	
Pajak Kini	-
Pajak Tangguhan	-
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**-**
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK PENGHASILAN	**(1.746.662.781)**

Jakarta, 20 Januari 2026

Oktofrida Wisnu Pamungka
Direktur

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)

K E T E R A N G A N	Cat	Modal Saham	Selisih Revaluasi	Tambahan Modal Disetor- TA	Saldo Laba (Defisit)	Jumlah Ekuitas
EKUITAS AWAL						
Saldo per 1 Januari 2024		**164.025.990.000**	**33.329.979.575**	**2.030.287.790**	**(47.056.997.075)**	**152.329.260.291**
Tambahan Modal Disetor		-	-	-	-	-
Koreksi Uang Muka Pembagian Dividen		-	-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-	-	-	-
Rugi Bersih		-	-	-	(1.893.540.950)	(1.893.540.950)
Saldo per 31 Desember 2024		**164.025.990.000**	**33.329.979.575**	**2.030.287.790**	**(48.950.538.025)**	**150.435.719.341**
Tambahan Modal Disetor						
Pembagian Dividen						-
Tambahan Modal Disetor - TA						-
Koreksi Laba Ditahan						-
Selisih Revaluasi Aset Tetap						-
Rugi Bersih					(1.746.662.781)	(1.746.662.781)
EKUITAS AKHIR TAHUN 2025		**164.025.990.000**	**33.329.979.575**	**2.030.287.790**	**(50.697.200.806)**	**148.689.056.559**

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)

K E T E R A N G A N	2025
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan kas dari pelanggan	4.796.132.544
Pembayaran kepada karyawan	(1.765.431.984)
Pembayaran beban operasional	(3.206.784.628)
Pembayaran PBB dan pajak pembangunan daerah	(210.061.084)
	(386.145.152)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Pembelian aset tetap	(151.666.978)
Pembelian perlengkapan	(90.965.884)
Pekerjaan dalam Penyelesaian	(162.723.320)
	(405.356.182)
Jumlah arus kas dari aktivitas investasi	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Penerimaan Pihak ke 3	115.000.000
Pngembalian Pihak ke 3	**-**
Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan	**115.000.000**
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	**(676.501.334)**
Kas dan setara kas awal tahun	**1.214.047.914**
Kas dan setara kas akhir tahun	**537.546.580**

Lampiran : 11 / 1 - 3

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ASET TETAP - TANAH
PER 31 DESEMBER 2025

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	MUTASI TAHUN 2025						SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG			
			Pindah Masuk Antar OPD	Hibah Masuk	TOTAL MUTASI TAMBAH	Pindah Keluar Antar SKPD	Penghapusan	TOTAL MUTASI KURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
01	**Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
01.01	Kantor DPRD	-			-			-	-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	-			-			-	-
01.03	Sekretariat Daerah	**16.858.346.241,00**	5.250.000,00		**5.250.000,00**			-	**16.863.596.241,00**
01.04	Sekretariat DPRD	**7.652.000,00**			-			-	**7.652.000,00**
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	-			-				-
01.06	Inspektorat Kabupaten	**8.360.000,00**			-	8.360.000,00		**8.360.000**	-
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-			-			-	-
		-			-			-	-
01.09	**Kecamatan**	-			-			-	-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	**772.500.000,00**			-			-	**772.500.000,00**
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	**38.900.000,00**			-			-	**38.900.000,00**
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	**10.000.000,00**			-			-	**10.000.000,00**
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	**10.922.500,00**			-			-	**10.922.500,00**
01.09.05	Kecamatan Sei.Limau	**55.485.000,00**			-			-	**55.485.000,00**
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	**11.000.000,00**			-			-	**11.000.000,00**
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	**15.925.000,00**			-			-	**15.925.000,00**
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	**60.480.000,00**			-			-	**60.480.000,00**
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	**11.325.000,00**			-			-	**11.325.000,00**
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	**12.900.000,00**			-			-	**12.900.000,00**
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	**5.000.000,00**			-			-	**5.000.000,00**
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	**4.970.000,00**			-			-	**4.970.000,00**
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	**75.680.000,00**			-			-	**75.680.000,00**
01.09.14	Kecamatan Patamuan	**30.000.000,00**			-			-	**30.000.000,00**
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	**8.000.000,00**			-			-	**8.000.000,00**
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	**50.000.000,00**			-			-	**50.000.000,00**
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	**70.000.000,00**			-			-	**70.000.000,00**
	Sub Jumlah	**18.117.445.741**	**5.250.000,00**	**-**	**5.250.000**	**8.360.000,00**	**-**	**8.360.000,00**	**18.114.335.741**
02	**Bidang Pendidikan**							-	
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**13.073.133.533,00**			-	434.687.420,00	148.500.000,00	**583.187.420,00**	**12.489.946.113,00**
		-			-			-	-
03	**Bidang Kesehatan**	-			-			-	-
03.01	Dinas Kesehatan	**2.385.988.100,00**	434.687.420,00	502.540.000,00	**937.227.420,00**			-	**3.323.215.520,00**
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	**1.222.160.000,00**			-			-	**1.222.160.000,00**

Lampiran : 11 / 2 - 3

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	MUTASI TAHUN 2025						SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG			
			Pindah Masuk Antar OPD	Hibah Masuk	TOTAL MUTASI TAMBAH	Pindah Keluar Antar SKPD	Penghapusan	TOTAL MUTASI KURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		-			-			-	-
04	**Bidang Pekerjaan Umum**	-			-			-	-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**141.003.591.225,00**			-			-	**141.003.591.225,00**
		-			-			-	-
05	**Bidang Perencanaan Pembangunan**	-			-			-	-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-			-			-	-
		-			-			-	-
06	**Bidang Perhubungan**	-			-			-	-
06.01	Dinas Perhubungan	**483.109.000,00**						-	**483.109.000,00**
06.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	-						-	-
		-			-			-	-
07	**Bidang Lingkungan Hidup**	-			-			-	-
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**30.020.747.750,00**			-			-	**30.020.747.750,00**
		-			-			-	-
08	**Bidang Kependudukan dan Capil**				-			-	
08.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**14.740.000,00**	8.360.000,00		**8.360.000,00**			-	**23.100.000,00**

Lampiran : 11 / 3 - 3

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	MUTASI TAHUN 2025						SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG			
			Pindah Masuk Antar OPD	Hibah Masuk	TOTAL MUTASI TAMBAH	Pindah Keluar Antar SKPD	Penghapusan	TOTAL MUTASI KURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		-			-			-	-
09	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	-			-			-	-
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-			-			-	-
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**300.000.000,00**			-			-	**300.000.000,00**
		-						-	-
10	**Bidang Sosial**	-			-			-	-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**335.370.000,00**			-			-	**335.370.000,00**
		-			-			-	-
11	**Bidang Koperasi dan UKM**	-			-			-	-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	**96.595.000,00**			-			-	**96.595.000,00**
		-			-			-	-
12	**Bidang Penanaman Modal**	-			-			-	-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	-			-			-	-
		-			-			-	-
13	**Bidang Kebudayaan**	-			-			-	-
		-			-			-	-
14	**Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**	-			-			-	-
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	**1.812.858.400,00**			-				**1.812.858.400,00**
		-			-			-	-
15	**Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri**	-			-			-	-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-			-			-	-
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	-							-
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**52.200.000,00**			-			-	**52.200.000,00**
		-			-			-	-
16	**Bidang Pemberdayaan Masy. Desa**	-			-			-	-
		-			-			-	-
17	**Bidang Perpustakaan**	-			-			-	-
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	**321.630.000,00**			-			-	**321.630.000,00**
		-			-			-	-
18	**Bidang Pertanian**				-			-	
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**4.030.468.000,00**			-			-	**4.030.468.000,00**
18.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	**55.750.000,00**			-	5.250.000,00		**5.250.000,00**	**50.500.000,00**
		-			-			-	-
19	**Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**	-			-			-	-
		-			-			-	-
20	**Bidang Kelautan dan Perikanan**	-			-			-	-
20.01	Dinas Perikanan	**3.113.542.000,00**		3.645.000.000,00	**3.645.000.000,00**				**6.758.542.000,00**
					-				
	TOTAL	**216.439.328.749,00**	**448.297.420,00**	**4.147.540.000,00**	**4.595.837.420,00**	448.297.420,00	148.500.000,00	**596.797.420,00**	**220.438.368.749,00**

Lampiran : 12 / 1 - 4

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ASET TETAP - PERALATAN DADN MESIN
PER 31 DESEMBER 2025

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi 2025				Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Total Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	18	24	35	36
01	**Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**						
01.01	Kantor DPRD	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
01.03	Sekretariat Daerah	**28.164.440.301,71**	-	**2.417.457.193,02**	17.982.000,00	**686.645.262,00**	**29.895.252.232,73**
01.04	Sekretariat DPRD	**8.239.282.740,23**	-	**984.767.050,00**	-	**-**	**9.224.049.790,23**
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	**5.399.717.145,00**	16.500.000,00	**708.159.815,00**	38.478.640,00	**106.299.640,00**	**6.001.577.320,00**
01.06	Inspektorat Kabupaten	**1.439.302.647,00**	-	**343.075.805,00**	-	**-**	**1.782.378.452,00**
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**1.895.741.316,00**	-	**-**	-	**-**	**1.895.741.316,00**
01.09			-	**-**	-	**-**	
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	**504.108.243,00**	-	**-**	-	**-**	**504.108.243,00**
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	**585.954.440,00**	7.900.000,00	**7.900.000,00**	-	**-**	**593.854.440,00**
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	**503.068.578,00**	-	**11.500.000,00**	-	**-**	**514.568.578,00**
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	**464.164.191,00**	-	**-**	-	**-**	**464.164.191,00**
01.09.05	Kecamatan Sungai Limau	**600.992.958,00**	-	**24.637.500,00**	-	**-**	**625.630.458,00**
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	**486.985.558,00**	-	**15.000.000,00**	-	**-**	**501.985.558,00**
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	**508.401.431,00**	-	**-**	-	**-**	**508.401.431,00**
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	**454.781.167,00**	-	**5.500.000,00**	12.225.400,00	**12.225.400,00**	**448.055.767,00**
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	**502.206.952,00**	-	**-**	-	**-**	**502.206.952,00**
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	**560.171.229,00**	-	**-**	-	**-**	**560.171.229,00**
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	**552.080.027,00**	-	**-**	-	**-**	**552.080.027,00**

Lampiran : 12 / 2 - 4

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi 2025				Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Total Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	**432.826.651,00**	-	**-**	-	**-**	**432.826.651,00**
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	**506.356.251,00**	-	**24.411.801,00**	-	**-**	**530.768.052,00**
01.09.14	Kecamatan Patamuan	**588.711.008,00**	8.500.000,00	**32.500.000,00**	-	**1.300.000,00**	**619.911.008,00**
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	**375.352.256,00**	-	**11.471.850,00**	-	**-**	**386.824.106,00**
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	**529.237.107,00**	-	**30.500.000,00**	-	**-**	**559.737.107,00**
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	**602.754.593,00**	-	**-**	-	**-**	**602.754.593,00**
	Sub Jumlah	**53.896.636.789,94**	32.900.000,00	**4.616.881.014,02**	68.686.040,00	**806.470.302,00**	**57.707.047.501,96**
02	**Bidang Pendidikan**					**-**	
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**138.334.587.843,81**	5.976.059.882,00	**9.142.742.644,00**	3.283.930.444,00	**3.283.930.444,00**	**144.193.400.043,81**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
03	**Bidang Kesehatan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
03.01	Dinas Kesehatan	**96.850.481.570,19**	37.740.000,00	**4.968.605.808,00**	517.212.669,15	**517.212.669,15**	**101.301.874.709,04**
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	**99.472.857.626,75**	283.689.456,00	**6.601.771.511,00**	949.610,00	**949.610,00**	**106.073.679.527,75**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
04	**Bidang Pekerjaan Umum**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**17.178.850.621,10**	117.308.000,00	**146.408.000,00**	-	**64.308.000,00**	**17.260.950.621,10**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
05	**Bidang Perencanaan Pembangunan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	**2.354.072.243,00**	15.500.000,00	**167.000.001,00**	-	**-**	**2.521.072.244,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
06	**Bidang Perhubungan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
06.01	Dinas Perhubungan	**10.392.393.126,00**	-	**144.065.000,00**	-	**310.913.466,00**	**10.225.544.660,00**
06.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	**4.040.004.460,60**	-	**84.233.750,00**	-	**-**	**4.124.238.210,60**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**

Lampiran : 12 / 3 - 4

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi 2025				Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Total Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
07	**Bidang Lingkungan Hidup**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**8.592.709.519,00**	-	**95.059.500,00**	-	**4.445.376,00**	**8.683.323.643,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
08	**Bidang Kependudukan dan Capil**		-	**-**	-	**-**	
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	**3.429.707.225,00**	-	**95.168.452,00**	-	**-**	**3.524.875.677,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
09	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**1.040.060.615,00**	-	**26.943.200,00**	-	**-**	**1.067.003.815,00**
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**8.974.194.984,00**	-	**223.997.201,00**	-	**-**	**9.198.192.185,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
10	**Bidang Sosial**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**2.332.970.429,00**	-	**-**	-	**-**	**2.332.970.429,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
11	**Bidang Koperasi dan UKM**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	**4.514.987.756,23**	46.020.600,00	**180.330.600,00**	-	**-**	**4.695.318.356,23**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
12	**Bidang Penanaman Modal**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	**5.664.825.345,00**	118.195.000,00	**138.175.000,00**	24.658.000,00	**24.658.000,00**	**5.778.342.345,00**
			-	**-**	-	**-**	
13	**Bidang Kebudayaan**		-	**-**	-	**-**	
			-	**-**	-	**-**	
14	**Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**		-	**-**	-	**-**	
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	**3.088.923.339,00**	-	**352.572.750,00**	-	**417.800.000,00**	**3.023.696.089,00**
			-	**-**	-	**-**	

Lampiran : 12 / 4 - 4

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi 2025				Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Total Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
15	**Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri**		-	-	-	-	
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	**384.360.359,00**	-	-	-	-	**384.360.359,00**
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	**11.771.335.625,00**	-	**1.820.000,00**	1.820.000,00	**134.820.000,00**	**11.638.335.625,00**
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**7.606.655.035,00**	7.709.000,00	**2.160.169.110,00**	107.384.548,00	**107.384.548,00**	**9.659.439.597,00**
			-	-	-	-	
16	**Bidang Pemberdayaan Masy. Desa**		-	-	-	-	
			-	-	-	-	
17	**Bidang Perpustakaan**		-	-	-	-	
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	**3.780.613.893,00**	-	**287.743.260,00**	-	-	**4.068.357.153,00**
			-	-	-	-	
18	**Bidang Pertanian**		-	-	-	-	
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**6.854.570.332,36**	-	-	-	-	**6.854.570.332,36**
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	**2.681.143.663,66**	-	-	-	**5.537.650,02**	**2.675.606.013,64**
			-	-	-	-	
19	**Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**		-	-	-	-	
			-	-	-	-	
20	**Bidang Kelautan dan Perikanan**		-	-	-	-	
20.01	Dinas Perikanan	**4.189.774.844,94**	-	**23.535.000,00**	-	-	**4.213.309.844,94**
		-	-	-	-	-	**-**
	TOTAL	**497.426.717.246,58**	**6.635.121.938,00**	**29.457.221.801,02**	**4.004.641.311,15**	**5.678.430.065,17**	**521.205.508.982,43**

Lampiran : 13 / 1 - 5

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2025

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2024				Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	19	24	33	34
01	**Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**						
01.01	Kantor DPRD	**-**	-	**-**		**-**	**-**
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	**-**	-	**-**		**-**	**-**
01.03	Sekretariat Daerah	**118.455.039.885,97**	-	**914.306.060,00**	-	**-**	**119.369.345.945,97**
01.04	Sekretariat DPRD	**5.595.516.907,00**	-	**-**	-	**-**	**5.595.516.907,00**
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	**8.447.792.643,00**	-	**-**	-	**-**	**8.447.792.643,00**
01.06	Inspektorat Kabupaten	**6.355.963.180,00**	-	**-**	-	**313.272.480,00**	**6.042.690.700,00**
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
01.09	**Kecamatan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	**777.241.996,00**	-	**-**	-	**-**	**777.241.996,00**
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	**1.058.031.803,00**	-	**-**	-	**-**	**1.058.031.803,00**
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	**1.100.052.986,00**	-	**-**	-	**-**	**1.100.052.986,00**
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	**737.238.000,00**	-	**-**	-	**-**	**737.238.000,00**
01.09.05	Kecamatan Sungai Limau	**1.328.003.642,00**	-	**-**	-	**-**	**1.328.003.642,00**
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	**1.960.376.000,00**	-	**-**	-	**-**	**1.960.376.000,00**
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	**2.722.535.567,76**	-	**-**	-	**-**	**2.722.535.567,76**
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	**784.305.980,00**	-	**-**	-	**-**	**784.305.980,00**
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	**1.366.565.000,00**	-	**-**	-	**-**	**1.366.565.000,00**

Lampiran : 13 / 2 - 5

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2024				Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	19	24	33	34
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	**697.992.900,00**	-	**-**	-	**-**	**697.992.900,00**
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	**634.140.000,00**	-	**-**	-	**-**	**634.140.000,00**
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	**297.000.000,00**	-	**-**	-	**-**	**297.000.000,00**
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	**2.259.848.679,48**	-	**-**	-	**-**	**2.259.848.679,48**
01.09.14	Kecamatan Patamuan	**787.339.363,00**	-	**-**	-	**-**	**787.339.363,00**
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	**540.192.000,00**	-	**-**	-	**-**	**540.192.000,00**
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	**870.852.181,00**	-	**-**	-	**-**	**870.852.181,00**
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	**662.397.130,00**	-	**-**	-	**-**	**662.397.130,00**
	Sub Jumlah	**157.438.425.844,21**	-	**914.306.060,00**	-	**313.272.480,00**	**158.039.459.424,21**
02	**Bidang Pendidikan**					**-**	
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**597.136.550.007,19**	2.934.644.857,00	**20.408.238.207,00**	390.065.620,00	**1.201.685.620,00**	**616.343.102.594,19**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
03	**Bidang Kesehatan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
03.01	Dinas Kesehatan	**103.900.385.459,11**	4.572.930.064,00	**21.217.378.405,00**	189.510.737,00	**189.510.737,00**	**124.928.253.127,11**
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	**87.903.985.405,39**	-	**4.981.893.300,00**	-	**-**	**92.885.878.705,39**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
04	**Bidang Pekerjaan Umum**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**17.339.753.137,60**	-	**823.991.500,00**	388.868.500,00	**624.185.500,00**	**17.539.559.137,60**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
05	**Bidang Perencanaan Pembangunan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	**10.205.138.715,06**	-	**-**	-	**-**	**10.205.138.715,06**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**

Lampiran : 13 / 3 - 5

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2024				Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	19	24	33	34
06	**Bidang Perhubungan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
06.01	Dinas Perhubungan	**9.235.123.443,80**	-	**-**	-	**-**	**9.235.123.443,80**
	Dinas Komunikasi dan Informatika		-	**-**	-	**-**	
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
07	**Bidang Lingkungan Hidup**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**24.857.422.678,00**	-	**-**	-	**-**	**24.857.422.678,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
08	**Bidang Kependudukan dan Capil**		-	**-**	-	**-**	
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	**488.343.425,00**	-	**313.272.480,00**	-	**-**	**801.615.905,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
09	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**65.000.000,00**	-	**-**	-	**-**	**65.000.000,00**
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**5.181.090.576,82**	-	**2.532.500.100,00**	-	**-**	**7.713.590.676,82**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
10	**Bidang Sosial**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**912.089.524,00**	-	**-**	-	**-**	**912.089.524,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
11	**Bidang Koperasi dan UKM**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	**1.232.364.200,00**	-	**-**	30.006.000,00	**30.006.000,00**	**1.202.358.200,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**

Lampiran : 13 / 4 - 5

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2024				Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	19	24	33	34
12	**Bidang Penanaman Modal**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	**40.878.550.266,44**	-	**-**	-	**-**	**40.878.550.266,44**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
13	**Bidang Kebudayaan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
14	**Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	**25.889.129.604,20**	-	**-**	-	**-**	**25.889.129.604,20**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
15	**Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri**		-	**-**	-	**-**	
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	**755.076.617,00**	-	**-**	-	**-**	**755.076.617,00**
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**3.695.687.250,00**	-	**1.925.447.257,05**	-	**-**	**5.621.134.507,05**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
16	**Bidang Pemberdayaan Masy. Desa**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
17	**Bidang Perpustakaan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	**1.575.544.240,00**	-	**-**	-	**-**	**1.575.544.240,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
18	**Bidang Pertanian**		-	**-**	-	**-**	
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**13.294.198.795,00**	-	**-**	-	**-**	**13.294.198.795,00**
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	**3.073.332.010,00**	-	**-**	-	**678.989.060,00**	**2.394.342.950,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**

Lampiran : 13 / 5 - 5

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2024				Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	19	24	33	34
19	**Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
20	**Bidang Kelautan dan Perikanan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
20.01	Dinas Perikanan	**6.908.498.828,99**	-	**147.513.000,00**	-	**-**	**7.056.011.828,99**
		-					**-**
	TOTAL	**1.111.965.690.027,81**	7.507.574.921,00	**53.264.540.309,05**	998.450.857,00	**3.037.649.397,00**	**1.162.192.580.939,86**

Lampiran : 14 / 1 - 4

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ASET TETAP - JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2025

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025				Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	17	22	33	34
01	**Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**						
01.01	Kantor DPRD	-		-		-	-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	-		-		-	-
01.03	Sekretariat Daerah	**865.748.050,00**		**14.850.000,00**	-	-	**880.598.050,00**
01.04	Sekretariat DPRD	**138.827.450,00**		-	-	-	**138.827.450,00**
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	**134.441.200,00**		-	-	-	**134.441.200,00**
01.06	Inspektorat Kabupaten	**80.257.000,00**		-	-	-	**80.257.000,00**
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**41.015.000,00**		-	-	-	**41.015.000,00**
		-		-	-	-	-
01.09	**Kecamatan**	-		-	-	-	-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	**40.874.310,00**		-	-	-	**40.874.310,00**
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	**6.988.000,00**		-	-	-	**6.988.000,00**
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	**6.933.000,00**		-	-	-	**6.933.000,00**
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	**6.971.500,00**		-	-	-	**6.971.500,00**
01.09.05	Kecamatan Sei.Limau	**6.988.000,00**		-	-	-	**6.988.000,00**
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	**7.000.000,00**		-	-	-	**7.000.000,00**
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	**6.890.500,00**		-	-	-	**6.890.500,00**
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	**13.730.500,00**		-	-	-	**13.730.500,00**
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	**6.988.000,00**		-	-	-	**6.988.000,00**
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	**6.992.000,00**		-	-	-	**6.992.000,00**
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	**10.471.500,00**		-	-	-	**10.471.500,00**
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	**9.842.000,00**		-	-	-	**9.842.000,00**
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	**6.930.000,00**		-	-	-	**6.930.000,00**

Lampiran : 14 / 2 - 4

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025				Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	17	22	33	34
01.09.14	Kecamatan Patamuan	**7.000.000,00**		**-**	-	**-**	**7.000.000,00**
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	**7.000.000,00**		**-**	-	**-**	**7.000.000,00**
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	**6.988.000,00**		**-**	-	**-**	**6.988.000,00**
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	**6.890.500,00**		**-**	-	**-**	**6.890.500,00**
	Sub Jumlah	**1.425.766.510,00**		**14.850.000,00**	-	**-**	**1.440.616.510,00**
				-			
02	**Bidang Pendidikan**			**-**		**-**	
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**1.024.516.660,00**	27.807.000,00	**384.952.523,00**	-	**-**	**1.409.469.183,00**
		-		**-**	-	**-**	**-**
03	**Bidang Kesehatan**	**-**		**-**	-	**-**	**-**
03.01	Dinas Kesehatan	**617.160.789,00**		**729.430.022,00**	-	**-**	**1.346.590.811,00**
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	**3.544.362.626,00**		**1.181.579.280,00**	-	**-**	**4.725.941.906,00**
		-		**-**	-	**-**	**-**
04	**Bidang Pekerjaan Umum**	**-**		**-**	-	**-**	**-**
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**2.638.927.092.998,81**	1.433.415.793,00	**30.289.452.392,00**	1.415.867.024,00	**1.415.867.024,00**	**2.667.800.678.366,81**
		-		**-**	-	**-**	**-**
05	**Bidang Perencanaan Pembangunan**	**-**		**-**	-	**-**	**-**
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	**-**		**-**	-	**-**	**-**
		-		**-**	-	**-**	**-**
06	**Bidang Perhubungan**	**-**		**-**	-	**-**	**-**
06.01	Dinas Perhubungan	**7.453.498.326,00**		**158.575.188,00**	2.142.000,00	**2.142.000,00**	**7.609.931.514,00**
06.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	**-**				**-**	**-**
		-		**-**	-	**-**	**-**
07	**Bidang Lingkungan Hidup**	**-**		**-**	-	**-**	**-**
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**133.946.000,00**		**-**	-	**-**	**133.946.000,00**
		-		**-**	-	**-**	**-**
08	**Bidang Kependudukan dan Capil**			**-**	-	**-**	
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	**118.061.808,00**		**-**	-	**-**	**118.061.808,00**
		-		**-**	-	**-**	**-**

Lampiran : 14 / 3 - 4

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025				Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	17	22	33	34
09	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	-		-	-	-	-
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-		-	-	-	-
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**25.000.000,00**		-	-	-	**25.000.000,00**
		-		-	-	-	-
10	**Bidang Sosial**	-		-	-	-	-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**139.975.000,00**		-	-	-	**139.975.000,00**
		-		-	-	-	-
11	**Bidang Koperasi dan UKM**	-		-	-	-	-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	**55.106.900,00**		-	-	-	**55.106.900,00**
		-		-	-	-	-
12	**Bidang Penanaman Modal**	-		-	-	-	-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	**1.744.474.500,00**		-	-	-	**1.744.474.500,00**
		-		-	-	-	-
13	**Bidang Kebudayaan**	-		-	-	-	-
		-		-	-	-	-
14	**Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**	-		-	-	-	-
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	**25.000.000,00**		-	-	-	**25.000.000,00**
		-		-	-	-	-
15	**Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri**			-	-	-	
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	**177.447.000,00**		-	-	-	**177.447.000,00**
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	**8.550.000,00**		-	-	-	**8.550.000,00**
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**17.567.897.954,00**		**149.999.000,00**	149.999.000,00	**17.689.156.954,00**	**28.740.000,00**
		-		-	-	-	-
16	**Bidang Pemberdayaan Masy. Desa**	-		-	-	-	-
		-		-	-	-	-
17	**Bidang Perpustakaan**	-		-	-	-	-
17.01	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	**10.265.000,00**		-	-	-	**10.265.000,00**
		-		-	-	-	-

Lampiran : 14 / 4 - 4

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025				Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	17	22	33	34
18	**Bidang Pertanian**			**-**	-	**-**	
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**29.587.840,00**		**-**	-	**-**	**29.587.840,00**
18.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	**52.850.000,00**		**-**	-	**14.850.000,00**	**38.000.000,00**
		-		**-**	-	**-**	**-**
19	**Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**	**-**		**-**	-	**-**	**-**
		-		**-**	-	**-**	**-**
20	**Bidang Kelautan dan Perikanan**	**-**		**-**	-	**-**	**-**
20.01	Dinas Perikanan	**8.655.493.024,24**		**3.000.000,00**	-	**-**	**8.658.493.024,24**
	TOTAL	**2.681.736.052.936,05**	1.461.222.793,00	**32.911.838.405,00**	1.568.008.024,00	**19.122.015.978,00**	**2.695.525.875.363,05**

Lampiran : 15 / 1 - 5

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025				Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Total Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	7	11	16	24	25
01	**Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**						
01.01	Kantor DPRD	-		-		-	-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	-		-		-	-
01.03	Sekretariat Daerah	**109.298.300,00**	-	**29.836.800,00**	-	-	**139.135.100,00**
01.04	Sekretariat DPRD	**239.960.000,00**	-	-	-	-	**239.960.000,00**
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-
01.06	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-	-	-
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
01.09	**Kecamatan**	-	-	-	-	-	-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	-	-	-	-	-	-
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	-	-	-	-	-	-
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	-	-	-	-	-	-
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	-	-	-	-	-	-
01.09.05	Kecamatan Sei.Limau	-	-	-	-	-	-
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	-	-	-	-	-	-
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	-	-	-	-	-	-
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	-	-	-	-	-	-

Lampiran : 15 / 2 - 5

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025				Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Total Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	7	11	16	24	25
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	-	-	-	-	-	-
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	-	-	-	-	-	-
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	-	-	-	-	-	-
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	-	-	-	-	-	-
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	-	-	-	-	-	-
01.09.14	Kecamatan Patamuan	-	-	-	-	-	-
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	-	-	-	-	-
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	**7.000.000,00**	-	-	-	-	**7.000.000,00**
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	**356.258.300,00**	-	**29.836.800,00**	-	-	**386.095.100,00**
						-	
02	**Bidang Pendidikan**					-	
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**92.837.663.617,79**	6.735.257.120,00	**6.735.257.120,00**	-	-	**99.572.920.737,79**
			-	-	-	-	
03	**Bidang Kesehatan**	-	-	-	-	-	-
03.01	Dinas Kesehatan	**13.869.505,00**	-	-	-	-	**13.869.505,00**
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	**50.454.300,00**	-	-	-	-	**50.454.300,00**
		-	-	-	-	-	-
04	**Bidang Pekerjaan Umum**	-	-	-	-	-	-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**49.550.000,00**	-	-	-	-	**49.550.000,00**
		-	-	-	-	-	-
05	**Bidang Perencanaan Pembangunan**	-	-	-	-	-	-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	**49.269.000,00**	-	**15.500.000,00**	15.500.000,00	**15.500.000,00**	**49.269.000,00**

Lampiran : 15 / 3 - 5

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025				Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Total Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	**(Rp)**	(Rp)	**(Rp)**	**(Rp)**
1	2	3	7	11	16	24	25
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
06	**Bidang Perhubungan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
06.01	Dinas Perhubungan	**193.861.200,00**	-	**-**	-	**-**	**193.861.200,00**
06.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
07	**Bidang Lingkungan Hidup**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**678.469.998,00**	-	**-**		**-**	**678.469.998,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
08	**Bidang Kependudukan dan Capil**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
09	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		-	**-**	-	**-**	
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
10	**Bidang Sosial**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
11	**Bidang Koperasi dan UKM**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	**747.811.761,56**	-	**18.870.000,00**	18.870.000,00	**18.870.000,00**	**747.811.761,56**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**

Lampiran : 15 / 4 - 5

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025				Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Total Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	7	11	16	24	25
12	**Bidang Penanaman Modal**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	**49.275.000,00**	-	**-**	-	**-**	**49.275.000,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
13	**Bidang Kebudayaan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
14	**Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	**218.522.500,00**	-	**-**	-	**-**	**218.522.500,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
15	**Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
16	**Bidang Pemberdayaan Masy. Desa**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
17	**Bidang Perpustakaan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	**855.178.839,00**	-	**-**	-	**-**	**855.178.839,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
18	**Bidang Pertanian**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**20.222.000,00**	-	**-**	-	**-**	**20.222.000,00**
18.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	**11.150.000,00**	-	**-**		**-**	**11.150.000,00**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**

Lampiran : 15 / 5 - 5

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025				Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
			Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Reklase Keluar	Total Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	7	11	16	24	25
19	**Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
		-	-	**-**	-	**-**	**-**
20	**Bidang Kelautan dan Perikanan**	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**
20.01	Dinas Perikanan	**114.237.583,00**	-	**20.000.000,00**	-	**-**	**134.237.583,00**
	TOTAL	**96.245.793.604,35**	**6.735.257.120,00**	**6.819.463.920,00**	**34.370.000,00**	**34.370.000,00**	**103.030.887.524,35**

Lampiran : 16 / 1 - 7

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PER 31 DESEMBER 2025

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025		Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
			Total Mutasi Tambah	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	13	**14**
01	**Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**				
01.01	Kantor DPRD	-	-	-	**-**
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	-	-	-	**-**
01.03	Sekretariat Daerah	-	-	-	**-**
01.04	Sekretariat DPRD	-	-	-	**-**
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	-	-	-	**-**
01.06	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	**-**
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	**-**
		-			**-**
01.09	**Kecamatan**	-			**-**
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	-	-	-	**-**
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	-	-	-	**-**
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	-	-	-	**-**
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	-	-	-	**-**
01.09.05	Kecamatan Sei.Limau	-	-	-	**-**
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	-	-	-	**-**
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	-	-	-	**-**
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	-	-	-	**-**
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	-	-	-	**-**
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	-	-	-	**-**
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	-	-	-	**-**
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	-	-	-	**-**
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	-	-	-	**-**

Lampiran : 16 / 2 - 7

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025		Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
			Total Mutasi Tambah	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	13	**14**
01.09.14	Kecamatan Patamuan	-	-	-	**-**
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	-	-	**-**
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	-	-	-	**-**
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	-	-	-	**-**
	Sub Jumlah	-	-	-	**-**
02	**Bidang Pendidikan**				
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.191.087.350,00	23.854.000,00	1.191.087.350,00	**23.854.000,00**
				-	
03	**Bidang Kesehatan**			-	
03.01	Dinas Kesehatan	**59.200.000,00**	**670.785.980,00**	-	**729.985.980,00**
	Gedung dan Bangunan	**59.200.000,00**	**-**	-	**729.985.980,00**
	Perencanaan Penambahan Ruang Puskesmas Koto Bangko	59.200.000,00	-	-	**59.200.000,00**
	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit tipe Sungai Limau 2025		481.275.243,00	-	**481.275.243,00**
	Pembangunan Labor Puskesmas Sungai Geringging (2025)		189.510.737,00	-	**189.510.737,00**
			-		**-**
03.02	**Rumah Sakit Umum Daerah**	**122.040.940,00**	-	**-**	**122.040.940,00**
	DED Turap RSUD	42.239.900,00	-	-	**42.239.900,00**
	Perencanaan Penahan Tebing Bangunan RS	79.801.040,00	-		**79.801.040,00**
			-		
04	**Bidang Pekerjaan Umum**		-		
04.01	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**63.032.082.821,00**	1.244.265.000,00	**-**	**64.426.097.821,00**
	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	**27.415.713.021,00**	1.244.265.000,00	**-**	**28.659.978.021,00**
	- Jalan	**21.013.076.457,00**	348.596.000,00	**-**	**21.361.672.457,00**
	Perencanaan Pembangunan Jalan Wilayah I Kab. Padang Pariaman	**99.597.000,00**	-		**99.597.000,00**
	Peningkatan Jalan Ke Tarok City (Lanjutan) Kec. 2 X 11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman	**16.058.158.000,00**	-		**16.058.158.000,00**
	Review Perencanaan Jalan Tarok 2020	**29.678.000,00**	-	-	**29.678.000,00**
	DED Pemeliharaan Periodik Kab. Padang Pariaman	**79.753.600,00**	-		**79.753.600,00**
	Perencanaan pembangunan jalan Wilayah V	**63.240.000,00**	-	-	**63.240.000,00**

Lampiran : 16 / 3 - 7

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025		Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
			Total Mutasi Tambah	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	13	14
	DED Jalan DAK Tahun 2020 Paket I	**99.385.000,00**	-	-	**99.385.000,00**
	DED Jalan DAK Tahun 2020 Paket II	**79.596.000,00**	-	-	**79.596.000,00**
	DED Jembatan DAK Tahun 2020 Paket I	**49.698.000,00**	-	-	**49.698.000,00**
	Perencanaan pembangunan jalan Wilayah II dan III	**84.535.050,00**	-	-	**84.535.050,00**
	DED Upper Pass Jalan Tarok Kec.2x11 Kayu Tanam	**84.766.250,00**	-	-	**84.766.250,00**
	Pembangunana Upper Pass Jalan Menuju kawasan Pendidikan Tarok Kec.2x11 Kayu Tanam	**2.196.681.000,00**	-		**2.196.681.000,00**
	Review DED Upper Pass 2020	**29.733.000,00**	-		**29.733.000,00**
	DED Kawasan Tarok Kec.2x11 Kayu Tanam	**273.892.000,00**	-	-	**273.892.000,00**
	Perencanaan Peningkatan / Pembangunan Jalan Paket I Kab.Padang Pariaman	**58.158.100,00**	-	-	**58.158.100,00**
	Perencanaan Pengaman Jalan Padang Alai - Palak Tabu (Bencal) Kab.Padang Pariaman	**99.638.000,00**	-	-	**99.638.000,00**
	Perencanaan Peningkatan Jalan Pasa Dama - Rimbo Kalam Kab.Padang Pariaman	**74.684.000,00**	-	-	**74.684.000,00**
	Paket I DAU Hotmix	**1.321.884.457,00**	-	-	**1.321.884.457,00**
	Perencanaan DAK Tahun 2025 Paket I	**99.786.000,00**	-	-	**99.786.000,00**
	Perencanaan DAK Tahun 2025 Paket II	**30.353.000,00**	-	-	**30.353.000,00**
	Perencanaan DAK Tahun 2025 Paket III	**99.860.000,00**	-	-	**99.860.000,00**
	Survei Kondisi Jalan Paket I (DAU) 2025		74.838.000,00	-	**74.838.000,00**
	Survei Kondisi Jalan Paket 2 (DAU) 2025		74.888.000,00	-	**74.888.000,00**
	Konsultan Perencanaan Jalan Paket 2 (DAU) 2025		99.535.000,00	-	**99.535.000,00**
	Konsultan Prc Jalan Paket 1 (DAU MURNI) Kab. Pdg Pariaman 2025		99.335.000,00	-	**99.335.000,00**
			-		
			-		
	- Jembatan	**4.614.712.800,00**	498.302.000,00	**-**	**5.113.014.800,00**
	Pembangunan Jembatan Kampung Tarandam Malai 2 Kecamatan Batang Gasan	**199.783.000,00**	-	-	**199.783.000,00**
	Pembangunan Jembatan Lenggogeni Kec. Nan Sabaris	**959.283.000,00**	-	-	**959.283.000,00**
	Pembangunan Jembatan Anduring Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	**957.008.000,00**	-	-	**957.008.000,00**
	DED Pembangunan Jembatan Pasir Baru (Batang Naras) Kec. Sungai Limau	**97.372.000,00**	-	-	**97.372.000,00**

Lampiran : 16 / 4 - 7

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025		Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
			Total Mutasi Tambah	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	13	**14**
	DED Pembangunan Jembatan Salisikan Kec. Batang Anai	**99.940.000,00**	-	-	**99.940.000,00**
	Pembangunan Jembatan Sungai Talang (Lanjutan) Kab.Padang Pariaman	**337.213.200,00**	-		**337.213.200,00**
	DED Pambangunan dan Rehabilitasi Jembatan II Lokasi Kab. Padang Pariaman	**99.400.000,00**	-		**99.400.000,00**
	Jembatan Sungai Talang Kec. Sungai Limau	**950.780.000,00**	-	-	**950.780.000,00**
	DED Jembatan Tarok Kec.2x11 Kayu Tanam	**49.800.000,00**	-	-	**49.800.000,00**
	Jembatan Parik Nagari Tapakis	**78.457.000,00**	-	-	**78.457.000,00**
	Jembatan Jalan Kapau Indah Korong Pasar Sei Geringging Nagari Malai III Koto Kec.Sei Geringging	**212.527.600,00**	-	-	**212.527.600,00**
	Perencanaan Pengaman Abutmen Jembatan Campago (Bencal) Kab.Padang Pariaman	**49.714.000,00**	-		**49.714.000,00**
	Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket 3 Kab.Padang Pariaman	**99.687.000,00**	-		**99.687.000,00**
	Perencanaan DAK Jalan dan Jembatan 2021 Kab.Padang Pariaman	**191.670.000,00**	-		**191.670.000,00**
	Perencanaan Pembangunan Jembatan Lubuk Napa	**232.078.000,00**	-		**232.078.000,00**
	Konsultan Prncanaan Pemb Jmbtan Pket 2 Tahun 2025	-	99.700.000,00		**99.700.000,00**
	Konsultan Prncanaan Rehab Jmbtan Pket 2 (Fisik BPBD) Tahun 2025		99.597.000,00		**99.597.000,00**
	Konsultan Prncanaan Rehab Jmbtan Pket 2 Tahun 2025		99.659.000,00		**99.659.000,00**
	Konsultan Prc Pembangunan Jembatan Paket 4 (Fisik BPBD) Tahun 2025		99.676.000,00		**99.676.000,00**
	Konsultan Prc Pemb Jmbtn Pkt 3 Tahun 2025		99.670.000,00		**99.670.000,00**
	- Irigasi	**1.071.930.064,00**	397.367.000,00	**-**	**1.469.297.064,00**
	DED Embung Sungai Abu	**42.330.000,00**	-	-	**42.330.000,00**
	DED Chek Dam Pulau Air	**42.330.000,00**	-	-	**42.330.000,00**
	Perencanaan Irigasi Type XVIII	**99.880.000,00**	-		**99.880.000,00**
	Perencanaan DAK Irigasi	**99.238.964,00**	-		**99.238.964,00**
	Perencanaan Irigasi	**418.730.700,00**	-		**418.730.700,00**
	e-Paksi (DAK)	**89.247.100,00**	-		**89.247.100,00**
	Perencanaan DAK Paket I	**93.358.800,00**	-		**93.358.800,00**

Lampiran : 16 / 5 - 7

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025		Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
			Total Mutasi Tambah	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	13	**14**
	Perencanaan DAK Paket II	**93.289.200,00**	-		**93.289.200,00**
	Perencanaan DAK Paket III	**93.525.300,00**	-		**93.525.300,00**
	Pelaksanaan Keg E-Paksi (DAU MURNI) 2025		99.128.000,00		**99.128.000,00**
	Perencanaan Program Bencana Alam 2025		99.519.000,00		**99.519.000,00**
	Pelaksanaan Keg E-Paksi (DAU MURNI) Tahun 2025		99.200.000,00		**99.200.000,00**
	Perencanaan Keg DAK 2026		99.520.000,00		**99.520.000,00**
			-		
	- Air Bersih	**234.425.500,00**	**-**	**-**	**234.425.500,00**
	Konstruksi Air Bersih Kantor Bupati	**185.382.000,00**	-	-	**185.382.000,00**
	DED Air Bersih SPAM PPI Ulakan dan Pasir Baru	**49.043.500,00**	-	-	**49.043.500,00**
			-		
	- Drainase	**109.427.200,00**	-		**109.427.200,00**
	DED Drainase Kab. Padang Pariaman	**59.727.200,00**	-		**59.727.200,00**
	Perencanaan Jaringan Perpipaan DDUB Kab. Padang Pariaman 2020	**49.700.000,00**	-		**49.700.000,00**
			-		
	- Jaringan	**372.141.000,00**	-	-	**372.141.000,00**
	Instalasi Jaringan Listrik Kantor Bupati	**372.141.000,00**	-	-	**372.141.000,00**
			-		
	Gedung dan Bangunan	**35.616.369.800,00**	-	**-**	**35.766.119.800,00**
	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Mesjid Raya Padang Pariaman	**39.767.200,00**	-		**39.767.200,00**
	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Kantor DPRD Padang Pariaman	**59.642.400,00**	-		**59.642.400,00**
	Perencanaan Rehabilitasi Kantor Bupati Padang	**39.663.200,00**	-		**39.663.200,00**
	Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran IKK Kec. Enam Lingkung	**288.494.000,00**	-		**288.494.000,00**
	DED Bangunan Gerbang IKK	**69.452.000,00**	-	-	**69.452.000,00**
	Bangunan Kantor DPRD	**34.644.319.000,00**	**149.750.000,00**	-	**34.794.069.000,00**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran IKK Parit Malintang Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman	**-**	-	-	**-**
	DED Bangunan Kantor Dinas LH	**121.786.000,00**	-	-	**121.786.000,00**
	DED Bangunan Kantor Disduk Capil	**107.894.000,00**	-	-	**107.894.000,00**

Lampiran : 16 / 6 - 7

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025		Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
			Total Mutasi Tambah	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	13	14
	DED Bangunan Kantor BP3KKP	**123.664.000,00**	-	-	**123.664.000,00**
	DED Bangunan Kantor BPMP2P	**121.688.000,00**	-	-	**121.688.000,00**
			-		
05	**Bidang Perencanaan Pembangunan**	-	-	-	**-**
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	**-**
		-	-	-	**-**
06	**Bidang Perhubungan**	-	-	-	**-**
06.01	Dinas Perhubungan	**59.066.925,00**	-	-	**59.066.925,00**
			-	-	
07	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	-	-	-	**-**
			-	-	
07	**Bidang Lingkungan Hidup**	-	-	-	**-**
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	**-**
		-	-	-	**-**
08	**Bidang Kependudukan dan Capil**	**-**	-	-	**-**
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	-	-	-	**-**
		-	-	-	**-**
09	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	-	-	-	**-**
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	**-**
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	**-**
		-	-	-	**-**
10	**Bidang Sosial**	**-**	-	-	**-**
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	**-**
		-	-	-	**-**
11	**Bidang Koperasi dan UKM**	-	-	-	**-**
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	-	-	-	**-**
		-	-	-	**-**

Lampiran : 16 / 7 - 7

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025		Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
			Total Mutasi Tambah	Nilai Mutasi Kurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	9	13	**14**
12	**Bidang Penanaman Modal**	**661.920.379,00**	-	-	**-**
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	**661.920.379,00**	-	661.920.379,00	**-**
	Uang Muka Pengadaan Mesin Processing	**661.920.379,00**	-	661.920.379,00	**-**
		-	-	-	**-**
13	**Bidang Kebudayaan**	**-**	-	-	**-**
		-	-	-	**-**
14	**Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**	**-**	-	-	**-**
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	**43.851.200,00**	-	-	**43.851.200,00**
		-	-	-	**-**
15	**Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri**	**-**	-	-	**-**
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	**-**	-	-	**-**
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	**-**	-	-	**-**
15,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**210.558.253,00**	149.999.000,00	-	**360.557.253,00**
16	**Bidang Pemberdayaan Masy. Desa**	**-**	-	-	**-**
		-	-	-	**-**
17	**Bidang Perpustakaan**	**-**	-	-	**-**
17.01	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	**-**	-	-	**-**
		-	-	-	**-**
18	**Bidang Pertanian**	**-**	-	-	**-**
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**-**	-	-	**-**
18.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	**-**	-	-	**-**
		-	-	-	**-**
19	**Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**	**-**	-	-	**-**
		-	-	-	**-**
20	**Bidang Kelautan dan Perikanan**	**-**	-	-	**-**
20.01	Dinas Perikanan	**-**	-	-	**-**
			-		
	TOTAL	**65.379.807.868,00**	**2.088.903.980,00**	**1.853.007.729,00**	**65.765.454.119,00**

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

per 31 Desember 2025

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten/Kota : Kabupaten Padang Pariaman

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan				Penyusutan Tahun Ini	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025	Nilai Buku
			Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2025			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
01	**Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
01.01	Kantor DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	Sekretariat Daerah	150.145.196.226,70	70.367.881.568,71	702.932.468,02	598.357.595,00	70.472.456.441,73	7.299.399.360,00	77.771.855.801,73	72.373.340.424,97
01.04	Sekretariat DPRD	14.958.394.147,23	10.156.761.348,23	-	-	10.156.761.348,23	556.719.834,00	10.713.481.182,23	4.244.912.965,00
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	14.583.811.163,00	8.623.686.425,00	-	16.371.667,00	8.607.314.758,00	718.083.417,00	9.325.398.175,00	5.258.412.988,00
01.06	Inspektorat Kabupaten	7.905.326.152,00	3.766.501.639,00	-	313.272.480,00	3.453.229.159,00	388.421.940,00	3.841.651.099,00	4.063.675.053,00
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.936.756.316,00	1.667.420.525,00	-	-	1.667.420.525,00	100.374.682,00	1.767.795.207,00	168.961.109,00
		-		-	-	-		-	-
01.09	**Kecamatan**	-		-	-	-		-	-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	1.322.224.549,00	917.254.949,00	-	-	917.254.949,00	45.411.349,00	962.666.298,00	359.558.251,00
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	1.658.874.243,00	1.151.569.119,00	-	-	1.151.569.119,00	57.251.990,00	1.208.821.109,00	450.053.134,00
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	1.621.554.564,00	1.132.651.993,00	-	-	1.132.651.993,00	60.135.428,00	1.192.787.421,00	428.767.143,00
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	1.208.373.691,00	1.157.964.523,00	-	-	1.157.964.523,00	10.291.170,00	1.168.255.693,00	40.117.998,00
01.09.05	Kecamatan Sungai Limau	1.960.622.100,00	1.230.160.084,00	-	-	1.230.160.084,00	63.189.502,00	1.293.349.586,00	667.272.514,00
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	2.469.361.558,00	1.431.674.368,00	-	-	1.431.674.368,00	107.483.513,00	1.539.157.881,00	930.203.677,00
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	3.237.827.498,76	1.483.705.859,00	-	-	1.483.705.859,00	139.038.178,00	1.622.744.037,00	1.615.083.461,76
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	1.246.092.247,00	970.887.642,00	-	12.225.400,00	958.662.242,00	37.487.488,00	996.149.730,00	249.942.517,00
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	1.875.759.952,00	1.584.607.587,00	-	-	1.584.607.587,00	33.934.703,00	1.618.542.290,00	257.217.662,00
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	1.265.156.129,00	1.225.734.509,00	-	-	1.225.734.509,00	10.450.419,00	1.236.184.928,00	28.971.201,00
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	1.196.691.527,00	936.596.879,00	-	-	936.596.879,00	35.507.058,00	972.103.937,00	224.587.590,00
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	739.668.651,00	739.567.818,00	-	-	739.567.818,00	100.833,00	739.668.651,00	-
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	2.797.546.731,48	1.419.752.729,00	-	-	1.419.752.729,00	115.654.732,00	1.535.407.461,00	1.262.139.270,48
01.09.14	Kecamatan Patamuan	1.414.250.371,00	1.033.022.603,00	8.500.000,00	1.300.000,00	1.040.222.603,00	53.327.101,00	1.093.549.704,00	320.700.667,00
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	934.016.106,00	844.824.844,00	-	-	844.824.844,00	29.978.300,00	874.803.144,00	59.212.962,00
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	1.437.577.288,00	1.008.338.465,00	-	-	1.008.338.465,00	39.517.423,00	1.047.855.888,00	389.721.400,00
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	1.272.042.223,00	1.229.383.098,00	-	-	1.229.383.098,00	11.175.464,00	1.240.558.562,00	31.483.661,00
	Sub Jumlah	217.187.123.434,17	114.079.948.574,94	711.432.468,02	941.527.142,00	113.849.853.900,96	9.912.933.884,00	123.762.787.784,96	93.424.335.649,21
02	**Bidang Pendidikan**								
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	761.945.971.821,00	495.237.425.371,28	1.763.270.781,00	41.273.028,00	496.959.423.124,28	40.292.490.629,32	537.251.913.753,60	224.694.058.067,40
				-	-	-	-	-	-
03	**Bidang Kesehatan**			-	-	-	-	-	-
03.01	Dinas Kesehatan	227.576.718.647,15	121.018.722.883,19	2.339.979.613,00	214.608.372,15	123.144.094.124,04	18.736.866.865,28	141.880.960.989,32	85.695.757.657,83
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	203.685.500.139,14	117.471.979.224,75	283.689.456,00	-	117.755.668.680,75	13.187.305.650,00	130.942.974.330,75	72.742.525.808,39
				-	-	-		-	-
04	**Bidang Pekerjaan Umum**			-	-	-		-	-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.702.601.188.125,51	2.534.002.321.375,91	877.694.198,00	-	2.534.880.015.573,91	59.291.815.770,00	2.594.171.831.343,91	108.429.356.781,60
				-	-	-		-	-

Lampiran : 17 / 2 - 2

05	**Bidang Perencanaan Pembangunan**			-	-	-		-	-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.726.210.959,06	5.086.206.412,00	-	-	5.086.206.412,00	703.318.009,00	5.789.524.421,00	6.936.686.538,06
				-	-	-		-	-
06	**Bidang Perhubungan**			-	-	-		-	-
06.01	Dinas Perhubungan	27.070.599.617,80	22.574.794.302,00	133.992.334,00	310.913.466,00	22.397.873.170,00	1.011.623.237,00	23.409.496.407,00	3.661.103.210,80
	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.124.238.210,60	3.206.471.523,60	-	-	3.206.471.523,60	302.948.182,00	3.509.419.705,60	614.818.505,00
				-	-	-		-	-
07	**Bidang Lingkungan Hidup**			-	-	-		-	-
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	33.674.692.321,00	9.543.644.935,00	-	74.091,00	9.543.570.844,00	2.035.798.281,00	11.579.369.125,00	22.095.323.196,00
				-	-	-		-	-
08	**Bidang Kependudukan dan Capil**			-	-	-		-	-
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	4.444.553.390,00	3.557.600.378,00	313.272.480,00	-	3.870.872.858,00	161.827.075,00	4.032.699.933,00	411.853.457,00
				-	-	-		-	-
09	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			-	-	-		-	-
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.132.003.815,00	893.339.139,00	-	-	893.339.139,00	72.452.910,00	965.792.049,00	166.211.766,00
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.936.782.861,82	10.296.879.125,00	-	-	10.296.879.125,00	485.889.907,00	10.782.769.032,00	6.154.013.829,82
				-	-	-		-	-
10	**Bidang Sosial**			-	-	-		-	-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.385.034.953,00	2.752.257.137,00	3.025.000,00	-	2.755.282.137,00	164.995.745,00	2.920.277.882,00	464.757.071,00
				-	-	-		-	-
11	**Bidang Koperasi dan UKM**			-	-	-		-	-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	5.952.783.456,23	4.805.585.398,23	-	30.006.000,00	4.775.579.398,23	149.856.863,00	4.925.436.261,23	1.027.347.195,00
				-	-	-		-	-
12	**Bidang Penanaman Modal**			-	-	-		-	-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	48.401.367.111,44	14.801.959.020,00	118.195.000,00	24.658.000,00	14.895.496.020,00	2.889.323.976,00	17.784.819.996,00	30.616.547.115,44
				-	-	-		-	-
13	**Bidang Kebudayaan**			-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
14	**Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**			-	-	-		-	-
14,01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	28.937.825.693,20	7.435.699.480,00	220.614.333,00	3.481.667,00	7.652.832.146,00	1.480.517.126,00	9.133.349.272,00	19.804.476.421,20
				-	-	-		-	-
15	**Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri**			-	-	-		-	-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	561.807.359,00	559.307.359,00	-	-	559.307.359,00	2.500.000,00	561.807.359,00	-
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	12.401.962.242,00	9.160.351.693,00	-	133.000.000,00	9.027.351.693,00	622.457.960,00	9.649.809.653,00	2.752.152.589,00
15,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.309.314.104,05	11.183.634.099,00	7.709.000,00	876.957.898,00	10.314.385.201,00	401.719.340,00	10.716.104.541,00	4.593.209.563,05
				-	-	-		-	-
16	**Bidang Pemberdayaan Masy. Desa**			-	-	-		-	-
				-	-			-	-
17	**Bidang Perpustakaan**			-	-			-	-
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.654.166.395,00	3.865.090.870,00	287.743.262,00	-	4.152.834.132,00	305.569.433,00	4.458.403.565,00	1.195.762.830,00
				-	-	-		-	-
18	**Bidang Pertanian**			-	-			-	-
18,01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.178.356.967,36	13.761.038.783,36	-	-	13.761.038.783,36	798.151.079,00	14.559.189.862,36	5.619.167.105,00
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.107.948.963,64	4.777.910.579,66	-	699.376.710,02	4.078.533.869,64	188.741.049,00	4.267.274.918,64	840.674.045,00
				-	-			-	-
19	**Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**			-	-			-	-
				-	-			-	-
20	**Bidang Kelautan dan Perikanan**			-	-			-	-
20.01	Dinas Perikanan	19.927.814.698,17	16.091.482.522,18	-	-	16.091.482.522,18	440.057.113,00	16.531.539.635,18	3.396.275.062,99
	TOTAL	4.378.923.965.285,34	3.526.163.650.186,10	7.060.617.925,02	3.275.876.374,17	3.529.948.391.736,95	153.639.160.083,60	3.683.587.551.820,55	695.336.413.464,79

Lampiran : 18 / 1 - 2

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DAFTAR ASET TAK BERWUJUD PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Software Sistem Informasi Pokok Pendidikan Berbasis WEB (Tahun 2012 Rp77.635.000.00)	2012	77.635.000,00
		Software Sistem Informasi Pokok Pendidikan Berbasis WEB (Tahun 2013 Rp19.800.000.00)	2013	19.800.000,00
		Software Media Pendidikan SDN	2016	323.972.000,00
		Software E Waspada	2017	18.700.000,00
		Software Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2017	24.750.000,00
		Software Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SDN dan SMPN (Tahun 2018 adalah Rp. 19.800.000, Tahun 2019 Rp. 22.959.000, Tahun 2022 Rp. 35.000.000, Tahun 2023 Rp.35.000.000)	2018	112.759.000,00
		Software Website Disdikbud Padang Pariaman	2019	15.000.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				**592.616.000,00**
2.	Dinas Kesehatan	Software (Software Manajemen Pasien Puskesmas)	2012	522.500.000,00
		Software Padang Pariaman Sehat	2016	13.000.000,00
		Software Perencanaan dan Penganggaran E-Surenggarkes	2016	22.000.000,00
		Software E-Logistik Berbasis Barcode	2016	44.968.000,00
		Software Sistem Informasi Kepegawaian	2016	15.000.000,00
		Sofware Aplikasi Sistem Penunjang Kinerja Dinkes	2017	15.000.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Dinas Kesehatan				**632.468.000,00**
3.	RSUD	Software (SIRS)	2014	61.930.000,00
		Software SIRS Rawat Jalan	2015	42.460.000,00
		Software SIRS Administrasi	2016	35.750.000,00
		Software SIRS Laboratorium	2016	26.510.000,00
		Software SIRS Radiologi	2016	26.510.000,00
		Software SIRS Kasir	2016	27.610.000,00
		Software SIRS Keuangan	2016	35.750.000,00
		Software SIRS Kamar Operasi	2016	26.510.000,00
		Perencanaan Revieu Master Plan Rumah Sakit	2020	99.400.000,00
		Penyusunan UKL/ UPL	2020	49.500.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud RSUD				**431.930.000,00**
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Software Database Jalan	2016	547.750.000,00
		Kajian Dokumen Rispam Induk	2019	621.546.000,00
		Kajian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Ibukota Kabupaten	2022	976.467.000,00
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Perkotaan Lubuk Alung	2022	80.000.000,00
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Perkotaan Tiram	2022	80.000.000,00
		Kajian Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Perkotaan Lubuk Alung	2022	79.850.000,00
		Kajian Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Perkotaan Tiram	2022	79.850.000,00
		Kajian Strategi Sanitasi Kabupaten Padang Pariaman	2022	69.636.960,00
		Master Plan Drainase Kab. Padang Pariaman (Wilayah I)	2023	99.960.000,00
		Master Plan Drainase Kab. Padang Pariaman (Wilayah IV)	2023	99.950.000,00
		Master Plan Drainase Kab. Padang Pariaman (Wilayah III)	2023	99.958.000,00
		Master Plan Drainase Kab. Padang Pariaman (Wilayah V)	2023	99.955.000,00
		Master Plan Drainase Kab. Padang Pariaman (Wilayah II)	2023	99.949.000,00
		Master Plan Drainase Kab. Padang Pariaman (Wilayah VI)	2023	99.961.000,00
		Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bid Air	2023	69.875.000,00
		Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bid Air Limbah Paket II	2023	69.952.502,00
		Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bid Air Minum dan Air Limbah	2023	69.900.000,00
		Jasa Konsultan Pengawasan Perpipaan DDUB	2023	39.629.775,00
		Kajian Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Padang Pariaman	2024	49.700.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud DPUPR				**3.433.890.237,00**
6.	Badang Penanggulangan Bencana Daerah	Software Website Kebencanaan	2017	19.800.000,00
		Software Database RR	2019	54.574.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud BPBD				**74.374.000,00**
7.	Dinas Kependudukan dan Capil	Software (Anti Virus Simantek untuk Aplikasi Data SIAK/E-KTP)	2014	6.650.000,00
		Software (Aplikasi Akta Kelahiran Mobile)	2014	21.500.000,00
		Software Survey Kepuasan Pelanggan	2017	17.050.000,00
		Software Inventory Barang	2016	16.753.000,00
		Software Windows Server	2020	13.545.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Dinas Dukcapil				**75.498.000,00**
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Software Website PPID	2017	29.535.000,00
		Software Website Lumbung Data	2013	93.144.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Dinas Kominfo				**122.679.000,00**
9.	Dinas Perikanan	Software (Website DKP)	2014	9.975.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Dinas Perikanan				**9.975.000,00**
10	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Software (Software Map Info Professional V.11.5)	2012	37.031.500,00
		Software Aplikasi Online Kasir	2021	6.550.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Disdagnakerkop dan UKM				**43.581.500,00**

No	SKPD	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
11.	Sekretariat Daerah	Software Sistem Tata Naskah Surat Dinas (DAS)	2011	290.015.000,00
		Software (Aplikasi Analisa Jabatan dan Analisa beban Kerja)	2012	84.315.000,00
		Software (Aplikasi Sub Block Website Bagian Humas)	2013	10.000.000,00
		Software (Remestering Website Padang Pariaman-Bagian PDE)	2013	14.941.000,00
		Software (Aplikasi Pusat Data Bagian PDE)	2013	12.978.600,00
		Software (Aplikasi Pengaduan Masy berbasis SMS Gateway)	2014	44.220.000,00
		Software Website Evaluasi dan Monitoring (Bagian Pembangunan Fisik dan Prasarana)	2017	14.976.500,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Sekretariat Daerah				**471.446.100,00**
12.	Kantor Camat Enam Lingkung	Softwara (Website dan Aplikasi Buku Tamu)	2017	14.300.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Kantor Camat Enam Lingkung				**14.300.000,00**
13.	Bapelitbangda	Software (Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)	2017	49.940.000,00
		Software ArcGIS Desktop Basic	2017	36.296.127,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Bapelitbangda				**86.236.127,00**
14.	BPKD	Software (Aplikasi PBB) Update Aplikasi Tahun 2022 senilai Rp. 49.950.000,-	2013	306.600.000,00
		Software (SIG PBB)	2014	124.300.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud BPKD				**430.900.000,00**
15.	Badan Kepegawaian dan Pengem-bangan Sumber Daya Manusia	Software (Sofware Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG)). Tahun 2011 Rp49.500.000.00 dan Tahun 2015 Rp79.189.000.00	2011	128.689.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud BKPSDM				**128.689.000,00**
16	Dinas Perhubungan	Software Aplikasi BlueCard	2020	46.970.000,00
		Software Modul E-Pemeriksaan Uji	2020	44.000.000,00
		Software (Sistem Aplikasi Blue Card)	2020	27.500.000,00
		Software Aplikasi BLUe dan RFID	2022	27.750.000,00
	SIMPKB HYBRID full cycle		2025	53.113.500,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Dinas Perhubungan				**199.333.500,00**
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Software (Kaspersky Internet Security 3 PC 1 Tahun)	2020	5.870.000,00
		Software (Microsoft Home and Student 2019 MAC)	2020	2.010.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				**7.880.000,00**
Total Aset Tak Berwujud				**6.755.796.464,00**

Lampiran : 19 / 1 - 4

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REKAP ASET LAIN-LAIN RUSAK BERAT
PER 31 DESEMBER 2025

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - RUSAK BERAT				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	**(Rp)**
1	2	3	4	5	6	**7**
01	**Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**					
01.01	Kantor DPRD					**-**
01.02	Kepala Daerah dan Wakil					**-**
01.03	Sekretariat Daerah	383.313.803,79	-	-	-	**383.313.803,79**
01.04	Sekretariat DPRD	106.631.750,00	-	-	-	**106.631.750,00**
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	111.247.950,00	-	-	-	**111.247.950,00**
01.06	Inspektorat Kabupaten	258.931.750,00	-	-	-	**258.931.750,00**
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	245.099.000,00	-	-	-	**245.099.000,00**
				-	-	**-**
01.09	**Kecamatan**	-		-	-	**-**
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	-	-	-	-	**-**
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	34.403.000,00	-	-	-	**34.403.000,00**
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	114.822.930,00	-	-	-	**114.822.930,00**
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	12.000.000,00	-	-	-	**12.000.000,00**
01.09.05	Kecamatan Sei.Limau	3.300.000,00	-	-	-	**3.300.000,00**
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	-	-	-	-	**-**
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	42.257.800,00	75.000.000,00	-	-	**117.257.800,00**
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	36.165.425,00	-	-	-	**36.165.425,00**
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	17.450.000,00	-	-	-	**17.450.000,00**
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	34.688.600,00	-	-	-	**34.688.600,00**
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	12.000.000,00	-	-	-	**12.000.000,00**

Lampiran : 19 / 2 - 4

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - RUSAK BERAT				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	**(Rp)**
1	2	3	4	5	6	**7**
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	28.853.000,00	-	-	-	**28.853.000,00**
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	31.521.250,00	-	-	-	**31.521.250,00**
01.09.14	Kecamatan Patamuan	54.231.000,00	-	-	-	**54.231.000,00**
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	96.457.750,00	-	-	-	**96.457.750,00**
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	12.691.500,00	-	-	-	**12.691.500,00**
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	30.868.000,00	-	-	-	**30.868.000,00**
	Sub Jumlah	**1.666.934.508,79**	**75.000.000,00**	**-**	**-**	**1.741.934.508,79**
02	**Bidang Pendidikan**					**-**
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.160.775.495,96	4.056.784.028,00	-	-	**5.217.559.523,96**
		-		-	-	**-**
03	**Bidang Kesehatan**	-		-	-	**-**
03.01	Dinas Kesehatan	1.487.555.581,60	717.439.498,00	-	-	**2.204.995.079,60**
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	300.755.464,00	-	-	-	**300.755.464,00**
		-		-	-	**-**
04	**Bidang Pekerjaan Umum**	-		-	-	**-**
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.750.000,00	125.135.000,00	480.000.000,00	-	**669.885.000,00**
		-		-	-	**-**
05	**Bidang Perencanaan Pembangunan**	-		-	-	**-**
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	630.245.129,00	-	-	-	**630.245.129,00**
		-		-	-	**-**
06	**Bidang Perhubungan**	-		-	-	**-**
06.01	Dinas Perhubungan	153.909.867,00	-	-	-	**153.909.867,00**
06.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	39.806.250,00		-	-	**39.806.250,00**
		-		-	-	**-**
07	**Bidang Lingkungan Hidup**	-		-	-	**-**

Lampiran : 19 / 3 - 4

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - RUSAK BERAT				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	**(Rp)**
1	2	3	4	5	6	**7**
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	366.634.316,00	-	-	-	**366.634.316,00**
		-		-	-	**-**
08	**Bidang Kependudukan dan Capil**	-		-	-	**-**
08.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	268.027.675,00	-	-	-	**268.027.675,00**
		-		-	-	**-**
09	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	-		-	-	**-**
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	71.466.617,75	-	-	-	**71.466.617,75**
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	539.584.466,00	-	-	-	**539.584.466,00**
		-		-	-	**-**
10	**Bidang Sosial**	-		-	-	**-**
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.839.700,00	-	-	-	**18.839.700,00**
		-		-	-	**-**
11	**Bidang Koperasi dan UKM**	-		-	-	**-**
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	519.006.600,00	30.006.000,00	-	-	**549.012.600,00**
		-		-	-	**-**
12	**Bidang Penanaman Modal**	-		-	-	**-**
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	82.917.398,00	-	-	-	**82.917.398,00**
		-		-	-	**-**
13	**Bidang Kebudayaan**	-		-	-	**-**
		-		-	-	**-**
14	**Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**	-		-	-	**-**
14,01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	280.957.500,00	-	-	135.141.000,00	**416.098.500,00**
		-		-	-	**-**
15	**Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri**	-		-	-	**-**
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	501.791.663,34	-	-	-	**501.791.663,34**
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	25.242.500,00	-	-	-	**25.242.500,00**
15,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	129.068.428,00	-	-	-	**129.068.428,00**

Lampiran : 19 / 4 - 4

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - RUSAK BERAT				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	**(Rp)**
1	2	3	4	5	6	**7**
		-		-	-	**-**
16	**Bidang Pemberdayaan Masy. Desa**	-		-	-	**-**
		-		-	-	**-**
17	**Bidang Perpustakaan**	-		-	-	**-**
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	**-**
		-		-	-	**-**
18	**Bidang Pertanian**	-		-	-	**-**
18,01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	120.790.000,00	-	-	-	**120.790.000,00**
18,01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	97.772.000,00	-	-	-	**97.772.000,00**
		-		-	-	**-**
19	**Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**	-		-	-	**-**
		-		-	-	**-**
20	**Bidang Kelautan dan Perikanan**	-		-	-	**-**
20.01	Dinas Perikanan	136.357.715,00	-	-	-	**136.357.715,00**
	TOTAL	**8.663.188.875,44**	**5.004.364.526,00**	**480.000.000,00**	**135.141.000,00**	**14.282.694.401,44**

Lampiran : 20 / 1 - 4

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REKAP ASET LAIN-LAIN - ASET PENELUSURAN
PER 31 DESEMBER 2025

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - ASET PENELUSURAN				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
01	**Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**					
01.01	Kantor DPRD	-	-	-	-	-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	-	-	-	-	-
01.03	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-
01.04	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	-	-	-	-	-
01.06	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-	-
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-
			-	-	-	-
01.09	**Kecamatan**	-	-	-	-	-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	-	-	-	-	-
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	-	-	-	-	-
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	-	-	-	-	-
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	-	-	-	-	-
01.09.05	Kecamatan Sei.Limau	-	-	-	-	-
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	-	-	-	-	-
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	-	-	-	-	-
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	-	-	-	-	-
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	-	-	-	-	-
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	-	-	-	-	-
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	-	-	-	-	-
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	-	-	-	-	-
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	-	-	-	-	-
01.09.14	Kecamatan Patamuan	-	-	-	-	-
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	-	-	-	-
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	-	-	-	-	-
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	-	-	-	-	-
		-				

Lampiran : 20 / 2 - 4

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - ASET PENELUSURAN				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	**(Rp)**
1	2	3	4	5	6	**7**
02	**Bidang Pendidikan**	-				**-**
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
03	**Bidang Kesehatan**	-	-	-	-	**-**
03.01	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	**-**
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
04	**Bidang Pekerjaan Umum**	-	-	-	-	**-**
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
05	**Bidang Perencanaan Pembangunan**	-	-	-	-	**-**
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
06	**Bidang Perhubungan**	-	-	-	-	**-**
06.01	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	**-**
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
07	**Bidang Lingkungan Hidup**	-	-	-	-	**-**
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
08	**Bidang Kependudukan dan Capil**	-	-	-	-	**-**
08.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	**-**

Lampiran : 20 / 3 - 4

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - ASET PENELUSURAN				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	**(Rp)**
1	2	3	4	5	6	**7**
		-	-	-	-	**-**
09	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	-	-	-	-	**-**
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.629.000,00	-	-	-	**25.629.000,00**
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
10	**Bidang Sosial**	-	-	-	-	**-**
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
11	**Bidang Koperasi dan UKM**	-	-	-	-	**-**
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
12	**Bidang Penanaman Modal**	-	-	-	-	**-**
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
13	**Bidang Kebudayaan**	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
14	**Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**	-	-	-	-	**-**
14,01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
15	**Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri**	-	-	-	-	**-**
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	**-**
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	**-**
15,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
16	**Bidang Pemberdayaan Masy. Desa**	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
17	**Bidang Perpustakaan**	-	-	-	-	**-**
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
18	**Bidang Pertanian**	-	-	-	-	**-**
18,01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	**-**
18.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	**-**
19	**Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**	-	-	-	-	**-**

Lampiran : 20 / 4 - 4

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - ASET PENELUSURAN				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	**(Rp)**
1	2	3	4	5	6	**7**
		-	-	-	-	**-**
20	**Bidang Kelautan dan Perikanan**	-	-	-	-	**-**
20.01	Dinas Perikanan	-	-	-	-	**-**
					-	
	TOTAL	25.629.000,00	-	-	-	**25.629.000,00**

Lampiran : 21 / 1 - 1

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	BADAN/DINAS/KANTOR	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2024	Amortisasi Tahun 2025	Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2025	Nilai Buku
1	Sekretariat Daerah	471.446.100,00	471.446.100,00	-	471.446.100,00	-
2	Dinas Kesehatan	632.468.000,00	632.468.000,00	-	632.468.000,00	-
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	592.616.000,00	592.616.000,00	-	592.616.000,00	-
4	Disdagnakerkop dan UKM	43.581.500,00	42.271.500,00	1.310.000,00	43.581.500,00	-
5	BKPSDM	128.689.000,00	128.689.000,00	-	128.689.000,00	-
6	BPBD	74.374.000,00	74.374.000,00		74.374.000,00	-
7	BPKD	430.900.000,00	430.900.000,00		430.900.000,00	-
8	BAPELITBANGDA	86.236.127,00	86.236.127,00		86.236.127,00	-
9	RSUD	431.930.000,00	431.930.000,00	-	431.930.000,00	-
10	Dinas Dukcapil	75.498.000,00	75.498.000,00		75.498.000,00	-
11	DPUPR	3.433.890.237,00	2.338.354.486,80	452.918.847,40	2.791.273.334,20	642.616.902,80
12	Dinas Perikanan	9.975.000,00	9.975.000,00	-	9.975.000,00	-
13	Dinas Kominfo	122.679.000,00	122.679.000,00		122.679.000,00	-
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.880.000,00	7.880.000,00		7.880.000,00	-
15	Dinas Perhubungan	199.333.500,00	135.120.000,00	39.866.700,00	174.986.700,00	24.346.800,00
16	Kecamatan Enam lingkung	14.300.000,00	14.300.000,00		14.300.000,00	-
	JUMLAH	**6.755.796.464,00**	**5.594.737.213,80**	**494.095.547,40**	**6.088.832.761,20**	**666.963.702,80**

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

per 31 Desember 2025

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten/Kota : Kabupaten Padang Pariaman

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan						Nilai Buku
			Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025	Mutasi Tambah / Mutasi Tambah	Mutasi Kurang / Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2025	Penyusutan Tahun Ini	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025	
1	2	3	4		8	9	10	11	12
01	**Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
01.01	Kantor DPRD		-		-	-		-	-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil		-		-	-		-	-
01.03	Sekretariat Daerah	383.313.803,79	383.313.803,79	-	-	383.313.803,79	-	383.313.803,79	-
01.04	Sekretariat DPRD	106.631.750,00	106.631.750,00	-	-	106.631.750,00	-	106.631.750,00	-
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	85.397.950,00	88.737.950,00	-	3.340.000,00	85.397.950,00	-	85.397.950,00	-
01.06	Inspektorat Kabupaten	258.931.750,00	113.606.250,00	145.325.500,00	-	258.931.750,00	-	258.931.750,00	-
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	245.099.000,00	76.066.000,00	168.169.080,00	-	244.235.080,00	863.920,00	245.099.000,00	-
			-	-	-	-		-	-
01.09	**Kecamatan**		-	-	-	-		-	-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung		-	-	-	-		-	-
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	34.403.000,00	34.403.000,00	-	-	34.403.000,00	-	34.403.000,00	-
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	114.822.930,00	114.822.930,00	-	-	114.822.930,00	-	114.822.930,00	-
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
01.09.05	Kecamatan Sungai Limau	3.300.000,00	5.600.000,00	-	2.300.000,00	3.300.000,00	-	3.300.000,00	-
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam		-	-	-	-		-	-
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	117.257.800,00	83.749.000,00	31.135.466,00	-	114.884.466,00	2.373.334,00	117.257.800,00	-
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	23.940.025,00	10.500.000,00	13.440.025,00	-	23.940.025,00	-	23.940.025,00	-
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	17.450.000,00	17.450.000,00	-	-	17.450.000,00	-	17.450.000,00	-
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	34.688.600,00	21.499.000,00	13.189.600,00	-	34.688.600,00	-	34.688.600,00	-
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	28.853.000,00	28.853.000,00	-	-	28.853.000,00	-	28.853.000,00	-
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	31.521.250,00	-	30.897.917,00	-	30.897.917,00	623.333,00	31.521.250,00	-
01.09.14	Kecamatan Patamuan	62.731.000,00	62.731.000,00	-	-	62.731.000,00	-	62.731.000,00	-
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	96.457.750,00	67.050.000,00	28.857.750,00	-	95.907.750,00	550.000,00	96.457.750,00	-
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	12.691.500,00	2.736.500,00	9.955.000,00	-	12.691.500,00	-	12.691.500,00	-
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	30.868.000,00	30.868.000,00	-	-	30.868.000,00	-	30.868.000,00	-
	Sub Jumlah	1.712.359.108,79	1.272.618.183,79	440.970.338,00	5.640.000,00	1.707.948.521,79	4.410.587,00	1.712.359.108,79	-
02	**Bidang Pendidikan**								
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.940.785.456,96	6.940.785.456,96	-	-	6.940.785.456,96	-	6.940.785.456,96	-
			-		-	-		-	-

Lampiran : 22 / 2 - 3

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan						Nilai Buku
			Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2025	Penyusutan Tahun Ini	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025	
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang				
1	2	3	4		8	9	10	11	12
03	**Bidang Kesehatan**		-		-	-		-	-
03.01	Dinas Kesehatan	4.051.127.580,45	3.239.410.711,00	784.138.115,45	-	4.023.548.826,45	27.578.754,00	4.051.127.580,45	-
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	584.444.920,00	584.444.920,00	-	-	584.444.920,00	-	584.444.920,00	-
			-		-	-		-	-
04	**Bidang Pekerjaan Umum**		-		-	-		-	-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	669.885.000,00	669.885.000,00	-	-	669.885.000,00	-	669.885.000,00	-
			-		-	-		-	-
05	**Bidang Perencanaan Pembangunan**		-		-	-		-	-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	630.245.129,00	630.245.129,00	-	-	630.245.129,00	-	630.245.129,00	-
			-		-	-		-	-
06	**Bidang Perhubungan**		-		-	-		-	-
06.01	Dinas Perhubungan	153.909.867,00	153.909.867,00	-	-	153.909.867,00		153.909.867,00	-
	Dinas Komunikasi dan Informatika	39.806.250,00	39.806.250,00	-	-	39.806.250,00	-	39.806.250,00	-
			-		-	-		-	-
07	**Bidang Lingkungan Hidup**		-		-	-		-	-
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	366.634.316,00	106.110.000,00	241.917.887,00	-	348.027.887,00	18.606.429,00	366.634.316,00	-
			-		-	-		-	-
08	**Bidang Kependudukan dan Capil**		-		-	-		-	-
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	268.027.675,00	268.027.675,00	-	-	268.027.675,00	-	268.027.675,00	-
			-		-	-		-	-
09	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		-		-			-	-
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	97.095.617,75	97.095.617,75	-	-	97.095.617,75	-	97.095.617,75	-
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	539.584.466,00	539.584.466,00	-	-	539.584.466,00	-	539.584.466,00	-
			-		-	-		-	-
10	**Bidang Sosial**		-		-	-		-	-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.839.700,00	18.839.700,00	-	-	18.839.700,00	-	18.839.700,00	-
			-		-	-		-	-
11	**Bidang Koperasi dan UKM**		-		-	-		-	-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	519.006.600,00	519.006.600,00		-	519.006.600,00	-	519.006.600,00	-
			-		-	-		-	-
12	**Bidang Penanaman Modal**		-		-	-		-	-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	176.454.398,00	6.225.000,00	168.118.798,00	-	174.343.798,00	2.110.600,00	176.454.398,00	-
			-		-	-		-	-
13	**Bidang Kebudayaan**		-		-	-		-	-
			-		-	-		-	-
14	**Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**		-		-	-		-	-
14,01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	280.957.500,00	280.957.500,00	-	-	280.957.500,00	-	280.957.500,00	-
			-		-	-		-	-

Lampiran : 22 / 3 - 3

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan						Nilai Buku
			Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2025	Penyusutan Tahun Ini	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025	
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang				
1	2	3	4		8	9	10	11	12
15	**Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri**		-		-	-		-	-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	501.791.663,34	493.791.663,34	8.000.000,00	-	501.791.663,34	-	501.791.663,34	-
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	25.242.500,00	25.242.500,00	-	-	25.242.500,00	-	25.242.500,00	-
15,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	136.777.428,00	70.816.000,00	65.741.428,00	-	136.557.428,00	220.000,00	136.777.428,00	-
			-		-	-		-	-
16	**Bidang Pemberdayaan Masy. Desa**		-		-	-		-	-
			-		-	-		-	-
17	**Bidang Perpustakaan**		-		-	-		-	-
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		-	-	-	-		-	-
			-		-	-		-	-
18	**Bidang Pertanian**		-		-	-		-	-
18,01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	120.790.000,00	120.790.000,00	-	-	120.790.000,00	-	120.790.000,00	-
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	97.772.000,00	97.772.000,00	-	-	97.772.000,00	-	97.772.000,00	-
			-		-	-		-	-
19	**Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**		-		-	-		-	-
			-		-	-		-	-
20	**Bidang Kelautan dan Perikanan**		-		-			-	-
20.01	Dinas Perikanan	136.357.715,00	136.357.715,00	-	-	136.357.715,00		136.357.715,00	-
	TOTAL	**18.067.894.891,29**	**16.311.721.954,84**	**1.708.886.566,45**	**5.640.000,00**	**18.014.968.521,29**	**52.926.370,00**	**18.067.894.891,29**	**-**

Lampiran : 23/ 1 - 12

Pengujian Terhadap Laporan Operasional (LO) dengan Laporan Realisasi (LRA)

No	KODE REKENING	URAIAN	LRA	KODE REKENING	URAIAN	LO	SELISIH	PENJELASAN
1	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	800.710.050,00	7.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	855.678.350,00	-54.968.300,00	1.1.03.09.01.0001 Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron
2	4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.226.451.448,00	7.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah-LO	1.184.177.853,00	42.273.595,00	1.1.03.12.01.0001 Piutang Pajak Air Tanah, Pelunasan Piutang Pajak Air Tanah dan Pendapatan Diterima Dimuka
3	4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	7.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet-LO	500.000,00	0,00	
4	4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.654.495.681,00	7.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	5.654.495.681,00	0,00	
5	4.1.01.15.01.0001	PBBP2	15.316.670.498,00	7.1.01.15.01.0001	PBBP2-LO	21.373.280.975,00	-6.056.610.477,00	1.1.03.15.01.0001 Piutang PBBP2
6	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	7.760.571.078,00	7.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	7.760.571.078,00	0,00	
7	4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	3.765.158.542,00	7.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran-LO	3.765.158.542,00	0,00	
8	4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	21.831.244.565,00	7.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	21.831.244.565,00	0,00	
9	4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	479.381.671,00	7.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel-LO	479.381.671,00	0,00	
10	4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.088.703.245,00	7.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	1.088.703.245,00	0,00	
11	4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	248.192.900,00	7.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO	248.192.900,00	0,00	
12	4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	17.247.533.700,00	7.1.01.20.01.0001	Opsen PKB-LO	17.247.533.700,00	0,00	
13	4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	8.641.971.600,00	7.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB-LO	8.641.971.600,00	0,00	
14	4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	20.253.670.670,00	7.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	20.234.598.670,00	19.072.000,00	1.1.04.01.01.0001 Pelunasan Piutamg Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
15	4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	53.584.246.771,00	7.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	53.970.924.940,00	-386.678.169,00	1.1.04.01.01.0005 Piutang Tahun 2024 dan Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
16	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	594.783.792,00	7.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	707.933.792,00	-113.150.000,00	1.1.04.01.02.0001 Piutang Tahun 2024 dan Pelunasan Piutang Retribus Pelayanan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pendapatan Diterima Dimuka
17	4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	26.280.000,00	7.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	26.280.000,00	0,00	
18	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	81.300.000,00	7.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	81.300.000,00	0,00	
19	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	6.176.000,00	7.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	6.176.000,00	0,00	
20	4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	26.485.000,00	7.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	26.485.000,00	0,00	
21	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	863.704.981,00	7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	863.704.981,00	0,00	
22	4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.931.467.131,00	7.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	8.931.467.131,00	0,00	
23	4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	67.500.000,00	7.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD-LO	152.500.000,00	-85.000.000,00	2.1.05 Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka dan Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka
24	4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.786.202.672,00	7.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.786.202.672,00	0,00	
	4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	4.026,00	7.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	4.026,00	0,00	1.1.04.01.13.0001 Pengakuan Jasa Giro-LO Kecamatan 2x11 kayu Tanam Tahun 2025 yang masih ada di Kas Bendahara Pengeluaran Kec. 2x11 kayu tanam
25	4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.894.756.385,90	7.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.894.756.385,90	0,00	1.1.06.05.04.0001 Pelunasan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
26	4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	428.384.273,52	7.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	428.384.273,52	0,00	
27	4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	100.526.064,00	7.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2-LO	100.526.064,00	0,00	
28	4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	201.879.800,00	7.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB-LO	201.879.800,00	0,00	
29	4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	251.600,00	7.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB-LO	251.600,00	0,00	
30	4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	229.339.000,00	7.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	229.339.000,00	0,00	
31	4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	822.611.168,00	7.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	822.611.168,00	0,00	
32	4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	97.921.018.878,00	7.2.01.05.01.0001	Dana Desa_LO	0,00	97.921.018.878,00	Tidak Dilakukan Penjurnalan LO Karena salur tidak masuk ke RKUD
33	4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.113.627.000,00	7.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	7.113.627.000,00	0,00	

Lampiran : 23/ 2 - 12

No	KODE REKENING	URAIAN	LRA	KODE REKENING	URAIAN	LO	SELISIH	PENJELASAN
34	4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.515.251.202,00	7.2.01.07.01.0001	DBH PBB-LO	1.515.251.202,00	0,00	
35	4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.791.917.000,00	7.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO	7.791.917.000,00	0,00	
36	4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	47.670.000,00	7.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	47.670.000,00	0,00	
37	4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	219.390.000,00	7.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	219.390.000,00	0,00	
38	4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	458.711.000,00	7.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty-LO	458.711.000,00	0,00	
39	4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	41.252.000,00	7.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	41.252.000,00	0,00	
40	4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.060.775.000,00	7.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan-LO	1.060.775.000,00	0,00	
41	4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.989.996.000,00	7.2.01.07.03.0001	DBH Sawit-LO	1.989.996.000,00	0,00	
42	4.2.01.08.01.0001	DAU	666.001.255.000,00	7.2.01.08.01.0001	DAU-LO	666.001.255.000,00	0,00	
43	4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	9.974.133.956,00	7.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	9.974.133.956,00	0,00	
44	4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	44.182.570.000,00	7.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	44.182.570.000,00	0,00	
45	4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	41.112.104.000,00	7.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	41.112.104.000,00	0,00	
46	4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.372.743.000,00	7.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	4.372.743.000,00	0,00	
47	4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	490.549.743,00	7.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD-LO	490.549.743,00	0,00	
48	4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	208.864.988,00	7.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD-LO	208.864.988,00	0,00	
49	4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	292.013.502,00	7.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP-LO	292.013.502,00	0,00	
50	4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	13.337.924.542,00	7.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	13.337.924.542,00	0,00	
51	4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	3.109.971.300,00	7.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana-LO	3.109.971.300,00	0,00	
52	4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	151.521.663.100,00	7.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD		151.521.663.100,00	Tidak Dilakukan Penjurnalan LO Karena salur tidak masuk ke RKUD
53	4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	643.500.000,00	7.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		643.500.000,00	Tidak Dilakukan Penjurnalan LO Karena salur tidak masuk ke RKUD
54	4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.938.277.980,00	7.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	5.938.277.980,00	0,00	
55	4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	56.376.780.883,00	7.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	56.376.780.883,00	0,00	
56	4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.887.000.000,00	7.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	1.887.000.000,00	0,00	
57	4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.296.042.178,00	7.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	4.296.042.178,00	0,00	
58	4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	7.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	45.000.000,00	0,00	
59	4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.046.810.000,00	7.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	1.046.810.000,00	0,00	
60	4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	7.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	45.000.000,00	0,00	
61	4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	12.258.198.112,00	7.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	12.258.198.112,00	0,00	
62	4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	436.776.000,00	7.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO	436.776.000,00	0,00	
63	4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.744.108.564,00	7.2.02.01.01.0001	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	14.744.108.564,00	0,00	
64	4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	291.840.000,00	7.2.02.01.01.0002	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO	291.840.000,00	0,00	
65	4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.074.347.085,00	7.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	18.411.931.693,00	-13.337.584.608,00	1.1.08.01.01 Peiutang dan Pelunasan Piutang Bagi Hasil Provinsi
66	4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.911.300.752,00	7.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	112.976.635,00	1.798.324.117,00	1.1.08.01.01 Peiutang dan Pelunasan Piutang Bagi Hasil Provinsi
67	4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.809.445.119,00	7.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	10.696.225.738,00	23.113.219.381,00	1.1.08.01.01 Peiutang dan Pelunasan Piutang Bagi Hasil Provinsi
68	4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	73.637.661,00	7.2.02.02.02.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	25.836.843,00	47.800.818,00	1.1.08.01.01 Peiutang dan Pelunasan Piutang Bagi Hasil Provinsi
69	4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.918.750.185,00	7.2.02.02.04.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	20.918.750.185,00	0,00	
70	4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.720.000.000,00	7.3.01.01.01.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.720.000.000,00	0,00	
71	4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	620.000.000,00	7.3.01.02.01.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	620.000.000,00	0,00	
72	4.3.02.01.01.0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	4.000.000.000,00	7.4.01.02.02.0036	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana-LO	4.000.000.000,00	0,00	

Lampiran : 23/ 3 - 12

No	KODE REKENING	URAIAN	LRA	KODE REKENING	URAIAN	LO	SELISIH	PENJELASAN
73				7.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	16.453.595.328,10	-16.453.595.328,10	Dengan Rincian 1 Hibah dari BNPB 1. Nomor 49/BNPB/PUSDALOPS/RT.03.05/12/2025 Tanggal 23 Desember 2025 berupa Peralatan dan Mesin Pusdalop di pakandangan 2. Nomor 50/BNPB/PUSDALOPS/RT.03.05/12/2025 Tanggal 23 Desember 2025 berupa Peralatan dan Mesin Pusdalop di pakandangan 3. BAST.137.A/BNPB/Pdin/BP.03.03/11/2025 Rp. 799.082.530 total Rp2.149.560.110,05
								2. Hibah dari BNPB Nomor 49/BNPB/PUSDALOPS/RT.03.05/12/2025 Tanggal 23 Desember 2025 berupa Gedung Pusdalop di pakandangan sebesar Rp1.925.447.257
								3.Hibah atas Mobiler dari Kemendikdasmen =Rp550.272.626,00
								4. Hibah Kemendikdasmen=Rp8.931.388.390,00
74				7.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	8.295.614.000,00	-8.295.614.000,00	7.3.01.02.01.0001 Pendapatan Hibah Reklase Hibah Masuk Bangunan Gedung dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp 8.295.614.000,00
75				7.3.01.03.01.0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	532.540.000,00	-532.540.000,00	7.3.01.03.01.0001 Pendapatan Hibah Tanah PUSKESMAS Sikucur penilaian sesuai NJOP No 900/516/BPKD-PP/2025 dari Hibah Masyarakat sebesar Rp5.200.000,00 dan Hibah Komite =Rp30.000.000,00 serta Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat an. Hajjah Oslilianiari Soeratno dan keluarga pada Dinkes untu Tanah RSUD Sungai Limau sebesar Rp497.340.000,00
76				7.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	3.645.000.000,00	-3.645.000.000,00	7.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Hibah dari Nagari Batang Anai untuk Kampung Merah Putih sebesar Rp3.645.000.000,00
78				7.4.01.02.01.0004	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO	448.297.420,00	-448.297.420,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
79				7.4.01.02.02.0036	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO	484.624.000,00	-484.624.000,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
80				7.4.01.02.02.0117	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO	4.371.285,00	-4.371.285,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
81				7.4.01.02.02.0126	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO	32.318.000,00	-32.318.000,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
82				7.4.01.02.02.0128	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat-LO	31.990.000,00	-31.990.000,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
83				7.4.01.02.02.0405	Surplus Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-Personal Computer-LO	67.821.000,00	-67.821.000,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
84				7.4.01.02.03.0001	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	235.317.000,00	-235.317.000,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
85				7.4.01.02.04.0026	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi-LO	16.662.200.056,00	-16.662.200.056,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
			1.393.861.370.042,42			**1.185.682.177.796,52**	**208.179.192.245,90**	

Lampiran : 23/ 4 - 12

Pengujian Terhadap Laporan Operasional (LO) dengan Laporan Realisasi (LRA)

No	KODE REKENING	URAIAN	LRA	KODE REKENING	URAIAN	LO	SELISIH	PENJELASAN
1	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	263.785.424.784,00	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	263.634.149.001,00	(151.275.783,00)	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
2	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	90.418.675.173,00	8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	90.418.675.173,00	0,00	
3	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	25.069.014.649,00	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	25.054.815.857,00	(14.198.792,00)	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
4	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.941.170.386,00	8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	8.941.170.386,00	0,00	
5	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.573.355.000,00	8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	4.567.195.000,00	(6.160.000,00)	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
6	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.838.915.400,00	8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	21.793.791.000,00	(45.124.400,00)	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
7	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.038.010.500,00	8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5.141.485.500,00	103.475.000,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
8	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.190.997.000,00	8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.190.017.000,00	(980.000,00)	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
9	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.539.444.998,00	8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.539.444.998,00	0,00	
10	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.971.653.040,00	8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	12.971.653.040,00	0,00	
11	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.923.768.915,00	8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	5.940.134.655,00	16.365.740,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
12	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.351.752.604,00	8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.347.401.456,00	(4.351.148,00)	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
13	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.350.339,00	8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	3.335.790,00	(14.549,00)	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
14	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.593.105,00	8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.595.415,00	2.310,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
15	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.937.408.310,00	8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.930.248.677,00	(7.159.633,00)	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
16	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.732.919.445,00	8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.736.895.905,00	3.976.460,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
17	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	541.373.428,00	8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	541.073.839,00	(299.589,00)	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
18	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	189.259.371,00	8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	189.259.371,00	0,00	
19	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.624.127.739,00	8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.623.228.957,00	(898.782,00)	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
20	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	567.738.502,00	8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	567.738.502,00	0,00	
21	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	80.471.276.487,00	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	80.482.719.579,00	11.443.092,00	Utang TPP pada BPBD
22	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.582.304.759,00	8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.626.856.759,00	44.552.000,00	Utang TPP pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.464.275.158,00	8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.472.375.966,00	8.100.808,00	Utang TPP pada BPBD
24	5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.154.124.162,00	8.1.01.02.04.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.154.124.162,00	0,00	
25	5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	16.400.000,00	8.1.01.02.06.0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	16.400.000,00	0,00	
26	5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	123.000.000,00	8.1.01.02.06.0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	123.000.000,00	0,00	
27	5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	9.225.000,00	8.1.01.02.06.0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	9.225.000,00	0,00	
28	5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	24.600.000,00	8.1.01.02.06.0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	24.600.000,00	0,00	
29	5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	676.500.000,00	8.1.01.02.06.0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	676.500.000,00	0,00	
30	5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	41.000.000,00	8.1.01.02.06.0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	41.000.000,00	0,00	
31	5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	46.125.000,00	8.1.01.02.06.0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	46.125.000,00	0,00	
32	5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	184.500.000,00	8.1.01.02.06.0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	184.500.000,00	0,00	
33	5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	553.500.000,00	8.1.01.02.06.0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	553.500.000,00	0,00	

No	KODE REKENING	URAIAN	LRA	KODE REKENING	URAIAN	LO	SELISIH	PENJELASAN
34	5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	276.750.000,00	8.1.01.02.06.0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	276.750.000,00	0,00	
35	5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	602.658.264,00	8.1.01.02.06.0020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	602.658.264,00	0,00	
36	5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	332.124.255,00	8.1.01.02.06.0021	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	332.124.255,00	0,00	
37	5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	23.976.000,00	8.1.01.02.06.0023	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	23.976.000,00	0,00	
38	5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.570.000,00	8.1.01.02.06.0035	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.570.000,00	0,00	
39	5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	34.800.000,00	8.1.01.02.06.0050	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	34.800.000,00	0,00	
40	5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	172.555.587.900,00	8.1.01.02.06.0064	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	21.033.924.800,00	(151.521.663.100,00)	Beban LO Tahun 2025 Tidak Dilakukan Penjurnalan LO Karena salur tidak masuk ke RKUD yang tercatat pada LO saat ini merupakan nilai Beban TPG THR dan Gaji 13 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025 yang masuk melalaui Rekening RKUD
41	5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.630.250.000,00	8.1.01.02.06.0066	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	986.750.000,00	(643.500.000,00)	Beban LO Tahun 2025 Tidak Dilakukan Penjurnalan LO Karena salur tidak masuk ke RKUD yang tercatat pada LO saat ini merupakan nilai Beban TPG THR dan Gaji 13 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025 yang masuk melalaui Rekening RKUD
42	5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.904.731.763,00	8.1.01.02.06.0067	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.904.731.763,00	0,00	
43	5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	8.1.01.04.01.0001	Beban Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	0,00	
44	5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	79.571.100,00	8.1.01.04.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	79.571.100,00	0,00	
45	5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	114.496.020,00	8.1.01.04.03.0001	Beban Tunjangan Beras DPRD	114.496.020,00	0,00	
46	5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00	8.1.01.04.04.0001	Beban Uang Paket DPRD	76.482.000,00	0,00	
47	5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	8.1.01.04.05.0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	0,00	
48	5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	113.700.300,00	8.1.01.04.06.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	113.700.300,00	0,00	
49	5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.016.700,00	8.1.01.04.07.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.016.700,00	0,00	
50	5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000,00	8.1.01.04.08.0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000,00	0,00	
51	5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000,00	8.1.01.04.09.0001	Beban Tunjangan Reses DPRD	756.000.000,00	0,00	
52	5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	549.761,00	8.1.01.04.10.0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	549.761,00	0,00	
53	5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	77.674.212,00	8.1.01.04.12.0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	77.674.212,00	0,00	
54	5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.835.568,00	8.1.01.04.12.0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.835.568,00	0,00	
55	5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.506.704,00	8.1.01.04.12.0003	Beban Jaminan Kematian DPRD	5.506.704,00	0,00	
56	5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.135.083.820,00	8.1.01.04.12.0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	3.135.083.820,00	0,00	
57	5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.926.400.000,00	8.1.01.04.13.0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.926.400.000,00	0,00	
58	5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	101.400.000,00	8.1.01.05.01.0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	101.400.000,00	0,00	
59	5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00	8.1.01.05.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00	0,00	
60	5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	8.1.01.05.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	0,00	
61	5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.228.120,00	8.1.01.05.04.0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.228.120,00	0,00	
62	5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	821.813,00	8.1.01.05.05.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	821.813,00	0,00	
63	5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	800,00	8.1.01.05.06.0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	800,00	0,00	
64	5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.466.720,00	8.1.01.05.07.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.466.720,00	0,00	
65	5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	8.1.01.05.08.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00	
66	5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	8.1.01.05.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00	
67	5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	3.600.000,00	8.1.01.05.10.0006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	3.600.000,00	0,00	
68	5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	27.000.000,00	8.1.01.05.10.0007	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	27.000.000,00	0,00	
69	5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.025.000,00	8.1.01.05.10.0008	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.025.000,00	0,00	
70	5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.400.000,00	8.1.01.05.10.0009	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.400.000,00	0,00	

No	KODE REKENING	URAIAN	LRA	KODE REKENING	URAIAN	LO	SELISIH	PENJELASAN
71	5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	148.500.000,00	8.1.01.05.10.0010	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	148.500.000,00	0,00	
72	5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	9.000.000,00	8.1.01.05.10.0011	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	9.000.000,00	0,00	
73	5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	10.125.000,00	8.1.01.05.10.0012	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	10.125.000,00	0,00	
74	5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	40.500.000,00	8.1.01.05.10.0014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	40.500.000,00	0,00	
75	5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	121.500.000,00	8.1.01.05.10.0015	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	121.500.000,00	0,00	
76	5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	60.750.000,00	8.1.01.05.10.0016	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	60.750.000,00	0,00	
77	5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(],PKB],	132.290.838,00	8.1.01.05.10.0020	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	132.290.838,00	0,00	
78	5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [(],BBNKB],	73.352.596,00	8.1.01.05.10.0021	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	73.352.596,00	0,00	
79	5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.854.000,00	8.1.01.05.11.0002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.854.000,00	0,00	
80	5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	180.000,00	8.1.01.05.11.0014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	180.000,00	0,00	
81	5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	2.700.000,00	8.1.01.05.11.0031	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	2.700.000,00	0,00	
82	5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.238.500,00	8.1.01.06.01.0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.238.500,00	0,00	
83	5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	8.1.01.06.02.0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	0,00	
84	5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	28.900.162.709,00	8.1.01.99.99.9999	Beban Pegawai BLUD	28.900.162.709,00	0,00	
85	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	54.742.196,00	8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.860.000,00	(49.882.196,00)	Reklase Masuk Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi bahan bangunan ke Aset Tetap =Rp49.882.196
86	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	114.362.326,00	8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	114.362.326,00	0,00	
87	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.281.746.193,00	8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.281.746.193,00	0,00	
88	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.127.500,00	8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.127.500,00	0,00	
89	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.655.000,00	8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.655.000,00	0,00	
90	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	40.238.500,00	8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	40.238.500,00	0,00	
91	5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	9.549.120,00	8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	9.549.120,00	0,00	
92	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.754.610.626,00	8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	11.754.610.626,00	0,00	
	8.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	380.000,00	380.000,00	Selisih Jurnal Balik Persediaan dengan Persediaan Akhir Pada Dinas PUPR pada Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
93	5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	7.401.480,00	8.1.02.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	7.401.480,00	0,00	
	5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.983.000,00	8.1.02.01.01.0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.983.000,00	0,00	
94	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	673.667.252,00	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	675.813.052,00	2.145.800,00	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2024 dan 2025 pada Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
95	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	882.772.000,00	8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	884.192.000,00	1.420.000,00	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2024 dan 2025 pada Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
96	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.160.637.466,00	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.223.649.466,00	63.012.000,00	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2024 dan 2025 pada Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
97	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.617.000,00	8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.617.000,00	0,00	
98	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.048.436.065,00	8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	961.951.065,00	(86.485.000,00)	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2024 dan 2025 pada Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
99	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	517.947.949,00	8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	517.947.949,00	0,00	
100	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	370.545.679,00	8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	361.620.679,00	(8.925.000,00)	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2024 dan 2025 pada Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
101	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	276.994.340,00	8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	276.994.340,00	0,00	

No	KODE REKENING	URAIAN	LRA	KODE REKENING	URAIAN	LO	SELISIH	PENJELASAN
102	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	137.354.350,00	8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	137.354.350,00	0,00	
103	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	199.765.000,00	8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	199.765.000,00	0,00	
104	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	38.128.500,00	8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.494.825.340,05	3.456.696.840,05	Reklasifikasi dari Aset ke Beban Ekstrakompatable dan Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2024 dan 2025 pada Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
105	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.158.291.121,00	8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	2.013.561.091,46	(1.144.730.029,54)	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2024 dan 2025 pada Beban Obat-Obatan-Obat
106	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.976.413,00	8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.092.783.117,41	1.087.806.704,41	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2024 dan 2025 pada Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
107	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.342.521.376,00	8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.850.208.008,10	(3.492.313.367,90)	Reklasifikasi dari Aset ke Beban Ekstrakompatable dan Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2024 dan 2025
108	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	99.296.000,00	8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	99.296.000,00	0,00	
109	5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	15.842.750,00	8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	15.842.750,00	0,00	
110	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.690.244.317,00	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.690.244.317,00	0,00	
111	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.277.020.039,00	8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.277.020.039,00	0,00	
112	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.234.000,00	8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.234.000,00	0,00	
113	5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	165.462.590,00	8.1.02.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	165.462.590,00	0,00	
114	5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	337.976.000,00	8.1.02.01.01.0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	337.976.000,00	0,00	
115	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	108.865.995,00	8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	108.865.995,00	0,00	
116	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	281.623.085,00	8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	281.623.085,00	0,00	
117	5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	49.783.500,00	8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	49.783.500,00	0,00	
118	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	232.739.320,00	8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	232.739.320,00	0,00	
119	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	280.916.025,00	8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	280.916.025,00	0,00	
120	5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	86.660.038,00	8.1.02.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka	86.660.038,00	0,00	
121	5.1.02.01.01.0079	Belanja Barang Sampel Pangan	790.000,00	8.1.02.01.01.0079	Beban Barang Sampel Pangan	790.000,00	0,00	
122	5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	2.250.000,00	8.1.02.01.02.0004	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	2.250.000,00	0,00	
123	5.1.02.01.04.0040	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	127.365.000,00	8.1.02.01.04.0040	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	127.365.000,00	0,00	
124	5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	30.816.600,00	8.1.02.01.04.0118	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.440.000,00	(23.376.600,00)	Reklasifikasi ke Aset Yang Sebenarnya dari Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
125	5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.774.000,00	8.1.02.01.04.0121	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	(3.774.000,00)	Reklasifikasi ke Aset Yang Sebenarnya dari Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
126	5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.000.000,00	8.1.02.01.04.0132	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.000.000,00	0,00	
127	5.1.02.01.04.0244	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	451.770,00	8.1.02.01.04.0244	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	451.770,00	0,00	
128	5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	79.740.000,00	8.1.02.01.04.0405	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	(79.740.000,00)	Reklasifikasi ke Aset Yang Sebenarnya dari Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
129	5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	18.900.000,00	8.1.02.01.04.0409	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	(18.900.000,00)	Reklasifikasi ke Aset Yang Sebenarnya dari Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
130	5.1.02.01.04.0515	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	874.684.509,00	8.1.02.01.04.0515	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	(874.684.509,00)	Reklasifikasi ke Aset Yang Sebenarnya dari Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
131	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.773.425.000,00	8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.773.425.000,00	0,00	

Lampiran : 23/ 8 - 12

No	KODE REKENING	URAIAN	LRA	KODE REKENING	URAIAN	LO	SELISIH	PENJELASAN
132	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	544.590.000,00	8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	544.590.000,00	0,00	
133	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	99.100.000,00	8.1.02.02.01.0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	99.100.000,00	0,00	
134	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.278.900.000,00	8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.278.900.000,00	0,00	
135	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5.150.000,00	8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	5.150.000,00	0,00	
136	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	259.625.000,00	8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	259.625.000,00	0,00	
137	5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	904.300.000,00	8.1.02.02.01.0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	904.300.000,00	0,00	
138	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.333.500.000,00	8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	10.333.500.000,00	0,00	
139	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	830.263.760,00	8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	830.263.760,00	0,00	
140	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	137.153.000,00	8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	137.153.000,00	0,00	
141	5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	367.945.000,00	8.1.02.02.01.0018	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	367.945.000,00	0,00	
142	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	347.800.000,00	8.1.02.02.01.0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	347.800.000,00	0,00	
143	5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	148.550.000,00	8.1.02.02.01.0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	148.550.000,00	0,00	
144	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14.039.185.000,00	8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	14.039.185.000,00	0,00	
145	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.871.589.995,00	8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.390.314.752,00	(481.275.243,00)	Reklase dari Belanja Barang dan Jasa (Jasa Tenaga Ahli) sebesar Rp 481.275.243,00 ke Aset Tetap
146	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.391.004.000,00	8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.391.004.000,00	0,00	
147	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	788.833.000,00	8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	788.833.000,00	0,00	
148	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.793.492.000,00	8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	1.793.492.000,00	0,00	
149	5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.499.720,00	8.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.499.720,00	0,00	
150	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	96.200.000,00	8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	96.200.000,00	0,00	
151	5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	11.140.000,00	8.1.02.02.01.0038	Beban Jasa Tata Rias	11.140.000,00	0,00	
152	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	365.000.000,00	8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	365.000.000,00	0,00	
	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	8.1.02.02.01.0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	12.568.825,00	12.568.825,00	Reklase ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Reklase ke Belanja Barang dan Jasa (Jasa Pemasangan Telepon Air Listrik)
153	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.556.521.259,00	8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	1.556.521.259,00	0,00	
	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	178.601.898,00	8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi	178.601.898,00	0,00	
155	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	51.028.728,00	8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	51.028.728,00	0,00	
156	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	174.460.000,00	8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	174.460.000,00	0,00	
157	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	53.221.569,00	8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	53.221.569,00	0,00	
158	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	68.627.140,00	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	76.730.640,00	8.103.500,00	Utang Beban Tagihan Air pada Dinas Perikanan dan Kecamatan Batang Anai
159	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.961.451.448,00	8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	2.961.451.448,00	0,00	
160	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	842.175.000,00	8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	842.175.000,00	0,00	
161	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.747.869.210,00	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.730.534.210,00	(17.335.000,00)	Pelunasan Utang Dinkes aras Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
162	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	40.837.900,00	8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	40.837.900,00	0,00	
163	5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	1.046.300,00	8.1.02.02.01.0065	Beban Penambahan Daya	1.046.300,00	0,00	
164	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	401.280.900,00	8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	401.280.900,00	0,00	
165	5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	18.718.438.573,00	8.1.02.02.01.0068	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	18.718.438.573,00	0,00	
166	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	10.471.000,00	8.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up	10.471.000,00	0,00	
167	5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	204.202.290,00	8.1.02.02.01.0077	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	204.202.290,00	0,00	
168	5.1.02.02.01.0079	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	26.429.614,00	8.1.02.02.01.0079	Beban Jasa Pengujian Sampel Pangan	26.429.614,00	0,00	
169	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.167.742.000,00	8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	5.167.742.000,00	0,00	
170	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	142.925.000,00	8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	142.925.000,00	0,00	
171	5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.837.558.920,00	8.1.02.02.02.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.837.558.920,00	0,00	
172	5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	15.076.350.600,00	8.1.02.02.02.0002	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	15.076.350.600,00	0,00	
173	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	92.520.608,86	8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	92.520.608,86	0,00	
174	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	106.478.161,14	8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	106.478.161,14	0,00	
175	5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	39.484.590,00	8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	39.484.590,00	0,00	
176	5.1.02.02.03.0021	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	0,00	8.1.02.02.03.0021	Beban Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	10.531.125,00	10.531.125,00	Pengakuan atas Sewa Bayar Dimuka Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah sebesar Rp10.531.125,00
	5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	2.500.000,00	8.1.02.02.03.0035	Beban Sewa Lapangan Lainnya	2.500.000,00	0,00	

No	KODE REKENING	URAIAN	LRA	KODE REKENING	URAIAN	LO	SELISIH	PENJELASAN
177	5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.942.745.097,00	8.1.02.02.04.0035	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.942.745.097,00	0,00	
178	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	582.582.500,00	8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	582.582.500,00	0,00	
179	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	184.400.000,00	8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	184.400.000,00	0,00	
180	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	916.726.380,00	8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	916.726.380,00	0,00	
181	5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	17.500.000,00	8.1.02.02.04.0121	Beban Sewa Alat Pendingin	17.500.000,00	0,00	
	5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	185.707.500,00	8.1.02.02.04.0137	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	185.707.500,00	0,00	
182	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.581.621.660,00	8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.581.621.660,00	0,00	
183	5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	52.155.000,00	8.1.02.02.05.0038	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	52.155.000,00	0,00	
184	5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	6.000.000,00	8.1.02.02.07.0028	Beban Sewa Alat Musik	6.000.000,00	0,00	
185	5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	29.877.870,00	8.1.02.02.10.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	29.877.870,00	0,00	
186	5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	99.494.000,00	8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	99.494.000,00	0,00	
	5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	247.850.000,00	8.1.02.02.08.0002	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	247.850.000,00	0,00	
	5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	22.945.000,00	8.1.02.02.08.0005	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	22.945.000,00	0,00	
187	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.849.521,00	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.849.521,00	0,00	
188	5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	30.228.142,00	8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	30.228.142,00	0,00	
	5.1.02.02.09.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	8.1.02.02.09.0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	6.979.000,00	6.979.000,00	
191	5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	9.960.000,00	8.1.02.03.01.0035	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	9.960.000,00	0,00	
192	5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	23.637.450,00	8.1.02.03.02.0002	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	23.637.450,00	0,00	
193	5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	102.108.604,00	8.1.02.03.02.0003	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	102.108.604,00	0,00	
194	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.301.772.152,00	8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.301.772.152,00	0,00	
195	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	152.140.540,00	8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	152.140.540,00	0,00	
196	5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	62.437.745,00	8.1.02.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	62.437.745,00	0,00	
197	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	172.276.435,00	8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	172.276.435,00	0,00	
198	5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	63.239.000,00	8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	63.239.000,00	0,00	
199	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	157.473.500,00	8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	157.473.500,00	0,00	
200	5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.100.000,00	8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.100.000,00	0,00	
201	5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	17.000.000,00	8.1.02.03.02.0132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	17.000.000,00	0,00	
202	5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	5.328.000,00	8.1.02.03.02.0133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	5.328.000,00	0,00	
203	5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	39.862.875,00	8.1.02.03.02.0301	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	39.862.875,00	0,00	
204	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	161.245.350,00	8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	161.245.350,00	0,00	
205	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.489.488.309,00	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.472.988.309,00	(16.500.000,00)	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa (Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.500.000,00 ke Aset Tetap
206	5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.550.000,00	8.1.02.03.03.0009	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.550.000,00	0,00	
207	5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.379.992.675,00	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.379.992.675,00	0,00	
208	5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	293.747.000,00	8.1.02.03.04.0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	293.747.000,00	0,00	
209	5.1.02.03.04.0105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	61.909.338,00	8.1.02.03.04.0105	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	61.909.338,00	0,00	
210	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	12.956.200,00	8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	12.956.200,00	0,00	
211	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.291.660.294,00	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.291.660.294,00	0,00	
212	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.353.418.000,00	8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.353.418.000,00	0,00	
213	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	80.920.000,00	8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	80.920.000,00	0,00	
214	5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	32.653.715,00	8.1.02.04.02.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	32.653.715,00	0,00	
215	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	207.451.730,00	8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	207.451.730,00	0,00	
216	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	24.000.000,00	8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	24.000.000,00	0,00	

Lampiran : 23/ 10 - 12

No	KODE REKENING	URAIAN	LRA	KODE REKENING	URAIAN	LO	SELISIH	PENJELASAN
217	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.764.060.491,00	8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.766.202.491,00	2.142.000,00	Reklase Aset JIJ ke Belanja Barang dan Jasa atas Penggantian Uang Jaminan Langganan UJL PJU Mandiri Lubuk Tarok sebesar Rp 2.142.000,00 atas Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
218	5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	53.392.193.880,00	8.1.02.89.01.0001	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	40.680.876.878,00	(12.711.317.002,00)	Reklasifikasi ke Aset Yang Sebenarnya atas Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler
219	5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.439.788.000,00	8.1.02.89.01.0002	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.439.788.000,00	0,00	
220	5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	8.1.02.89.02.0002	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	0,00	
221	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.779.430.705,00	8.1.02.90.01.0001	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.779.430.705,00	0,00	
222	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.811.015.849,00	8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	37.979.542.843,68	1.168.526.994,68	Jurnal Balik Persediaan, Persediaan Akhir dan Utang BLUD RSUD dan Puskesmas atas Beban Barang dan Jasa BLUD
223	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	971.000.000,00	8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	971.000.000,00	0,00	
224	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.652.500.000,00	8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.652.500.000,00	0,00	
225	5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.429.800.000,00	8.1.05.06.02.0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.429.800.000,00	0,00	
226	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	999.360.000,00	8.1.05.07.01.0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	999.360.000,00	0,00	
227	5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.296.042.178,00	8.1.05.08.02.0001	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.296.042.178,00	0,00	
228	5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.091.810.000,00	8.1.05.08.03.0001	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.091.810.000,00	0,00	
229	5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	2.309.951.651,00	8.1.07.01.07.0002			(2.309.951.651,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
230	5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	916.800.000,00	8.1.07.01.09.0001			(916.800.000,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
231	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	89.873.000,00	8.1.07.01.12.0001			(89.873.000,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
232	5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	25.974.000,00	8.1.07.01.15.0001			(25.974.000,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
233	5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.650.000,00	8.1.07.02.01.0005			(8.650.000,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
234	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	116.532.630,00	8.1.07.02.01.0046			(116.532.630,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
235	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	139.677.380,00	8.1.08.01.02.0001			(139.677.380,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
236	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.340.796.500,00	8.1.08.01.02.0002			(2.340.796.500,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
237	5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	25.641.000,00	8.1.08.01.05.0005			(25.641.000,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
238	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	371.745.045,00	8.1.08.02.01.0001			(371.745.045,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
239	5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	28.621.500,00	8.1.08.03.01.0003			(28.621.500,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
240	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.012.999.580,00	8.1.08.03.01.0010			(1.012.999.580,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
241	5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	28.644.000,00	8.1.08.03.01.0013			(28.644.000,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
242	5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	6.048.390,00	8.1.08.03.02.0003			(6.048.390,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
243	5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	34.504.350,00	8.1.08.03.02.0005			(34.504.350,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
244	5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	141.834.850,00	8.1.08.03.02.0008			(141.834.850,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
245	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	55.283.550,00	8.1.08.03.03.0002			(55.283.550,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
246	5.2.02.06.03.0010	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola	1.800.000,00	8.1.08.03.03.0009			(1.800.000,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
247	5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	338.568.460,00	8.1.08.03.03.0026			(338.568.460,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
248	5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	281.732.502,00	8.1.08.03.03.0032			(281.732.502,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
249	5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	135.719.700,00	8.1.08.03.03.0033			(135.719.700,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
250	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.917.282.156,00	8.1.08.03.04.0007			(1.917.282.156,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
251	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	239.497.238,00	8.1.08.03.04.0008			(239.497.238,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
252	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	49.907.600,00	8.1.08.06.01.0004			(49.907.600,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
253	5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	6.000.000,00	8.1.08.06.01.0005			(6.000.000,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
254	5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	16.983.000,00	8.2.01.01.01.0001			(16.983.000,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
255	5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.252.623.757,00	8.3.01.01.03.0001			(8.252.623.757,00)	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
256	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.356.491.600,00	8.3.01.02.01.0001			(3.356.491.600,00)	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
257	5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	13.289.580.766,00	8.3.01.02.01.0005			(13.289.580.766,00)	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
258	5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	403.334.429,00	8.3.01.02.02.0005			(403.334.429,00)	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan

Lampiran : 23/ 11 - 12

No	KODE REKENING	URAIAN	LRA	KODE REKENING	URAIAN	LO	SELISIH	PENJELASAN
259	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.355.860.836,00	8.3.01.02.02.0055			(5.355.860.836,00)	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
260	5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	99.667.809,00	8.3.01.02.02.0139			(99.667.809,00)	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
261	5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	147.513.000,00	8.3.01.02.04.0033			(147.513.000,00)	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
262	5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	458.769.282,00	8.3.01.04.01.0005			(458.769.282,00)	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
263	5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.382.952.604,00	8.3.01.04.02.0005			(1.382.952.604,00)	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
264	5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	41.146.875,00	8.3.01.04.03.0005			(41.146.875,00)	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
265	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	4.718.777.142,00	8.3.02.05.02.0005			(4.718.777.142,00)	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
266	5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.971.933.303,00	8.4.01.02.02.0036			(4.971.933.303,00)	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
267	5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	199.021.500,00	8.4.01.02.02.0126			(199.021.500,00)	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
268	5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.577.145.700,00				(1.577.145.700,00)	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
269	5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	357.145.523,00				(357.145.523,00)	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
270	5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	3.000.000,00				(3.000.000,00)	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
271	5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	158.575.188,00				(158.575.188,00)	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
272	5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	710.159.130,00				(710.159.130,00)	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
273	5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.200.850.172,00				(1.200.850.172,00)	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
274	5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	34.370.000,00				(34.370.000,00)	di Kapitalisasi ke Aset Tetap Lainnya
275	5.2.05.03.01.0004	Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya	20.000.000,00				(20.000.000,00)	di Kapitalisasi ke Aset Tetap Lainnya
276	5.2.05.06.01.0003	Belanja Modal Tanaman Koleksi	29.836.800,00				(29.836.800,00)	di Kapitalisasi ke Aset Tetap Lainnya
277	5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	53.113.500,00				(53.113.500,00)	di Kapitalisasi ke Aset Lainnya
278	5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.200.264.113,00	8.2.01.01.01.0001	Beban Tidak Terduga	7.200.264.113,00	0,00	
279	5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.286.086.320,00	8.3.01.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.406.158.447,20	1.120.072.127,20	Penyesuaian Utang Beban Tahun 2024 dan 2025
280	5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	152.439.794,00	8.3.01.02.01.0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	159.872.935,50	7.433.141,50	Penyesuaian Utang Beban Tahun 2024 dan 2025
281	5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	97.921.018.878,00	8.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	0,00	(97.921.018.878,00)	Tidak Dilakukan Jurnal Beban Dana Desa LO
282	5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	74.932.242.820,00	8.3.02.05.02.0005	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	74.932.242.820,00	0,00	Tidak Dilakukan Jurnal Beban Dana Desa LO
283				8.1.07.01.07.0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	546.350,00	546.350,00	Penyesuaian Penyisihan Piutang
284				8.1.07.01.09.0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	4.221.491,50	4.221.491,50	Penyesuaian Penyisihan Piutang
285				8.1.07.01.12.0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2.204.565,95	2.204.565,95	Penyesuaian Penyisihan Piutang
286				8.1.07.01.15.0001	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	46.935.373.757,56	46.935.373.757,56	Penyesuaian Penyisihan Piutang
287				8.1.07.02.01.0005	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	238.655.688,50	238.655.688,50	Penyesuaian Penyisihan Piutang
288				8.1.07.02.01.0046	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan	153.933.000,00	153.933.000,00	Penyesuaian Penyisihan Piutang
				8.1.07.04.05.0004	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	150.637,00	150.637,00	Penyesuaian Penyisihan Piutang
289				8.1.07.06.01.0001	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	91.458.360,06	91.458.360,06	Penyesuaian Penyisihan Piutang
290				8.1.07.06.01.0004	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	28.229,28	28.229,28	Penyesuaian Penyisihan Piutang
291				8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.926.500,00	2.926.500,00	Penyesuaian Penyusutan Peralatan dan Mesin
292				8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.503.166.450,00	3.503.166.450,00	Penyesuaian Penyusutan Gedung dan Bangunan
293				8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	29.698.217.375,08	29.698.217.375,08	Penyesuaian Penyusutan Gedung dan Bangunan
294				8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	60.423.986.039,52	60.423.986.039,52	Penyesuaian Penyusutan Gedung dan Bangunan
295				8.1.08.03.01.0003	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	37.105.128.421,00	37.105.128.421,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
296				8.1.08.03.01.0010	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	88.326.940,00	88.326.940,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
297				8.1.08.03.01.0013	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	10.638.540.037,00	10.638.540.037,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ

No	KODE REKENING	URAIAN	LRA	KODE REKENING	URAIAN	LO	SELISIH	PENJELASAN
298				8.1.08.03.02.0003	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	5.558.368.738,00	5.558.368.738,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
299				8.1.08.03.02.0005	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	96.555.726,00	96.555.726,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
300				8.1.08.03.02.0008	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	4.667.331.393,00	4.667.331.393,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
301				8.1.08.03.03.0002	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	3.701.400,00	3.701.400,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
302				8.1.08.03.03.0009	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	60.311.057,00	60.311.057,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
303				8.1.08.03.03.0026	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	192.136.560,00	192.136.560,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
304				8.1.08.03.03.0032	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1.181.579.280,00	1.181.579.280,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
305				8.1.08.03.03.0033	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	198.848.166,00	198.848.166,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
306				8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	147.358.379,00	147.358.379,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
307				8.1.08.03.04.0008	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	72.677.622,00	72.677.622,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
311				8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	41.176.700,00	41.176.700,00	Penyesuaian Amortisasi Aset Tidak Berwujud
315				8.1.08.06.01.0005	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	452.918.847,40	452.918.847,40	Selisih Nilai Buku Pertukaran Peralatan dan Mesin antar SKPD
316				8.3.01.02.01.0005	Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO	683.614.420,00	683.614.420,00	Selisih Nilai Buku Pertukaran Tanah antar SKPD
317				8.3.01.02.02.0005	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	67.821.000,00	67.821.000,00	Selisih Nilai Buku Pertukaran Peralatan dan Mesin antar SKPD
				8.3.01.02.02.0055	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO	414.318.333,00	414.318.333,00	Selisih Nilai Buku Pertukaran Kendaraan antar SKPD
				8.3.01.02.02.0139	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO	4.371.285,00	4.371.285,00	Selisih Nilai Buku Pertukaran Peralatan dan Mesin antar SKPD
318				8.3.01.02.04.0033	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi-LO	16.662.200.056,00	16.662.200.056,00	Selisih Nilai Buku Pertukaran JIJ antar SKPD
319				8.3.01.04.01.0005	Defisit Penghapusan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO	148.500.000,00	148.500.000,00	Akibat Penghapusan Tanah
320				8.3.01.04.02.0005	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	661.920.379,00	661.920.379,00	Selisih Nilai Buku Pertukaran Peralatan dan Mesin antar SKPD
321				8.3.01.04.03.0005	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	811.620.000,00	811.620.000,00	Akibat Penghapusan Gedung dan Banguinan
				8.4.01.02.02.0036	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO	70.305.667,00	70.305.667,00	Akibat Penghapusan Peralatan dan Mesin
				8.4.01.02.02.0126	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat-LO	64.308.000,00	64.308.000,00	Akibat Penghapusan Peralatan dan Mesin
		TOTAL	**1.329.872.011.279,00**			**1.231.367.731.998,25**	**(98.504.279.280,75)**	